Paradigma Baru

Remiskinan

Pengantar

Prof Drs I Nyoman K Kabinawa, MM, MBA

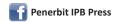


pengukuran tingkat metode kesejahteraan dilihat dari beberapa indikator vaitu kriteria BKKBN, Pengeluaran Pangan, Persepsi Keluarga, dan BPS. Tingkat kesejahteraan dalam buku "Benchmarking Kemiskinan" berdasarkan pengukuran di desa dan kota. Hasil analisis khi (Q) kuadrat menunjukkan adanya hubungan yang nyata pada p<0,01 antara kriteria kemiskinan BKKBN, Pengeluaran Pangan, dan BPS. Kriteria Persepsi Keluarga menunjukkan tidak ada hubungan vang nyata pada p>0,05 dengan kriteria BPS. Persentase misklasifikasi (positif semu) yang cukup tinggi terjadi pada kriteria Persepsi Keluarga, vaitu 65,5%, sedangkan misklasifikasi pada kriteria BKKBN sebesar 41,1%. Sementara persentase misklasifikasi yang paling rendah terjadi pada kriteria Pengeluaran Pangan sebesar 22%.

ntuk di daerah kota menggunakan indikator BKKBN, Pengeluaran keseiahteraan Pangan, dan Persepsi Keluarga menggunakan BPS sebagai benchmark. Hasil analisis khi (Q) kuadrat menunjukkan adanya hubungan yang nyata pada p<0,05 antara keempat kriteria tersebut. Sementara itu, kriteria Persepsi Keluarga menunjukkan tidak adanya hubungan yang nyata pada p>0,05 dengan kriteria BPS. Persentase misklasifikasi yang cukup tinggi terjadi pada kriteria Persepsi Keluarga, yaitu 68,6%, sedangkan misklasifikasi pada kriteria BKKBN sebesar 52,9%. Sementara persentase misklasifikasi paling rendah terjadi pada kriteria Pengeluaran Pangan, yaitu 19,6%.

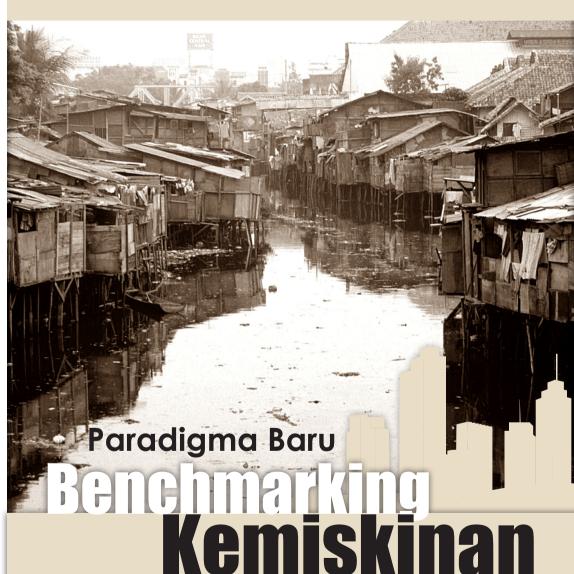
PT Penerbit IPB Press

Kampus IPB Taman Kencana Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16128 Telp. / Fax. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@ipb.ac.id









Suatu Studi ke Arah Penggunaan Indikator Tunggal



Kemiskinar

Paradigma Baru BENCHMARKING KEMISKINAN

Suatu Studi ke Arah Penggunaan Indikator Tunggal

Dr A Iskandar, Drs, MSi

Pengantar

Prof Drs I Nyoman K Kabinawa, MM, MBA



BENCHMARKING KEMISKINAN

(Suatu Studi ke Arah Penggunaan Indikator Tunggal)

Dr A Iskandar, Drs, MSi

Copyright © 2012 Dr A Iskandar, Drs, MSi

Penyunting : Nia Januarini
Desainer Sampul dan Penata Isi : Ardhya Pratama
Korektor : Hans Baihaqi

Foto Sampul : daus1975.wordpress.com

PT Penerbit IPB Press Kampus IPB Taman Kencana Bogor

Cetakan Pertama: September 2012

Dicetak oleh Percetakan IPB

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN: 978-979-493-434-0

Kata Pengantar

Sejumlah pakar seperti Sayogyo, mengukur kemiskinan berdasarkan penghasilan setara 240-320 kg beras per tahun untuk daerah pedesaan dan 360-480 kg beras per tahun untuk daerah perkotaan. Menurut Hendarto Esmara, garis kemiskinan diukur berdasarkan jumlah pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok per kapita selama setahun. Garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia adalah pengeluaran berdasarkan data-data Susenas. Secara umum, kemiskinan menunjuk pada kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang atau rumah tangga berdasarkan penghasilan atau pengeluarannya. Menurut Rusli et al., garis kemiskinan menunjukkan tingkat kecukupan kebutuhan fisik minimum pangan rumah tangga sebanyak 2.100 kalori per orang per hari dan kebutuhan fisik minimum bukan pangan dengan pengeluaran sebesar Rp13.295 per kapita per bulan untuk daerah pedesaan. Departemen Sosial mendefinisikan keluarga miskin sebagai keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian atau penghasilan rendah, penghasilan sangat rendah, kondisi rumah dan lingkungan tidak memenuhi syarat kesehatan, serta pendidikan terbatas. Sementara itu, BKKBN telah mengembangkan 23 indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga (fungsi keagaman, ekonomi, dan reproduksi), kebutuhan sosial psikologis (fungsi sosialisasi, pendidikan, dan cinta kasih), kebutuhan pengembangan (fungsi perlindungan atau proteksi dan sosial budaya), serta kepedulian sosial (fungsi pembinaan lingkungan).

Upaya pemberdayaan keluarga yang tergolong miskin menjadi tidak miskin harus memperhatikan faktor pekerjaan, pendapatan, konsumsi pangan, dan kepemilikan aset. Hal tersebut merupakan sumber daya utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Pemanfaatan sumber daya dapat mengangkat keluarga yang semula tergolong miskin menjadi keluarga yang

tidak miskin. Adapun penyebab kemiskinan yang dikelompokkan atas dua kategori, yaitu kondisi lingkungan yang miskin baik ilmu pengetahuan yang tidak memadai maupun adanya bencana alam serta akibat kesalahan kebijakan ekonomi seperti korupsi dan kondisi politik yang tidak stabil. Beragam kriteria yang digunakan untuk mengukur kemiskinan dan melahirkan kemiskinan bangsa yang tidak pasti, sehingga menimbulkan banyak interpretasi bahwa kemiskinan seolah-olah dipertahankan sebagai suatu proyek yang sustainable. Ketidakseragaman ini juga menimbulkan konflik di tingkat masyarakat lokal. Ketidakseragaman itu terjadi ketika mendistribusikan beras untuk keluarga miskin yang disebabkan jumlah keluarga miskin menurut BKKBN. Jumlah keluarga miskin menurut BPS lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin menurut BKKBN.

Prof Drs I Nyoman K Kabinawa, MM, MBA

Pengantar Penulis

Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas izinnya penulis dapat menyelesaikan buku ini walaupun banyak kekurangan dan kelemahan yang terdapat di dalamnya. Kajian ini merupakan hasil penelitian disertasi (S3) yang diraih di Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulis menyadari bahwa kajian kesejahteraan memang merupakan sebuah kajian yang harus membandingkan berbagai kriteria (BKKBN, BPS, Pengeluaran Pangan, dan Persepsi Keluarga), sesuatu yang amat rumit dan baru. Oleh karena itu, penulis berharap saran dan kritik yang pragmatis demi perbaikan selanjutnya. Buku ini dibuat berdasarkan permintaan beberapa kalangan yang merasa penting untuk diterbitkan. Alasannya karena begitu banyak kriteria pengukuran kemiskinan yang kadang membuat bingung orang awam. Kebingungan tersebut dapat dilihat dari satu pihak keluarga yang dikatakan miskin dan memperoleh bantuan (kriteria BKKBN). Sementara itu, pihak keluarga lain dikatakan tidak miskin (kriteria BPS) sehingga tidak memperoleh bantuan, padahal secara riil keluarga tersebut memiliki kondisi ekonomi yang sama.

Buku ini ditulis berdasarkan penelitian empiris yang terfokus pada pengukuran kemiskinan dari berbagai kriteria (BKKBN, BPS, Pengeluaran Pangan, dan Persepsi Keluarga). Setelah mengetahui kemiskinan secara kuantitatif, baru kemudian dicari model dan strategi pemberdayaan keluarga miskin tersebut. Hal ini dilakukan sebagai ide riil yang disampaikan kepada pemerintah daerah untuk menanggulanginya, sesuai dengan kondisi sosial yang berlaku di daerah tersebut (Kota Bogor atau Kabupaten Bogor). Akhirnya, penulis mempersembahkan buku ini, semoga bermanfaat bagi pembaca, saran serta kritik pun selalu kami harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Bogor, Juli 2011

Daftar Isi

Kata Pe	ngan	tar	iii
Pengant	ar Pe	enulis	V
Daftar I	si		vii
Daftar 7	Tabel		xi
Daftar (Gaml	bar	xv
BAB I	Ket	niskinan	1
D/ID I	A.	Beragam Ukuran Kemiskinan	
	В.	Angka Kemiskinan Lintas Tahun	
	C.	Problematika	
	D.	Tujuan Penulisan Buku	
	E.	Kegunaan Buku	
BAGIA	N PE	ERTAMA TEORI	9
BAB II	Ет	pirical Research	15
	Α.	Pengertian Keluarga	
	В.	Studi Tentang Kesejahteraan	
	C.	Studi Tentang Kepuasan	
	D.	Studi Tentang Kebahagiaan	44
BAB III	Mie	ddle Range Theory	57
	A.	Teori Ekonomi Keluarga	57
	В.	Teori Ekologi Keluarga	58
	C.	Teori Modernisasi	63

BAB IV	The	oritical Framework	67
	A.	Teori Struktural Fungsional	67
	B.	Teori Interaksionisme Simbolis	71
BAGIAN	N KE	EDUA KASUS	73
BAB V	Kar	akteristik Demografi dan Sosial Ekonomi	77
	A.	Jumlah Anggota Keluarga Contoh dan Kemiskinan	77
	B.	Usia Suami Istri dan Kemiskinan	78
	C.	Keadaan Fisiologi Suami Istri dan Kemiskinan	79
	D.	Pendidikan Suami Istri dan Kemiskinan	81
	Е.	Pekerjaan Suami Istri dan Kemiskinan	83
BAB VI	Kar	akteristik Lingkungan Keluarga	85
	A.	Kebijakan Pemerintah dan Kemiskinan	
	B.	Kelembagaan Sosial dan Kemiskinan	86
	C.	Kepemilikan Aset Keluarga dan Kemiskinan	92
	D.	Keadaan Lingkungan Tempat Tinggal	
		dan Kemiskinan	96
BAB VII	[Tin	ngkat Kesejahteraan Keluarga	.103
	A.	Akurasi Berbagai Metode Pengukuran	
		Kesejahteraan	.103
	В.	Tingkat Kesejahteraan di Desa dan Kota	.105
	C.	Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesejahteraan Keluarga	
	D.	Tujuan Hidup Keluarga	
	Е.	Komunikasi, Pengambilan Keputusan, dan Pengelolaar Sumber Daya	1

BAGIAN KETIGA MODEL PEMBERDAYA	AAN163
BAB VIII Model dan Strategi Pemberdayaan	165
BAB IX Kesimpulan	177
Daftar Pustaka	179
Tentang Penulis	193
Daftar Lampiran	193

Daftar Tabel

1.	Jumlah penduduk miskin tahun 1970–1996	.3
2.	Beberapa aspek sosial yang diukur beserta indikatornya	12
3.	Perbedaan atau persamaan kesejahteraan, kepuasan, dan kebahagiaan	55
4.	Ketergantungan lingkungan mikro dengan keluarga	61
5.	Interaksi lingkungan makro dengan keluarga	63
6.	Sebaran jumlah anggota contoh dan tingkat kesejahteraan	77
7.	Sebaran usia suami contoh dan tingkat kesejahteraan	78
8.	Sebaran usia istri contoh dan tingkat kesejahteraan	79
9.	Sebaran keadaan fisiologi suami contoh dan tingkat kesejahteraan	80
10.	Sebaran keadaan fisiologi istri contoh dan tingkat kesejahteraan	
11.	Sebaran suami contoh berdasarkan pendidikan dan tingkat kesejahteraan	
12.	Sebaran istri contoh berdasarkan pendidikan dan tingkat kesejahteraan	
13.	Sebaran suami contoh berdasarkan jenis pekerjaan	83
14.	Sebaran istri contoh berdasarkan jenis pekerjaan	84
15.	Sebaran jenis program pemerintah dan tingkat kemiskinan	86
16.	Sebaran akses pinjaman atau bantuan dari instansi atau individu dan tingkat kesejahteraan	87

17.	Sebaran sumber pinjaman uang pada lembaga finansial dan tingkat kesejahteraan
18.	Penggunaan pinjaman contoh dan tingkat kesejahteraan90
19.	Sebaran responden berdasarkan bantuan kredit barang dari institusi atau individu dan tingkat kesejahteraan91
20.	Sebaran kebijakan pengembalian kredit barang dari institusi atau individu dan tingkat kesejahteraan
21.	Sebaran kepemilikan aset contoh dan tingkat kesejahteraan94
22.	Sebaran lingkungan tempat tinggal contoh dan tingkat kesejahteraan
23.	Sebaran contoh berdasarkan Kriteria BKKBN, Pengeluaran Pangan, Persepsi Keluarga, dan BPS sebagai <i>benchmark</i> di desa 104
24.	Sebaran contoh berdasarkan Kriteria BKKBN, Pengeluaran Pangan, Persepsi Keluarga, dan BPS sebagai <i>benchmark</i> di kota 105
25.	Sensitivitas dan spesifisitas Kriteria BKKBN, Pengeluaran Pangan, Persepsi Keluarga dengan Kriteria BPS sebagai benchmark
26.	Sebaran contoh berdasarkan Kriteria BKKBN dan tingkat kesejahteraan
27.	Jumlah jawaban kategori kemiskinan berdasarkan kriteria pengukuran
28.	Faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan menurut BKKBN
29.	Faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan menurut BPS
30.	Faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan menurut Pengeluaran Pangan
31.	Faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan menurut Persepsi Keluarga
32.	Sebaran tujuan hidup contoh yang ingin dicapai dan tingkat kesejahteraan

33.	Sebaran jawaban responden tentang pendidikan anak dan tingkat kesejahteraan	1
34.	Sebaran responden berdasarkan status sosial dan tingkat kesejahteraan	4
35.	Sebaran responden terhadap kebutuhan keamanan dan tingkat kesejahteraan	8
36.	Sebaran responden terhadap kebutuhan fisik dan tingkat kesejahteraan	0
37.	Sebaran pembagian tugas contoh dan tingkat kesejahteraan15	1
38.	Jumlah alokasi waktu kegiatan suami contoh dan tingkat kesejahteraan	6
39.	Jumlah alokasi waktu kegiatan istri contoh dan tingkat kesejahteraan	7
40.	Sebaran responden dalam melakukan pengawasan dan tingkat kesejahteraan	8
41.	Faktor yang mempengaruhi perencanaan dalam keluarga dan tingkat kesejahteraan	9
42.	Faktor yang mempengaruhi pembagian tugas dalam keluarga dan tingkat kesejahteraan	1
43.	Faktor yang mempengaruhi pengawasan dalam keluarga dan tingkat kesejahteraan	1
44.	Program-program Pengentasan Kemiskinan Periode 1990-an 16	7

Daftar Gambar

1.	Bagan individu atau manajerial sistem	19
2.	Sebaran contoh berdasarkan kriteria kemiskinan di kota	.113
3.	Sebaran contoh berdasarkan kriteria kemiskinan di desa	.114
4.	Hubungan interpersonal internal dan eksternal sistem	. 141
5.	Model pemberdayaan yang berorientasi proses belaiar	. 176

Bab**1** Kemiskinan

A. Beragam Ukuran Kemiskinan

Di Indonesia, istilah keluarga sejahtera baru dirumuskan oleh pemerintah sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Konsep yang ada sebelumnya adalah kemiskinan yang dikembangkan oleh beberapa pakar. Sayogyo (1999) adala orang yang mengukur tingkat kemiskinan keluarga dengan menggunakan kriteria batas garis kemiskinan berdasarkan satuan kilogram beras ekuivalen. Keluarga miskin adalah keluarga yang mempunyai penghasilan setara dengan 240-320 kg beras per tahun untuk daerah pedesaan dan 360-480 kg beras per tahun untuk daerah perkotaan. Menurut Hendarto Esmara (1986), garis kemiskinan diukur berdasarkan pada jumlah pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok per kapita selama setahun. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan akan barang-barang seperti beras, daging, sayur, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan pokok di sini dapat berubahubah. Perubahan pengeluaran per kapita atas barang kebutuhan pokok mencerminkan perubahan tingkat harga dan pola konsumsi keluarga. Indikator ini mampu menjelaskan perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap kebutuhan pokok (Sumodiningrat et al. 1999). Dapat dikatakan pula bahwa ukuran kemiskinan Esmara mampu menangkap dampak inflasi maupun dampak penghasilan riil yang meningkat terhadap kuantitas barang-barang esensial yang dikonsumsi (Kuncoro 1997).

Garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia adalah pengeluaran berdasarkan data-data Susenas. Untuk mengatasi perbedaan harga antardaerah, pengeluaran konsumsi harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di Jakarta (Sumodiningrat *et al.* 1999). Kedua konsep tersebut

tetap mengacu kepada pemikiran yang sama, yaitu UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1. Perbedaan mendasar antara definisi tidak sejahtera (pra-KS dan KS-I) dengan definisi miskin adalah pada pendekatan analisisnya. Secara umum, kedua definisi tersebut menunjuk pada kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang atau rumah tangga miskin. Namun, definisi miskin menggunakan pendekatan ekonomi menunjuk pada kemampuan keluarga yang memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Dengan begitu, ukuran yang digunakan adalah penghasilan atau pengeluaran seseorang/rumah tangga.

Menurut Rusli et al. dalam Sumarti 1999, garis kemiskinan menunjukkan tingkat kecukupan kebutuhan fisik minimum pangan rumah tangga sebanyak 2.100 kalori per orang per hari dan kebutuhan fisik minimum bukan pangan dengan pengeluaran sebesar Rp13.295 per kapita per bulan untuk daerah pedesaan. Departemen Sosial mendefinisikan keluarga miskin sebagai keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian atau penghasilan rendah, penghasilan sangat rendah, kondisi rumah dan lingkungan tidak memenuhi syarat kesehatan, serta pendidikan terbatas. Departemen Pertanian mendefinisikan kemiskinan yang ditujukan kepada petani atau nelayan kecil yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan, yaitu di bawah 320 kg setara dengan beras per tahun per kapita (Sayogyo 1996). Sementara itu, menurut Haryanto dan Tomagola dalam Sumarti 1999), untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga, BKKBN telah mengembangkan 23 indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga (fungsi keagaman, ekonomi, dan reproduksi), kebutuhan sosial psikologis (fungsi sosialisasi, pendidikan, dan cinta kasih), kebutuhan pengembangan (fungsi perlindungan atau proteksi dan fungsi sosial budaya), serta kepedulian sosial (fungsi pembinaan lingkungan). Dengan demikian, berbicara tentang kemiskinan sama halnya dengan berbicara tentang ketidaksejahteraan.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial, tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara maju. Fenomena ini telah menjadi perhatian global pada konferensi tingkat tinggi dunia. Fenomena tersebut berhasil menggelar deklarasi dan program aksi untuk pembangunan sosial di Copenhagen tahun 1995. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,

sosial, dan standar kebutuhan yang lain (Herbert 2001). Misalnya, jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan, tidak ada investasi, kurangnya akses kepelayanan publik, dan kurangnya lapangan kerja merupakan beberapa contoh dari ketidakmampuasn orang.

B. Angka Kemiskinan Lintas Tahun

Upaya pemberdayaan keluarga yang tergolong *powerless* menjadi *powerfull* harus memperhatikan faktor pekerjaan, pendapatan, konsumsi pangan, kepemilikan aset, kepemilikan tabungan, kredit/pinjaman uang atau barang pada lembaga finansial, dan bantuan langsung tunai (BLT). Hal tersebut merupakan sumber daya utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Pemanfaatan sumber daya dapat mengangkat keluarga yang semula tergolong miskin menjadi keluarga yang tidak miskin. Adapun penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan atas dua kategori, yaitu (1) faktor alamiah seperti kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, serta adanya bencana alam dan (2) faktor nonalamiah seperti akibat kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, dan kesalahan pengelolaan sumber daya alam (Lubis 2006).

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1, keluarga miskin atau tidak sejahtera merupakan tanggung jawab negara. Bentuk tanggung jawab tersebut terlihat dari peran berbagai institusi yang mengadakan penanggulangan sesuai bidangnya, seperti Program Kesejahteran Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri (Departemen Sosial), Takesra, dan Kukesra (BKKBN). Bentuk tanggung jawab keluarga miskin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah penduduk miskin tahun 1970–1996

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1970	70,0	60,0
1976	54,2	40,1
1978	47,2	33,3
1980	42,3	28,6
1981	40,6	26,9

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase Penduduk Miskin (%) 1984 35,0 21,6 1987 30,0 17,4

Tabel 1 Jumlah penduduk miskin tahun 1970–1996 (lanjutan)

1990 15,1 27,2 1993 25,9 13,7 1996 22,5 11.3

Sumber: Program Penghapusan Kemiskinan (Suyono 1997)

Dalam kurun waktu 1970–1996 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Akibat dari krisis ekonomi tahun 1997–1998, jumlah penduduk miskin meningkat sangat tajam menjadi 49,50 juta (24,23%) pada tahun 1998. Bank Dunia (2006) mengatakan hampir 50% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, yaitu berpendapatan kurang dari 2 dollar AS per kapita per hari. Sementara itu, BPS (2006) melaporkan pada Maret 2006 terdapat 39,05 juta (17,8%) penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, lebih tinggi dari tahun 2005 yaitu Banyak faktor yang berkaitan dengan tingginya 35,10 juta (16%). jumlah penduduk miskin, di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diakibatkan oleh kebijakan pengurangan subsidi BBM. Selain itu, program peningkatan kesejahteran yang dilakukan pada awal terjadinya krisis lebih bernuansa untuk mencegah terjadi penurunan kesejahteraan yang lebih buruk (safety net program) (Ibrahim 2007). Prioritas Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah (1) peningkatan ketahanan pangan (food security), (2) penciptaan lapangan kerja produktif (employment creation), (3) pengembangan usaha kecil dan menengah (small and medium enterprises), dan (4) perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan (social protection).

Beragam kriteria di lain pihak digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, melahirkan kemiskinan bangsa yang "turun naik" atau "up and down". Hal tersebut sebenarnya dapat menimbulkan interpretasi bahwa kemiskinan sengaja dibesarkan sebagai proyek berkelanjutan (duniaesai.com 2006). Selain itu, beragam kriteria diakibatkan oleh program penanggulangan selama menggunakan data makro hasil Susenas oleh BPS, data mikro hasil pendaftaran keluarga pra-Sejahtera, dan KS-I oleh BKKBN. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan garis kemiskinan yang diturunkan dari kebutuhan dasar kalori minimal 2.100 kkal atau sekitar Rp152.847 per kapita per bulan. Garis kemiskinan untuk daerah perkotaan Rp175.324 dan untuk daerah pedesaan Rp131.256 (BPS 2006). Beragam kriteria yang diturunkan dapat membingungkan pemerintah lokal ketika mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat berpedoman pada angka kemiskinan yang dihasilkan BPS, sedangkan pemerintah lokal menggunakan kriteria BKKBN sebagai target sasaran. Ketidakseragaman ini juga menimbulkan konflik di tingkat masyarakat lokal, seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Konflik tersebut terjadi ketika akan mendistribusikan beras untuk keluarga miskin karena jumlah keluarga miskin menurut BPS tidak sama dengan jumlah keluarga miskin menurut BKKBN. Jumlah keluarga miskin menurut BKKBN.

Ketidakseragaman ini juga menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal di tingkat masyarakat lokal. Konflik vertikal bisa menimbulkan protes maupun unjuk rasa terhadap pemerintah, sedangkan konflik horizontal dapat terjadi antara warga masyarakat yang merasa tidak puas dengan keluarga yang sesungguhnya tidak layak mendapat bantuan. Seharusnya, bantuan tersebut diberikan kepada keluarga yang secara riil memperolehnya sesuai dengan pengamatan ketua RT, kepala desa, atau kepala kelurahan setempat.

C. Problematika

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 15, dijelaskan bahwa kebijaksanaan pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang berciri kemandirian dan ketahanan keluarga. Ciri kemandirian keluarga adalah sikap mental keluarga dalam mendayagunakan kemampuan yang ada pada seluruh lembaga keluarga. Ciri tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun seluruh potensi agar menjadi sumber daya insani dalam mendukung pembangunan bangsa. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual

yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, serta ketenteraman lahir dan batin. Hal itu memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe 2005).

Dalam melakukan program penanggulangan kemiskinan, seringkali dipergunakan dua metode untuk menetapkan sasaran, yaitu BKKBN dan BPS. Penggunaan dua metode ini menghasilkan angka kemiskinan yang berbeda, misalnya data empiris tahun 2006 mengenai angka kemiskinan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor menggunakan metode BKKBN. Data tersebut berturut-turut sebesar 10,7% (Kota Bogor dalam Angka 2005) dan 49,8% (Kabupaten Bogor dalam Angka 2005). Sementara itu, menurut BPS, proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor berturut-turut adalah 17,9% (BPS Kabupaten Bogor 2005) dan 20,5% (BPS Kota Bogor 2005). Perbedaan angka kemiskinan tersebut tentunya akan menjadi kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan dan terdapat beberapa hal yang menjadi problematika. Pertama, perbedaan indikator pengukuran kemiskinan antarsatu departemen dengan departemen yang lain. Kedua, ketidaktepatan pengukuran kemiskinan berdasarkan karakteristik demografi dan karakteristik sosial ekonomi. Ketiga, faktor eksternal atau faktor lingkungan yang menyangkut ketersediaan dan akses keluarga terhadap kelembagaan sosial, serta policy regional atau program pemerintah kurang merata. Keempat, belum diterapkan manajemen sumber daya keluarga dalam keluarga secara baik. Kelima, pencapaian kesejahteraan keluarga melalui manajemen keluarga belum teratur. Keenam, belum diciptakannya suatu model dan strategi pemberdayaan keluarga miskin secara sustainable.

D. Tujuan Penulisan Buku

Secara umum, penulisan buku ini bertujuan untuk mempelajari secara komprehensif berbagai indikator kemiskinan yang dipakai selama ini, sedangkan secara khusus tujuan penulisan buku ini adalah sebagai berikut.

- 1. Menganalisis tingkat kemiskinan dengan berbagai metode pengukuran.
- Menganalisis pengaruh karakteristik demografi dan karakteristik sosial ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.
- 3. Menganalisis faktor eksternal, meliputi kelembagaan sosial dan kebijakan regional, atau program pemerintah terhadap kemiskinan.
- Menganalisis praktik manajemen sumber daya keluarga dalam keluarga.
- 5. Menganalisis pencapaian kesejahteraan keluarga melalui manajemen keluarga.
- 6. Merumuskan model dan strategi pemberdayaan kemiskinan.

E. Kegunaan Buku

Buku ini dapat digunakan oleh *stakeholders* untuk menyusun kebijakan pemberdayaan berdasarkan masalah-masalah yang telah teridentifikasi. Kebijakat tersebut antara lain menentukan suatu *benchmark* untuk menentukan kemiskinan melalui berbagai analisis metode pengukuran, analisis berbagai karakteristik demografi atau sosial ekonomi, analisis berbagai faktor eksternal, analisis perumusan model, serta strategi pemberdayaan keluarga. Dari masalah-masalah yang telah teridentifikasi tersebut, sesungguhnya mengindikasikan hal-hal, sebagai berikut:

- 1. Memberikan bukti ilmiah persepsi keluarga tentang kemiskinan; dan
- 2. Memberikan bukti ilmiah tentang keluarga miskin dan tidak miskin, serta faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.

BAGIAN PERTAMA **TEORI**



Bagian pertama ini membahas tentang teori. Sebelum menjelaskan tiga kelompok teori dalam kajian buku ini, perlu dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan paradigma baru ke arah indikator tunggal dalam memahami kemiskinan. Untuk itu dibahas tentang paradigma, konsep, proposisi, dan teori. Setelah itu membahas ketiga kelompok teori tersebut. Ketiga kelompok teori tersebut adalah *empirical research*, *middle range theory*, dan *conceptual framework*.

Ritzer (1980) mengatakan di dalam paradigma melekat tiga unsur krusial, yaitu (1) *image of the subject matter* (citra pokok suatu persoalan), (2) strategi dalam mengidentifikasi persoalan, dan (3) perspektif dalam menelaah persoalan. Oleh karena itu, topik kajian yang sama boleh jadi membuahkan hasil akhir yang berbeda apabila dilakukan atau berasal dari paradigma yang berbeda.

Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Rambe (2005) tentang "Alokasi pengeluaran dan tingkat kesejahteraan" maupun yang dilakukan oleh Ibrahim (2007) tentang "Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kesejahteran keluarga". Rambe (2005) melihat tingkat kesejahteran keluarga dari aspek pengeluaran, sehingga yang dikaji adalah pengeluaran pangan dan nonpangan, sedangkan Ibrahim (2006) melihat dari faktorfaktor yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, yang dikaji adalah sejumlah faktor yang dipandang sebagai variabel bebas, memengaruhi kesejahteraan seperti pendapatan dan pekerjaan. Sementara yang dikupas oleh penulis adalah analisis kesejahteraan dan manajemen sumber daya keluarga. Bukan hanya karakteristik keluarga, karakteristik sosial ekonomi, dan faktor eksternal yang dikaji dalam buku ini, tetapi juga membahas tentang aspek manajemen sumber daya keluarga yang berpengatuh terhadap kesejahteran, misalnya perencanaan, pembagian tugas, dan pengawasan. Inilah yang membedakan antara penulis dengan kedua peneliti tersebut. Oleh karena citra pokok persoalan yang berbeda, strategi dalam mengidentifikasi masalah dan perspektif dalam menelaah masalah pun berbeda-beda.

Menurut Usman (1995), konsep adalah suatu abstraksi yang digunakan sebagai *building block* (batasan) untuk membangun proposisi dan teori yang kelak diharapkan dapat menerangkan dan memprediksi suatu fenomena. Sebuah konsep merupakan suatu kesatuan pengertian (saling berkaitan

dalam bentuk jalinan). Jadi, bukan sekadar deretan gejala yang dirangkai menjadi suatu pernyataan, misalnya kesejahteraan tergantung pada tingkat pendapatan yang dimiliki. Keyakinan semacam ini tersirat bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan material, tingkat pendapatan menjadi sangat penting. Salah satu instrumen yang digunakan dalam mengukur konsep adalah mencari indikator-indikatornya. Indikator tersebut seperti indikator kesejahteraan rakyat yang disusun oleh BPS (1984) tentang perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia agar lebih merata dan sekaligus ditujukan pula untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Strategi pembangunan yang telah ditetapkan oleh MPR dicantumkan dalam GBHN dan merupakan suatu strategi yang dianggap paling tepat. Hal tersebut untuk lebih memacu pertumbuhan negara Indonesia sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945. Secara lebih luas lagi, dengan strategi ini dapat diwujudkan keseluruhan potensi masyarakat Indonesia.

Pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik fisik maupun nonfisik yaitu termasuk dalam proses pembangunan. Dalam usaha mempercepat terpenuhinya kebutuhan tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai program di bidang-bidang yang strategis, misalnya kependudukan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, perumahan, dan lingkungan hidup, serta pengeluaran rumah tangga. Untuk itu diperlukan data dan informasi untuk mengevaluasi sasaran pembangunan yang telah dicapai atau untuk memonitor apa saja yang sudah berhasil dilakukan dan apa yang belum. Untuk mencapai tingkat pemerataan yang diinginkan, diperlukan tidak sedikit informasi dari berbagai sektor kehidupan. Dengan demikian, selain penyediaan barang dan jasa yang dapat meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia, penyediaan data yang lengkap, cermat, tepat waktu, dan berkesinambungan juga merupakan hasil pembangunan yang sangat menentukan kemajuan selanjutnya.

Indikator yang diperlukan untuk perencanaan, evaluasi, dan pemantauan program pembangunan harus dihasilkan dari survei tahunan karena adanya suatu kebutuhan untuk mengetahui perubahan setiap tahun dan pelaksanaan program yang telah disusun. Terdapat pengaruhnya juga pada keadaan sosial masyarakat yang menjadi sasaran

program tersebut. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut bidang-bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, perumahan, lingkungan hidup, serta pengeluaran rumah tangga. Untuk mengukur bidang-bidang tersebut digunakan suatu indikator komposit, misalnya bidang kependudukan nilainya didasarkan pada dua variabel kepadatan penduduk seperti kepadatan penduduk menurut provinsi dan perbandingan banyaknya anak usia 0–4 tahun terhadap wanita usia 15–49 tahun menurut provinsi. Demikian pula variabel lainnya seperti pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Beberapa aspek sosial yang diukur beserta indikatornya

No	Aspek Sosial	Indikator
1	Kependudukan	 - Kepadatan penduduk menurut provinsi - Perbandingan banyaknya anak usia 0–4 tahun terhadap wanita usia 15–49 tahun menurut provinsi
2	Kesehatan	 Banyaknya puskesmas dan puskesmas pembantu Jumlah tenaga kesehatan menurut jenisnya Perkiraan kematian bayi menurut provinsi dan seks Perkiraan harapan hidup waktu lahir menurut provinsi dan seks
3	Pendidikan	 Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan Persentase penduduk menurut 10 tahun ke atas yang buta huruf menurut provinsi dan tempat tinggal
4	Sosial budaya	 Persentase penduduk yang memiliki radio dan kaset menurut provinsi Persentase penduduk berbahasa Indonesia sehari-hari menurut provinsi di daerah perkotaan dan pedesaan
5	Perumahan dan lingkungan hidup	 - Persentase rumah tangga menurut luas lantai yang didiami - Persentase rumah tangga di daerah kota dan pedesaan menurut jenis penerangan lampu
6	Pengeluaran rumah tangga	 Perkembangan pendapatan nasional neto per kapita Distribusi pengeluaran dan <i>gini ratio</i> menurut pulau atau daerah

Proposisi adalah pernyataan tentang hakikat suatu kenyataan sosial yang dapat diuji kebenarannya dan dapat diamati gejalanya. Proposisi bisa dirumuskan dalam bentuk hipotesis dan dalil (Philips 1971). Untuk menjelaskan elemen ini, kita melihat kembali citra pokok masalah yang dikaji oleh penulis, yaitu kesejahteran dan manajemen sumber daya keluarga. Dari *image* semacam ini dapat disusun bermacam-macam proposisi. Proposisi tersebut pada intinya berkaitan dengan variabel independen, meliputi jumlah anggota, usia, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, kepemilikan aset, kepemilikan tabungan, perencanaan, pembagian tugas, pengawasan, akses pinjaman pada lembaga keuangan, bantuan langsung tunai (BLT), kepemilikan kredit, dan lokasi tempat tinggal.

Teori adalah seperangkat proposisi yang menggambarkan mengapa suatu gejala terjadi seperti itu dan prediksi kehidupan sosial (Ritzer 1983). Dalam pendekatan teori, dikemukakan *empirical research* yang membahas kemiskinan, kesejahteraan, kepuasan, dan kebahagiaan. Sementara itu, *middle range theory* dikupas tentang teori ekologi keluarga, teori ekonomi keluarga, dan teori modernisasi. *Theoritical framework* menjelaskan sejumlah *grand* teori. Hill dan Hansen (1960) mengatakan *theoritical framework* (kerangka konseptual) yang merujuk pada sekumpulan konsep saling berhubungan dan proposisi-proposisi tentang fenomena keluarga secara umum antara lain Teori Struktural Fungsional dan Teori Interaksionisme Simbolis. Teori-teori tersebut telah mapan akar paradigmanya dan masih relevan sampai saat ini.

Bab 2 Empirical Research

A. Pengertian Keluarga

Kelompok teori *empirical research* membahas sejumlah pengertian tentang keluarga, kesejahteraan, kepuasan, dan kebahagiaan. Istilah keluarga dan rumah tangga sering diartikan sama, pandangan ini sebenarnya keliru dan tidak boleh terjadi. Rice dan Tucker (1986) mengemukakan rumah tangga lebih luas daripada keluarga. Dalam rumah tangga, tersirat suatu deskripsi tentang rumah, isi, serta pengaturan yang ada di dalamnya, tetapi kurang menyiratkan hubungan antaranggota yang mengisi rumah tersebut.

Biro Pusat Statistik di Indonesia mendefinisikan rumah tangga sebagai sekelompok orang yang tinggal di bawah satu atap dan makan dari dapur yang sama. Rumah tangga dapat terdiri dari anggota keluarga dan bukan anggota keluarga, seperti orang mondok dan pembantu rumah tangga yang hidup dalam satu unit tempat tinggal (pemondokan atau bangunan beratap). Bangunan disebut unit tempat tinggal jika unit itu dimaksudkan untuk dihuni sebagai satuan-satuan tempat tinggal yang terpisah. Maksud dari satuan tempat tinggal yang terpisah adalah satuan yang memiliki akses keluar atau dapat keluar melalui ruangan bersama atau ruangan umum. Bisa juga harus memiliki dapur atau tempat memasak yang dapat digunakan oleh penghuninya. Setiap rumah tangga mempunyai kepala rumah tangga, yaitu salah seorang dari kelompok yang namanya digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya pemilihan tempat tinggal, penyewaaan perabot rumah tangga, dan pemeliharaan rumah. Dari pasangan suami istri pada rumah tangga, yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami walaupun de facto tidak selalu suami, mungkin bisa saja istri atau anak yang telah dewasa.

Margaret Mead *dalam* Tucker dan Rice 1986) mendefinisikan keluarga adalah *The cultural history, instillling it's prevelling value system and socializing the next generation into effective citizens and human beings.* Burgess dan Locke (1960) mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak pungut). Hubungannya dengan anak, keluarga pun dicirikan sebagai tempat atau lembaga pengasuhan anak yang paling dapat memberi kasih sayang yang tulus, manusiawi, efektif, dan ekonomis.

Dalam keluarga, anak pertama-tama memperoleh bekal untuk hidupnya di kemudian hari melalui latihan-latihan fisik, sosial, mental, emosional, dan spiritual. Kegiatan dalam memenuhi fungsi sebagai keluarga unit sosial tersebut hidup dalam satuan yang disebut rumah tangga. Deacon dan Firebaugh (1981) mengatakan fungsi keluarga adalah bertanggung jawab dalam menjaga, menumbuhkan, dan mengembangkan anggota-anggotanya. Dengan demikian, pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan untuk mampu bertahan, tumbuh, dan berkembang perlu tersedia hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemenuhan akan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan untuk pengembangan fisik dan sosial.
- b. Kebutuhan akan pendidikan formal, informal, dan nonformal untuk pengembangan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual.

Dengan memperhatikan kebutuhan dasar dari anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kesempatan untuk berkembang lebih luas dapat dibangun. Melalui kesempatan berkembang yang lebih luas ini, individu dan keluarga akan mampu menampakkan diri dalam berbagai aspek kehidupan mereka, misalnya dalam aspek budaya, intelektual, dan sosial. Hal ini sesuai dengan teori kebutuhan bertingkat dari Maslow, individu bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer, kemudian berpindah kepada kebutuhan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Maslow mengatakan bahwa kebutuhan seperti (1) kebutuhan makanan, minuman, dan seks; (2) kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), seperti keamanan dan perlindungan; (3) kebutuhan akan kasih sayang, rasa memiliki, memberi, dan menerima kasih sayang; (4) kebutuhan akan penghargaan; dan (5)

kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan potensi diri (aktualisasi diri). Tahun pertama dari kehidupan adalah hal penting dalam seluruh aspek perkembangan manusia dan akan memberikan orientasi yang paling penting pada perkembangan mental selanjutnya.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa keluarga merupakan unit ekonomi yang membawa suatu proses dan aktivitas untuk memperoleh suatu produksi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Proses dan aktivitas ekonomi keluarga berbasis pada mikro ekonomi dalam skala rumah tangga. Terdapat dua masalah yang selalu dihadapi keluarga di dalam ekonomi keluarga, yaitu kelangkaan dan penggunaan sumber daya. Kedua faktor ini menuntut keluarga secara internal, mengembangkan cara atau prosedur untuk mengarahkan ekonomi keluarga agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh keluarga, aktivitas keluarga yang sangat penting dan menentukan adalah alokasi sumber daya, produksi, distribusi, dan konsumsi.

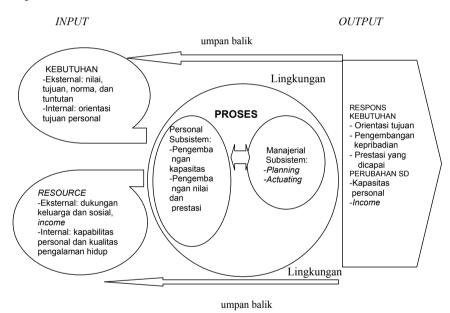
Keluarga sebagai unit ekonomi sudah tentu mengalokasikan sumber dayanya untuk sejumlah kepentingan anggota keluarga. Sumber daya adalah sumber yang dapat digunakan untuk membantu anggota keluarga dalam mencapai tujuan, seperti pendapatan, barang tahan lama dan tidak tahan lama, pangan, serta tanah. Produksi rumah tangga adalah aktivitas yang dilakukan oleh keluarga untuk keperluan anggota keluarga itu sendiri. Peralatan dan perkakas rumah tangga seperti parang, kapak, sabit, cangkul, traktor, dan pukat merupakan contoh dari alat produksi. Distribusi adalah penetapan barang yang diproduksi untuk digunakan dengan maksud tertentu. Distribusi melibatkan penetapan pendapatan nyata pada individu menurut kebutuhan, keinginan, dan kepentingan. Keputusan untuk melakukan distribusi barang akan menentukan sejauhmana jumlah barang yang diperoleh anggota keluarga untuk konsumsi sekarang dan jangka panjang. Konsumsi adalah penggunaan barang secara langsung untuk memenuhi keinginan. Secara umum, konsumsi keluarga meliputi segala kegiatan dalam penggunaan barang dan jasa yang harus diperoleh untuk dirinya sendiri. Alokasi langsung pendapatan keluarga terhadap konsumsi adalah konsumsi sehari-hari rumah tangga, misalnya telepon, air, peralatan rumah tangga, perawatan tubuh, dan kesehatan sehari-hari.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, hubungan antara subsistem individual dan subsistem manajerial dapat dijelaskan di bawah ini. Deacon dan Firebaugh (1981) mengatakan keluarga merupakan subsistem dari sistem masyarakat keluarga, terdiri dari subsistem personal dan subsistem manajerial. Subsistem manajerial mempunyai fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Subsistem personal merupakan bagian yang berhubungan dengan interaksi dinamis dari jalinan hubungan sosial. Pada akhirnya, subsistem memberi ciri kepribadian seseorang yang akan memberi pengaruh pada kemampuan manajerial, misalnya dalam proses kognitif dari suatu pengambilan keputusan. Subsistem personal, terdiri dari komponen *input, throughput,* dan *output. Output* yang terpenting dari subsistem personal adalah apa yang menjadi tujuan.

Subsistem personal tersebut memberi kontribusi terhadap subsistem manajerial karena subsistem manajerial adalah sebuah proses berpikir dan bertindak dalam berbagai sumber daya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Orientasi tujuan, orientasi pengembangan, dan prestasi personal dapat memprakarsai respon manajerial sebagai rangkaian keputusan. Hal tersebut berasal dari suatu proses perencanaan hingga implementasi yang secara terus-menerus melibatkan sistem nilai seseorang sebagai pilihan yang harus dibuat. Tujuan mengidentifikasi subsistem personal dan manajerial adalah untuk mengenal aspek penguatan kembali subsistem melalui penerapan dan pengembangan keahlian manajerial yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, untuk dapat melaksanakan fungsinya, keluarga menerima berbagai masukan berupa barang dan jasa serta informasi dan modal manusia (human capital).

Untuk memenuhi tujuan keluarga, sistem keluarga mengendalikan masukan ini, memprosesnya, dan merubahnya. Proses transformasi terjadi pada subsistem personal dan manajerial, serta antara kedua subsistem tersebut dalam sistem keluarga. Proses transformasi ini berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Dengan kondisi awal yang sama dan dalam kurun waktu yang sama, dua keluarga dapat sampai pada kondisi akhir yang berbeda (*multifinality*). Sebaliknya, dengan kondisi awal yang berbeda, dua keluarga dapat sampai pada kondisi akhir yang

sama (*equifinality*). Konsep ini penting dilihat dari segi manajemen karena kejadian ini menekankan pentingnya memperhatikan faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perbedaan tersebut dalam kurun waktu yang sama. Dari proses tersebut, selain diperoleh hasil yang berupa tujuan individu/keluarga yang ingin dicapai serta sumber daya yang digunakan, juga hasil berupa limbah yang keluar dari sistem keluarga juga merupakan kontibusi penting, masuk ke dalam sistem eksternal yang merupakan informasi baru dan menjadi umpan balik untuk sistem internal. Subsistem personal dan subsistem manajerial berfungsi sebagai satu kesatuan, seperti dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1 Bagan individual atau manajerial sistem Sumber: Deacon dan Firebaugh (1981)

Umpan balik dapat berupa umpan balik positif dan umpan balik negatif. Umpan balik positif mendorong perubahan, sedangkan umpan balik negatif memerlukan penyesuaian. Dengan mencermati pemikiran Deacon dan Firebaugh, kemudian pemikiran inilah yang dijadikan landasan konsep pembangunan kesejahteraan keluarga. Konsep kesejahteraan mengacu pada UU No. 10 Tahun 1992 yang menyebutkan

bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, serta selaras dan seimbang antaranggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN 1996). Untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan material diperlukan manajemen yang baik.

Kerja sama antara suami, istri, dan anak di dalam pendekatan manajemen keluarga diperlukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Tujuan hidup yang telah ditetapkan akan tercapai apabila semua subsistem secara fungsional melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya (Campbell 1979). Fungsi subsistem keluarga sangat didorong oleh apa yang menjadi tujuan hidup dan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, tujuan hidup dan sumber daya merupakan *input* (masukan) di satu sisi, sedangkan di sisi lain pencapaian tujuan hidup sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki.

Dalam pemikiran berikutnya, tujuan keluarga dapat tercapai apabila sumber daya yang tersedia memungkinkan. Gross *et al.* (1973) mengatakan sumber daya merupakan alat atau bahan yang tersedia dan diketahui potensinya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan keluarga. Untuk memudahkan dalam menetapkan pengalokasian sumber daya, digunakan dua cara pengukuran, yaitu: (a) sumber daya uang dan (b) sumber daya waktu.

Tujuan hidup keluarga sebagaimana dipaparkan di atas sangat dipengaruhi oleh karakteristik keluarga dan faktor eksternal. Karakteristik keluarga mencakup jumlah anggota, usia, fisiologi, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, kepemilikan aset, dan lingkungan tempat tinggal. Faktor eksternal meliputi (a) kelembagaan sosial yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, dan BPR, apakah tersedia dan dapat diakses oleh keluarga berupa kredit atau pinjaman; (b) kebijakan atau program pemerintah menyangkut pemberian raskin, JPS, dana kompensasi BBM, dan kredit finansial, apakah tersedia dan dapat diakses oleh keluarga atau tidak; dan (c) lingkungan tempat tinggal.

Kedua unsur tersebut akan memengaruhi perubahan sumber daya waktu dan sumber daya uang (pendapatan). Perubahan dalam arti

bagaimana pengalokasiannya secara efektif dan efisien, sehingga akan terjadi perubahan pada kapasitas personal dan pendapatan/kekayaan. Memang, setiap suami atau istri memiliki jumlah waktu yang sama yaitu 24 jam, tetapi cara menggunakan waktu berbeda-beda, misalnya suami menggunakan waktu untuk kegiatan produktif lebih banyak, sedangkan istri menggunakan waktu lebih banyak pada kegiatan domestik. Demikian pula suami dan istri dalam menggunakan waktu luang, kegiatan sosial, dan kegiatan personal.

Setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan yang berbeda-beda ini diakibatkan oleh pendidikan, jumlah anggota, usia, dan kondisi fisiologi. Keempat komponen tersebut memengaruhi perubahan pada sumber daya uang (pendapatan). Anggota keluarga yang berpendidikan tinggi akan lebih mampu berpikir ke depan dan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, serta mengalokasikan anggaran keluarga agar apa yang ingin dicapai dapat terwujud. Walaupun kemampuan berpikir ke depan ada, tetapi sumber daya yang terbatas dapat membuat keluarga memberikan prioritas pada apa yang diperlukan di masa sekarang (Megawangi 1994).

Pendidikan dan kesejahteraan merupakan dua variabel yang saling memengaruhi. Di satu sisi, perubahan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap perubahan tingkat kesejahteraan, sedangkan di lain pihak tingkat kesejahteraan signifikan terhadap perkembangan pendidikan. Tingkat pendidikan akan memengaruhi tingkat pendapatan keluarga karena setiap kali kenaikan tingkat pendidikan, akan mendorong tingkat pendapatan yang bisa melampaui garis kemiskinan (Rambe 2005).

Menurut Tenge (1989) dan Bank (1994), jumlah anggota dan usia anak balita berpengaruh terhadap alokasi pengeluaran keluarga untuk konsumsi anak dan anggota lainnya yang tidak produktif. Hal ini akan memengaruhi pengeluaran rumah tangga karena rumah tangga yang memiliki balita mempunyai kebutuhan berbeda dengan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah. Selain itu, kondisi fisiologi berpengaruh terhadap alokasi pengeluaran jika terjadi pada anggota yang mengalami gangguan kesehatan, pemeriksaan kehamilan, dan kebutuhan untuk menyusui anak. Sebelum menetapkan tujuan, pengalokasian sumber daya

waktu dan sumber daya uang (pendapatan) telebih dahulu dilakukan komunikasi internal keluarga maupun eksternal keluarga. Komunikasi internal maupun eksternal melibatkan suami, istri, dan anak-anak ketika membicarakan pendidikan anak, jumlah anak, dan ibu bekerja di luar rumah atau di dalam rumah. Komunikasi internal dan eksternal maksudnya menampung dan mengolah berbagai masukan berupa pendapat atau saran, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan suami dan istri lebih tepat. Suami dan istri merupakan figur yang paling bertangung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga.

Keputusan merupakan pilihan yang tepat, efektif, dan efisien berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dan sumber daya yang tersedia. Indikator dari pengambilan keputusan adalah (a) ada atau tidaknya keterlibatan suami dan istri dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam hal pendidikan anak, jumlah anak, kepemilikan rumah, maupun partisipasi dalam KB; (b) jika tidak, siapa yang mengambil keputusan, apakah suami atau istri saja (pola tradisional); dan (c) jika keputusan bersama dibuat oleh suami dan istri dengan kekuatan berimbang atau keputusan bersama. Suami dan istri lebih baik sama-sama dominan, begitupun dalam diskusi antara suami dan istri (pola modern) (Guhardja et al. 1992). Jadi, sejumlah keputusan keluarga tersebut merupakan pilihan-pilihan rasional yang diharapkan dapat dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Keputusan-keputusan tersebut merupakan rumusanrumusan yang masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan manajemen di tingkat keluarga. Siagian (1980) mendefinisikan manajemen sebagai "kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil melalui kegiatan-kegiatan".

Berdasarkan pengertian tersebut, manajemen keluarga menurut penulis adalah kemampuan keluarga untuk meraih hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui kegiatan suami, istri, dan anak-anak. Oleh karena itu, unsur-unsur di dalam manajemen keluarga menjadi sangat penting. Unsur-unsur tersebut menurut Terry *dalam* Siagian 1980) antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanan, dan pengawasan.

1. Planning

Pada prinsipnya, rencana yang dibuat sesuai dengan tujuan hidup. Siagian (1980) mendefinisikan perencanaan sebagai "keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan". Berdasarkan pendapat tersebut, apakah berbagai aktivitas keluarga memiliki rencana atau tidak, apakah rencana tersebut tertulis atau tidak, dan apakah rencana tersebut dikomunikasikan dengan anggota lain atau tidak. Perencanaan pada dasarnya terdiri dari dua komponen, yaitu penentuan standar dan urutan tindakan seperti diuraikan di bawah ini

a. Penetapan Standar

Penetapan standar adalah usaha mendeskripsikan hasil yang akan dicapai dan cara untuk mencapai keinginan. Pencapaian tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan tuntutan-tuntutan. Hasibuan (1990) mengatakan beberapa pokok dalam perencanaan yang perlu dijawab adalah sebagai berikut.

- 1. What, apa kegiatan yang akan dilakukan?
- 2. Where, di mana kegiatan itu dilakukan?
- 3. When, kapan kegiatan itu dilakukan?
- 4. How, bagaimana cara melaksanakan kegiatan tersebut?
- 5. Who, siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut?
- 6. Why, mengapa kegiatan tersebut dilakukan?

b. Urutan Tindakan

Urutan tindakan merupakan sistematika tindakan yang seharusnya dilakukan oleh keluarga dalam suatu proses produksi. Ada tiga tipe kegiatan menurut Deacon dan Firebaugh (1981) antara lain sebagai berikut.

b.1. Kegiatan Interdependent

Kegiatan *Interdependent* adalah kegiatan yang saling tergantung satu sama lain. Kegiatan tersebut seperti kegiatan membangun sebuah rumah terdiri dari komponen-komponen kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya yaitu kegiatan mencari tukang, kegiatan pengurusan izin membangun, kegiatan mencari material, dan kegiatan mendesain bangunan.

b.2. Kegiatan Dovetailing

Kegiatan *Dovetailing* adalah kegiatan pada saat keluarga memberi perhatian terhadap dua atau lebih pekerjaan secara periodik sampai seluruhnya selesai. Kegiatan tersebut misalnya waktu untuk berbelanja pangan ke pasar hanya 1 jam, sedangkan kegiatan yang ingin dilakukan antara lain belanja, mencetak foto, dan *photocopy*.

b.3. Kegiatan Overlaping

Kegiatan *overlaping* merupakan kegiatan keluarga yang memberi perhatian sama terhadap dua atau lebih pekerjaan pada waktu yang sama. Kegiatan tersebut misalnya seorang ibu rumah tangga yang sedang memasak sambil mengasuh anak.

2. Organizing

Siagian (1980) mendefinisikan pengorganisasian sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa. Terciptalah suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Definisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya pengorganisasian dibuat sebelumnya. Dengan demikian, pengorganisasian menghasilkan suatu organisasi internal keluarga (suami, istri, dan anak-anak) dapat digerakkan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas keluarga. Indikatornya adalah ada atau tidak pembagian tugas pada masing-masing anggota untuk melakukan kegiatan.

3. Actuating

Guhardja et al. (1992) mengatakan actuating merupakan upaya menjalankan suatu rencana dan menguraikan rencana ke dalam segala risiko untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, alokasi waktu dan alokasi pengeluaran (pendapatan) menjadi sangat penting. Waktu saat atau lamanya kegiatan dilakukan merupakan alat ukur lain dari sumber daya manusia maupun materi. Jumlah waktu yang diperlukan dalam proses produksi menentukan produktivitas suatu alat atau barang. Waktu juga dapat menentukan produktivitas manusia. Hal ini dihitung dari jumlah output atau hasil yang diperoleh individu dalam satuan waktu tertentu (Guhardja et al. 1992). Indikatornya adalah (a) apakah ada atau tidak alokasi waktu yang dilakukan oleh keluarga dan (b) apakah tercapai atau tidak hasil yang diinginkan sesuai rencana berdasarkan alokasi waktu tersebut.

Mangkuprawira (1985) membagi alokasi waktu ke dalam enam kategori, yaitu: (1) kegiatan domestik seperti membersihkan rumah, memasak, menyiapkan makanan, dan memelihara anak (Rm); (2) kegiatan produktif yaitu kegiatan mencari nafkah dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan, termasuk dalam hal ini bekerja tanpa mendapat upah (M); (3) kegiatan meningkatkan keterampilan bekerja lewat pendidikan latihan yang ditujukan untuk memelihara keluarga atau mencari nafkah (Pd); (4) kegiatan sosial berupa jangkauan keluarga dalam berbagai macam kegiatan di luar rumah tangga meliputi pengajian, arisan, kegiatan PKK, dan organisasi sosial (S); (5) kegiatan personal adalah kegiatan yang menyangkut perawatan pribadi seperti sembahyang, tidur, makan, dan mandi (Pi); dan (6) kegiatan waktu luang yaitu waktu yang digunakan untuk menonton televisi, olahraga, rekreasi, serta melakukan suatu hobi (L). Alokasi waktu untuk kegiatan produksi akan menghasilkan pendapatan (uang). Uang dapat dialokasikan untuk kebutuhan pangan atau nonpangan. Indikatornya adalah (a) ada atau tidak alokasi pengeluaran untuk pangan dan nonpangan dan (b) apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi pengeluaran pangan dan nonpangan.

Alokasi pengeluaran meliputi alokasi pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan non-pangan. Kebutuhan pangan mencakup beras, lauk-

pauk, sayur, dan buah-buahan, sedangkan alokasi nonpangan meliputi pemeriksaaan kesehatan, kebersihan atau keindahan, pendidikan anak, dan pakaian. Tingkat kesejahteran keluarga dapat ditelusuri melalui pola pengeluaran rumah tangga. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah pengeluaran untuk pangan dan nonpangan. Kesejahteraan keluarga dikatakan baik jika persentase pengeluaran untuk makanan semakin kecil dibandingkan dengan total pengeluaran. Demikian pula sebaliknya, keluarga dikatakan miskin apabila persentase pengeluaran untuk makanan semakin besar.

Di negara-negara maju, persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran biasanya di bawah 50%, sedangkan di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk pangan masih merupakan bagian terbesar (>50%). Menurut Soekirman (1991), umumnya keluarga berpendapatan rendah di Indonesia membelanjakan sekitar 60–80% dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pengeluaran total rumah tangga sebesar 61,52% adalah pengeluaran pangan untuk seluruh penduduk di Indonesia. Secara umumnya, sebagian besar pendapatan keluarga miskin dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Dengan demikian, uang merupakan sumber daya, sekaligus dapat dijadikan alat pengukur sumber daya. Hal ini karena uang merupakan nilai tukar dari sumber daya materi yang ditetapkan melalui mekanisme pasar. Selain nilai suatu barang atau aset, uang juga dapat dipakai sebagai pengukur sumber daya manusia yang direalisasikan dalam bentuk gaji atau upah (Guhardja *et al.* 1992).

4. Controlling

Deacon dan Firebaugh (1981) mengatakan "pengawasan dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan sudah dilaksanakan dan memeriksa tindakan-tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana atau tidak, dan lain-lain". Indikatornya adalah (a) ada atau tidak pengawasan dilakukan; (b) siapa yang dilibatkan untuk melakukan pengawasan; dan (c) bagaimana prosedur melakukan pengawasan, apakah membuat catatan, atau memperbaiki kesalahan. Prinsipnya, pengawasan yang dilakukan adalah untuk menemukan hambatan-hambatan yang dihadapi dan mencegah timbulnya

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan ditujukan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, meningkatkan efisiensi kerja, dan tidak memfonis kesalahan seorang anggota keluarga, tetapi pengawasan harus menentukan apa yang dikerjakan tidak betul. Oleh karena itu, pengawasan harus bersifat membimbing, sehingga para tenaga kerja dapat meningkatkan kinerjanya. Dengan mengelola manajemen keluarga yang teratur, diharapkan dapat memengaruhi apa yang menjadi tujuan hidup keluarga dan kesejahteraan dapat tercapai. Setelah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menemukan hasil akhir, apakah *output* tersebut memenuhi standar atau tidak untuk mengetahui tingkat kesejahteraan melalui kepuasan yang dirasakan.

Untuk mengetahui apakah tujuan hidup keluarga tercapai atau tidak dapat digunakan berbagai pendekatan pengukuran, antara lain kriteria BPS, kriteria BKKBN, kriteria Pengeluaran Pangan, dan kriteria Persepsi Keluarga. Kriteria BPS menggunakan pendapatan untuk menentukan garis kemiskinan. Kriteria BKKBN mengklasifikasikan rumah tangga miskin berdasarkan indikator ekonomi. Kriteria Pengeluaran Pangan untuk menentukan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran pangan atau nonpangan. Ukuran yang terakhir adalah Persepsi Keluarga. Persepsi Keluarga tersebut dibangun di atas dua indikator, yaitu interpretasi subjektif dan kondisi objektif. Ukuran tersebut dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang akan direspons oleh keluarga berdasarkan pensepsi mereka tentang kesejahteraan yang alami. Setelah dikemukakan pengertian tentang keluarga, akan dijelaskan tentang kesejahteraan, kepuasan, dan kebahagiaan.

B. Studi Tentang Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan menurut tim perumus indikator sosial (1975) dalam Amiyatsih 1986 didefinisikan sebagai "ringkasan dari serangkaian data statistik sosial yang diturunkan dan disusun untuk menggambarkan suatu keadaan atau kecenderungan keadaan-keadaan sosial yang menjadi pokok perhatian atau usaha pembangunan masyarakat". Definisi tersebut membedakan antara statistik sosial dan indikator sosial yang diturunkan dari data statistik sosial. Indikator sosial biasanya merupakan kumpulan

data yang lebih sedikit dan dapat dianggap sebagai petunjuk singkat pembangunan sosial.

Sumarti (1999) mendefinisikan kesejahteraan merupakan kondisi relatif yang dibentuk masyarakat melalui interaksi sosial. Pendefinisian kesejahteraan tersebut didasarkan pada stratifikasi sosial dalam masyarakat. Ketika satu golongan menempati posisi dominan dalam masyarakat, definisi kesejahteraan lebih berorientasi pada golongan status tersebut, misalnya golongan priayi dan wong cilik. Golongan priayi berorientasi pada keraton dan sebagai pusat tradisi besar Jawa, sedangkan golongan wong cilik berorientasi pada desa sebagai tradisi lokal.

Lee dan Hanna (1990) mendefinisikan kesejahteraan sebagai total dari net worth (manfaat yang benar-benar diperoleh) dan human capital wealth (kesejahteraan sumber daya manusia). Manfaat yang diperoleh merupakan nilai atas aset yang dimiliki, dikurangi dengan pengeluaran (liabilitas). Sementara itu, kesejahteraan SDM dapat diduga melalui pendapatan yang dihasilkan oleh SDM (human capital income) yang ada saat ini atau dihitung dari nilai pendapatan nonaset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteran rumah tangga dipengaruhi oleh usia, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, tempat tinggal, ukuran rumah tangga, dan siklus hidup.

Usia, kesejahteraan keluarga mempunyai hubungan yang erat dengan usia. Kekayaan dan human capital income meningkat pada usia 55–59 tahun dan mulai menurun pada usia 59 tahun. Sebelum menikah, orang muda tidak mempunyai pendapatan dan banyak meluangkan waktu tanpa berpikir tentang masa depan. Dua puluh tahun kemudian, tabungan mereka tidak cukup karena mereka mempunyai tiga anak yang tentu saja memerlukan biaya yang cukup mahal. Setelah usia pertengahan, mereka dapat menabung dalam jumlah besar, kemudian melepaskan anak-anak menjadi mandiri dan menurunkan belanja rutin mereka. Setelah pensiun, konsumen menarik aset untuk melengkapi penurunan pendapatan mereka. Human capital akan menurun setelah masa pensiun karena pendapatan lebih rendah dari sebelumnya. Oleh karena itu, usia merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kekayaan sejalan dengan persentase pendapatan yang bisa ditabung terus dari siklus hidup dan akan menunjukan pola akumulasi kekayaan.

Pendidikan, kesejahteraan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Terdapat hubungan yang positif antara pendidikan dengan kekayaan pada semua usia. Pada usia 65 tahun, kekayaan yang diramalkan sebesar \$224.560 untuk mereka yang tingkat pendidikannya sampai dengan kelas delapan, \$369.352 untuk mereka yang tingkat pendidikannya sampai dengan kelas 12. Untuk mereka yang selama 16 tahun menempuh pendidikan sebesar \$514.144 dan \$658.937 untuk mereka yang menempuh pendidikan selama 20 tahun.

Status Perkawinan, pasangan yang menikah memiliki hubungan yang positif dengan kekayaan. Artinya, pasangan menikah bisa mengakumulasikan kekayaan bersih dan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tunggal dalam satu rumah tangga. Pasangan yang bercerai akan memisahkan aset mereka berdua dan faktor perceraian ini akan menjadi penyebab turunnya pendapatan rumah tangga.

Pekerjaan, terdapat hubungan yang positif antara pekerjaan dengan tingkat kesejahteraan. Pekerjaan berpengaruh positif pada akumulasi kekayaan karena *human capital income* menggambarkan pendapatan yang diperoleh.

Tempat Tinggal, orang yang tinggal di pinggiran kota lebih memiliki kekayaan dibanding yang tinggal di wilayah perkotaan. Orang yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki biaya hidup yang lebih mahal dibandingkan dengan yang tinggal di pinggiran kota.

Ukuran Rumah Tangga, terdapat hubungan negatif antara ukuran rumah tangga dengan kekayaan. Ukuran rumah tangga yang besar akan mengakibatkan menurunnya kekayaan. Permintaan konsumen meningkat sejalan dengan ukuran rumah tangga yang besar pula. Jika aspek lain normal, tingkat pendapatan dan aset perkapita menurun sejalan dengan jumlah anggota rumah tangga yang meningkat.

Siklus Hidup, siklus hidup yang diciptakan berpengaruh terhadap kekayaan. Wanita *single* dengan 16 tahun menempuh pendidikan, menikah di usia 24 tahun, memiliki tiga anak, dan anak-anaknya pergi dari rumah pada usia 21 tahun. Dia dan suami pensiun pada usia 66 tahun, suaminya meninggal pada usia 75 tahun, diramalkan kekayaan ibu rumah tangga

tersebut kurang dari 23% dan kekayaan perorang turun 4%. Jika istri tidak bekerja, kekayaan akan lebih menurun dan juga pada saat pensiun. Kematian suami juga mengakibatkan penurunan kekayaan rumah tangga dari pasangan menikah.

Sajogyo (1984) mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam Trilogi Pembangunan sejak Repelita III, yaitu: (1) peluang berusaha; (2) peluang bekerja; (3) tingkat pendapatan; (4) tingkat pangan, sandang, dan perumahan; (5) tingkat pendidikan dan kesehatan; (6) peran serta; (7) pemerataan antardaerah, desa atau kota; dan (8) kesamaan dalam hukum. Iskandar (2007) mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai "usaha untuk melepaskan diri dari segala tekanan, kesulitan, kesukaran, dan gangguan untuk mencapai suatu keadaan yang relatif tercukupi". Kondisi tersebut dapat diraih apabila keluarga memiliki dan mengakses hal-hal seperti pekerjaan, pendapatan, kebiasaan menggunakan pangan, KB, pendidikan, kepemilikan aset, kondisi fisiologi, lingkungan tempat tinggal, akses lembaga finansial, dan policy regional. Grant (1978) dan Morris (1982) dalam Budiman 1996 mengukur tingkat kesejahteraan dengan membuat indeks (suatu ukuran ringkas yang merupakan gabungan dari beberapa indikator), seperti Indeks Mutu Hidup Fisik (Physical Quality of Life Indekx-PQLI). PQLI adalah suatu indeks pengukuran yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: (1) rata-rata harapan hidup sesudah usia satu tahun, (2) rata-rata jumlah kematian bayi, dan (3) rata-rata persentase buta dan melek aksara. Pertama, angka 100 diberikan bila rata-rata harapan hidup mencapai 77 tahun, sedangkan angka 1 diberikan bila rata-rata harapan hidup hanya mencapai 28 tahun. Kedua, angka 100 diberikan bila ratarata angka kematian adalah 9 untuk 1000 kelahiran, angka 1 bila rata-rata angka kematian adalah 229. Ketiga, angka 100 diberikan bila rata-rata persentase melek aksara mencapai 100%, angka 0 diberikan bila tak ada yang melek aksara di negara tersebut. Angka rata-rata dari ketiga unsur tersebut menjadi PQLI yang besarnya antara 0 sampai 100. Atas dasar ini, dapat disusun sebuah daftar urut dari negara-negara sesuai dengan prestasi PQLI-nya.

Rusli *et al.* (1995) mengukur indikator kemiskinan berdasarkan tingkat kecukupan kebutuhan fisik minimum pangan rumah tangga sebanyak

2.100 kalori per orang per hari dan kebutuhan fisik minimum bukan pangan dengan pengeluaran sebesar Rp13.295 per kapita per bulan untuk pedesaan (garis kemiskinannya). Berdasarkan batas kecukupan pangan dan nonpangan, BPS (2002) menentukan garis kemiskinan untuk daerah perkotaan sebesar Rp130.541 per kapita per bulan, sedangkan untuk daerah pedesaan sebesar Rp96.521 per kapita per bulan. Di negara-negara maju, persentase pengeluaran untuk makanan terhadap pengeluaran biasanya berada di bawah 50%, sedangkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk pangan masih merupakan bagian terbesar di atas 50% (Soekirman 1991). Bagi Indonesia nampaknya masih berada di atas angka tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, BPS (2003) menggunakan berbagai indikator untuk menentukan kesejahteraan rakyat, antara lain: (1) kependudukan; (2) kesehatan dan gizi; (3) pendidikan;(4) ketenagakerjaan; (5) taraf dan pola konsumsi; (6) perumahan dan lingkungan; dan (7) sosial budaya. Pengaruh pertumbuhan penduduk di antaranya terlihat pada komposisi, usia, dan distribusi penduduk. Semakin rendah proporsi penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), semakin rendah angka beban ketergantungan. Hal tersebut memberi kesempatan kepada usia produktif untuk meningkatkan kualitas personalnya, sedangkan jumlah penduduk yang besar merupakan sumber daya, tetapi kemudian akan menjadi beban jika mutunya rendah. Sementara itu, distribusi penduduk yang merata akan sangat meringankan beban di wilayah yang ditempatinya. Konsentrasi penduduk secara dahsyat pada salah satu wilayah menimbulkan banyak masalah seperti pengangguran, pelacuran, dan perampokan karena ketidakmampuan mengakses pekerjaan secara layak.

Tingkat kesejahteran masyarakat juga terlihat dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Artinya, menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi dan angka harapan hidup dapat dilihat dari efektivitas masyarakat berobat ke berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang ada, maupun efektivitas pelayanan medis terhadap ibu hamil dan keluarga yang sakit. Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan dipandang sebagai salah satu indikasi ketidaksejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Tingkat pendidikan

masyarakat juga sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Ukuran yang sangat mendasar adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk juga menjadi indikator kesejahteraan rakyat. Tingkat partisipasi angkatan kerja (usia 15–64 tahun) adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kepuasan individu, memenuhi perekonomian rumah tangga, dan kesejahteraan keluarga. Taraf dan pola konsumsi masyarakat juga dijadikan indikasi untuk melihat tingkat kemiskinan keluarga.

Berbagai indikator yang digunakan untuk mengetahui taraf dan pola konsumsi adalah (1) tingkat pendapatan dan (2) pengeluaran pangan dan nonpangan. Penduduk miskin ditafsirkan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak. Kebutuhan tersebut diterjemahkan sebagai jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian dijadikan sebagai standar kemiskinan. Selain itu, pengeluaran rumah tangga juga dijadikan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi pendapatan, porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Perumahan dan lingkungan juga dijadikan sebagai indikator kesejahteraan rakyat. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteran tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumah tangga, dan juga tempat penampungan kotoran akhir. Indikator terakhir adalah faktor sosial budaya. Sosial budaya merupakan salah satu aspek kesejahteran yang memiliki cakupan amat luas. Semakin banyak seseorang memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan sosial budaya dapat dikatakan kesejahteraan semakin meningkat. Waktu yang ada tidak semata-mata dipakai untuk mencari nafkah, tetapi juga digunakan untuk wisata, nonton TV, dan mendengar radio. Dalam kaitannya dengan ukuran pengeluaran pangan tersebut Aspatria (1996)

mengidentifikasi pola konsumsi pangan masyarakat, yaitu: (a) aspek pola kebiasaan makan yang mencakup frekuensi makan, jenis bahan pangan yang umumnya dikonsumsi, dan susunan menu makan keluarga, serta kebiasaan makan pagi dan makan makanan selingan dan (b) jenis-jenis bahan makanan yang dikonsumsi, bersumber dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta sayur-sayuran. Masih dalam kerangka pembahasan di atas, Khomsan (1993) mengidentifikasi keragaan kebiasaan makan yang terdiri dari dua unsur, antara lain frekuensi makan dan jenis makanan yang dikonsumsi.

Bungaran Saragih *et al.* (1993) mengukur indikator kemiskinan berdasarkan keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian atau dengan penghasilan rendah, kondisi rumah dan lingkungan fisik tidak memenuhi syarat kesehatan, serta pendidikan terbatas. Studi yang dilakukan oleh Salim *dalam* Soemarjan 1984) mengemukakan ada lima karakteristik membuat munculnya kemiskinan, yaitu: (1) penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi; (2) tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri; (3) tingkat pendidikan pada umumnya rendah; (4) tidak mempunyai fasilitas; dan (5) berusaha dalam usaha yang relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (2000) mengemukakan untuk mengatasi tingkat kesejahteraan keluarga yang diakibatkan oleh krisis ekonomi adalah dengan memantapkan asas hidup kekeluargaan dalam menghadapi segala aspek kehidupan. Asas hidup kekeluargaan tersebut seperti menciptakan kerja sama, tolong menolong, dan bantu membantu. Selain itu, keluarga lain dapat menitipkan sebagian anggotanya kepada keluarga lain yang lebih mampu atau secara umum sangat biasa terjadi pinjam-meminjam uang tanpa bunga antarkeluarga untuk menutup pengeluaran pokok yang tidak dapat ditunda.

Untuk meningkatkan mereka yang tergolong miskin atau tidak sejahtera, salah satu solusi adalah memberikan pinjaman modal melalui lembaga finansial yang ada. Lembaga finansial yang dibangun diharapkan dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, tetap memperhatikan hubungan antara jumlah uang yang dipinjam dengan karakteristik keluarga yang

bersangkutan, sehingga masalah ketidakmampuan keluarga untuk membayar utang dapat dihindari. Contoh dari hal tersebut misalnya studi yang dilakukan oleh DeVaney dan Lytton (1995) tentang ketidakampuan rumah tangga untuk melunasi hutang, kegagalan keluarga meminjam mobil, kecenderungan kebangkrutan keluarga, dan kebangkrutan institusi finansial menemukan bahwa, sebagai berikut.

a. Pengembalian Pinjaman oleh Konsumen

Survey of Consumer Finance (SCF) Tahun 1983 tentang perilaku keterlambatan rumah tangga membayar uang dilaporkan kira-kira 22% dari 3.824 responden. Persentase ini dianalisis oleh Sullivan dan Fisher (1988) melalui analisis multivariat dan bivariat yang menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut diakibatkan oleh dua faktor, yaitu pendapatan dan usia peminjam. Kesulitan melunasi hutang bagi mereka yang berpendapatan rendah di bawah \$10.000 merupakan hal yang sangat tinggi (37%), sedangkan kesulitan membayar hutang bagi mereka yang berpendapatan tinggi yaitu \$50.000 hanya (7%). Sementara itu, kepala rumah tangga di bawah usia 35 tahun sanggup melunasi hutang, sedangkan kepala rumah tangga yang berusia 55 tahun mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan masalah hutang. Studi yang dilakukan Canner dan Luckett (1990) menunjukkan bahwa rumah tangga besar mempunyai masalah (55%) dalam melunasi pinjaman, sedangkan rumah tangga yang tidak bekerja (24%) juga mempunyai masalah dalam melunasi pinjaman.

b. Kegagalan pada Pinjaman Mobil

Peterson dan Peterson (1981) memformulasikan bahwa interaksi antara karakteristik peminjam, bentuk-bentuk pinjaman, dan resiko kegagalan dapat dilihat dari ciri-ciri personal setiap individu, seperti keahlian dan pekerjaan. Keahlian dan pekerjaan yang tinggi akan meminjam dengan jumlah pinjaman yang tinggi, sebaliknya mereka yang memiliki keahlian dan pekerjaan yang rendah justru gagal dalam melunasi hutang. Studi Peterson dan Peterson menguji rata-rata kegagalan dari kelompok profesional dan pekerja yang menunjukkan bahwa rata-rata kegagalan pinjaman pada kelompok profesional adalah rendah, kelompok-kelompok lain juga seperti itu. Namun, kelompok labores rata-rata kegagalannya

tinggi. Kedua peneliti ini kemudian membandingkan antara usia dengan besarnya pinjaman dan menemukan bahwa saat membayar hutang adalah tinggi yaitu melebihi 30%. Peterson dan Peterson merumuskan bahwa, seharusnya kreditor menyusun besarnya pembayaran ketika mengevaluasi risiko-risiko kredit. Mereka percaya bahwa untuk menjelaskan besarnya hutang perlu dilihat dari sejumlah faktor, seperti faktor psikologi, sosial, dan ekonomi. Analisis dan pembayaran hutang pada sampel responden yang paling dominan adalah pada pekerja kelas bawah, menengah, dan atas tahun 1989 menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh mengandung beberapa tanggapan yang bersifat kontradiktif. Pembayaran hutang tidak signifikan sebagaimana yang diprediksikan variabel sosiodemografi, yaitu kelas sosial, usia, atau jumlah anak yang belum menikah.

c. Kecenderungan Kebangkrutan

Pengaruh usia, pendapatan, dan status perkawinan adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan. Kebangkrutan tersebut dianalisis dengan menggunakan data tahun 1981 dan 1986 pada survei keuangan konsumen yang dilakukan oleh DeVaney dan Hanna (1994). Analisis mereka menunjukkan bahwa usia rumah tangga mempunyai hubungan yang negatif dengan kebangkrutan. Pendapatan yang rendah mempunyai efek negatif terhadap kecenderungan kebangkrutan. Pada periode pertama tahun 1980, rata-rata kebangkrutan pasangan menikah diprediksi rendah, kemudian tipe rumah tangga yang lain pun sama. Namun, pada tahun 1986, hubungan antara status perkawinan dan kebangkrutan tidak jelas. Rumah tangga besar, pendidikan, dan ras adalah variabel yang tidak berpengaruh terhadap kebangkutan. Artinya, jumlah anggota yang banyak dari sebuah keluarga, tingkat pendidikan apa pun, dan ras mana pun yang meminjam uang sanggup melunasinya serta tidak terjadi ketidakmampuan keluarga dalam melunasi hutang.

d. Kebangkrutan

Studi tentang kebangkrutan mengedepankan beberapa kasus empiris, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Studi yang dilakukan tahun 1960 di Michigan dan Utah misalnya menemukan kebanyakan kebangkrutan terjadi pada pekerja-pekerja kelas bawah. Dua penelitian memperkuat

temuan tersebut, antara lain studi yang dilakukan tahun 1980 menunjukkan bahwa 80% kebangkrutan adalah mereka yang dipekerjakan sebagai pekerja busana. Studi kedua menunjukkan bahwa 20% keluarga yang mempunyai dua pendapatan terpisah yaitu pasangan yang bercerai, sebagaimana ditemukan oleh Sullivan *et al.* (1989).

Shepard (1984) menemukan ada hubungan yang positif antara ratarata perceraian dengan rasio cicilan konsumen dan nonangsuran pinjaman pada pendapatan dan rata-rata kebangkrutan. Shepard juga menunjukkan hasil temuannya jika ada hubungan negatif antara informasi tentang daerah kediaman dengan rata-rata kebangkrutan. Secara keseluruhan, pinjaman dihitung 80% dari kenaikan gaji selama periode investigasi.

Sullivan et al. (1989) mengumpulkan data kebangkrutan sebanyak 1.529 keluarga di Illinois, Pennsylvania, dan Texas. Tahun 1981, secara intensif ia mengidentifikasi karakteristik catatan-catatan kebangkrutan dari kasus-kasus lainnya. Mereka menemukan bahwa kebangkrutan sesungguhnya terjadi pada rumah tangga besar dengan pendapatan yang kecil (3–4 anggota dibandingkan dengan 2–7). Kemudian, ratarata dari mereka menggadaikan sesuatu untuk membayar hutang karena terlalu banyak pinjaman (\$10.800 dibandingkan dengan \$2.400). Pada pertengahan, hutang peminjam tidak dapat dilunasi dengan besar pinjaman \$15.500, yang memberikan pinjaman atau debitor justru mengalami kebangkrutan sesuai dengan catatan pada buku kas tahunan. Sesuai catatan, sebanyak 20% kebangkrutan debitor secara formal melibatkan masalah bisnis yang salah tentang perusahaan yang dikelola. Dari sejumlah pendapat tersebut, yang akan digunakan oleh peneliti dalam menjelaskan pinjaman ke lembaga finansial adalah pendapat Peterson dan Peterson.

Jakti (1994) mengemukakan masalah pokok masyarakat desa terdiri dari keterkebelakangan dan kemiskinan. Lebih tepat disebut masalah struktur yang menampilkan diri dalam wujud makin buruknya perbandingan antara luas lahan, jumlah individu, dan pola pemilikan atas tanah. Hal ini mendorong meningkatnya jumlah pengangguran baik terselubung maupun terbuka, serta berlakunya upah yang rendah. Selain itu, meningkat pula jumlah kaum buruh di kalangan petani. Sisi lain, semakin kuat kekuasaan birokrasi negara yang bersifat nepotistik

dan feodal, semakin meluas korupsi dalam birokrasi. Masalah lain adalah membesarnya kekuasaan golongan minoritas, termasuk orang asing di sektor perdagangan dan penanaman modal serta adanya dualisme sosial, ekonomi, dan teknologi.

Oleh karena itu, upaya perbaikan dari kondisi tersebut adalah (1) perencanaan pembangunan pedesaan perlu dirumuskan melalui proses identifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat pedesaan; (2) perlu merumuskan paradigma baru pembangunan dengan mengutamakan pembangunan industri pedesaan yang mampu mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan pada masyarakat pedesaan; dan (3) peningkatan kualitas SDM melalui jalur pendidikan nonformal perlu mendapat prioritas agar masyarakat pedesaan memiliki *life skill* yang mantap.

Studi yang dilakukan oleh Richard (1997) menunjukan kegoyahan keluarga bersumber dari uang. Pertengkaran suam istri karena uang cukup banyak terjadi, khususnya pada keluarga dengan tingkat ekonomi di bawah, masalah tersebut bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga. Perselisihan karena uang bisa dibagi menjadi dua golongan berdasarkan penyebabnya, yaitu karena kurangnya jumlah dana dan tidak ada keterbukaan di antara suami istri. Masalah kekurangan uang banyak terjadi di kalangan ekonomi menengah ke bawah, sedangkan ketidakketerbukaan sering muncul di keluarga kelompok ekonomi atas. Oleh karena itu, menurut Sutrisno (1997), kesejahteraan keluarga akan tercapai apabila pasangan dapat menata keuangan dengan baik, dalam arti membeli atau membelanjakan sesuatu kebutuhan. Studi yang dilakukan oleh Soedjatmoko (2003) menemukan bahwa kesejahteraan itu dapat dicapai apabila manusia memiliki hal-hal yang bersifat material seperti alat transaksi (uang), alat-alat untuk produksi seperti traktor, dan hal-hal yang bersifat nonmaterial, misalnya prestise sosial, pengetahuan, dan pendidikan.

Idiom-idiom tentang kesejahteraan dituangkan juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, konsep yang ada sebelumnya adalah kemiskinan. Walaupun demikian, kedua konsep tersebut berbasis pada pemikiran yang sama, yaitu upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga. Miskin atau tidak sejahtera dalam pandangan sosial sangat ditentukan oleh posisi dalam masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat pemenuhan

kebutuhan hidup keluarga. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga, BKKBN (1998) mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan menggunakan 23 indikator, yaitu sebagai berikut.

Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti: (1) melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga; (2) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; (3) seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian; (4) bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah; dan (5) bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin KB, dibawa ke sarana kesehatan.

Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah terpenuhi kebutuhan dasar (1 s/d 5), tetapi kebutuhan sosial psikologi belum terpenuhi, yaitu: (6) anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur; (7) paling kurang seminggu sekali keluarga menyediakan daging/telur/ikan; (8) seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru per tahun; (9) luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni rumah; (10) seluruh anggota keluarga untuk tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat; (11) paling kurang satu anggota keluarga usia 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap; (12) seluruh anggota keluarga yang berusia 10–60 tahun bisa baca tulis huruf latin; (13) seluruh anak berusia 5–15 tahun bersekolah pada saat ini; dan (14) bila anak yang masih hidup dua atau lebih, keluarga pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan nomor 1 s/d 14, tetapi kebutuhan pengembangannya belum sepenuhnya terpenuhi, antara lain: (15) mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama; (16) sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarganya; (17) biasanya makan bersama paling sedikit sekali sehari dan kesempatan itu dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antaranggota keluarga; (18) ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya; (19) mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1 s/d 6 bulan; dan (21) anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.

Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan fisik, sosial, psikologi, dan pengembangannya (1 s/d 21), tetapi kepedulian sosial belum terpenuhi, yaitu: (22) secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk material; dan (23) kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, instansi, dan masyarakat.

Keluarga Sejahtera III plus, yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan fisik, sosial, psikologi, dan pengembangannya, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi (1 s/d 23). Indikator sejahtera dan tidak sejahtera yang dirumuskan pemerintah bersifat makro, berlaku seragam secara nasional. Kemudian konsep ini secara nyata mengabaikan atau tidak memperhitungkan kondisi sosial budaya yang ada. Berpedoman pada indikator tersebut, pemerintah dengan mudah menemukan siapa yang disebut miskin dan siapa yang disebut tidak miskin.

Menurut Watkins (1915), ada empat faktor yang menjadi konsep dasar dalam membicarakan standar dan tingkat kehidupan, antara lain: (1) tingkat konsumsi; (2) standar konsumsi; (3) tingkat kehidupan; dan (4) standar kehidupan. Standar dan tingkat kehidupan ditentukan oleh sejauhmana masyarakat Bogor mengonsumsi beras sebagai makanan utama, mendesak dan harus diusahakan sesuai kondisi geografis. Tidak bisa digeneralisir antara standar konsumsi dan tingkat konsumsi satu daerah dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, menurut penulis kesejahteraan ditafsirkan menurut persepsi *local community*.

Persepsi masyarakat yang dimaksud adalah sebuah pendekatan dengan menggunakan wawancara langsung pada responden. Untuk mengetahui ungkapan-ungkapan verbal berdasarkan interpretasi subjektif, diharapkan melahirkan definisi sosial tentang kesejahteraan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana mempelajari definisi kesejahteraan ini, tentunya menyangkut pertanyaan-pertanyaan mendasar yang dikemukakan ketika dilakukan wawancara dengan tetap berpijak pada pemahaman interpretasi subjektif. Persepsi masyarakat dapat dipahami sebagai suatu deskripsi interpretatif yang sifatnya sangat subjektif. Interpretatif subjektif tersebut bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi atas kondisi yang memang

mereka rasakan, berbeda dengan penafsiran secara kelompok maupun institusi.

Untuk memahami persepsi tentang kesejahteraan, perlu dibangun sebuah paradigma. Untuk kepentingan ini, penulis mencoba menjelaskan konsep kesejahteraan dalam sebuah paradigma yang menurut Ritzer (1980) adalah 'paradigma fakta sosial'. Paradigma ini mengarahkan "studi kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan sosiologi", seperti yang disajikan oleh Emile Durkheim yaitu "kenyataan kehidupan keluarga justru menjadi fokus studi utama yang berbeda dengan orang lain". Untuk memahami fakta sosial seperti itu, diperlukan pemahaman kondisi objektif atau penyusunan data riil di luar pemikiran atau prasangka manusia atau peneliti.

Arti penting pernyataan Durkheim terletak pada usahanya untuk menerangkan bahwa fakta kehidupan keluarga yang disebut sejahtera tidak dapat dipelajari melalui konstruksi pemikiran orang lain. Fakta hidup keluarga harus diteliti di dalam dunia empiris keluarga itu sendiri, sehingga metode yang digunakan adalah angket dan wawancara. Konsep dasarnya menyangkut kondisi objektif dengan asumsinya bahwa dengan memahami kondisi riil keluarga, perumusan konsep kesejahteraan keluarga menjadi lebih tepat sesuai persepsi masyarakat. Twikora *et al. dalam* Sumarti 1999) mengatakan persepsi merupakan hasil pengalaman sekelompok manusia dalam hubungannya dengan objek atau peristiwa sosial yang diamati. Persepsi tentang kesejahteraan hidup manusia terbangun melalui pengalaman dari berbagai macam proses dalam usaha manusia menjalin hubungan dengan lingkungan mereka.

C. Studi Tentang Kepuasan

Pemenuhan berbagai indikator kesejahteran dapat menimbulkan puas atau tidak puas terhadap aset dan akses sumber daya yang ada, baik internal maupun eksternal. Konsep kepuasan itu sendiri dianalisis dari berbagai sudut pandangan masing-masing ahli, ada yang memandangnya dari aspek psikologi, biologi, dan ekonomi.

Studi yang dilakukan oleh Perlmutter dan Hall (1992), Belsky dan Rovine dalam Smolak 1993 menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan mencapai tingkat tinggi pada awal perkawinan dan menurun setelah anak pertama lahir. Hackel dan Ruble (1992) mengatakan penurunan ini justru dialami oleh istri. Kondisi ini terjadi karena istri merupakan pemeran utama dalam proses kelahiran dan pengasuhan anak yang membuatnya harus mencurahkan perhatian secara penuh bagi anak, sehingga kesempatan untuk menjadi diri sendiri berkurang banyak.

Synder dalam Ratus dan Nevid 1983 mengatakan faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan perkawinan adalah cinta, kebersamaan, anak, pengertian pasangan, dan kebutuhan standar hidup. Duvall dan Miller (1985) mengatakan karakteristik kepuasan perkawinan meliputi (1) ekspresif afeksi yang terbuka satu sama lain; (2) terjalinnya rasa saling percaya; (3) tidak ada dominasi antara satu terhadap yang lain; keputusan dibuat bersama; (4) komunikasi yang bebas dan terbuka antara pasangan; (5) hubungan seks yang saling terbuka antara pasangan; (6) melakukan kegiatan bersama dalam hal aktivitas di luar rumah; (7) tempat tinggal relatif stabil; dan (8) penghasilan yang memadai.

Studi yang dilakukan oleh Ang (2003) menunjukkan bahwa krisis perkawinan pada pasangan paruh baya adalah mengatasi menopause dan ketidakseimbangan seks antara suami istri. Akibat menopause yang dialami istri, suami merasa kurang ada kepuasan dalam hubungan seks, istri berkurang gairah seksnya terhadap suami. Berkurangnya gairah seks dari istri dan ketidakpuasan suami akan menyebabkan kemerosotan kualitas hubungan antara suami dan istri, bahkan suami cenderung menyeleweng dan selingkuh.

Penelitian yang dilakukan Fisek *et al.* (1978) dan Terafe *et al.* (1993) menunjukkan bahwa keterlibatan suami dalam memakai alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, istri merasa puas. Penelitian yang dilakukan oleh Best (1998) menemukan bahwa istri merasa puas dengan suami yang disunat, puas ketika melakukan hubungan seks serta merasa puas pula dengan keadaan tersebut. Sunat dapat menurunkan atau mencegah risiko terkena infeksi HIV/AIDS karena sunat merupakan masalah kesehatan pada laki-laki yang telah aktif melakukan seksual.

Studi yang dilakukan oleh Ferree (1976) menunjukkan bahwa wanita yang bekerja memiliki tingkat kepuasan hidup sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja meski ada beberapa faktor lain yang menentukan. Penelitian yang dilakukan oleh Gohong (1993) menemukan rumah tangga petani memperoleh kepuasan yang cukup besar atau tinggi adalah (1) petani memiliki rumah sendiri; (2) angka buta huruf rendah; (3) pendidikan anak cukup baik; (4) luas lantai rumah tidak kurang dari 50 m²; dan (5) bahan dinding rumah bukan dari bambu. Sementara itu, rumah tangga petani yang menunjukan kepuasan yang rendah atau kecil adalah (1) tidak memiliki radio atau televisi; (2) kesehatan keluarga rendah; (3) tidak memiliki kakus; (4) bahan bakar untuk penerangan bukan listrik; dan (5) bahan bakar untuk memasak bukan minyak tanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Johan (2002) menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara pemenuhan harapan penggajian dengan kepuasan kerja karyawan. Artinya, pihak universitas harus mempelajari lebih lanjut berapa besar biaya yang dibutuhkan oleh karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Seseorang karyawan akan memiliki kepuasan dalam bekerja apabila harapannya terpenuhi. Salah satu harapan yang diinginkan oleh karyawan adalah mendapatkan penghasilan, setidaknya dapat mencukupi kebutuhan hidup minimalnya, bahkan berlebihan. Karyawan tersebut akan memiliki semangat tinggi yang akan tampak melalui kinerjanya dan melalui kreativitas, serta produktivitas kerjanya.

Studi yang dilakukan oleh Chruden dan Sherman dalam Johan 1972 tentang Kepuasan Kerja Karyawan mengatakan faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan kerja, adalah: (1) isi pekerjaan; (2) supervisi; (3) organisasi dan manajemen; (4) kesempatan untuk maju; (5) gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya seperti insentif; (6) rekan kerja; dan (7) kondisi pekerjaan. Adapun salah satu cara untuk menentukan apakah pekerja puas dengan pekerjaannya ialah dengan membandingkan pekerjaan mereka dengan beberapa pekerjaan ideal tertentu. Kepuasan kerja dapat dirumuskan sebagai respons umum pekerja berupa perilaku yang ditampilkan oleh karyawan sebagai hasil

persepsi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seorang karyawan yang masuk dan bergabung dalam suatu institusi mempunyai seperangkat keinginan, kebutuhan, hasrat, dan pengalaman masa lalu yang menyatu dan membentuk suatu harapan yang diharapkan dapat dipenuhi di tempatnya bekerja. Teori Kesenjangan mengatakan kepuasan kerja akan diperoleh apabila ada kesesuaian antara harapan dengan kenyataan yang ditemui dan didapatkannya dari tempatnya bekerja.

Untuk terfokusnya kajian ini, penulis menjelaskan dalam sebuah paradigma yang disebut oleh Ritzer (1980) adalah "paradigma perilaku sosial". Dengan pendekatan ekonomi yang ditafsirkan terbatas pada upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam suatu proses produksi untuk tujuan ekonomis yang indikatornya ditakar melalui ukuran-ukuran ekonomi.

Studi kepuasan dengan paradigma perilaku sosial dengan pendekatan ekonomi seperti yang disajikan oleh Peden dan Glahe (1986) memfokuskan perhatiannya pada hubungan antara material dan finansial yang dimiliki dengan kepuasan keluarga. Dengan tercapainya kepuasan keluarga sebagai variabel dependen adalah konsekuensi dari material dan finansial yang dimiliki sebagai variabel independen. Ini berarti pendekatan ekonomi keluarga menerangkan kepuasan yang ada melalui materi yang dimiliki keluarga, sehingga metode yang dipakai adalah angket, wawancara, dan observasi. Konsep dasarnya adalah material dan finansial. Asumsinya adalah apabila keluarga memiliki materi dan finansial, maka kepuasan akan tercapai. Ada tiga prinsip dasar yang menurut hemat penulis dalam membicarakan masalah kepuasan, yaitu: (1) hasrat dan keinginan yang dicita-citakan, (2) kenyataan yang dihadapi, dan (3) alternatif perolehannya.

Misalnya menurut Sajogyo (1996), pengeluaran rumah tangga daerah pedesaan sebesar 240–320 kg nilai tukar beras orang per tahun dan pengeluaran rumah tangga daerah perkotaan sebesar 360–480 kg nilai tukar beras orang per tahun merupakan patokan ideal bagi kedua komunitas tersebut. Ketika keluarga mencapai patokan ideal tersebut atau lebih dari itu (alternatifnya), keluarga merasa puas. Sebaliknya, jika tidak mencapainya, keluarga akan mengalami frustrasi karena kebutuhan

pangan tidak terpenuhi untuk satu tahun. Kebutuhan 240–320 kg nilai tukar beras orang per tahun untuk daerah pedesaan dan 360–480 kg nilai tukar beras orang per tahun untuk daerah perkotaan adalah kebutuhan yang paling mendesak, harus diusahakan oleh keluarga baik di pedesaan maupun di perkotaan yang merupakan standar konsumsi atau standar kehidupan kedua komunitas tersebut.

Dengan demikian, kepuasan keluarga dapat didefinisikan sebagai "suatu keadaan pada saat keluarga merasa lega, puas, dan senang karena telah memenuhi keinginan atau hasrat yang dicita-citakan. Keinginan dan hasrat tersebut menyangkut kebutuhan finansial dan material. Kebutuhan finansial yaitu uang, sedangkan kebutuhan material mencakup makanan dan lahan usaha."

D. Studi Tentang Kebahagiaan

Berbeda dengan kebahagiaan yang belum tentu dirasakan sama bagi semua keluarga. Sebuah keluarga walaupun memiliki finansial dan material belum tentu merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, sebuah keluarga yang hidupnya pas-pasan mungkin merasa lebih bahagia dari pada keluarga tadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Olson (2002) tentang faktor yang membuat bahagia atau tidak bahagia adalah (1) pernikahan tanpa vitalitas. Pasangan ini selalu hidup berantakan atau bercerai karena menikah pada usia terlalu muda, penghasilannya rendah, dan berasal dari keluarga yang berantakan; (2) pasangan finansial. Karier dan uang menjadi satu-satunya penghiburan. Banyak di antara mereka yang mempertimbangkan untuk bercerai; (3) pasangan berkonflik. Pasangan ini tidak puas dalam banyak aspek, yaitu dalam aspek seks, kepribadian pasangan, dan komunikasi masalah yang dihadapi. Banyak yang mencari kepuasan di luar rumah, seperti menekuni hobi secara berlebihan atau mencari pelarian dalam ritual kegamaan; (4) pasangan tradisional. Pasangan ini menemukan kepuasan dalam banyak aspek, tetapi memiliki masalah serius dalam aspek komunikasi dan seksual. Kebahagiaan pasangan ini dari aspek religius dan hubungan yang baik, serta kedekatan dengan kerabat mereka. Rumah

tangga mereka relatif stabil; (5) pasangan seimbang. Pasangan ini merasa cukup dalam banyak aspek dengan kekuatan utama pada kemampuan komunikasi, resolusi konflik yang mereka hadapi, dan kelemahan pada aspek finansial. Memiliki kesamaan yang tinggi dalam aspek aktivitas waktu luang, pengasuhan anak dan seksualitas, serta lebih mementingkan keluarga batih; (6) pasangan harmonis. Biasanya puas dengan pasangannya masing-masing, ekspresi kasih sayang sesama, ekspresi yang ditujukan pasangan, serta kehidupan seksual. Mereka lebih baik hidup berdua daripada kehadiran anak yang dianggap mengganggu; dan (7) keluarga penuh vitalitas. Pasangan ini biasanya menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi pada semua aspek, menjalin hubungan baik, saling melengkapi kepribadian, mampu menjalin komunikasi dengan baik, mencari solusi dari konflik yang mereka hadapi, dan puas secara seksual.

Hutabarat (2003) mengatakan konsep keluarga bahagia sebenarnya tergantung dari anggota keluarga sendiri karena kebahagiaan itu sendiri bersifat subjektif, masing-masing insan berbeda dalam memandang dan merasakan kebahagiaan. Untuk menciptakan suasana yang diinginkan dalam keluarga, pada prinsipnya adalah saling melengkapi. Kekurangan istri dilengkapi oleh kelebihan suami dan dari masing-masing anggota keluarga, saling berbagi suka maupun duka, berbagi pengalaman, dan saling membimbing satu sama lain. Dengan cara demikian, keluarga itu akan melihat suatu persoalan dengan cara berpikir yang sama, sehingga tidak akan terjadi perbedaan yang membuat antaranggota keluarga bentrok. Kisah *Hamba Lelaki* mengemukakan kebahagiaan suami dan istri dapat dicapai apabila mereka lebih memahami setiap tindakan yang mereka lakukan (Anonymous 2003).

Dalam tulisan yang berjudul *Bahagia dan Duka* (2003) dijelaskan bahwa pada hakikatnya kebahagiaan dan kedukaan hanyalah ada dalam persepsi kita masing-masing. Jadi, orang yang memperoleh, mendapatkan kelebihan materi, jabatan, kedudukan, dan kekuasaan belum tentu dikatakan bahagia. Sebaliknya, orang miskin, mencuri, korupsi, dan menumpuk harta haram dikatakan malapetaka bagi dirinya? Semua ini tergantung pada pribadi yang bersangkutan untuk mendefinisikan tentang apa itu kebahagiaan dan kedukaan sesuai persepsinya.

Sanjaya (2002) mengatakan setiap orang mempunyai definisi dan pendapat tentang kebahagiaan berbeda-beda. Ia membagi tiga tipe manusia dalam mendefinisikan kebahagiaan. **Tipe I** adalah orang yang mengatakan dirinya akan merasa bahagia jika apa yang telah lama diinginkan dapat tercapai. Biasanya orang tipe I ini mengapresiasikan kebahagiaan dengan banyaknya benda-benda material yang dapat dimiliki. **Tipe II** adalah mereka yang merasa bahagia jika mereka dapat meraih kesuksesan. Kesuksesan yang diperolehnya bisa berupa sukses dalam studi maupun karier. **Tipe III** adalah manusia yang merasa bahagia jika ia dapat bersama dengan seseorang yang ia cintai atau dengan kata lain telah menemukan cinta sejatinya dan membentuk keluarga yang bahagia.

Hasil penelitian Freudiger (1983) tentang ukuran kebahagian hidup wanita yang sudah menikah ditinjau dari tiga kategori, yaitu wanita bekerja, wanita pernah bekerja, dan wanita yang belum pernah bekerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagi para istri dan ibu bekerja kebahagiaan perkawinannya adalah tetap menjadi hal yang utama dibandingkan dengan kepuasan kerja. Studi lain masih menyangkut kebahagiaan kehidupan para ibu bekerja yang dilakukan oleh Walters dan McKenry (1985). Studi tersebut menunjukkan bahwa mereka cenderung merasa bahagia selama para ibu bekerja dapat mengintegrasikan kehidupan keluarga dan kehidupan kerja secara harmonis. Jadi, adanya konflik peran yang dialami oleh ibu bekerja akan menghambat kepuasan dalam hidupnya. Perasaan bersalah (meninggalkan perannya sementara waktu sebagai ibu rumah tangga) yang tersimpan membuat sang ibu tersebut tidak dapat menikmati perannya dalam dunia kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Sismayanti (1995) menunjukkan bahwa meningkatnya alokasi pribadi, waktu luang, dan waktu rumah tangga akan meningkatkan skor kebahagiaan perkawinan maupun aspekaspeknya. Terdapat perbedaan kebahagiaan perkawinan antara ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja. Ibu yang bekerja sebagai buruh relatif kurang bahagia dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja, sedangkan ibu yang bekerja di bidang jasa relatif lebih bahagia dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Studi yang dilakukan oleh Scanzoni (1980) mengungkapkan perkawinan dual-career yang dikatakan berhasil jika di

antara kedua belah pihak (suami istri) saling memperlakukan pasangannya sebagai partner yang setara. Pada umumnya, mereka tidak hanya akan berbagi dalam hal income, tetapi tidak segan-segan berbagi dalam urusan rumah tangga dan mengurus anak. Studi yang dilakukan oleh Rini (2002) menunjukkan bahwa manfaat bekerja bagi wanita adalah (1) mendukung ekonomi rumah tangga. Dengan bekerjanya sang ibu, berarti sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan, dan hiburan, serta fasilitas kesehatan; dan (2) meningkatkan harga diri dan pemantapan identitas. Bekerja, memungkinkan seorang wanita mengekspresikan dirinya sendiri dengan cara yang kreatif dan produktif. Untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kebanggaan terhadap diri sendiri, terutama jika prestasinya tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Melalui bekerja, wanita berusaha menemukan arti dan identitas dirinya dan pencapaian tersebut mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.

Studi yang dilakukan Akatiga (1999) terhadap krisis perempuan miskin di perkotaan menunjukkan bahwa istri merasa bahagia jika telah memberi makan pada suami dan anak, sementara mereka akan makan terakhir. Krisis perempuan miskin di perkotaan adalah perempuan yang tinggal pada keluarga dengan pendapatan tidak tetap berkisar Rp5.000 sampai dengan Rp8.000 per hari di sektor marginal, seperti mencuci, menyeterika, dan menjaga anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tolstoy (1859) menunjukkan bahwa kebahagiaan keluarga dipengaruhi oleh beberapa ekspresif, antara lain: bermuka ceria, selalu senyum, suka memuji satu sama lain secara tulus, mengidealkan suami yang lebih tua, tinggi, tegap, sehat, kuat, selalu merespon apa yang diucapkan, bersemangat, dan penuh perhatian. Nik (1991) mengemukakan kebahagiaan keluarga dapat diraih apabila pasangan suami istri menjalin hubungan yang mesra, nostalgia kembali kenangan masa lalu, selalu berkomunikasi, meluangkan waktu untuk bergurau dan bersantai bersama, berdandan, serta kepuasan seks antara suami dan istri. Ibrahim (2003) mengatakan kebahagiaan dan kejayaan

itu tidak akan memberi makna apa-apa, jika kita tidak memiliki seorang wanita atau laki-laki yang kita cintai dan sayangi.

Dalam sebuah tulisan yang berjudul *Meniti Kehidupan* (2002), tertulis bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak akan menikmati kehidupan dan mencapai kebahagiaan. Poerwadarminta (1976) mendefinisikan kebahagiaan sebagai suatu keadaan atau perasaan senang, tenteram, dan lepas dari segala yang menyusahkan, baik lahiriah maupun batiniah. Studi yang dilakukan oleh Abbash (2000) menunjukkan bahwa kebahagiaan suami istri dapat dicapai apabila istri diberikan haknya sebagai istri dan bukan sebagai budak suruhan atau babu. Istri bukan juga sebagai patung semata-mata untuk memuaskan nafsu, bersifat terus terang kepada istri, dan jangan terlalu mengikuti kehendak istri.

Studi yang dilakukan oleh Daulay (2003) bahwa kebahagiaan dapat diraih oleh setiap orang apabila orang mematuhi adat budayanya. Dalam studi ini, Daulay membicarakan masalah adat budaya Batak yang disebut "Dalihan Na Tolu" dapat menembus agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Adat budaya Batak ini memiliki tujuh nilai inti, yaitu hagabeon yang bermakna harapan panjang, bercucu banyak, dan baik-baik. Nilai hamoraan (kehormatan) terletak pada keseimbangan aspek spiritual yang ada pada diri seseorang. Nilai uhum (law) mutlak untuk ditegakkan dan pengakuannya yang tercermin pada kesungguhan penerapannya dalam menegakkan keadilan. Nilai suatu keadilan itu ditentukan dari ketaatan pada upari (habit), padan (janji). Pengayoman (perlindungan) wajib diberikan kepada lingkungan masyarakat. Marsisarian artinya menghargai dan saling membantu. Menurut Madjid (2002), kebahagiaan itu diraih apabila setiap orang menaati firman Allah dan sunah Rasul.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, mengatakan "norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin". Nilai-nilai agama yang membuat diri pribadi, keluarga, atau masyarakat agar menciptakan kehidupan yang bahagia antara suami dan istri, misalnya

dapat dilihat pada pandangan masing-masing agama samawi di bawah ini.

1. Ajaran Islam

Dalam Surah Ar-Ruum 21, yang artinya "dan di antara kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda berpikir". Jadi, arti surah Ar-Ruum Ayat 21 tersebut secara substantif mengungkapkan kebahagiaan suami istri dalam berkeluarga akan tercipta apabila ada ketenangan (sakinah), saling mencintai sesama antara suami istri, saling menyayangi suami istri, dan saling melindungi. Maksudnya suami bisa melindungi istri dan anak-anak, demikian pula sebaliknya. Jika suami dan istri telah menegakkan nilai-nilai tersebut, cita-cita untuk menuju keluarga bahagia dan sakinah akan terwujud. Jika keluarga dibangun dengan baik, tentunya akan dapat menanamkan benih kehidupan keluarga yang penuh kejujuran, kebersamaan, keterbukaan, saling pengertian, saling melengkapi, saling membutuhkan, dan dapat dipastikan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Untuk menciptakan kebahagiaan suami dan istri dalam berkeluarga, beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagaimana dimuat dalam Buletin An-Nur (1999) adalah sebagai berikut.

Aspek Pembinaan Suami dan Istri. Dalam Surah An-Nisa Ayat 34 dijelaskan bahwa stabilitas rumah tangga merupakan tangung jawab suami dan istri. Seorang bapak bertugas untuk menjadi pemimpin, pembina, dan pengendali roda rumah tangga. "Kaum laki-laki pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) telah mencari sebagian dari harta mereka, sedangkan istri atau ibu memiliki tugas merawat rumah, mendidik anak, menjaga segala amanat rumah tangga, sehingga ibu atau istri boleh dikatakan tempat atau figur pendidik dalam rumah tangga". Jika suami dan istri mematuhi nilai-nilai agama tersebut, kepatuhan itu merupakan modal yang paling besar untuk membentuk kebahagiaan keluarga.

Aspek Keimanan Keluarga. Pilar utama penyangga rumah tangga adalah agama dan moral. Rumah tangga hendaknya bersih dari segala bentuk kesyirikan, tradisi jahilliyah, serta selalu marak dengan aktivitas ibadah, seperti salat, puasa, dan pengajian. Biasakan semua aktivitas ini karena kebiasaan seperti itu dapat mengusir setan. Rasulullah Saw. bersabda, yang artinya "Janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah".

Aspek Ilmu Agama Keluarga. Mendidik dan mengajarkan ilmuilmu agama kepada keluarga hukumnya wajib. Firman Allah yang artinya "wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu". Imam At-Thabari mengatakan ayat tersebut mewajibkan kepada kita agar mengajarkan anak-anak dan keluarga kita tentang agama dan kebaikan, serta apa-apa yang dipentingkan dalam persoalan adab dan etika. Dalam mengajarkan ilmu agama atau pun ilmu umum, tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana, seperti guru, perpustakaan mini di rumah, upah pengajar, serta alat-alat akses informasi seperti TV, radio, dan *tape*.

Aspek Ibadah dan Moral. Aspek ibadah yang terpenting adalah salat, baik fardu atau pun sunah hendaknya membiasakan di Masjid dan perempuan dianjurkan salat. Salat sunah bagi semuanya lebih utama dilakukan di rumah berdasarkan hadis Rasulullah, yang artinya "sebaikbaiknya salat laki-laki adalah di rumahnya, kecuali salat fardu". Adapun aspek moral, hendaknya semua anggota keluarga menghiasi pribadi masing-masing dengan akhlakul karimah dan adab yang mulia, seperti makan dengan tangan kanan, masuk rumah orang dengan izin, menghargai tetangga, serta adab terpuji lainnya. Sedapat mungkin menjauhkan seluruh akhlak berbohong, menipu, dan ingkar janji.

Aspek Sosial dan Lingkungan. Agar kehidupan sosial keluarga memiliki hubungan harmonis, sebaiknya anggota keluarga diberi kesempatan untuk mendiskusikan setiap masalah keluarga secara transparan dan terbuka, sehingga seluruh masalah bisa selesai sebaik mungkin. Suami dan istri sebaiknya tidak boleh menampilkan konflik dihadapan anak-anak

dan hendaknya diusahakan semaksimal mungkin merahasiakan konflik tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar anak-anak tidak terbebani, apalagi konflik tersebut sampai mendatangkan perceraian, sudah tentu akan mengganggu kestabilan dan keharmonisan dalam keluarga. Dalam keluarga perlu dijaga agar tidak dimasuki orang-orang jahat dan anggota keluarga tidak terpengaruh dengan pengaruh orang-orang jahat tersebut.

2. Ajaran Kristen

Dalam agama Kristen, seperti yang tersurat dalam Injil Perjanjian Baru (Efesus 5:22–23) mengatakan keluarga bahagia adalah keluarga yang berada di dalam rencana dan pimpinan Tuhan. Tuhan menetapkan bahwa suami dan ayah merupakan kepala rumah tangga. Allah telah mempercayakan kepada manusia pada saat penciptaan, yaitu syarat bahwa "suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat".

Namun sayang, kini banyak ayah atau bapak yang meninggalkan tanggung jawab mereka. Ini bukanlah kehendak Allah. Allah mempercayakan pada suami atau bapak untuk membina dan mengatur rumah tangganya dengan kasih dan penuh pengertian. Sifat mementingkan diri tidak boleh ada, harus diganti dengan pelayanan dan pengorbanan yang sungguh. Kristus adalah teladan yang paling tepat. Ia memimpin jemaat-Nya menuju hidup yang penuh kelimpahan dan keberhasilan. Sebagai suami dan ayah, hendaklah kepala keluarga membimbing istri dan seisi keluarga ke jalan damai, penuh berkat, dan penuh pengertian. Para istri hendaklah selalu menjadi pendorong bagi suaminya dalam memegang tampuk pimpinan keluarga. Scott (1998) mengemukakan ketika Anda memeluk ajaran Yesus Kristus dan rencana kebahagian-Nya, Anda dibaptiskan dan ditetapkan sebagai anggota dari kerajaan-Nya di bumi ini. Anda mengambil diri Anda ke atas nama-Nya. Anda membuat komitmen untuk patuh pada ajaran-Nya, untuk membuat perubahan apa saja di dalam kehidupan Anda yang dituntutkan oleh ajaran-ajaran tersebut. Dalam memperoleh segenap suka cita, Anda perlu menerima tata cara bait suci. Pola itu akan memberi Anda kebahagiaan terbesar di bumi ini dan sepanjang kekekalan. Dengan demikian, kebahagiaan itu tercipta apabila Anda menyingkirkan semua tradisi atau adat kebiasan yang memposisikan suami untuk bertindak otoriter, kekerasan, dan hal yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus.

3. Ajaran Hindu Buddha

Dalam ajaran agama Hindu Buddha, Sang Buddha *dalam* Tjahjadi 1989), menguraikan empat macam kebahagian bagi manusia, yang terdiri dari: (1) *Athi sukha*, yaitu kebahagiaan karena memiliki kesehatan, kekayaan, umur panjang, kecantikan, dan kegembiraan; (2) *Bhoga sukha*, yaitu kebahagiaan karena menggunakan milik di atas; (3) *Anama sukha*, yaitu kebahagiaan karena tiada mempunyai hutang; dan (4) *Anavajja sukha*, yaitu kebahagiaan karena jauh dari kehinaan.

Selanjutnya dijelaskan oleh Sang Guru Buddha, Gotama dalam Dhammakaro 2000) bahwa kebahagiaan itu pada hakikatnya adalah Nibbana. Nibbana diartikan sebagai padamnya nafsu keinginan, pudarnya benda-benda yang tercipta, terbebas dari semua noda dan kekotoran batin, serta terhentinya kebencian (dosa) dan kebodohan batin (lobha). Inilah Nibbana yang dijadikan gambaran tentang bahagia. Dengan demikian, kebahagiaan itu bukan karena memiliki, apalagi melekati, tetapi kita harus belajar melepaskan diri dari keterikatan dan nafsu keinginan. Pada dasarnya, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat dimiliki, hanya kebodohanlah yang berkeinginan untuk memiliki semua itu.

4. Ajaran Kong-Hu-Cu

Lie (2003) menjelaskan apa yang disebut dalam ajaran Kong-Hu-Cu sebagai Xiaoyao dan sering disebut Xiaoyaopai. Arti menurut kamus, Xiaoyao berarti gembira dan Pai adalah kelompok. Jadi Xiaoyaopai berarti kaum yang gembira ria. Gembira ria maksudnya dalam arti yang positif. Untuk mencapai taraf Xiaoyao, perlu menumbuhkan beberapa sifat positif dalam diri kita, misalnya optimis, rendah hati, lapang dada, cinta kasih, mengampuni dan memaafkan, serta tidak egois. Untuk bisa mendapat sifat tersebut, perlu introspeksi diri masing-masing. Hal ini bisa dicapai

bila kita rajin berlatih dan memperluas wawasan pengertian kita. Harus rajin berdoa, memohon bimbingan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa (*Shen*), serta mampu bersyukur atas apa yang ada saat ini. Dengan selalu bersyukur, itu akan sangat membantu meringankan beban kita. Jadi, yang dimaksud dengan *Xiaoyao* adalah kebahagiaan yang sejalan dengan *Taol* kebenaran, bukan kegembiraan dan pemuasan nafsu sesaat atau pun kegembiraan atas kesusahan orang lain.

Setelah memahami sejumlah pengertian sebelumnya, penulis mencoba menjelaskan konsep kebahagiaan dalam sebuah paradigma, yang menurut Ritzer (1980) adalah "paradigma definisi sosial". Studi kebahagiaan dengan paradigma definisi sosial menuntut pendekatan psikologi, seperti yang disajikan oleh Weber "interpretasi subjektif" yang mengandung makna tersendiri bagi keluarga, justru menjadi fokus utama dalam paradigma definisi sosial. Konsep dasarnya adalah definisi sosial. Asumsinya adalah keluarga hidup dalam lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan fisik yang berbeda, sehingga berpotensi untuk mendefinisikan makna tersendiri.

Dari uraian di atas, kebahagiaan keluarga dapat dipahami sebagai suatu deskripsi interpretatif yang sifatnya sangat subjektif. Interpretatif subjektif tersebut bukan sekedar ekspresi yang dibuat-buat, tetapi muncul dengan penuh kesadaran. Dalam upaya menjelaskan kebahagiaan, menafsirkan atau memberi makna lebih akurat, hal yang harus diperhatikan adalah "definisi subjektif". Artinya, sedapat mungkin keluarga harus menjauhkan kebenaran konsep kebahagiaan keluarga lain dengan konsep kebahagiaan menurut keluarga yang bersangkutan. Menurut Weber, ada satu ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian tentang kebahagiaan menurut definisi yang dibangun keluarga, antara lain definisi kebahagiaan yang mengandung "makna subjektif". Persoalan yang muncul adalah bagaimana mempelajari definisi kebahagiaan yang mengandung makna subjektif tersebut? Tentunya menyangkut metode penelitian. Weber menganjurkan melalui penafsiran dan pemahaman (interpretative understanding), atau menurut terminologi Weber sendiri dengan vestehen. Dengan demikian, peneliti mencoba menginterpretasikan definisi kebahagiaan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu harus memahami motif dan tindakan keluarga tersebut. Muncul pula masalah bagaimana cara memahami motif keluarga itu? Dalam hal ini, Weber menyarankan agar peneliti menyelami pengalaman keluarga. Oleh karena itu, peneliti berusaha membaur diri sebagai bagian dari keluarga serta mencoba memahami sesuatu seperti yang dipahami oleh keluarga, sehingga metode yang digunakan adalah observasi.

Berdasarkan perspektif tersebut, kebahagiaan dapat didefinisikan sebagai "suatu keadaan atau perasaan senang, tenteram, aman, dan lepas dari sesuatu yang menyusahkan. Kondisi atau perasaan tersebut belum tentu dipengaruhi oleh material dan finansial, tetapi antara material, finansial, dan perasaan berjalan secara seimbang. Artinya, pada saat keluarga memperoleh material dan finansial dengan penuh kesenangan. Perasaan pun demikian adanya, tetapi sebaliknya, apabila keluarga memperoleh material dan finansial tetapi perasaan tidak nyaman, keadaan tersebut bukanlah bahagia". Dengan demikian, kebahagiaan itu tergantung pada perasaan keluarga masing-masing. Kebahagiaan suatu pasangan suami dan istri didasarkan pada kehadiran anak, misalnya belum tentu sesuai dengan pasangan suami istri yang lain. Boleh jadi pasangan kedua tadi mengatakan bahwa kami bahagia karena hidup berduaan saja tanpa ada gangguan pihak ketiga atau anak. Perbedaan dan persamaan ketiga konsep yang dikaji ke dalam ketiga paradigma tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Perbedaan atau persamaan kesejahteraan, kepuasan, dan kebahagiaan

Kebahagiaan	 Pendekatan: psikologi. Paradigma: definisi sosial. Fokus Studi: interpretasi subjektif. Konsep Dasar: definisi sosial. Asumsi Dasar: keluarga hidup di lingkungan sosial, ekonomi dan budaya, serta fisik yang berbeda, berpotensi untuk mendefinisikan makna kebahagiaan tersebut secara berbeda. Metode: observasi. Definisi: kebahagiaan adalah suatu keadaan atau perasaan senang, tenteram, aman, dan lepas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Perasaan tesebut belum tentu atau relatif dipengaruhi oleh faktor material dan finansial, tetapi antara material, finansial, dan perasaan seyogianya tidak berjalan seimbang. 	Idem
Kepuasan	 Pendekatan: ekonomi. Paradigma: perilaku sosial. Fokus Studi: hasrat dan keinginan yang diharapkan atau alternatifnya. Konsep Dasar: kepuasan materi atau finansial. Asumsi Dasar: jika memiliki material dan finansial akan merasa puas. Metode: angket/interview/observasi. Definisi: kepuasan adalah suatu keadaan pada saat keluarga merasa lega, puas, dan senang karena memenuhi keinginan atau hasrat yang dicita-citakan. Keinginan dan hasrat tersebut menyangkut finansial dan material. 	Idem
Kesejahteraan	 Pendekatan: sosiologi. Paradigma: fakta sosial. Fokus studi: kenyataaan sosial. Konsep Dasar: kondisi objektif. Asumsi Dasar: dengan memahami kon disi keluarga, perumusan welfare akan lebih tepat. Metode: angket dan wawancara. Definisi: kesejahteraan adalah usaha untuk melepaskan diri dari tekanan, berupa kesulitan, kesukaran, dan gangguan untuk mencapai suatu keadaan yang relatif tercukupi. Pada saat kondisi tersebut dapat diraih apabila keluarga memiliki dan mengakses sumber daya, baik mikro maupun makro. Seperti pekerjaan, pendapatan, konsumsi pangan, KB, pendidikan, policy regional, akses terhadap lembaga sosial, kepemilikan aset, kondisi fisiologi, dan keadaan lingkungan. 	Membahas masalah, seperti sandang, pangan, papan, uang, <i>income</i> , pekerjaan, seks, perasaan, ambisi, emosi, jasa, barang, dan benda.
Unsur	Perbedaan dalam memalami objek formal	Persamaan Membahas dalam pangan, pal memahami seks, perasa objek material dan benda.

Sumber: Data Primer

Bab **3** Middle Range Theory

Dalam ilmu keluarga juga telah berkembang sejumlah *Middle Range Theory* yang membahas masalah keluarga. Teori-teori tersebut memiliki *basic* paradigma yang berbeda-beda.

A. Teori Ekonomi Keluarga

Poulson dalam Peden dan Glahe 1986 mendefinisikan keluarga sebagai kumpulan dari individu-individu yang bertalian darah, perkawinan, atau adopsi. Transaksi di dalam keluarga terjadi dalam kerangka kerja perilaku yang menggambarkan peran setiap anggota dan menentukan interaksi anggotanya. Setiap peran jarang didefinisikan dalam pola-pola formal di dalam kontrak kesepakatan, tetapi sebagian besar aturan yang diterapkan dalam keluarga justru diambil dari adat dan tradisi di dalam keluarga dan masyarakat.

Keunikan transaksi dalam keluarga dipengaruhi oleh beberapa ciri, yaitu (1) transaksi antaranggota keluarga tidak mencakup pertukaran hak milik ekuivalen, seperti yang terjadi dalam transaksi pasar tetapi sering melibatkan transfer hak milik; (2) anggota keluarga terikat dalam transaksi saling ketergantungan yang luas; (3) anggota keluarga sebagai alat transaksi dengan institusi lain dalam masyarakat; dan (4) transaksi keluarga melibatkan rangkaian dinamika transaksi pada periode waktu yang lama. Karakteristik keluarga yang paling menonjol adalah keunikan identitas dan saling ketergantungan anggota keluarga. Keluarga dipandang analog dengan perusahaan di dalam teori ekonomi keluarga. Jika tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan, berarti tujuan keluarga adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan. Kesejahteraan keluarga tergantung pada jasa yang diberikan, seperti kasih sayang antara

anggota keluarga dan perhatian yang diberikan dari satu anggota keluarga dengan yang lainnya, misalnya perhatian terhadap yang muda dan yang tua. Sementara itu, kebahagiaan keluarga diperoleh melalui kesehatan, gizi, pendidikan, rekreasi, dan hiburan. Keluarga juga memberikan asuransi bagi anggota keluarganya seperti ketika sakit, kematian, dan yang belum bekerja. Dalam teori ekonomi keluarga, anak dipandang sebagai barang keluarga.

Oleh karena itu, pelayanan, perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak merupakan fungsi orang tua, apabila mereka telah dewasa dapat menjadi alat produksi atau sebagai pekerja. Ketika mereka ditempatkan sebagai alat produksi dan sebagai pekerja untuk memperoleh upah, diharapkan dapat menyumbangkan pendapatan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik dalam sektor industri maupun pertanian. Dalam keluarga, kasih sayang dan perhatian akan menghasilkan perilaku yang altruistis yang dapat memengaruhi transaksi antaranggota keluarga. Adanya kasih sayang dan perhatian, barang-barang keluarga akan dialokasikan kepada anggota keluarga untuk kesejahteraan anggota. Misalnya, transfer barang atau penghasilan dari orang tua kepada anakanaknya, transfer barang atau penghasilan dari anak ke orang tua, atau dari anak ke anak lainnya dalam rangka kesejahteraan keluarga. Kasih sayang dan perhatian juga memengaruhi proses produksi dalam keluarga. Jika anggota saling memperhatikan, mereka tidak mungkin akan melalaikan tanggung jawabnya. Melalaikan tanggung jawab akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan mereka sendiri dan total kesejahteraan keluarga akan menurun pula. Selain anak sebagai barang keluarga, terdapat barang kolektif dari keluarga itu sendiri, misalnya rumah dan seisinya.

B. Teori Ekologi Keluarga

Menurut Deacon dan Firebaugh (1988), lingkungan keluarga dapat diklasifikasikan menjadi lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah kondisi-kondisi di sekitar keluarga, baik dalam arti lokasi maupun kontak individu. Lingkungan mikro berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kedua lingkungan ini menjadi penyangga dalam menyerap berbagai masukan dari lingkungan makro.

Lingkungan Fisik. Lingkungan mikro berupa sebuah bangunan rumah serta halaman yang dikelilingi pagar, membatasi tempat tinggal dengan tempat tinggal orang lain, kamar, atau apartemen. Tempat tinggal keluarga dapat ditata sedemikian rupa, sehingga memenuhi berbagai kebutuhan seperti kebutuhan akan ketenangan dan keakraban, kebutuhan untuk melakukan rangsangan psikologis, mendorong kreatifitas, memahami makna suatu tempat dan konsep milik pribadi, serta kebutuhan untuk berhubungan dengan sistem lainnya.

Beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap sistem keluarga, baik faktor yang termasuk lingkungan makro maupun lingkungan mikro. Respons individu terhadap perumahan atau ruang yang tersedia, bervariasi menurut latar belakang, preferensi, dan nilai. Individu yang berasal dari keluarga biasa tinggal berdesakan dalam rumah yang sempit. Mungkin tidak merasa terganggu jika harus tinggal berdua dalam satu kamar, sebaliknya individu yang berasal dari keluarga memiliki tempat khusus untuk masing-masing individu akan merasa terganggu. Suatu ruang mungkin dirasakan sesak, sempit, atau luas sangat bergantung dari latar belakang serta pengalaman yang pernah dilalui oleh seseorang. Namun, ruangan yang terlalu padat dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Lingkungan Sosial. Lingkungan sosial mikro pada hakikatnya tidak dicirikan oleh dimensi jarak. Artinya bisa saja seorang teman yang tinggal jauh tetapi masih bisa dikatakan sebagai lingkungan sosial mikro dari keluarga. Pada prinsipnya, mempelajari hubungan keluarga dengan lingkungan fisik dan sosial yang langsung adalah sangat penting agar penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dapat lebih efektif. Lingkungan mikro baik yang berupa fisik maupun sosial merupakan faktor penyangga bagi sistem keluarga. Menurut Deacon dan Firebaugh (1988), lingkungan makro atau *larger environment* merupakan lingkungan yang ada di luar sistem keluarga dan lingkungan mikronya. Keluarga akan mempunyai efek yang kecil, bahkan tidak bisa mengontrol keadaan dari lingkungan makro. Pada hakikatnya, lingkungan makro dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (a) lingkungan yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan, yaitu sosial budaya, sistem politik, ekonomi, dan teknologi dan (b) lingkungan alam serta buatan di sekitarnya.

Sistem Kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan merupakan bagian penting dari ekosistem keluarga yang mengelilingi lingkungan mikro dan mewujudkan interaksi yang menyeluruh antarsistem untuk mencapai tujuan. Sistem kemasyarakatan ini meliputi sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Kebutuhan berbagai macam barang dan jasa biasanya dipenuhi keluarga dengan pertukaran pada sistem sosial tersebut. Hubungan antarsistem sosial dengan individu atau keluarga biasanya tidak seerat seperti di dalam lingkungan mikro.

Sosial Budaya. Budaya adalah hasil karya dari suatu masyarakat yang dapat berubah karena adanya manusia lain dan lingkungannya, hampir seluruh aspek kehidupan manusia dipengaruhi dan disentuh oleh budaya. Budaya akan memengaruhi cara manusia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai-nilai budaya memberi perasaan tanggung jawab dan merupakan kewajiban moral untuk mengikuti tingkah laku yang telah ditentukan.

Politik. Sistem politik akan berpengaruh kepada sistem keluarga melalui perangkat hukum, peraturan, perlindungan, dan jasa yang dibuat pemerintah. Berbagai fasilitas yang tersedia merupakan hasil dari suatu keputusan politik seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Semua hal tersebut merupakan sumber daya yang sangat penting dalam manajemen keluarga. Suksesnya pelaksanaan suatu sistem politik dimungkinkan oleh adanya dukungan keluarga yang dimanifestasikan dalam kepatuhan dan kesadaran setiap anggota untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban, misalnya membayar pajak, iuran TV, dan pembayara lainnya.

Ekonomi. Sistem ekonomi akan menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal yang lebih penting lagi bagi keluarga adalah barang dan jasa yang tersedia dapat terjangkau atau terbeli sesuai dengan kemampuannya. Sistem keluarga akan mendukung sistem ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja dan pengeluaran investasi oleh keluarga.

Teknologi. Selain akan meningkatkan kuantitas barang dan jasa, sains dan teknologi juga akan meningkatkan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan teknologi akan membawa implikasi kepada perubahan kesejahteraan. Ketergantungan keluarga dengan lingkungan dan beberapa sistem dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Saling ketergantungan lingkungan makro dan sistem sosial dengan keluarga

Pertukaran	Harapan atau Tujuan yang Ingin Dicapai	Dukungan
Sistem sosial budaya ke keluarga	Perilaku konsisten dengan nilai sosial budaya dan sosialisasi anak	Memiliki kepribadian dan bekerja sama menyokong sosial budaya
Sistem keluarga ke sosial budaya	Memahami kebutuhan utama, kesulitan, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan	Mematuhi, menerima sosial budaya, dan meneruskan warisan budaya melalui proses sosialisasi
Sistem politik ke keluarga	Mematuhi undang-undang dan peraturan, serta melibatkan para ahli dalam berbagai kebijakan	Perlindungan, ketertiban, pelayanan, program, dan kebijakan
Sistem keluarga ke politik	Mengutarakan kebutuhan serta nilai yang dipegang secara formal dalam bentuk menyokong gagasan-gagasan tertentu	Pembayaran pajak, mematuhi peraturan dan undang-undang, tugas bela negara, serta memberi suara dalam setiap pemilihan.
Sistem ekonomi ke keluarga	Jumlah barang dan jasa yang dibeli, tenaga kerja, dan sumber daya untuk produksi pada harga yang wajar	Upah tenaga kerja dan imbalan untuk <i>output</i> produktif yang wajar
Sistem keluarga ke ekonomi	Barang dan jasa tersedia pada tingkat harga yang terjangkau, kesempatan berpartisipasi dalam proses produksi, dan proteksi pasar yang wajar	Pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, menyediakan tenaga kerja, dan sumber daya dari yang produktif pada tingkat harga yang wajar dan disepakati
Sistem teknologi ke keluarga	Tersedianya produk barang dan jasa yang lebih baik, serta selaras dengan tingkat alternatif yang diperlukan	Mengadopsi cara, produk, dan jasa untuk menjamin interaksi sosial dan lingkungan yang optimal
Sistem keluarga ke teknologi	Menyediakan produk barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat	Bertanggung jawab menjaga kepentingan lingkungan dan masyarakat

Sumber: Guhardja et al. (1993)

Sistem Alami dan Buatan. Kedua faktor ini akan menyediakan bahanbahan mentah untuk berbagai macam proses produksi yang dibutuhkan oleh sistem sosial, serta menyediakan lingkungan alam bagi kepentingan sosial.

Manusia mampu mengubah bahan mentah dan energi ke dalam berbagai macam bentuk. Akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menyebabkan terganggunya keseimbangan alam dan lingkungan, sehingga timbul berbagai bencana alam yang pada hakikatnya diciptakan oleh manusia. Manusia dan sistem sosiallah yang akan langsung merasakan akibatnya dengan berbagai masalahnya dan disinilah diperlukan kesadaran terhadap lingkungan. Lingkungan fisik terdiri dari ruang yang dibuat seperti berbagai macam bangunan, jalan raya, dan ruang alamiah seperti taman-taman, hutan sampai gunung, dan lautan, serta sistem biologis yang terkandung di dalamnya.

Perhatian terhadap lingkungan perlu ditumbuhkan. Setiap keluarga mempunyai kontribusi dalam memelihara lingkungan karena merekalah yang biasanya memilih lahan untuk pemukiman. Perkembangan ekonomi menyebabkan tumbuhnya industri yang memilih penggunaan sumber daya yang murah (air, energi, dan tenaga kerja). Polusi timbul dari industri, keluarga, serta dari sistem transportasi yang melayani industri dan keluarga. Semakin meningkatnya perhatian terhadap lingkungan, mendorong timbulnya peraturan bagi limbah industri, sampah perumahan, dan polusi alat transportasi.

Keluarga-keluarga merupakan konsumen yang menghasilkan maupun membuang berbagai limbah dan polusi secara langsung melalui alat-alat yang digunakan untuk berbagai kegiatan. Misalnya, dalam penggunaan alat transportasi dihasilkan polusi asap kendaraan bermotor, penggunaan lemari es dihasilkan gas buangan klorofluorokarbon (CFC), dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia seperti sampah. Keberadaan sumber daya alami dan yang mengelilinginya secara serius dipengaruhi oleh tingkat kehidupan yang diinginkan manusia. Perhatian terhadap kualitas lingkungan harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan masalahmasalah lain, seperti adanya kekurangan energi. Manusia telah berusaha untuk mengendalikan dan memodifikasi lingkungannya, termasuk cuaca. Peningkatan pengendalian terhadap lingkungan terutama pada tingkat

mikro lambat laun akan dapat mengurangi kemampuan adaptasi biologis, psikologis, dan sosial pada kondisi lingkungan baru.

Di negara dengan iklim yang beragam (empat musim), temperatur relatif ekstrem (dingin, beku, dan panas), keluarga dituntut melakukan adaptasi dengan menyediakan sistem pemanas saat iklim dingin dan sistem penyejuk (baca: *air conditioner*) saat iklim panas. Tanaman juga memerlukan teknik budi daya yang lebih canggih dan mengharuskan petani untuk menyesuaikan jenis tanaman dengan iklim. Pemanfaatan tenaga kerja harus efisien karena pada musim dingin tenaga kerja juga terbatas. Sementara itu, di negara beriklim tropis dengan dua iklim (panas dan hujan), keluarga relatif tidak dituntut untuk beradaptasi. Saling ketergantungan lingkungan makro dan sistem keluarga seperti pada Tabel 5.

Tabel 5 Interaksi lingkungan makro dengan sistem keluarga

Pertukaran	Hal-hal yang Diperlukan	Sumber Daya yang Diberikan
Dari fisik biologis ke sistem sosial	Bahan dasar dan sumber energi	Bahan mentah untuk olahan dan distribusi, serta lingkungan alam untuk digunakan oleh masyarakat
Dari masyarakat ke fisik biologis	Konsumsi, limbah, energi yang tersedia, dan mekanisme peraturan	Ruang, air, atmosfer, bahan yang berubah, dan persediaan bentuk energi

Sumber: Guhardja et al. (1993)

Sistem keluarga dan individu berinteraksi secara teratur dengan seluruh aspek lingkungan makro yang dibuat manusia itu sendiri, seperti jalan, bangunan, dan tempat perbelanjaan semuanya sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan individu. Interaksi fisik dan biologis dengan sistem sosial dalam lingkungan makro akan memberikan pertukaran penting dari ekosistem secara keseluruhan.

C. Teori Modernisasi

Dua teori yang tergolong ke dalam kelompok Teori Modernisasi menurut Budiman (1996) adalah Teori Etika Protestan dan Teori Harrod-Domar. Teori Etika Protestan. Teori Etika Protestan yang dibangun oleh Max Weber, Sosiolog Jerman yang dipandang sebagai bapak sosiologi mengedepankan persoalan manusia yang dibingkai oleh nilai-nilai agama. Salah satu tema yang dikupas oleh Weber adalah peran agama sebagai faktor yang menyebabkan munculnya kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Etika Protestan ini dibahas dalam sebuah karya tulis yang berjudul *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*.

Dalam tulisan ini, Weber berusaha merespons pertanyaan, mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kemajuan ekonomi di bawah kapitalisme? Salah satu penyebab utama kemajuan adalah apa yang disebut sebagai Etika Protestan. Doktrin ini lahir di Eropa melalui agama Protestan yang dikembangkan oleh Calvin. Etika Protestan mengatakan seseorang telah ditentukan untuk masuk ke surga atau neraka, tetapi setiap orang tidak akan mengetahui di mana dia akan berada. Oleh karena itu, mereka menjadi tidak tenang karena tidak mengetahui nasibnya di kemudian hari.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah masuk surga atau neraka adalah keberhasilan kerjanya di dunia. Jika seseorang berhasil di dunia, dipastikan akan naik ke surga. Apabila kerjanya gagal di dunia, dia akan masuk ke neraka. Adanya kepercayaan ini membuat pengikut agama Protestan Calvin berusaha keras untuk mencapai sukses dan orang-orang ini kemudian menjadi kaya. Dalam tulisan ini, Etika Protestan bukan menjadi sebuah ideologi yang diterapkan di masyarakat Bogor, tetapi didudukkan menjadi konsep umum yang tidak dihubungkan lagi dengan agama Protestan itu sendiri. Dia bisa menjelma menjadi nilai sosial budaya di luar agama.

Teori Harrod-Domar. Evsey Domar dan Roy Harrod adalah ekonom yang menciptakan sebuah teori yang disebut "Tabungan dan Investasi". Kedua ahli ini mengatakan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat akan rendah pula. Teori menurut Budiman (1996) didasarkan pada asumsi bahwa masalah pembangunan merupakan masalah menambahkan investasi modal. Masalah keterbelakangan merupakan masalah kekurangan modal. Andaikata ada

modal dan modal tersebut diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi.

Teori ini, menurut Budiman (1996) dapat dimodifikasi sesuai kondisi, tetapi intinya tetap mengacu pada modal, tabungan, dan investasi. Modifikasi-modifikasi ini memang harus terjadi karena dalam pengertian investasi dapat diperluas sedikit pada investasi pendidikan dan investasi kesehatan. Bukan hanya investasi modal dalam bentuk finansial dan material, begitu pun kedua ahli ini mengabaikan persoalan manusia karena masalah manusia dianggapnya sudah tersedia. Asumsi teori modernisasi yang dikemukan di depan inilah yang kemudian dirujuk untuk membuat model strategik pembangunan. Teori dan kebijakan modernisasi ini tertulis amat signifikan, sehingga terkesan kuat untuk dianut dalam kebijakan pembangunan. Teori modernisasi bukan hanya menjadi dalih dan alasan untuk merujuk, melainkan ia lebih bersifat pragmatis di tingkat global, nasional, regional, maupun lokal.

Didorong oleh maksud teori modernisasi, untuk ikut aktif dalam upayamodernisasi yang tanpa terelakan juga akan dinilai mengamerikanisasi atau meng-eropanisasi. Memang kedua blok negara ini menjadi panutan atau contoh bagi negara berkembang atau daerah berkembang lainnya. Teori modernisasi memberikan dasar pembenaran dalam urusan pembangunan negara-negara yang sedang berkembang. **Pertama,** teori ini mampu memberikan dasar pembenar kepada negara maju (AS dan Eropa). Berdasarkan pengalaman dan prestasi kemajuannya membimbing dan menggurui negara-negara yang masih terkebelakang tentang *action* untuk bisa menjadi maju dan meraih tahap konsumsi yang melimpa ruah. **Kedua,** teori ini membenarkan peran dan turut campur tangan Amerika dan Eropa dalam setiap kiat pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang. Tidak hanya dalam bentuk pemberian bantuan, tetapi juga dalam wujud ekspansi usaha yang lain tanpa memberi kesan telah terjadinya kolonialisme dan imperialisme dalam modus baru.

Dipandang dari kepentingan negara-negara berkembang, kesediaan untuk merancang pembangunan dengan berpijak paradigmatik, teori modernisasi akan bermakna kesiapan untuk menyamakan idiom yang dilakukan. Idiom itu untuk menjalin dan membuat mulus hubungan

kerja sama dengan sebuah negara maju yang tak hanya kaya, tetapi juga berkepentingan untuk membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia yang amat memerlukan jalur logistik baru untuk mendorong perubahan dan perkembangan di dalam negerinya.

Mengacu pada cara pandang teori modernisasi yang dikemukakan di muka ini kemudian ditiru untuk membuat paradigma baru yang disebut model dan strategi pemberdayaan. Dimotifisir oleh maksud suci untuk memodernisasi Bogor, membuat open mind selain ide murni yang tumbuh dalam sanubari. Selain itu, mengikuti dan menggurui sejumlah daerah yang telah maju dengan modifikasi seperlunya untuk bisa menjadi Bogor yang maju dan lebih berkembang. Dilihat dari kepentingan sebagai daerah berkembang yang tidak mungkin akan menepuk dada, semuanya bisa diatasi sendiri. Namun, mau tidak mau harus menjalin kerja sama baik terhadap dunia luar, pemerintah pusat, pengusaha, LSM, maupun masyarakat untuk mendorong perubahan dan perkembangan daerah itu sendiri. Dalam perspektif itulah model dan strategi pemberdayaan masyarakat membutuhkan beberapa unsur eksternal, antara lain pemasokan modal baik dari luar maupun dari dalam negeri. Entah itu datangnya dari pemerintah atas, pengusaha, dan pihak lain yang mempunyai pedulian terhadap keluarga miskin. Pemasokan tenaga-tenaga ahli dan terampil (sepanjang kita belum memiliki) sambil tetap memperjuangkan putraputra daerah untuk mengikuti pendidikan sampai pada saatnya kita juga memiliki tenaga-tenaga ahli dan terampil yang handal, serta infrastruktur dan suprastruktur lainnya. Action secara internal, masalah tabungan, dan investasi masyarakat menjadi hal utama yang diperjuangkan. Pencapaian kesejahteraan masyarakat tidak lain adalah upaya meningkatkan taraf hidup mereka yang tergolong miskin (Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I). Dengan begitu, mereka akan memiliki kemampuan untuk menaikan strata sosial ke tingkat menengah dan atas atau tinggi (Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III plus).

Bab **1**Theoritical Framework

Dalam ilmu keluarga, telah berkembang sejumlah *grand* teori yang membahas bermacam-macam masalah (aspek struktural, fungsional keluarga, dan aspek perspektif keluarga). Teori-teori tersebut telah mapan dan memiliki akar paradigma yang berbeda-beda.

A. Teori Struktural Fungsional

Ogburn dan Parsons dalam Megawangi 1999 adalah para sosiolog ternama yang mengembangkan pendekatan struktural fungsional dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20. Teori yang diterapkan oleh Parsons adalah sebagai reaksi dari pemikiran-pemikiran tentang melunturnya atau berkurangnya fungsi keluarga karena adanya modernisasi. Bahkan menurut Parsons, fungsi keluarga pada zaman modern terutama dalam sosialisasi anak dan tension management untuk masing-masing anggota keluarga justru akan semakin terasa penting. Keluarga dapat dilihat sebagai salah satu subsistem dalam masyarakat. Tidak akan lepas dari interaksinya dengan subsistem lain yang ada dalam masyarakat, misalnya sistem ekonomi, politik, pendidikan, dan agama. Interaksinya dengan subsistem tersebut, keluarga berfungsi untuk memelihara keseimbangan sosial dalam masyarakat (equilibrium state). Seperti halnya organisme hidup, menurut Parsons keluarga diibaratkan sebuah hewan berdarah panas yang dapat memelihara temperatur tubuhnya agar tetap konstan, walaupun kondisi lingkungan berubah. Parsons tidak menganggap keluarga adalah statis atau tidak dapat berubah. Menurutnya, keluarga selalu beradaptasi secara mulus menghadapi perubahan lingkungan. Kondisi ini disebut "keseimbangan dinamis" (dynamic equilibrium). Dalam pandangan teori struktural fungsional, dapat dilihat dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu aspek struktural dan aspek fungsional.

Aspek Struktural. Ada tiga elemen utama dalam struktur internal, yaitu status sosial, fungsi sosial, dan norma sosial, ketiganya saling berkaitan. Berdasarkan status sosial, keluarga inti biasanya disusun oleh tiga struktur utama, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Struktur ini dapat pula berupa figur-figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak-anak balita, dan anak remaja. Keberadaan status sosial ini penting karena dapat memberikan identitas kepada angota keluarga seperti bapak, ibu, dan anak-anak dalam sebuah keluarga. Selain itu, memberikan rasa memiliki karena ia merupakan bagian dari sistem keluarga. Keberadaan status sosial secara intrinsik menggambarkan adanya hubungan timbal balik antaranggota keluarga dengan status sosial yang berbeda.

Bates (1956) mengatakan peran sosial dalam teori ini menggambarkan peran masing-masing individu atau kelompok menurut status sosialnya dalam sebuah sistem sosial. Peran sosial dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah laku, diharapkan dapat memotivasi tingkah laku seseorang yang menduduki status sosial tertentu. Dengan kata lain, untuk setiap status sosial tertentu akan ada fungsi dan peran, diharapkan dalam interaksinya antara individu atau kelompok dengan status sosial yang berbeda.

Berdasarkan pendapat Bates tersebut, ayah berstatus kepala keluarga diharapkan dapat menjamin kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga baik material maupun spiritual. Ibu berkewajiban memberikan perawatan terhadap anak-anak, sedangkan anak-anak berkewajiban menghormati orang tuanya. Parsons dan Bales (1955) membagi dua peran orang tua dalam keluarga, yaitu peran instrumental yang diharapkan dilakukan oleh suami dan peran emosional atau ekespresif biasanya dipegang oleh figur istri. Peran instrumental dikaitkan dengan peran pencari nafkah, sedangkan peran emosional adalah peran pemberi cinta, kelembutan, dan kasih sayang.

Norma sosial menurut Megawangi (1999) adalah sebuah peraturan yang menggambarkan sebaiknya seseorang bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya. Setiap keluarga mempunyai norma spesifik, misalnya norma sosial dalam hal pembagian tugas dalam rumah tangga yang merupakan bagian dari struktur keluarga untuk mengatur tingkah laku setiap anggota keluarga. Norma sosial menekankan baik atau buruk,

pantas atau tidak pantas, serta layak atau tidak layak yang ditujukan kepada setiap anggota keluarga untuk melakukan sesuatu, baik tindakan maupun perkataan. Dengan demikian, norma sosial adalah unsur dasar dari kehidupan keluarga.

Aspek Fungsional. Menurut Megawangi (1999), aspek fungsional sulit dipisahkan dengan aspek struktural karena keduanya saling berkaitan. Maksudnya, dikaitkan dengan bagaimana subsistem dapat berhubungan dan dapat menjadi sebuah kesatuan sosial. Menurut Megawangi, fungsi sebuah sistem mengacu pada sebuah sistem untuk memelihara dirinya sendiri dan memberikan kontribusi pada fungsi subsistem dari sistem tersebut.

Keluarga sebagai sebuah sistem menurut Mcintyre (1966) mempunyai fungsi yang sama seperti yang dihadapi oleh sistem sosial yang lain, yaitu menjalankan tugas-tugas, ingin meraih tujuan yang dicita-citakan, integrasi dan solidaritas sesama anggota, serta memelihara kesinambungan keluarga. Keluarga inti maupun sistem sosial lainnya mempunyai karakteristik yang hampir sama, yaitu ada diferensiasi peran, struktur yang jelas seperti ayah, ibu, dan anak-anak.

Berdasarkan hasil penelitian Parsons dan Bales (1956), mereka membuat kesimpulan bahwa institusi keluarga serta kelompok-kelompok kecil lainnya dibedakan oleh kekuasaan atau dimensi hierarki. Usia dan jenis kelamin biasanya dijadikan dasar alami dari proses diferensiasi itu. Parsons menekankan pula pentingnya diferensiasi peran dalam kesatuan peran instrumental emosional. Diferensiasi peran ini akan menggambarkan sejumlah fungsi atau tugas yang dijalankan oleh masing-masing anggota.

Ritzer (1992) mengatakan setiap struktur dalam hal suami, istri, dan anak-anak dalam sistem keluarga harus bersifat fungsional terhadap yang lain. Jika setiap struktur dalam keluarga tidak fungsional, struktur itu tidak akan ada atau hilang. Dalam keluarga, harus ada alokasi fungsi atau tugas yang jelas yang harus dilakukan agar keluarga sebagai sistem dapat tetap ada. Pembagian tugas yang tidak jelas pada masing-masing aktor dengan status sosialnya atau terjadi disfungsional salah satu aktor dalam keluarga menyebabkan sistem keluarga akan terganggu atau keberadaan keluarga tidak akan berkesinambungan. Berdasarkan pendapat Parsons, Bales, dan

Ritzer, institusi keluarga menurut Megawangi (1999) perlu melakukan langkah-langkah agar keluarga dapat berfungsi. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

Diferensiasi Peran. Terdapat serangkaian tugas dan aktivitas yang dilakukan di dalam keluarga, harus ada alokasi peran untuk setiap aktor dalam keluarga. Terminologi diferensiasi peran bisa mengacu pada usia, gender, generasi, juga posisi status ekonomi, dan politik dari masing-masing aktor. Maksud dari alokasi tugas di sini adalah siapa harus mengerjakan pekerjaan apa. White (1976) mengemukakan pekerjaan di sini menyangkut beberapa aspek, antara lain kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, pekerjaan yang langsung menghasilkan uang, pekerjaan yang memberikan status sosial atau prestise pada keluarga yang bersangkutan, pekerjaan yang dapat menimbulkan interaksi dari aktor yang bersangkutan terhadap pihak lain, dan kegiatan yang menghasilkan energi.

Alokasi solidaritas. Alokasi solidaritas mengacu pada distribusi relasi antaranggota keluarga menurut cinta, kekuatan, dan intensitas hubungan. Cinta atau kepuasan menggambarkan hubungan antaranggota. Misalnya, keterikatan emosional antara seorang ibu dengan anaknya. Kekuatan mengacu pada keutamaan sebuah relasi relatif terhadap relasi lainnya. Hubungan antara bapak dan anak lelaki mungkin lebih utama daripada hubungan antara suami dan istri pada suatu budaya tertentu. Intensitasnya adalah kedalaman relasi antaranggota menurut kadar cinta, kepedulian, atau pun ketakutan.

Alokasi kekuasaan. Alokasi kekuasaan ditekankan pada aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam keluarga. Aspek-aspek tersebut mencakup pengambilan keputusan dalam bidang sosialisasi nilainilai sosial budaya dalam bidang ekonomi, terutama dalam hal produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam bidang budaya adalah hal menghadapi transformasi nilai-nilai baru yang dipandang merusak tatanan norma keluarga. Distribusi kekuasaan dalam ketiga aspek tersebut (sosial, ekonomi, dan budaya) adalah penting dalam setiap keluarga, menyangkut otoritas legitimasi pengambilan keputusan untuk siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan atau aktivitas anggota keluarga. Agar keluarga dapat berfungsi dan melakukan hal-hal yang normal dan wajar, baik dalam

keluarga maupun di luar rumah, distribusi kekuasaan pada aspek di atas sangat diperlukan.

B. Teori Interaksionisme Simbolis

Menurut Usman (1995), teori interaksionisme simbolis lazim diidentifikasi sebagai deskripsi yang interpretatif. Dengan cara deskripsi yang interpretatif, fenomena sosial yang berkembang dalam keluarga bisa dipahami dengan lebih cermat, sehingga dapat ditemukan hal-hal baru yang berbeda dengan orang atau lingkungan lain. Ada tiga prinsip dasar yang dikembangkan oleh teori ini dalam membaca fenomena sosial, yaitu (1) individu menyikapi sesuatu atau apa saja yang ada di lingkungannya berdasarkan makna sesuatu tersebut bagi dirinya; (2) makna tersebut diberikan berdasarkan interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain; dan (3) makna tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretatif, berkaitan dengan hal-hal lain yang dijumpainya. Ketiga prinsip dasar tersebut pertama-tama dibingkai oleh asumsi bahwa setiap individu bisa melihat dirinya sendiri, sebagaimana ia melihat orang lain. Individu juga tidak pasif, artinya memiliki kemampuan membaca situasi yang melingkupi hidupnya. Dengan demikian, perhatian teori interaksionisme simbolis banyak difokuskan pada aspek-aspek interaksi sosial, baik yang memelihara stabilitas maupun yang mendorong perubahan bagaimana individu seharusnya melihat dirinya sendiri dan menafsirkan situasi yang melingkupi hidupnya.

Berangkat dari ketiga prinsip dasar tersebut, kaum interaksionisme simbolis menawarkan metodologi yang lebih menekankan pada pemahaman makna terhadap suatu aktivitas baik perkataan maupun perbuatan yang ada dalam keluarga, kemudian mengidentifikasi sebabnya. Makna dan sebab selanjutnya dipergunakan untuk memahami proses aktivitas tersebut. Proses menjadi salah satu yang sentral dalam analisis yang ditawarkan oleh pendekatan ini. Itulah sebabnya, dalam menerangkan interaksi antaranggota keluarga, teori ini menolak cara berpikir yang berangkat dari hipotesis seperti yang lazim dikemukakan oleh kaum idealis. Penekanannya pada proses bagaimana orang merumuskan definisi dan situasi yang melingkupinya.

Komponen penting dalam analisis berdasarkan teori interaksionisme simbolis adalah tentang tingkah laku dengan perhatian utama pada makna (meaning). Setiap tingkah laku aktor dalam keluarga bukan sekadar ekspresi yang mendadak atau tiba-tiba, tetapi lebih daripada itu, mengandung makna yang dilakukan oleh aktor dengan penuh kesadaran. Sebuah tingkah laku yang mempunyai makna tertentu bagi salah satu aktor dalam keluarga akan ditempatkan sebagai pola dalam memberi respons tingkah laku oleh anggota dalam keluarga tersebut. Dengan membuat deskripsi yang akurat dalam konteks keberadaan tingkah laku aktor dalam keluarga, keluarga akan menangkap berbagai macam hal mengapa tingkah laku tersebut muncul dalam kehidupan keluarga.

Dalam upaya memahami suatu tingkah laku (kemudian menafsirkan atau memberi makna lebih akurat), hal yang harus diperhatikan dalam keluarga adalah "definisi subjektif". Artinya sedapat mungkin mendekatkan kebenaran konsep diri dengan konsep orang atau aktor lain dalam suatu situasi sosial yang berbeda. Setiap aktor dalam keluarga harus cerdik dan pandai membaca makna atau fenomena yang muncul pada diri masingmasing.

BAGIAN KEDUA KASUS



Pertanyaan pertama yang akan muncul adalah pengukuran kemiskinan, apakah alat pengukuran menunjukkan derajat yang sesungguhnya atau sama? Pertanyaan ini memusatkan perhatian pada kriteria pengukuran yang disebut kesahihan pengukuran. Kesahihan sebuah kriteria pengukuran didefinisikan sebagai perangkat ukuran yang memperkenankan kepada pihak lain bahwa kriteria pengukuran itu sahih. Meskipun diukur dengan kriteria lain, seperti kriteria BPS, BKKBN, Pengeluaran Pangan, dan Persepsi Keluarga. Kesahihan yang dimaksud adalah kesahihan hasil. Kriteria yang valid berarti kriteria yang digunakan sebagai benchmarking atau gold standard.

Benchmarking atau gold standard adalah ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan secara tunggal setelah diuji melalui kriteria yang lain. Misalnya, BKKBN diuji sensitivitas dan spesivisitas dengan BPS, Pengeluaran Pangan, dan Persepsi Keluarga. Pengujian seperti ini belum dilakukan, sehingga sangat wajar jika negeri ini menggunakan beragam kriteria pengukuran kemiskinan. Konsekuensinya adalah setiap departemen memiliki angka kemiskinan yang berbeda-beda. Penanggulangannya juga berbeda-beda, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat, bahkan mengarah kepada konflik lokal akibat perlakuan yang berbeda. Jadi, benchmarking atau gold standard adalah suatu kriteria yang reliable karena digunakan beberapa kali untuk mengukur kemiskinan, yang tetap menghasilkan angka sama secara nasional. Dengan kriteria yang valid dan reliable dalam memperoleh angka kemiskinan, diharapkan angka kemiskinan bangsa akan menjadi valid dan reliable. Jadi, kesahihan dan keterandalan kriteria merupakan syarat untuk mendapatkan angka kemiskinan yang pasti, sehingga penanganannya juga pasti dan tidak terjadi perlakuan yang berbeda. Namun, kriteria yang valid dan reliable tidak otomatis menjamin angka kemiskinan yang valid dan reliable. Hal ini tergantung pada kondisi objek yang diteliti dan kemampuan orang yang mengunakan instrumen. Oleh karena itu, kontrol terhadap objek yang diteliti menjadi penting karena dengan kontrol dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi. Dengan kontrol itu pula dapat meningkatkan kemampuan responden atau peneliti yang menggunakan instrumen penelitian.

Angka kemiskinan yang valid apabila ada kesamaan antara angka kemiskinana yang terkumpul dengan angka kemiskinan yang sesungguhnya, artinya ada proses verifikasi pada angka kemiskinan yang diteliti. Jika kemiskinan yang diteliti adalah pendapatan rumah tangga, data yang harus dikumpulkan adalah penjumlahan penghasilan antara suami dan istri. Data tersebut akan valid, tetapi jika data yang dikumpulkan hanya pendapatan istri atau suami saja, maka data tersebut tidak valid. Selanjutnya, hasil penelitian tentang kemiskinan yang *reliable* jika terdapat konsistensi dalam waktu yang berbeda. Artinya, hari ini digunakan sama dengan yang akan digunakan pada hari esok dan seterusnya, atau jika angka kemiskinan hari ini sebanyak 1.000 rumah tangga, esok dan seterusnya juga 1.000. Inilah masalah yang dihadapi bangsa ini. Secara kuantitatif, angka kemiskinan berbeda-berbeda antara BPS, BKKBN, Pengeluaran Pangan, dan Persepsi Keluarga yang sampai saat ini belum menemukan suatu berchmarking atau gold standard. Oleh karena itu, ketika membahas angka kemiskinan, bangsa yang kembang kempis perlu dirancang studi kasus yang disebut berchmarking atau gold standard, diharapkan bangsa ini akan menggunakan kriteria tunggal.

Bab 5 Karakteristik Demografi dan Sosial Ekonomi

A. Jumlah Anggota Keluarga Contoh dan Kemiskinan

Besar keluarga merupakan keseluruhan jumlah anggota keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Jumlah anggota keluarga akan menentukan jumlah dan pola konsumsi pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 63,9% responden di kota yang memiliki anggota 5–7 orang tergolong miskin. Untuk responden yang tinggal di desa sebanyak 65,3% yang memiliki jumlah anggota kurang dari empat orang tergolong tidak miskin. Sementara itu, secara keseluruhan sebanyak 64% responden di wilayah ini memiliki jumlah anggota keluarga kurang dari empat orang atau keluarga kecil yang tergolong tidak miskin, sedangkan 35,7% tergolong miskin. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Sebaran jumlah anggota contoh dan tingkat kesejahteraan

		K	ota			D	esa		Total (Kota+Desa)					
Jumlah				idak iskin	Mi	iskin	Tidak Miskin		Miskin		Tidak Miskin			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
<4 orang	10	27,8	14	58,3	31	35,2	66	65,3	41	35,7	80	64,0		
5–7 orang	23	63,9	10	41,7	38	48,1	31	36,7	61	53,0	41	32,8		
>7 orang	3	8,3	0	0	10	12,7	4	4,6	13	11,3	4	3,2		
Total	36	100	24	100	79	100	101	100	115	100	125	100		
Mean±SD	5,6	± 1,7	4,5 :	4,5 ± 1,3		5,2 ± 1,9		$4,2 \pm 1,5$		$5,3 \pm 1,9$		4,2 ± 1,4		

Keluarga yang tinggal di wilayah kota cenderung memiliki jumlah tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah desa. Ratarata jumlah anggota keluarga di wilayah penelitian sebanyak 4,2 adalah tidak miskin, sedangkan 5,3 tergolong miskin. Hasil uji *t* menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05).

B. Usia Suami Istri dan Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 33,3% responden di kota tergolong tidak miskin pada selang usia 36–40 tahun, sedangkan di wilayah pedesaan 23,5% berada pada selang usia 36–40 tahun tergolong tidak miskin. Secara umum, proporsi terbesar (25,2%) usia suami di wilayah ini berada di bawah 40 tahun yang tergolong tidak miskin, sedangkan 16,2% adalah miskin. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Sebaran usia suami keluarga contoh dan tingkat kesejahteraan

		Ko	ota			De	sa		Total (Kota+Desa)					
Jumlah	М	iskin		idak iskin	N.	liskin		idak iskin	М	iskin	Tidak Miskin			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
< 20	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
20-25	1	3,3	0	0,0	1	1,3	2	2,0	2	1,9	2	1,7		
26-30	3	10,0	0	0,0	5	6,7	15	15,3	8	7,6	15	12,6		
31–35	2	6,7	3	14,3	14	18,7	16	16,3	16	15,2	19	16,0		
36-40	4	13,3	7	33,3	13	17,3	23	23,5	17	16,2	30	25,2		
41–45	6	20,0	1	4,8	11	14,7	12	12,2	17	16,2	13	10,9		
46-50	5	16,7	4	19,8	18	24,0	13	13,3	23	21,9	17	14,3		
> 50	9	30,0	6	28,6	13	17,3	17	17,3	22	21,0	23	19,3		
Total	30	100	21	100	75	100	98	100	105	100	119	100		
Mean±SD	45,2	±11,9	45,6	45,6 ±10,6		7± 10,6	41,3	3±10,9	44,1	± 10,9	42,0 ± 37,5			

Keterangan: 16 suami telah meninggal

Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, usia suami keluarga sampel di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan merupakan pasangan usia muda (produktif) dan beberapa pasangan sedang mencapai puncak kariernya. Dengan demikian, upaya untuk menambah pendapatan keluarga masih memungkinkan guna mencapai tingkat kesejahteraan

yang diinginkan. Hasil uji *t* menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 34,8% istri di kota tergolong tidak miskin pada selang usia 36–40 tahun, sedangkan sebesar 26,3% istri di desa tergolong tidak miskin pada selang usia 31–35 tahun. Secara umum, (23,8%) istri contoh di wilayah ini berada pada selang usia 31–35 tahun tergolong tidak miskin, sedangkan 18,8% tergolong miskin. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Sebaran usia istri keluarga contoh dan tingkat kesejahteraan

		Ko	ota			De	esa		Total (Kota+Desa)				
Jumlah	М	iskin		idak Iiskin	М	iskin		idak iskin	Mi	skin	Tidak Miskin		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
< 20	1	2,9	0	0,0	1	1,3	1	1,0	2	1,8	1	0,8	
20–25	4	11,8	0	0,0	6	7,7	13	13,1	10	8,9	13	10,7	
26-30	4	11,8	2	8,7	13	16,7	16	16,2	17	15,2	18	14,8	
31-35	2	5,9	3	13,0	19	24,4	26	26,3	21	18,8	29	23,8	
36-40	6	17,6	8	34,8	12	15,4	16	16,2	18	16,1	24	19,7	
41-45	5	14,7	0	0,0	15	19,2	11	11,1	20	17,9	11	9,0	
46-50	6	17,6	5	21,7	6	7,7	7	7,1	12	10,7	12	9,8	
> 50	6	17,6	5	21,7	6	7,7	9	9,1	12	10,7	14	11,5	
Total	34	100	23	100	78	100	99	100	112	100	122	100	
Mean±SD	40,2	2± 11,5	42,6± 9,1		37,	5±9,9	36,3	± 10,2	38,3	±10,5	37,5±10,3		

Keterangan: 6 istri telah meninggal

Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, usia istri keluarga sampel di wilayah ini merupakan pasangan usia muda (produktif) dan beberapa pasangan sedang mencapai puncak kariernya. Hasil uji *t* menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata (p<0,05) antara usia istri di kota dengan usia istri di desa.

C. Keadaan Fisiologi Suami Istri dan Kemiskinan

Keadaan fisiologi menggambarkan sehat atau tidaknya keluarga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan dimaknai sebagai kondisi yang dialami setiap orang. WHO (1984) mendefinisikan sehat sebagai status

kenyamanan menyeluruh dari jasmani, mental, dan sosial, bukan hanya tidak ada penyakit atau kecacatan. Kesehatan mental diartikan sebagai kemampuan berpikir dengan jernih dan koheren. Istilah ini dibedakan dari kesehatan emosional dan sosial, meskipun ada hubungan yang dekat di antara ketiganya. Kesehatan sosial berarti kemampuan untuk membuat dan mempertahankan hubungan dengan orang lain, sedangkan kesehatan jasmani adalah dimensi sehat yang paling nyata, mempunyai perhatian pada fungsi mekanistik tubuh. Namun, deskripsi tentang kesehatan dalam tulisan ini dibatasi pada kesehatan jasmani (Emilia 1994).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 96,7% status suami yang dalam keadaan sehat di daerah perkotaan tergolong miskin, sedangkan 98% status suami yang dalam keadaan sehat di daerah pedesaan tergolong tidak miskin. Secara umum, (97,5%) usia istri adalah sehat dan tergolong tidak miskin, sedangkan 97,1% tergolong miskin. Kondisi fisiologi suami contoh dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Sebaran keadaan fisiologis suami contoh dan tingkat kesejahteraan

	Kota						esa		Total (Kota+Desa)					
Kondisi	Mi	skin	Tidak Miskin		М	Miskin		idak iskin	Mi	skin		dak iskin		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Sakit	1	3,3	1	4,8	2	2,7	2	2,0	3	2,9	3	2,5		
Sehat	29	96,7	20	95,2	73	97,3	96	98,0	102	97,1	116	97,5		
Total	30	100	21	100	75	100	98	100	105	100	119	100		

Keterangan: 16 suami telah meninggal

Pada kondisi yang sama, yaitu 100% status istri dalam keadaan sehat di daerah perkotaan tergolong tidak miskin, sedangkan 96,7% status istri dalam keadaan sehat di daerah pedesaan tergolong miskin. Secara umum, proporsi usia suami terbesar (96,8%) adalah sehat dan tergolong tidak miskin, sedangkan 97,3% termasuk miskin. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10.

Kota Desa Total (Kota+Desa) Tidak Tidak Tidak Kondisi Miskin Miskin Miskin Miskin Miskin Miskin % % % 0/0 % % Sakit 2 5,9 0 0,0 1 1.3 4 4.0 3 2,7 4 3.2 Sehat 94.1 95 96,0 109 97,3 96,8 32 23 100 77 98,7 118 Total 34 100 23 100 78 100 99 100 112 100 122 100

Tabel 10 Sebaran keadaan fisiologis istri contoh dan tingkat kesejahteraan

Keterangan: Enam istri telah meninggal

Perhitungan menurut pendekatan demografi, terutama tentang *Prevalence Morbidity Rate* (PMR) yaitu jumlah penderita sesuatu penyakit, baik yang lama atau baru tidak dapat dilakukan karena penelitian ini dilakukan pada suami dan istri. Sementara itu, analisis demografi menghendaki studi totalitas populasi yang mengalami sesuatu penyakit baru atau lama, dibagi dengan jumlah populasi pada pertengahan tahun untuk mengetahui persentase angka kesakitan pada wilayah yang bersangkutan.

D. Pendidikan Suami Istri dan Kemiskinan

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses mengubah sesosok manusia biologis menjadi sesosok social being (pendidikan juga disebut sosialisasi). Jadi, sosialisasi merupakan upaya transformasi nilai-nilai sosial budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga diharapkan bertingkah laku seperti generasi pertama (Wignjosoebroto 1994). Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Sebaran suami contoh berdasarkan pendidikan dan tingkat kesejahteraan

		К	ota			Do	esa		Total (Kota+Desa)				
Tingkat Pendidikan	Miskin		Tidak Miskin		Miskin		Tidak Miskin		Miskin		Tidak Miskin		
	n	n %		%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Tidak Sekolah	0	0,0	1	4,8	1	1,3	2	2,0	1	1,0	3	2,5	
Tidak Tamat SD	4	13,3	0	0,0	28	37,3	10	10,2	32	30,5	10	8,4	
Tamat SD	8	26,7	6	28,6	32	42,7	34	34,7	40	38,1	40	33,6	

Tabel 11 Sebaran suami contoh berdasarkan pendidikan dan tingkat kesejahteraan (lanjutan)

		K	ota			D	esa		Total (Kota+Desa)				
Tingkat Pendidikan	М	iskin	Tidak Miskin		Miskin		Tidak Miskin		Miskin		Tidak Miskin		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Tamat SLTP	5	16,7	1	4,8	8	10,7	17	17,3	13	12,3	18	15,1	
Tamat SLTA	12	40,0	9	42,9	6	8,0	22	22,4	18	17,1	31	26,1	
Tamat PT	1	3,3	4	19,0	0	0,0	13	13,3	1	1,0	17	14,3	
Total	30	100	21	100	75	100	98	100	105	100	119	100	

Keterangan: 16 suami telah meninggal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 42,9% suami di daerah perkotaan yang tamat SLTA adalah tidak miskin, sedangkan 34,7% suami di daerah pedesaan yang tamat SD adalah tidak miskin juga. Secara umum, (33,6%) pendidikan suami adalah tamat SD atau lebih rendah yang tergolong tidak miskin, sedangkan 38,1% tergolong miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 43,5% istri contoh di daerah perkotaan yang tamat SLTA adalah tidak miskin, sedangkan di desa yang tamat SD (35,4%) tergolong tidak miskin juga. Secara umum, (35,2%) pendidikan istri contoh adalah tamat SD yang tergolong tidak miskin dan 45,5% tergolong miskin. Tabel 11 dan 12 memperlihatkan bahwa, pendidikan suami dan istri di daerah penelitian cukup memprihatinkan karena masih ada suami istri yang tidak sekolah. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Sebaran istri contoh berdasarkan pendidikan dan tingkat kesejahteraan

		K	ota			D	esa		Total (Kota+Desa)				
Tingkat Pendidikan	N	Miskin	Tidak Miskin		N	Miskin		Tidak Miskin		Miskin		dak skin	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Tidak Sekolah	1	2,9	0	0,0	4	5,1	5	5,1	5	4,5	5	4,1	
Tidak Tamat SD	4	11,8	0	0,0	24	30,8	12	12,1	28	25,0	12	9,8	
Tamat SD	12	35,3	8	34,8	39	50,0	35	35,4	51	45,5	43	35,2	
Tamat SLTP	4	11,8	4	17,4	6	7,7	24	24,2	10	8,9	28	23,0	
Tamat SLTA	13	38,2	10	43,5	5	6,4	18	18,2	18	16,1	28	23,0	
Tamat PT	0	0,0	1	4,3	0	0,0	5	5,1	0	0,0	6	4,9	
Total	34	100	23	100	78	100	99	100	112	100	122	100	

Keterangan: Enam istri telah meninggal

E. Pekerjaan Suami Istri dan Kemiskinan

Sebelum membicarakan pekerjaan, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah, antara lain swasta, pedagang, dan wiraswasta. Swasta adalah pekerja bebas. Pekerja bebas maksudnya orang yang melakukan usaha mandiri, tetapi tidak berorientasi keuntungan dan usaha yang dilaksanakannya tidak terlembaga, seperti tukang cukur, dan petani tradisional. Pedagang adalah beberapa pekerja yang bersama-sama dalam suatu tempat, di antara mereka merupakan koordinator yang biasanya sebagai pemasok modal utama. Wiraswasta adalah orang yang mempunyai sifat kewiraswastaan, seperti keberanian mengambil risiko, keutamaan, dan keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak pada kemauan maupun kemampuan sendiri (Priyono dan Soerata, 2005). Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13 Sebaran suami contoh berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat kesejahteraan

			Ko	ota			D	esa	Total (Kota+Desa)				
Jenis Pekerjaan	N	Aiskin	Tidak Miskin		N	Miskin		Tidak Miskin		Iiskin	Tidak Miskin		
	n	%	N	%	N	%	n	%	n	%	n	%	
PNS/POL/ABRI	4	13,3	2	9,5	2	2,7	12	12,2	6	5,7	14	11,8	
Swasta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	7,1	0	0,0	7	5,9	
Pedagang	10	33,3	9	42,8	16	21,3	13	13,3	26	24,8	22	18,5	
Buruh	8	26,7	4	19,1	43	57,3	46	46,9	51	48,6	50	42,0	
Petani	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,1	0	0,0	3	2,5	
Wiraswasta	0	0,0	2	9,6	6	8,0	14	14,3	6	5,7	16	13,4	
Ternak	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0.0	0,0	1	0,8	
Tidak Bekerja	8	26,7	4	19,0	8	10,7	2	2,0	16	15,2	6	5,1	
Total	30	100	21	100	75	100	98	100	105	100	119	100	

Keterangan: 16 suami telah meninggal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar (42,8%) suami contoh yang bekerja sebagai pedagang di kota adalah tidak miskin, sedangkan 46,9% yang bekerja sebagai buruh di desa adalah juga tidak miskin. Secara umum, (42%) pekerjaan suami adalah buruh yang tergolong tidak miskin, sedangkan 48,6% tergolong miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,

sebanyak (29,4%) istri yang bekerja sebagai pedagang di kota adalah miskin, sedangkan 23,3% istri yang bekerja sebagai pedagang di desa adalah tidak miskin. Secara umum, pekerjaan istri contoh di wilayah ini adalah sebagai pedagang (20,5%) tergolong tidak miskin, sedangkan 19,6% tergolong miskin, 68% tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga yang tergolong tidak miskin, dan 66,1% tergolong miskin. Dengan bekerja, keluarga dapat meningkatkan pendapatan. Pendapatan adalah suatu aliran atau flow, sedangkan kekayaan adalah suatu titik atau point. Sisa pendapatan yang diakumulasikan dapat menjadi kekayaan keluaraga. Secara lebih rinci pekerjaan istri contoh dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Sebaran istri contoh berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat kesejahteraan

		Ko	ota			D	esa		Total (Kota+Desa)				
Jenis Pekerjaan	Miskin		Tidak Miskin		N	Miskin		Tidak Miskin		Miskin		Tidak Miskin	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
PNS/POL/ABRI	1	2,9	2	8,7	2	2,6	4	4,0	3	2,7	6	4,9	
Swasta	0	0,0	0	0,0	3	3,8	0	0,0	3	2,7	0	0,0	
Pedagang	10	29,4	2	8,7	12	15,4	23	23,3	22	19,6	25	20,5	
Buruh	1	2,9	2	8,7	4	5,1	1	1,0	5	4,5	3	2,4	
Petani	1	2,9	0	0,0	1	1,3	1	1,0	2	1,8	1	0,8	
Wiraswasta	1	2,9	0	0,0	2	2,6	4	4,0	3	2,7	4	3,3	
Ternak	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Tidak Bekerja	20	20 58,8		73,9	54	69,2	66	66,7	74	66,1	83	68,0	
Total	34	100	23	100	78	100	99	100	112	100	122	100	

Keterangan: Enam istri telah meninggal

Bab **6** Karakteristik Lingkungan Keluarga

A. Kebijakan Pemerintah dan Kemiskinan

Argumen inti yang dibicarakan dalam kebijakan pemerintah adalah keputusan-keputusan politik yang dituangkan dalam berbagai program. Program ini pada ujungnya mengarah ke tema atau topik tentang pemberdayaan mereka yang tergolong lemah, yang selalu saja terpuruk di papan-papan bawah. Program-program tersebut antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 65 dollar AS per barel berdampak pada peningkatan biaya transportasi. Pada akhirnya menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa yang dicerminkan oleh laju inflasi relatif tinggi (17,89%) pada tahun 2005. Peningkatan harga barang dan jasa mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, terutama keluarga miskin. Kemampuan keluarga miskin dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari semakin lemah dan jumlah keluarga miskin pun semakin meningkat.

Untuk menekan pengaruh kenaikan harga BBM bagi keluarga miskin, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Keluarga Miskin. Dalam Inpres tersebut, setiap keluarga miskin menerima Rp100.000 per bulan yang diberikan setiap tiga bulan sekali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 22,2% keluarga yang memperoleh dana kompensasi BBM di daerah perkotaan tergolong miskin. Sementara itu, keluarga yang memperoleh dana kompensasi BBM di daerah pedesaan sebesar 11,4% tergolong miskin juga. Secara keseluruhan, (14,8%) yang memperoleh dana kompensasi BBM tergolong miskin dan 8% tidak

miskin. Di lain pihak, pemerintah juga memberikan bantuan melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Khususnya di bidang pendidikan sebesar Rp3.500 per bulan kepada satu keluarga di daerah perkotaan (2,8%) yang tergolong keluarga miskin. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 15.

	Sumber		Ko	ota			D	esa		Total (Kota+Desa)					
		N.	liskin (36)	Tidak Miskin (24)		Miskin (79)		Ν	Гidak ⁄Iiskin (101)		Miskin (115)	Tidak Miskin (125)			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
	BBM	8	22,2	2	8,3	9	11,4	8	7,9	17 14,8		10	8,0		
	JPS	1	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1 0,9		0	0,0		

Tabel 15 Sebaran jenis program pemerintah dan tingkat kesejahteraan

Menurut Samhudi (2005), tujuan dari program pemberian dana BLT bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi menjaga agar daya beli atau kesejahteraan masyarakat miskin tidak menurun karena adanya kenaikan harga BBM. Namun, dengan adanya dana kompensasi BBM atau BLT diharapkan beban masyarakat miskin dapat berkurang. Menurut Maulana (2006), pemberian dana BLT yang diberikan oleh pemerintah dalam pemanfaatannya tidak disosialisasikan dengan jelas oleh pemerintah tentang penggunaan uang tersebut. Tidak adanya sosialisasi yang jelas, tidak ada larangan juga bagi penerima BLT untuk membeli barang-barang yang sifatnya kurang berguna seperti rokok atau untuk taruhan bermain togel. Sementara itu, Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada dasarnya adalah program intervensi yang cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan (Raharjo 1998). Hanya satu keluarga di daerah perkotaan yang memperoleh JPS untuk mengatasi pendidikan anak.

B. Kelembagaan Sosial dan Kemiskinan

Lembaga sosial yang dimaksud adalah institusi-institusi finansial yang dapat memberikan kredit atau pinjaman kepada keluarga, baik berupa uang maupun barang seperti mobil atau motor. Adapun lembaga-lembaga

finansial tersebut misalnya BRI, BPD, Bank Mandiri, dan Bank Jabar. Selain lembaga finansial yang bersifat formal, bantuan-bantuan gratis yang tidak mengikat keluarga seperti dari individu, keluarga, dan kerabat juga mempunyai kepedulian terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, ada dua sumber yang diakses oleh keluarga dalam meningkatkan pendapatan. Pendapatan keluarga adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga atau rumah tangga. Sumber daya uang (pendapatan) yang dimiliki suatu keluarga relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga finansial yang dapat dimanfaatkan keluarga untuk memperoleh akses pinjaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden di kota yang melakukan pinjaman pada lembaga keuangan (8,3%) tergolong miskin, sedangkan responden di desa yang melakukan pinjaman pada lembaga yang sama (6,1%) tergolong tidak miskin. Sebanyak 1% responden di daerah pedesaan memperoleh bantuan keuangan dari individu, tetapi tergolong tidak miskin. Sebanyak 8,3% responden di kota yang memperoleh kredit barang tergolong miskin, sedangkan responden di desa yang memperoleh kredit barang sebesar 45,6% adalah tergolong miskin. Dengan demikian, secara keseluruhan (8,8%) dari mereka melakukan kredit uang pada institusi dibanding individu karena tergolong tidak miskin, sedangkan 8,7% tergolong miskin. Sementara itu, sebanyak 16% keluarga yang melakukan kredit barang melalui individu dibanding melalui Institusi karena mereka ini tergolong tidak miskin, sedangkan 33,9% adalah tergolong miskin. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16 Sebaran akses pinjaman atau bantuan dari institusi/individu dan tingkat kesejahteraan

			Kota				Desa	ı	Total (Kota+Desa)				
Sumber	Miskin (36)		Tidak Miskin (24)		Miskin (79)		Tio	dak Miskin (101)	Miskin (115)		Tidak Miskin (125)		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1.Institusi													
Lembaga Keuangan	3 8,3		5	1,2	7	5,5	6	6,1	10	8,7	11	8,8	
Kredit Barang	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
2.Individu													
Bantuan Uang	0 0,0		0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8	
Kredit Barang	3	8,3	5	1,2	36	45,6	15	15,2	39	33,9	20	16,0	

Pada Tabel 16 menunjukkan bahwa terdapat 21 responden meminjam uang (kredit) pada lembaga finansial, sedangkan 1 responden di wilayah pedesaan mendapat bantuan uang dari mertua sebesar Rp5.000.000 yang digunakan untuk berobat. Jumlah peminjam maupun besar pinjaman yang cukup tinggi berada di BRI dan Bank Jabar. Bank Mandiri, BCA, dan BPD bernilai di atas 15 juta untuk daerah perkotaan, sedangkan untuk daerah pedesaan bernilai di atas 6 juta. Sementara itu, sebagian kecil peminjam maupun besarnya pinjaman baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan ada pada lembaga keungan yang lain, seperti BPR, Bank Keliling, dan P2KP yaitu di bawah dua juta rupiah. Jangka waktu pengembalian pinjaman oleh lembaga finansial umumnya 40 hari sampai lima tahun, adanya variasi jangka waktu pengembalian juga sangat tergantung pada besar kecilnya jumlah uang yang dipinjam.

Terdapat kecenderungan, semakin besar uang yang dipinjam, semakin lama jangka waktu pengembalian pinjaman. Sementara itu, bunga pinjaman masing-masing lembaga finansial juga bervariasi, bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga finansial. Hal ini mengindikasikan adanya polarisasi pinjaman antara pengusaha kecil atau rakyat biasa dengan pengusaha besar yang dapat mengarah pada kesenjangan ekonomi. Perbedaan perlakuan semacam ini bisa menimbulkan kesenjangan di bidang usaha, terutama pada akses produksi. Fenomena semacam itu secara luas memunculkan kesan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terhimpit dengan kemiskinannya. Jika sistem pinjaman semacam ini dibiarkan terus-menerus tanpa batas dan tanpa merubah sistem pemerataan pinjaman, sesungguhnya yang akan tetap bertahan tentulah pengusaha besar yang akan meraih keuntungan dengan situasi perekonomian seperti ini. Sementara itu, kelompok yang berada pada posisi bawah akan memperoleh sedikit keuntungan. Pada Tabel 24 menunjukkan bahwa kebanyakan responden yang meminjam uang pada lembaga finansial tergolong tidak miskin. Namun, ada beberapa responden yang meminjam uang pada koperasi dan Bank Jabar di daerah perkotaan yang tergolong miskin. Demikian pula responden di desa yang tergolong miskin meminjam uang pada lembaga finansial, kecuali ada beberapa responden yang tergolong miskin meminjam uang pada BPR, BKM, Bank Amanah Ummah, dan Koperasi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17 Sebaran Sumber pinjaman uang pada lembaga finansial dan tingkat kesejahteraan

			K	ota			De	esa		Total (Kota+Desa)				
Sumber	Besar Pinjaman (Rp)		Miskin (36)		Tidak Miskin (24)		Miskin (79)		Tidak Miskin (101)		Miskin (115)		Tidak Miskin (125)	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
	40.000.000	0	0,0	1	4,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	
	12.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8	
BRI	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8	
	6.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8	
	6.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8	
BPR	1.000.000	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	0,9	0	0,0	
Bank Mandiri	18.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8	
BCA	115.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8	
	20.000.000	1	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	
Bank Jabar	2.000.000	0	0,0	1	4,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	
	15.000.000	0	0,0	1	4,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	
BPD	35.000.000	0	0,0	1	4,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	
Bank Keliling	200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
P2KP	500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
BKM	1.000.000	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	0,9	0	0,0	
Bank Amanah	500.000	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	0,9	0	0,0	
PLN	3.000.000	1	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	
	2.000.000	0	0,0	1	4,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	
V	1.500.000	1	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	
Koperasi	500.000	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	0,9	0	0,0	
	200.000	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	0,9	0	0,0	

Uang yang dipinjam oleh responden dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hidupnya. Akan tetapi, secara umum terdapat tujuh macam penggunaan uang pinjaman yang dilakukan oleh responden. Sebanyak 8,3% responden di daerah perkotaan menggunakan uang pinjaman untuk membangun rumah yang tergolong tidak miskin, sedangkan 3,8% responden di pedesaan menggunakan uang pinjaman untuk modal usaha,

yang berstatus miskin. Sisanya digunakan untuk keperluan yang lain, seperti membeli pangan dan membeli kerbau. Secara umum, (3,2%) uang pinjaman, baik responden di kota maupun responden di desa digunakan untuk modal usaha atau modal dagang dan mereka ini tergolong tidak miskin, sedangkan 2,6% tergolong keluarga miskin. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18 Penggunaan pinjaman keluarga contoh dan tingkat kesejahteraan

	Kota]	Desa		Total (Kota+Desa)				
Penggunaan Uang	Miskin (36)		Tidak Miskin (24)			Miskin (79)		Tidak Miskin (101)		Miskin (115)		Tidak Miskin (125)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1. Modal Dagang	0	0,0	1	4,2	3	3,8	3	2,9	3	2,6	4	3,2	
2. Biaya sekolah	1	2,8	0	0,0	1	1,3	0	0,0	2	1,7	0	0,0	
3. Bangun rumah	0	0,0	2	8,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,6	
4. Beli mobil	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,9	0	0,0	2	1,6	
5. Beli motor	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	
6. Beli pangan	0	0,0	1	4,2	1	1,3	0	0,0	1	0,9	1	0,8	
7. Beli kerbau	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	0,8	

Selain bantuan finansial dari institusi atau individu, keluarga juga mengkredit barang/peralatan dari individu/institusi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 103 responden yang melakukan kredit barang dari tukang kredit. Jenis barang yang umumnya dikreditkan adalah motor, pakaian, dan peralatan rumah tangga baik responden yang tinggal di kota maupun responden yang tinggal di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden di kota yang melakukan kredit motor (8,3%), kredit pakaian (4,2%), dan kredit alat rumah tangga berstatus tidak miskin. Responden di desa yang mengkredit motor (7,6%), kredit alat rumah tangga (3,8%), dan kredit pakaian (15,2%) berstatus miskin. Jenis barang lain (17,8%) yang sering dikreditkan adalah kendaraan dan TV. Secara keseluruhan, baik responden di kota maupun di desa yang

mengkredit barang berupa pakaian (15,2%) tergolong tidak miskin, sedangkan 11,3% tergolong miskin. Jangka waktu pengembalian bervariasi, antara tiga bulan sampai lima tahun, seperti terlihat pada Tabel 19.

Tabel 19 Sebaran responden berdasarkan bantuan kredit barang dari institusi atau individu dan tingkat kesejahteraan

	Nama Barang		Ko	ota			De	esa		Total (Kota+Desa)				
Sumber		Miskin (36)		Tidak Miskin (24)			iskin 79)	M	idak iskin 101)	Miskin (115)		Tidak Miskin (125)		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
	Mobil	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8	
Pengusaha	Motor	0	0,0	2	8,3	6	7,6	5	5,0	6	5,2	7	5,6	
	TV	1	2,8	0	0,0	1	1,3	0	0,0	2	1,7	0	0,0	
Adira	Mobil	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8	
Adira	Motor	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	0	0,0	2	1,6	
D J	Mobil	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	0	0,0	2	1,6	
Dealer	Motor	0	0,0	0	0,0	2	2,5	3	3,0	2	1,7	3	2,4	
	Pakaian	1	2,8	0	0,0	1	1,3	0	0,0	2	1,7	0	0,0	
Pedagang	Alat RT	0	0,0	1	4,2	3	3,8	7	7,0	2	1,7	8	6,4	
	TV	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	0	0,0	2	1,6	
	Tas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8	
D 1	TV	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8	
Perusahaan	DVD	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	0,9	0	0,0	
T.1	Pakaian	1	2,8	1	4,2	12	15,2	18	17,8	13	11,3	19	15,2	
Tukang kredit	Alat RT	0	0,0	1	4,2	7	8,9	14	13,9	7	6,0	15	12,0	
C 1	TV	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	0,9	0	0,0	
Saudara	Kayu	0	0,0	1	4,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	
Tetangga	Tempat Tidur	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	0,9	0	0,0	
	Baju	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	0,9	0	0,0	

Adanya kecenderungan semakin tinggi harga barang, semakin lama pula jangka waktu peminjaman. Sejumlah akses keluarga contoh pada pinjaman atau kredit barang dan peralatan dari individu/institusi, terdapat 86 keluarga contoh diberlakukan kebijakan. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara responden dengan institusi atau individu atas barang/peralatan yang diambil. Bentuk kebijakan antara institusi atau individu dengan responden adalah apabila responden tidak melunasi barang yang dikredit sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan, atau jika responden tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut, akan ditarik kembali barang yang telah di kredit.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, peralatan atau barang yang dikredit sampai dengan berakhirnya penelitian ini, peminjam atau responden masih mampu membayar. Belum ada responden atau peminjam yang ditarik barangnya atau peralatannya akibat tidak mampu membayar atau melunasi kreditnya. Hal ini menunjukkan bahwa peminjam memiliki kemauan untuk berusaha, baik untuk konsumsi maupun untuk usaha produktif, sehingga tingkat kesejahteraan dapat dicapai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden di kota yang mengkredit TV sebesar 2,8% berstatus miskin, sedangkan responden di daerah pedesaan yang mengkredit motor dan memperoleh kebijakan sebesar 7,6% berstatus miskin. Selanjutnya, sebesar 34,2% responden di desa yang mengkredit pakaian, berstatus miskin. Secara keseluruhan, (5,6%) responden di kota maupun di desa mengkredit motor, mereka ini tergolong tidak miskin, sedangkan 5,2% tergolong miskin. Uraian responden yang mengkredit motor, peralatan rumah tangga, dan sisanya kredit barang-barang yang lain dapat dilihat pada Tabel 20.

C. Kepemilikan Aset Keluarga dan Kemiskinan

Aset adalah salah satu sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh keluarga. Aset akan berperan sebagai alat pemuasan kebutuhan manusia.

Tabel 20 Sebaran kebijakan pengembalian kredit barang dari institusi atau individu dan tingkat kesejahteraan

			K	ota			De	sa		Т	otal (Ko	ota+I	Desa)
Sumber	Nama Barang		iskin 36)	M	idak iskin 24)		iskin 79)	Mi	idak skin 101)		iskin 15)	Mi	idak iskin 125)
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Motor	0	0,0	0	0,0	6	7,6	7	6,9	6	5,2	7	5,6
	TV	1	2,8	0	0,0	2	2,5	1	1,0	3	2,6	1	0,8
Pengusaha	Mobil	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8
	Gorden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8
	Uang	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8
Adira	Motor	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8
BPR	Alat RT	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8
D = I	Motor	0	0,0	0	0,0	2	2,5	2	2,0	2	1,7	2	1,6
Dealer	Mobil	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	0	0,0	2	1,6
D. J	Pakaian	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,0	0	0,0	3	2,4
Pedagang	Alat RT	0	0,0	0	0,0	3	3,8	5	4,9	3	2,6	5	4,0
77.1	TV	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8
Tukang Kredit	Pakaian	0	0,0	0	0,0	27	34,2	5	4,9	27	23,4	5	4,0
Kiedit	Alat RT	0	0,0	0	0,0	5	6,3	4	3,9	5	4,3	4	3,2
Saudara	TV	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	1,9	0	0,0
Т	Alat RT	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	1,9	0	0,0
Tetangga	Motor	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8

Oleh karena itu, keluarga yang memiliki aset lebih banyak cenderung lebih sejahtera dibandingkan dengan keluarga yang memiliki aset terbatas. Kepemilikan aset meliputi kepemilikan rumah, kepemilikan ternak, kepemilikan kendaraan, kepemilikan alat elektronik, kepemilikan mebel, dan kepemilikan alat rumah tangga. Secara rinci, kepemilikan aset tersebut dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21 Sebaran kepemilikan aset contoh dan tingkat kesejahteraan

		Kota Desa					7	Total (Kota+Desa)				
Aset		iskin 36)	Mi	Tidak Miskin (24)		Miskin (79)		idak iskin 101)	Miskin (115)		M	idak iskin .25)
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
A.Rumah												
1. Sendiri	14	38,9	11	45,8	52	65,8	71	70,3	66	57,4	82	65,6
2. Kontrak	3	8,3	1	4,2	6	7,6	13	12,9	9	7,8	14	11,2
3. Milik orang tua	19	52,8	11	45,8	21	26,6	15	14,9	40	34,8	26	20,8
4. Lainnya	0	0,0	1	4,2	0	0,0	2	2,0	0	0,0	3	2,4
B.Ternak												
1. Sapi	0	0,0	0	0,0	1	1,3	4	4,0	1	0,9	4	3,2
2. Kambing	0	0,0	1	4,2	3	3,9	1	1,0	3	2,7	2	1,6
3. Ayam	1	2,8	1	4,2	8	10,1	8	8,0	9	7,8	9	7,2
4. Bebek	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,0	1	0,9	1	0,8
5. Merpati	1	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	1	0,8
C.Kendaraan												
1. Mobil	1	2,8	1	4,2	3	3,8	18	17,9	4	3,4	19	15,2
2. Motor	7	19,4	3	12,5	17	20,3	50	49,5	24	20,9	53	42,4
3. Sepeda	2	5,6	1	4,2	19	24,1	36	35,6	21	18,3	37	29,6
4. Truk	0	0,0	0	0,0	1	5,6	1	4,2	1	0,9	1	0,8
D.Elektronik												
1. Radio	20	55,6	16	66,7	36	45,6	60	59,4	56	48,7	76	60,8
2. Video	16	44,5	17	70,9	28	34,5	51	50,5	44	38,3	68	54,4
3. Sega	5	13,9	2	8,3	5	6,3	15	14,9	10	8,7	17	13,6
4. AC/Kipas	19	52,8	14	58,3	21	26,6	58	57,4	41	35,7	72	57,6
5. Komputer	1	2,8	2	8,3	0	0,0	9	8,9	1	0,9	11	8,8
6. Telepon/HP	9	25,0	13	54,2	13	16,4	36	35,6	21	18,2	49	39,2
7. TV	7	19,4	9	37,5	51	64,6	70	69,4	58	50,4	79	63,2
E.Mebel												
1. Kursi	26	72,3	18	75,0	51	64,6	75	74,3	77	67,0	93	74,4
2. Meja makan	9	25,0	12	50,0	26	32,9	54	53,5	35	30,4	66	52,8
3. Tempat tidur	33	91,7	22	91,7	70	88,6	99	98,0	103	89,6	121	96,8
4. Lemari pakaian	35	97,2	12	50,0	78	98,7	98	97,0	113	98,2	110	88,8
5. Lemari rias	9	25,0	6	25,0	15	19,0	51	50,5	24	20,7	57	45,6
6. Lemari buku	10	27,8	7	29,2	15	19,0	38	37,6	25	21,7	45	36,0
7. Lemari dapur	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1	0,8
8. Meja belajar	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	0	0,0	2	1,6

Tabel 21 Sebaran kepemilikan aset contoh dan tingkat kesejahteraan (lanjutan)

		Ko	ota			D	esa		7	Total (Kota+Desa)			
Aset	Miskin (36)		Tidak Miskin (24)		Miskin (79)		Tidak Miskin (101)		Miskin (115)		Tidak Miskin (125)		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
F.Alat RT													
1. Lemari makan	14	38,9	15	62,5	19	24,1	47	46,6	33	2,6	62	49,6	
2. Mesin cuci	4	11,1	8	33,3	4	5,1	21	20,8	8	6,9	29	23,2	
3. Rice cooker	14	38,9	10	41,6	19	24,1	53	52,5	33	28,7	63	50,4	
4. Oven	7	19,4	7	29,2	8	10,1	23	22,8	15	13,0	30	24,0	
5. Microwave	0	0,0	1	4,2	1	1,3	1	1,0	1	0,9	2	1,6	
6. Kulkas	14	38,9	11	45,8	16	20,2	53	52,5	30	26,0	64	51,2	
7. Mesin jahit	5	13,9	6	25,0	8	9,2	13	12,9	13	11,3	19	15,2	
8. Kompor gas	6	16,7	4	16,7	6	7,6	40	39,6	12	10,4	44	35,2	
9. Kompor minyak	33	91,7	23	95,8	73	92,4	95	94,1	106	92,1	118	94,4	
10. Rak piring	0	0,0	1	4,2	1	1,3	0	0,0	1	0,9	1	0,8	
11. Setrika	0	0,0	0	0,0	3	3,8	8	7,9	3	2,6	8	6,4	
12. Magic Jar	0	0,0	0	0,0	3	3,8	14	13,9	3	2,6	14	11,2	
13. Mixer	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	0	0,0	2	1,6	
14. Blender	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	4,0	0	0,0	4	3,2	
15. Dispenser	0	0,0	0	0,0	2	2,5	2	2,0	2	1,7	2	1,6	

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden di kota yang tinggal di rumah orang tua sebanyak 52,8% adalah miskin, sedangkan responden di desa yang tinggal di rumah sendiri sebesar 70,3% adalah tidak miskin. Sebesar 4,2% responden di kota yang memiliki ternak ayam adalah tidak miskin, sedangkan sebanyak 10,1% responden di desa yang memiliki ternak ayam adalah miskin. Sebesar 19,4% responden di kota yang memiliki motor adalah miskin, sedangkan sebanyak 49,5% responden di desa yang memiliki motor tergolong tidak miskin. Sebanyak 66,7% responden di kota yang memiliki radio tergolong tidak miskin, sedangkan responden di desa yang memiliki TV (69,4%) tergolong juga tidak miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 98,3% responden di kota yang memiliki lemari pakaian adalah miskin, sedangkan sebanyak 97% responden di desa yang memiliki lemari pakaian adalah tidak miskin. Sebanyak 95,8% responden di kota yang memiliki kompor minyak adalah

tidak miskin, sedangkan 94,1% responden di desa yang memiliki kompor minyak juga tidak miskin. Secara keseluruhan, (96,8%) responden lebih banyak memiliki tempat tidur dan tergolong tidak miskin, sedangkan 89,6% tergolong miskin.

D. Keadaan Lingkungan Tempat Tinggal dan Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 62,5% responden di kota yang memiliki rumah permanen adalah tidak miskin, hal yang sama yaitu sebanyak 95% responden di desa yang memiliki rumah permanen tidak miskin juga. Sebagian besar (95,8%) keluarga di kota menggunakan genting sebagai atap rumah tergolong tidak miskin, sedangkan sebanyak 92,1% keluarga di desa yang menggunakan genting sebagai atap rumah juga tidak miskin. Sebesar 83,3% responden di kota dan 90,1% responden di desa yang memiliki WC sendiri adalah tidak miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 100% keluarga di kota dan 99% keluarga di desa yang menggunakan listrik atau diesel adalah tidak miskin. Sebagian besar (95,9%) keluarga di kota dan 80,2% keluarga di desa yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar tergolong tidak miskin. Sebagian besar (77,8%) responden di kota yang memperoleh air minum dari PAM atau PDAM adalah miskin, sedangkan 65,3% responden di desa yang memperoleh air minum dari sumur pompa adalah tidak miskin. Demikian pula air untuk mandi, yaitu 73,3% keluarga di kota mengaksesnya dari PAM atau PDAM, sedangkan lebih dari separuh (59,4%) keluarga di desa mengaksesnya dari sumur pompa.

Slamet (1996) mengatakan pengaruh air yang langsung terhadap kesehatan sangat bergantung kepada kualitas karena air berfungsi selain sebagai penyalur, juga penyebar penyebab penyakit atau sebagai sarang insekta penyebab penyakit. Kualitas air bisa berubah, terutama di sungai atau kali disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang sebagian kecil masih membuang air besar di kali atau sungai. Selain itu, intensitas aktivitas penduduk tidak hanya membutuhkan air, tetapi juga meningkatkan jumlah air buangan. Buangan itu bersumber dari alam seperti air hujan, mineral terlarut, udara, tumbuhan atau hewan yang telah

membusuk, dan tumbuhan air. Buangan yang bersumber dari pertanian, misalnya erosi, kotoran hewan, pupuk, pestisida, dan air irigasi. Buangan yang bersumber dari air buangan, seperti pemukiman, industri, dan pengolahan limbah. Buangan yang bersumber dari waduk, seperti lumpur dan tumbuhan akuatik, sedangkan buangan yang bersumber dari sumber lain seperti industri konstruksi, pertambangan, air tanah, dan sampah (James 1985).

Penyakit menular yang disebabkan oleh air yang sudah tercemar adalah diare pada anak, hepatitis A, polio, cholera, disentri, typhus abdominalis, dan paratyphus (Bank Dunia 1989). Untuk mencegah berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh bawaan air, masyarakat perlu memperhatikan penyediaan air minum, kualitas air minum, dan standar air minum. Penyediaan air minum adalah penyediaan air bersih yang dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Kesehatan. DPU menangani masyarakat perkotaan, sedangkan Depkes menangani masyarakat pedesaan. Kualitas air minum yang ideal menurut Depkes, adalah jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Kualitas air minum ini bisa menjadi standar untuk standar air minum.

Sebagian besar (87,5%) keluarga di kota yang membuang sampah di tempat pembuangan sementara adalah tidak miskin, sedangkan 31,7% keluarga di desa yang membakar langsung sampah rumah tangga adalah tidak miskin juga. Keluarga sebagai pengguna produksi sekaligus pengonsumsi produksi akan membuang kembali ke alam sebagai kotoran atau sampah. Persoalannya adalah sebagian kecil keluarga masih membuang sampah di kebun dan halaman rumah. Jika terlalu banyak, akan menimbulkan pengotoran lingkungan. Dengan demikian, masyarakat akan terganggu kesehatannya karena kontak langsung dengan sampah, misalnya sampah beracun yang dapat menimbulkan penyakit.

Benenson (1970) mengatakan sejumlah penyakit yang ditimbulkan oleh sampah adalah disentri, *cholera*, *pest*, metan, dan *dioxida*. Slamet (1996) mengungkapkan hal untuk menghindari efek samping dari sampah, perlu pengelolaan dan pembuangan. Teknik pembuangan sampah dapat dilihat dari sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22 Sebaran lingkungan tempat tinggal keluarga contoh dan tingkat kesejahteraan

		Kota				D	esa			Total (Kota+	Desa)
Pernyataan		iskin 36)	M	Cdk iskin 24)		iskin 79)	Mi	dk skin (101)		liskin 115)	Tdk	Miskin (125)
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Tempat tinggal												
1. Permanen	22	61,1	15	62,5	58	73,4	96	95,0	80	69,5	111	88,8
2. Semi	12	33,3	8	33,3	11	13,9	2	2,0	23	20,0	10	8,0
3. Non-Permanen	1	2,8	0	0,0	10	12,7	3	3,0	11	9,6	3	2,4
4. Lainnya	1	2,8	1	4,2	0	0,0	0	0,0	1	0,9	1	0,8
Sumber air												
minum 1. PAM/PDAM	28	77,8	18	75,0	4	5,1	7	6,9	32	27,8	25	20,0
2. Sumur timba	1	2,8	1	4,2	21	26,6	7	6,9	22	19,1	8	6,4
3. Sumur pompa	0	0,0	1	4,2	39	49,3	66	65,3	39	33,9	67	53,6
4. Mata air	4	11,1	0	0,0	11	14,0	13	12,9	15	13,1	13	10,4
5. Sungai	0	0,0	0	0,0	2	2,5	5	5,0	2	1,7	5	4,0
6. Lainnya	3	8,3	4	16,6	2	2,5	3	3,0	5	4,3	7	5,6
Sumber air												
mandi	27	75,0	17	70.0	4	5,1	5	5,0	31	27,0	22	176
1. PAM/PDAM	2	5,6	1/	70,8 4,2	19	24,1	8	7,9	21	18,3	9	17,6 7,2
2. Sumur timba	0	0,0	2	8,3	40	50,6	67	66,3	40	34,8	69	55,2
3. Sumur pompa	5	13,9	1	4,2	10	12,7	12	11,9	15	13,0	13	10,4
4. Mata air	0	0,0	1	4,2	5	6,3	8	7,9	5	4,3	9	7,2
5. Sungai	2	5,6	2	8,3	1	1,3	1	1,0	3	2,6	3	2,4
6. Lainnya												
Tempat sampah 1. Kali/sungai	10	27,8	2	8,3	15	19,0	13	12,9	25	21,7	15	12,0
2. Kebun	0	0,0	0	0,0	19	24,1	27	26,7	19	16,5	27	21,6
3. Halaman	0	0,0	1	4,2	9	11,4	7	6,9	9	7,8	8	6,4
4. Dibakar	0	0,0	0	0,0	16	20,3	32	31,7	16	13,9	32	25,6
5. Sementara	26	72,2	21	87,5	20	25,3	22	21,8	46	40,0	43	34,4
Tempat BAB												
1. Kali/sungai	5	13,9	3	12,5	15	19,0	7	6,9	20	17,4	10	8,0
2. WC sendiri	27	75,0	20	83,3	57	72,2	91	90,1	84	73,0	111	88,8
3. WC umum	4	11,1	1	4,2	7	8,8	3	3,0	11	9,6	4	3,2
Kamar Mandi												
1. Ada	28	77,8	20	83,3	63	79,7	96	95,0	91	79,1	116	92,8
2. Tidak ada	8	22,2	4	16,7	16	20,3	4	5,0	24	20,9	9	7,2
Penerangan												
1. Sentir/teplok	1	2,8	0	0,0	2	2,6	1	1,0	3	2,6	1	0,8
2. Listrik/diesel	35	97,2	24	100	77	97,4	100	99,0	112	97,4	124	99,2

Tabel 22	Sebaran lingkungan tempat tinggal keluarga contoh dan tingkat
	kesejahteraan (lanjutan)

		Kota				Desa				Total (Kota+Desa)			
Pernyataan		Miskin (36)		Tdk Miskin (24)		Miskin (79)		Tdk Miskin (101)		liskin 115)	Tdk Miskin (125)		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Bahan bakar													
1. Kayu bakar	2	5,6	0	0,0	29	36,8	8	7,9	31	26,9	8	6,4	
2. Minyak tanah	33	91,7	23	95,9	47	59,5	81	80,2	80	69,6	104	83,2	
3. Gas	1	2,7	1	4,2	3	3,7	12	11,9	4	3,5	13	10,4	
Atap rumah													
1. Genting	30	83,3	23	95,8	69	87,3	93	92,1	99	86,1	116	92,8	
2. Daun	0	0,0	0	0,0	1	1,3	0	0,0	1	0,9	0	0,0	
3. Lainnya	6	16,7	1	4,2	9	11,4	8	7,9	15	12,0	9	7,2	

Usaha pertama adalah mengurangi sumber sampah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan cara: (a) meningkatkan pemeliharan dan kualitas barang sehingga tidak cepat menjadi sampah; (b) meningkatkan efisiensi penggunaan lahan baku; dan (c) meningkatkan penggunan bahan yang dapat terurai secara alamiah, misalnya pembuangan plastik diganti menjadi pembungkus kertas. Semua usaha ini memerlukan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan ditujukan pada pengumpulan sampah, mulai dari produsen sampai pada tempat pembuangan akhir (TPA) dengan membuat tempat penampungan sementara (TPS), transportasi yang sesuai lingkungan, dan pengelolaan pada TPA. Secara umum, sebagian besar keluarga contoh di wilayah ini memiliki rumah permanen (88,8%), memiliki sumur pompa untuk kebutuhan air minum (53,6%), air untuk mandi (55,2%), membakar langsung sampah (25,6%), memiliki WC sendiri (88,8%), memiliki kamar mandi sendiri (92,8%), memiliki listrik sebagai penerangan rumah (99,2%), memiliki bahan bakar dari minyak tanah (83,2%), dan memiliki atap rumah dari genting (92,8%).

Keluarga contoh yang memiliki fasilitas rumah seperti ini termasuk tidak miskin. Selanjutnya, digambarkan secara garis besar tempat tinggal keluarga contoh tingkat desa atau kelurahan pada masing-masing kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dari dekat seberapa besar keluarga contoh dapat memiliki sarana dan

prasarana, serta fasilitas ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh keluarga contoh. Adapun gambaran umum desa atau kelurahan contoh di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor adalah sebagai berikut.

Desa Cicadas

Desa Cicadas merupakan salah satu desa di Kecamatan Ciampea yang jaraknya ke ibukota kecamatan 2,5 km, ke ibukota kabupaten 25 km, ke ibukota propinsi 150 km, dan ke ibukota negara 130 km. Sarana dan prasarana perhubungan yang ada di desa, adalah jalan hotmik 2 km, jalan pengerasan 7 km, jembatan permanen 6 buah, dan jembatan darurat 2 buah. Sementara itu, fasilitas ekonomi masyarakat yang ada di wilayah desa ini adalah sebuah pasar, seperti Pasar Ciampea yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh keluarga di wilayah ini, jaraknya kurang lebih 5 km.

Desa Tegalwaru

Desa Tegalwaru merupakan sebuah desa di Kecamatan Ciampea yang jaraknya ke ibukota kecamatan 2 km, ke ibukota kabupaten 20 km, dan ke ibukota propinsi 132 km. Sarana dan prasarana perhubungan yang ada di desa adalah jalan beton 4 km, jalan hotmik 6 km, jalan pengerasan 5 km, jalan tanah 2 km, jalan gang 3 km, dan jembatan 4 buah. Fasilitas ekonomi yang ada di desa tersebut yaitu kios/toko/warung 40 buah, bagan bangunan 1 buah, wartel 1 buah, dan pom bensin 1 buah.

Desa Wanaherang

Desa Wanaherang adalah salah satu desa di Kecamatan Gunung Putri yang jaraknya ke ibukota kecamatan 0,5 km, ke ibukota kabupaten 17 km, ke ibukota propinsi 120 km, dan ke ibukota negara 3 km. Sarana dan prasarana perhubungan yang ada, antara lain jalan hotmik 4,6 km, jalan aspal 6,2 km, jalan pengerasan 3,8 km, jalan tanah 1,5 km, jalan gang 2,2 km, dan jembatan 4 buah. Fasilitas ekonomi yang ada di desa adalah pasar desa 1 buah, minimarket 1 buah, toko/warung/kios 38 buah, bank pemerintah 1 buah, toko bahan bangunan 7 buah, toko keramik untuk lantai 12 buah, toko pupuk pertanian 2 buah, pompa bensin 1 buah, pangkalan minyak tanah 1 buah, dan wartel 14 buah.

Desa Ciangsana

Desa Ciangsana juga merupakan salah satu desa di Kecamatan Gunung Putri yang jaraknya ke ibukota kecamatan kurang lebih 9 km, ke ibukota kabupaten 20 km, ke ibukota propinsi kurang lebih 160 km, dan ke ibukota negara 20 km. Sarana dan prasarana perhubungan yang ada di desa antara lain jalan beton 1 km, jalan hotmik 5 km, jalan aspal 3 km, jalan pengerasan 4 km, jalan tanah 2 km, dan jembatan 4 buah. Fasilitas ekonomi yang ada di desa, adalah minimarket 3 buah, toko/warung/kios 586 buah, bank Swasta 1 buah, toko bangunan 9 buah, wartel 12 buah, dan pangkalan BBM 2 buah.

Desa Cibeureum

Desa Cibeureum adalah salah satu desa di Kecamatan Cisarua yang jaraknya ke ibukota kecamatan kurang lebih 3,5 km, ke ibukota kabupaten 46 km, ke ibukota propinsi kurang lebih 93 km, dan ke ibukota negara 62 km. Sarana dan prasarana perhubungan yang ada di desa antara lain jalan lingkup kabupaten 3 km, jalan aspal 7 km, jalan pengerasan 4 km, jalan tanah 2 km, dan jalan gorong 3 km. Fasilitas ekonomi yang ada di desa, adalah sawah 2 ha, kebun/ladang/tegalan 169,12 ha, perikanan air tenang 1 ha, dan sarana rekreasi atau wisata 130,5 ha.

Desa Kopo

Desa Kopo adalah salah satu desa di Kecamatan Cisarua yang jaraknya ke ibukota kecamatan 1 km, ke ibukota kabupaten 38 km, ke ibukota propinsi 95 km, dan ke ibukota negara 75 km. Sarana dan prasarana perhubungan yang ada di desa antara lain jalan hotmik 6 buah, jalan penetrasi 5 buah, jalan batu 1 buah, jalan tanah 1 buah, jembatan besar 7 buah, dan jembatan kecil 1 buah. Fasilitas ekonomi yang ada di desa adalah sawah 44,05 ha dan tegalan 102 ha.

Kelurahan Babakan Pasar

Kelurahan Babakan Pasar adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah yang jaraknya ke ibukota kecamatan 1 km, ke kota 1 km, ke ibukota propinsi kurang lebih 110 km, dan ke ibukota negara 50 km.

Sarana dan prasarana perhubungan yang ada di desa antara lain pasar kelurahan 1 buah, pasar swalayan 2 buah, restoran 4 buah, pertokoan 218 buah, kios 416 buah, warung 38 buah, pedagang kaki lima 257 buah, angkutan kota 11 buah, bemo 2 buah, wartel 10 buah, telepon umum 27 buah, dan kios telekomunikasi 2 buah.

Kelurahan Gudang

Kelurahan Gudang juga merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah yang jaraknya ke ibukota kecamatan kurang lebih 1,5 km, ke kota 0,5 km, ke ibukota propinsi 110 km, dan ke ibukota negara 50 km. Sarana dan prasarana perhubungan yang ada di desa antara lain jalan lingkungan 7 buah, jalan kelurahan 1 buah, jalan ekonomi 1 buah, jalan protokol 1 buah, gang kereta api 1 buah, jembatan beton 2 buah, dan jembatan bambu 1 buah. fasilitas ekonomi yang ada di kelurahan adalah 1 buah pasar kelurahan dan Bogor, atau pasar umum yang jaraknya 1 km, dan daerah pertokoan kurang lebih 2,5 ha.

Bab Tingkat Kesejahteraan Keluarga

A. Akurasi Berbagai Metode Pengukuran Kesejahteraan

Uji sensitivitas dan spesifisitas dilakukan untuk menilai berbagai indikator kesejateraan. Sensitivitas (Se) adalah kemampuan untuk menemukan rumah tangga miskin, sedangkan spesifisitas (Sp) adalah kemampuan untuk menemukan rumah tangga yang tidak miskin. Sebaran keluarga contoh di desa berdasarkan indikator kesejahteraan BKKBN adalah Pengeluaran Pangan dan Persepsi Keluarga menggunakan BPS sebagai *benchmark*.

Hasil analisis khi (Q) kuadrat menunjukkan adanya hubungan yang nyata (p<0,01) antara kriteria kemiskinan BKKBN, Pengeluaran Pangan, dan kriteria BPS. Kriteria Persepsi Keluarga menunjukkan tidak adanya hubungan yang nyata (p>0,05) dengan kriteria BPS. Persentase misklasifikasi (positif semu) yang cukup tinggi terjadi pada kriteria Persepsi Keluarga yaitu 65,5%, sedangkan misklasifikasi pada kriteria BKKBN sebesar 41,1%. Menurut kriteria BKKBN dan kriteria Persepsi Keluarga, mengategorikan rumah tangga adalah miskin, sedangkan menurut kriteria BPS tidak miskin. Persentase misklasifikasi yang paling rendah terjadi pada kriteria Pengeluaran Pangan yaitu sebesar 22%.

Pihak lain, sebaran keluarga contoh di daerah perkotaan dengan menggunakan indikator kesejahteraan BKKBN, Pengeluaan Pangan, dan Persepsi Keluarga dengan menggunakan BPS sebagai *benchmark* menunjukkan adanya hubungan yang nyata (p<0,05) antara keempat

kriteria tersebut. Sementara itu, kriteria Persepsi Keluarga menunjukkan tidak adanya hubungan yang nyata (p>0,05) antara kriteria Persepsi Keluarga dengan kriteria BPS. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23 Sebaran contoh berdasarkan Kriteria BKKBN, Pengeluaran Pangan, dan Persepsi Keluarga dengan Kriteria BPS sebagai *Benchmark* di desa

			Kri	teria K	emiskinan	BPS		Khi Kuadrat	
Indikator	Status Kemiskinan	N	Iiskin	Tida	k Miskin	7	Total		
	remonitari	n	%	n	%	N	%	rauciut	
BKKBN	Miskin	10	83,3	69	41,1	79	43,9		
	Tidak Miskin	2	16,7	99	58,9	101	56,1	0,005*	
	Total	12	100,0	168	100,0	180	100,0		
D 1	Miskin	10	83,3	37	22,0	47	26,1		
Pengeluaran Pangan	Tidak Miskin	2	16,7	131	78,0	133	73,9	0,000*	
r angan	Total	12	100,0	168	100,0	180	100,0		
Persepsi Keluarga	Miskin	11	91,7	110	65,5	121	67,2		
	Tidak Miskin	1	8,3	58	34,5	59	32,8	0,042	
	Total	12	100,0	168	100,0	180	100,0		

Keterangan: *nyata pada p<0,01

Persentase misklasifikasi yang cukup tinggi terjadi pada kriteria Persepsi Keluarga yaitu 68,6%, sedangkan misklasifikasi pada kriteria BKKBN sebesar 52,9%. Menurut kriteria BKKBN dan kriteria Persepsi Keluarga, yang mengategorikan rumah tangga miskin, ternyata menurut kriteria BPS tidak miskin. Persentase misklasifikasi yang paling rendah terjadi pada kriteria Pengeluaran Pangan yaitu sebesar 19,6%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sensitivitas yang tinggi di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan terjadi pada kriteria BKKBN dan kriteria Persepsi Keluarga. Sebaliknya, spesifisitas yang sangat tinggi terjadi pada kriteria Pengeluaran Pangan jika menggunakan BPS sebagai *benchmark*. Secara umum, sensitivitas yang tinggi terjadi pada kriteria BKKBN dan kriteria Persepsi Keluarga, sedangkan spesifisitas yang cukup tinggi terjadi pada kriteria Pengeluaran Pangan, sebagaimana terlihat pada Tabel 24.

Tabel 24 Sebaran contoh berdasarkan Kriteria BKKBN, Pengeluaran Pangan, Persepsi Keluarga dengan Kriteria BPS sebagai *Benchmark* di kota

	Ç		Krite	eria Ke	miskinan I	3PS		171 •
Indikator	Status Kemiskinan	M	iskin	Tida	k Miskin	7	Гotal	Khi Kuadrat
	Kelliiskillali	n	%	n	%	N	%	Kuadrat
	Miskin	9	100.0	27	52,9	36	60,0	
BKKBN	Tidak Miskin	0	0.0	24	47,1	24	40,0	0,006*
	Total	9	100.0	51	100,0	60	100,0	
	Miskin	6	66.7	10	19,6	16	26,7	
Pengeluaran Pangan	Tidak Miskin	3	33.3	41	80,4	44	73,3	0,036*
	Total	9	100.0	51	100,0	60	100,0	
	Miskin	8	88.9	35	68,6	43	71,7	
Persepsi Keluarga	Tidak Miskin	1	11.1	16	31,4	17	28,3	0,205
	Total	9	100.0	51	100,0	60	100,0	

Keterangan: *nyata pada p<0,05

B. Tingkat Kesejahteraan di Desa dan Kota

Kesejahteraan menurut BKKBN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden makan lebih atau sama dengan dua kali sehari, lantai rumah bukan dari tanah, dan mempunyai pakaian yang berbeda. Selanjutnya, sebagian besar responden makan daging/telur/ikan seminggu sekali, demikian pula membeli baju baru. Selain itu, ditemukan lebih dari setengah keluarga memiliki rumah dengan luas lantai rata-rata <8 m² per anggota keluarga. Berdasarkan identifikasi indikator kemiskinan, alasan ekonomi untuk daerah perkotaan diperoleh 60% keluarga contoh tergolong miskin jika dibandingkan dengan persentase populasi keluarga miskin (10,7%).

Tabel 25 Sensitivitas atau spesifisitas Kriteria BKKBN, Pengeluaran Pangan, dan Persepsi Keluarga dengan Kriteria BPS sebagai Benchmark (%)

Indikator	Ko	ota	D	esa	Total (Kota + Desa)		
Kemiskinan	Sensitivitas	Spesifisitas	Sensitivitas	Spesifisitas	Sensitivitas	Spesifisitas	
BKKBN	100,0	47,1	83,3	59,0	90,5	56,1	
Pengeluaran Pangan	66,7	80,4	83,3	77,9	76,1	78,5	
Persepsi Keluarga	88,9	31,4	91,7	34,5	90,5	33,8	

Perbedaan yang cukup tinggi ini diakibatkan oleh cukup tingginya prevalensi kemiskinan di Kecamatan Bogor Tengah, khususnya Kelurahan Gudang dan Babakan Pasar. Sementara itu, di daerah pedesaan, sebanyak 44% keluarga contoh tergolong miskin jika dibandingkan dengan persentase populasi keluarga miskin (49,8%). Perbedaan yang tidak terlalu jauh ini diakibatkan oleh cukup rendahnya prevalensi kemiskinan di desa. Beberapa kelemahan penentuan kesejahteraan BKKBN adalah (1) banyaknya data dan informasi yang harus dikumpulkan membutuhkan tingkat pemahaman yang cukup tinggi. Padahal tidak setiap kader mampu menguasai permasalahan karena di antara mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, variabel melaksanakan ibadah sangat subjektif dan sulit dinilai karena pertanyaan tersebut sangat bersifat individual atau subjektif. Variabel minimum mengonsumsi pangan hewani (daging/ telur/ikan) jika ditinjau dari segi elastisitas tidak seimbang karena telur mempunyai harga yang lebih murah, sehingga semua keluarga mampu mengonsumsinya. Sementara itu, daging memiliki harga yang lebih mahal, sehingga hanya sebagian keluarga saja yang dapat mengonsumsinya; (2) sistem nepotisme yang mengedepankan kekeluargaan membuat kader seringkali mengurangi atau menambah data sesuai program yang akan dilakukan, misalnya program JPS, raskin, beasiswa, dan pelayanan pengobatan gratis; (3) variabel memperoleh berita dari surat kabar/radio/ TV/majalah diklasifikasikan ke dalam KS-III. Padahal sudah hampir semua keluarga mampu mengakses radio dan TV yang saat ini sudah bukan merupakan kebutuhan sekunder, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26 Sebaran keluarga contoh berdasarkan Kriteria BKKBN dan tingkat kesejahteraan

		Kota				Desa				Total (K	Kota+D	esa)
Pernyataan		iskin 36)	Tidak Miskin (24)		Miskir (79)	1		idak in (101)		liskin 115)	Tidak Miskin (125)	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Makan <2 kali per hari	2,8	97,2	0,0	100	2,5	97,5	0	100	2,6	97,4	0,0	100
Lantai rumah sebagian besar tanah	2,8	97,2	0,0	100	17,7	82,3	0	0,0	13,0	87,0	0,0	100
Tidak punya pakaian yang berbeda	50,0	50,0	25,0	75,0	7,6	92,4	2,0	98,0	20,9	79,1	6,4	93,6
Makan daging/ telur/ikan <1 kali per minggu	83,3	16,7	100	0,0	84,8	15,2	99,0	1,0	84,3	15,7	99,2	0,8
Beli baju baru <1 kali setahun	63,9	36,1	100	0,0	93,7	6,3	100	0,0	84,4	15,7	100	0,0
Luas lantai rumah rata-rata <8 m² per anggota	41,7	58,3	66,7	33,3	49,4	50,6	83,2	16,9	45,2	54,8	80,0	20,0

Kelebihan kriteria BKKBN adalah mampu memberikan ukuran secara langsung kepada keluarga miskin, baik tingkat nasional, tingkat yang lebih rendah (desa atau kelurahan), maupun tingkat rumah tangga. Data tersebut dikumpulkan secara rutin melalui pendataan rumah tangga dengan menggunakan indikator-indikator ekonomi dan nonekonomi (Rambe 2005).

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik. Penggunaan kriteria kemiskinan BPS hanya mampu mengidentifikasi keluarga miskin di daerah perkotaan sebanyak 15%, sisanya 85% adalah keluarga tidak miskin. Sementara itu di daerah pedesaan, keluarga yang tergolong

miskin sebanyak 7%, sedangkan sisanya (93%) termasuk keluarga sejahtera. Rendahnya persentase keluarga miskin disebabkan oleh terlalu rendahnya garis kemiskinan yang digunakan jika dibandingkan dengan pendapatan, sehingga pengeluaran rumah tangga jauh lebih tinggi, garis kemiskinan berada jauh di bawah pengeluaran. Kelemahan indikator BPS di antaranya: (1) teknik sampling sensus blok untuk daerah perkotaan yang dilakukan Susenas bersifat tidak general dan tidak mampu mewakili keseluruhan rumah tangga. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan; (2) lamanya waktu wawancara dan keterbatasan daya ingat responden, lemahnya stratifikasi, dan keengganan responden untuk menjawab dengan benar, menghambat tercapainya mutu data yang diharapkan; (3) referensi yang berbeda-beda, satu minggu untuk makanan, sebulan, dan setahun untuk konsumsi bukan makanan akan menimbulkan banyak masalah; dan (4) beberapa peubah yang dinyatakan pada responden tidak mencerminkan pengeluaran riil rumah tangga, misalnya rumah tangga yang memiliki rumah sendiri harus diestimasi nilainya dan dianggap sebagai pengeluaran. Contoh lainnya, jika rumah tangga mendapat bantuan beras, harga beras tersebut dianggap sebagai pengeluaran dalam menghadiri suatu pesta makanan yang dikonsumsi dan diestimasi sebagai pengeluaran. Kelemahan lainnya belum mengaitkan keberadaan sarana dan prasarana wilayah dengan jumlah penduduk, sejauh mana keberadaan prasarana tersebut dapat menjangkau pun jadi tidak dapat digambarkan (Rusli et al. 1995). Kelebihan kriteria BPS adalah mudah dilakukan secara manual oleh pihak daerah, bahkan dengan menggunakan alat analisis statistik yang sederhana seperti penjumlahan skor.

Kesejahteraan menurut pengeluaran pangan. Berdasarkan indikator kemiskinan menurut kriteria Pengeluaran Pangan, sebagian besar (73%) keluarga di daerah perkotaan termasuk kategori sejahtera, sedangkan sisanya (27%) tergolong keluarga miskin. Sementara itu, sebanyak 74% keluarga di daerah pedesaan tergolong tidak miskin, sisanya 20% termasuk keluarga miskin. Menurut Raharto (2004), individu yang memiliki tingkat pendapatan tinggi akan membeli makanan dengan harga yang lebih mahal dan mengalokasikan untuk pengeluaran nonpangan lebih besar. Sementara

itu, pada keluarga berpendapatan rendah, sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan membeli makanan dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, besarnya proporsi pengeluaran untuk makanan adalah indikator kesejahteraan yang dapat diandalkan.

Beberapa kelemahan kriteria Pengeluaran Pangan adalah (1) dalam memperkirakan jumlah dan jenis konsumsi pangan yang tepat (consumption basket), khususnya pada saat terjadinya perubahan pola konsumsi pangan dan fluktuasi harga yang hebat. Namun, penggunaan pendekatan pola konsumsi pangan (consumption basket) untuk menghitung jumlah penduduk miskin, sebenarnya kontroversial dipandang dari sisi gizi. Nilai uang sejumlah kalori yang dikonsumsi dari pangan paling murah yang tersedia di pasar akan jauh lebih rendah dibanding harga kalori yang sama dari pangan dengan komposisi gizi seimbang, terdiri atas padi-padian, ikan, daging, dan sayur-sayuran (Irawan dan Sutanto 1999); (2) garis kemiskinan melalui pendekatan pengeluaran pangan sangat sensitif terhadap faktor harga, penentuan standar minimum kebutuhan dasar, pemilihan jenis paket komoditi, imputasi komponen bukan makanan, serta disparitas dan karakteristik wilayah. Rumitnya perhitungan garis kemiskinan konsumsi menggambarkan bahwa menghitung jumlah penduduk miskin tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Dengan memperluas dimensi kemiskinan ke dimensi-dimensi lain di luar dimensi konsumsi akan semakin menambah kerumitan penghitungan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, pertama-tama harus ada kesepakatan sosial untuk menentukan dimensi apa saja yang akan dimasukkan ke dalam penghitungan. Dimensi konsumsi dan dimensi-dimensi lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, jaminan masa depan, dan peranan sosial perlu diakomodasi dalam perhitungan tingkat kemiskinan (Rambe 2005).

Kesejahteraan menurut Persepsi Keluarga. Uji reliabilitas Persepsi Keluarga dengan menggunakan metode internal konsistensi *Alpha Cronbach*. Menunjukkan bahwa *Alpha Cronbach* uji reliabilitas adalah 0,772, sedangkan *Alpha Cronbach standardizes* (eror) adalah 0,677. Hal ini dapat dilihat pada klasifikasi kesejahteraan berdasarkan Persepsi Keluarga contoh di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Klasifikasi kesejahteraan berdasarkan Persepsi Keluarga di daerah perkotaan

diperoleh 72% termasuk kategori miskin, sedangkan Persepsi Keluarga contoh di daerah pedesaan terhadap kesejahteraan adalah 67%. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan contoh masih menganggap keluarganya tidak miskin. Menurut Diener dan Biswas (2000), kesejahteraan secara subjektif menggambarkan evaluasi individu terhadap kehidupannya, yang mencakup kebahagiaan, kondisi emosi gembira, kepuasaan hidup, relatif tidak adanya semangat, dan emosi yang tidak menyenangkan. Persepsi masyarakat mengenai kesejahteraan keluarga dapat dilihat melalui beberapa indikator keluarga sejahtera berdasarkan BKKBN (2001), antara lain kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, dan kesehatan), kebutuhan sosial psikologi (pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi sosial internal, dan ekternal), serta kebutuhan pengembangan (agama, tabungan, dan akses informasi).

Walaupun banyak di antara keluarga contoh yang dilihat dari kondisi objektif tergolong mampu, tetapi interpretasi subjektif tentang pendapatan, kepemilikan rumah, konsumsi pangan, pekerjaan, dan kepemilikan pakaian pada beberapa masalah ternyata mereka mengatakan miskin. Kondisi ini sebenarnya terbangun sejak krisis ekonomi, yang kemudian diperparah dengan kenaikan harga BBM, dan melonjaknya harga barangbarang. Sementara itu, pendapatan mereka tidak sebanding dengan kenaikan harga barang-barang dan kenaikan harga BBM. Pendekatan subjektif menginterpretasikan kemiskinan berdasarkan pemahaman mereka terhadap keadaan yang dihadapi, yang tidak mungkin individu lain mentransendentalkan keadaan tersebut pada wilayah kehidupan mereka dalam tataran mikro. Oleh karena itu, pendekatan subjektif sulit digunakan dalam studi-studi makro, tetapi bisa memberikan pengertian yang mendalam tentang masalah kemiskinan pada berbagai ruang dan latar kehidupan dari masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Lampiran 2, menunjukkan lebih dari separuh responden di kota maupun di desa memiliki persepsi bahwa konsumsi makanan sudah mencukup. Sebagian besar (83,3%) responden di kota maupun di desa mengatakan pakaian yang diperoleh sudah layak, sedangkan sebagian besar responden memiliki persepsi bahwa rumah yang dimiliki sudah

layak dihuni dengan fasilitasnya (65,0%) untuk responden di kota, di desa (73,3%). Akan tetapi, sebagian besar (80%) responden di kota dan 70,6% responden di desa berpandangan bahwa pendapatan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan keluarga. Pada bidang kesehatan, keluarga tidak mengalami kesulitan untuk membiayai kesehatan karena adanya kemudahan memperoleh obat-obatan farmasi. Agama merupakan salah satu contoh kebutuhan dasar manusia dan hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa, seluruh keluarga memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sesuai dengan agama masing-masing dan memiliki kitab suci, serta menikmati kebahagian suasana hari raya agamanya.

Dalam memenuhi kebutuhan sosial psikologi, sebagian besar (65%) responden di kota dan 84% responden di desa memiliki pandangan bahwa ada kemudahan dalam pelayanan KB, kebanyakan mempunyai keinginan untuk meningkatkan pendidikan. Sebagian besar (85%) responden beranggapan bahwa keluarga merasa aman dari gangguan kejahatan dan memiliki hubungan yang terjalin dengan baik antaranggota keluarga, baik di kota maupun di desa, serta sebagian besar selalu bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu. Dalam melakukan interaksi eksternal, sebagian besar responden berpartisipasi dalam arisan, pengajian, pertemuan-pertemuan, kegiatan kebersihan, dan kegiatan gotong-royong di lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu indikator keluarga sejahtera adalah mampu memberikan sumbangan (kontribusi) terhadap masyarakat. Sebagian besar responden memiliki anggapan bahwa, keluarga tidak bisa menjadi orang tua asuh anak-anak yang tidak mampu atau putus sekolah. Selain itu, juga dianggap tidak berpartisipasi dalam pembinaan keterampilan, mental, dan spiritual pada anak putus sekolah. Akan tetapi, lebih dari separuh responden memberikan persepsi bahwa keluarga telah mampu memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, dan orang jompo.

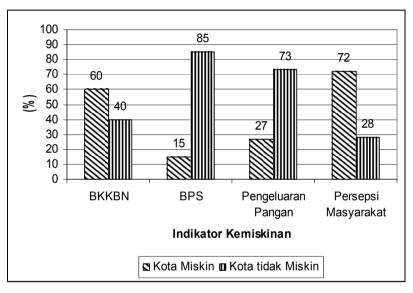
Lebih dari separuh (53,3%) responden di kota dan sebagian besar (73,9%) responden di desa mempunyai pandangan bahwa pekerjaan dapat membuat keluarga sejahtera, tetapi pekerjaan formal sulit untuk diperoleh. Sebagian besar responden juga memberikan persepsi harga BBM dan harga barang-barang saat ini dapat meresahkan dan menyulitkan keluarga.

Adanya raskin tidak mempermudah keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan. Oleh karena itu, sebagian besar responden beranggapankeluarga perlu menyesuaikan pengeluaran agar kebutuhan makan terpenuhi.

Untuk mengatasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan, lebih dari separuh responden berpandangan bahwa keluarga tidak harus menggadaikan barang dan meminjam uang untuk mengatasi kebutuhan makan, tetapi keluarga juga memperoleh bantuan orang tua asuh guna membiayai anak sekolah. Sebagian besar responden memiliki pandangan bahwa mereka bahagia dengan jumlah anak yang dimiliki sekarang dan tidak menganggap jumlah anggota keluarga akan menyulitkan keluarga dalam mengatasi kebutuhan. Alokasi waktu dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan tingkat hidup seseorang. Akan tetapi, penggunaan waktu berbeda-beda antarindividu satu dengan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden tidak membuat alokasi waktu untuk bekerja, mengurus rumah, dan rekreasi. Secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

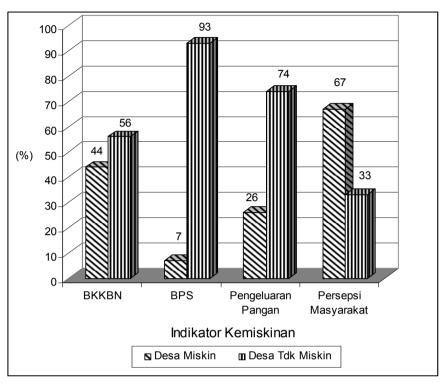
Kelemahan kriteria Persepsi Keluarga adalah pendekatan subjektif untuk mengukur tingkat kemiskinan yang sulit digunakan dalam studistudi makro karena setiap keluarga memiliki interpretasi berbeda tentang kondisi objektif yang dialami. Pendekatan ini sulit digunakan pada tingkat nasional, sehingga dipandang sebagai pelengkap untuk mengetahui secara mendalam mengenai rumah tangga miskin dan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sementara itu, kelebihannya adalah indikator yang dihasilkan dari penggunaan pendekatan subjektif akan sangat membantu dalam mengembangkan program-program intervensi pada kelompok sasaran spesifik, paling terpengaruh oleh krisis. Krisis multidimensional yang dialami Indonesia telah meningkatkan kemiskinan, baik kemiskinan kronik maupun kemiskinan sementara. Menurut Raharto dan Romdiati dalam WNKPG 2000, beberapa studi dampak krisis rumah tangga menunjukkan terdapat kelompok indikator spesifik yang dapat mengidentifikasi terjadinya kemiskinan sementara pada tingkat rumah tangga.

Raharto dan Romdiati *dalam* WNKPG 2000 menyatakan bahwa pendekatan subjektif mendefinisikan kemiskinan berdasarkan pemahaman penduduk mengenai standar hidup mereka dan bagaimana mereka mengartikannya. Pendekatan ini lebih cocok untuk studi-studi mikro karena biasanya menggunakan ukuran kualitatif. Dengan demikian, pendekatan ini tidak dapat digunakan pada tingkat nasional dan makro. Hanya dianggap sebagai pelengkap untuk mengetahui secara mendalam mengenai rumah tangga miskin sesuai pemahaman mereka.



Gambar 2 Sebaran keluarga berdasarkan kriteria kemiskinan di kota

Dari penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan kriteria pengukuran kemiskinan (BKKBN, Pengeluaran Pangan, dan Persepsi Keluarga), menurut hemat penulis, kriteria BKKBN dapat dijadikan sebagai indikator alternatif dengan pertimbangan. Walaupun indikator BKKBN memiliki kelemahan, tetapi kriteria BKKBN mampu memberikan ukuran secara langsung keluarga miskin pada tingkat nasional maupun tingkat yang lebih rendah (desa atau kelurahan) dan pada tingkat rumah tangga. Data-data tersebut dikumpulkan secara rutin melalui pendataan rumah tangga menggunakan indikator-indikator ekonomi dan nonekonomi oleh PLKB.



Gambar 3 Sebaran keluarga berdasarkan kriteria kemiskinan di desa

Persentase angka kemiskinan yang digambarkan pada Gambar 2 dan 3 tersebut dapat dikatakan bahwa keluarga yang tinggal di desa lebih sejahtera daripada keluarga yang tinggal di kota. Hal ini terlihat dari distribusi kriteria pengkuran kemiskinan pada kedua konsentrasi pemukiman tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori kemiskinan yang berada pada empat kriteria dengan nilai sebesar 5,4% memperlihatkan kemiskinan tersebut bisa saja terjadi pada kriteria BPS, BKKBN, Pengeluaran Pangan, dan Persepsi Keluarga. Sementara itu, tidak ada kemiskinan (0) dan bisa saja hasilnya akan sama ketika diukur dengan kriteria BPS, BKKBN, Pengeluaran Pangan, dan Persepsi Keluarga, demikian seterusnya. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 27.

PonSunarun		
Jumlah Kriteria Kemiskinan	Jumlah Katego	ri Kemiskinan
Juman Kintena Kemiskinan	n	%
4	13	5,4
3	30	12,5
2	68	28,3
1	84	35
0	45	18,8
Total	2/10	100

Tabel 27 Jumlah jawaban kategori kemiskinan berdasarkan kriteria pengukuran

C. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Keluarga

Faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek karakteristik keluarga, aspek sosial ekonomi, aspek ingkungan eksternal, dan aspek manajemen sumber daya keluarga. Aspek tersebut dianalisis melalui empat kriteria (BPS, BKKBN, Pengeluaran Pangan, dan Persepsi Keluarga). Analisis regresi logistik dilakukan terhadap peubah karakteristik demografi, sosial ekonomi, faktor eksternal (akses pada peminjaman uang, akses pada kredit barang atau peralatan, dan bantuan finansial dari pemerintah/individu), serta faktor manajemen sumber daya keluarga untuk mengetahui determinan kesejahteraan.

C.1. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Menurut BKKBN

Hasil analisis faktor yang paling berpengaruh nyata terhadap determinan kesejahteraan menurut kriteria BKKBN adalah jumlah anggota keluarga (p<0,05) dengan *odd ratio* 0,683. Artinya, keluarga yang memiliki jumlah anggota kecil mempunyai peluang untuk sejahtera sebanyak 0,683 kali lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang jumlah anggotanya besar.

Hatmadji dan Anwar (1993) mengatakan jumlah anggota keluarga yang kecil akan menyebabkan beban keluarga berkurang, sehingga tanggungan keluarga menjadi kecil. Tingkat pendapatan tertentu dengan anak yang sedikit akan memungkinkan anggaran biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anak lebih besar daripada keluarga dengan jumlah anak yang banyak. Disebutkan juga bahwa keluarga yang jumlah anggotanya besar akan menghadapi risiko besar menderita kekurangan gizi karena jumlah konsumsi pangan yang lebih kecil dibanding keluarga dengan jumlah anggota kecil pada tingkat pendapatannya sama. Hal ini disebabkan keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang besar sering kali mempunyai masalah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.

Menurut BPS (2003), kesejahteraan berkaitan dengan kebutuhan dasar. Jika kebutuhan bagi setiap individu atau keluarga tidak terpenuhi, dapat dikatakan tingkat kesejahteraan dari individu atau keluarga tersebut belum tercapai. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa pendapatan merupakan faktor penentu pada tingkat kesejahteraan keluarga. Pada hasil analisis terlihat bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Lee dan Hanna (1990) mengatakan terdapat hubungan negatif antara besar keluarga dengan kekayaan. Ukuran keluarga yang besar akan mengakibatkan menurunnya kekayaan yang akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan.

Usia suami (p<0,01) dengan *odd ratio* 0,928, yang artinya usia suami muda (produktif) mempunyai peluang untuk sejahtera sebanyak 0,928 kali lebih tinggi dibandingkan dengan usia suami yang sudah tua (tidak produktif). Usia istri (p<0,01) dengan *odd ratio* 1,077, artinya usia istri yang tua mempunyai peluang untuk sejahtera sebanyak 1,077 kali lebih tinggi dibandingkan dengan usia istri yang muda. Selanjutnya, mengenai usia produktif menurut BPS (2003) adalah usia 15–64 tahun, sedangkan usia tidak produktif adalah usia 14–65 tahun atau lebih. Sementara itu, yang disebut usia muda, baik suami atau istri adalah usia 15–44 tahun.

Lee dan Hanna (1990) mengatakan kesejahteraan keluarga mempunyai hubungan yang erat dengan usia. Kekayaan dan *human capital income* meningkat pada usia 55–59 tahun dan mulai menurun pada usia 59 tahun. Sebelum menikah, orang muda tidak mempunyai pendapatan dan banyak meluangkan waktu tanpa berpikir tentang masa depan. *Human capital*

akan menurun setelah masa pensiun karena pendapatan lebih rendah dari sebelumnya. Oleh karena itu, usia merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kekayaan, sejalan dengan persentase pendapatan yang bisa ditabung terus dari siklus hidup dan akan menunjukkan pola akumulasi kekayaan.

Keluarga muda menurut Guhardja *et al.* (1993) dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain tantangan akan pembentukan keluarga dan belajar untuk berperan sebagai ibu rumah tangga atau kepala keluarga. Tantangan akan memiliki anak yang tidak saja mendatangkan manfaat atau keuntungan, tetapi juga memerlukan biaya serta tantangan akan pendapatan keluarga muda yang relatif rendah dan memiliki kekayaan relatif sedikit. Rendahnya pendapatan ini biasanya disebabkan oleh belum banyaknya pengalaman kerja, keterbatasan keterampilan, atau yang tidak bekerja karena merawat anak-anaknya. Sebaliknya, istri yang tua atau dalam kategori keluarga menengah berusia 45–54 tahun, biasanya pendapatan keluarga mencapai tertinggi. Suami berada dalam puncak kariernya dan istri juga bekerja secara penuh atau paruh waktu, sehingga lebih sejahtera dari pada keluarga muda atau istri yang muda.

Pendidikan suami (p<0,01) dengan *odd ratio* 1,357, artinya pendidikan suami yang tinggi mempunyai peluang sejahtera 1,357 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan suami yang rendah. Menurut Lee dan Hanna (1990), terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan kesejahteraan. Semakin tinggi pendidikan yang diterima seseorang, baik suami maupun istri, semakin tinggi pula status ekonominya. Firdausy (1994) menyatakan keluarga yang dikepalai oleh seseorang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih miskin dibanding keluarga yang dikepalai oleh seseorang dengan pendidikan tinggi.

Keluarga dengan pendapatan tinggi (p<0,01) dengan *odd ratio* 1,000, artinya pendapatan yang tinggi memiliki peluang sejahtera 1,000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang berpendapatan rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Hartoyo dan Syarif (1993), bahwa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga terdiri dari faktor ekonomi dan bukan ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam memperoleh pendapatan. Keluarga

yang tidak sejahtera (miskin) memiliki pendapatan rendah. Rendahnya pendapatan tersebut, menurut Sharp *et al.* (1996) *dalam* Kuncoro 1997 disebabkan oleh adanya ketidakmampuan pola kepemilikan sumber daya, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta perbedaan akses dalam modal. Pekerjaan ibu (p<0,05) dengan *odd ratio* 2,351, artinya ibu yang bekerja berpeluang sejahtera 2,351 kali lebih tinggi daripada ibu yang tidak bekerja. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Lee dan Hanna (1990), bahwa terdapat hubungan yang positif antara pekerjaan dengan tingkat kesejahteraan. Pekerjaan berpengaruh positif pada akumulasi kekayaan karena *human capital income* menggambarkan pendapatan yang diperoleh.

Kepemilikian aset (p<0,1) dengan odd ratio 1,086, artinya keluarga yang memiliki aset berpeluang sejahtera 1,086 lebih tinggi daripada keluarga yang tidak memiliki aset. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Bryant (1990), bahwa aset adalah sumber daya atau kekayan yang dimiliki oleh keluarga. Aset akan berperan sebagai alat pemuas kebutuhan. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki aset lebih banyak cenderung lebih sejahtera dibandingkan dengan keluarga yang memiliki aset terbatas. Kepemilikan aset meliputi kepemilikan rumah, kepemilikan ternak, kepemilikan kendaraan, dan kepemilikan mebel. Kepemilikan tabungan (p<0,1) dengan *odd ratio* 2,922, artinya keluarga yang memiliki tabungan berpeluang sejahtera 2,922 kali lebih baik dari pada keluarga yang tidak memiliki tabungan. Bryant (1990) mengatakan tabungan merupakan suatu kegiatan penundaan kepuasan saat ini dan menghasilkan kepuasan di masa datang. Jadi, menabung merupakan simpanan uang di bank untuk menambah saldo dan bunga bank, yang pada suatu saat simpanan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga, baik bersifat primer maupun sekunder. Studi yang dilakukan oleh Markman (1997) menunjukkan bahwa uang memang masalah nomor satu yang sering dipertengkarkan para pasangan suami istri. Itu berarti, setiap keluarga entah kelompok yang berkelimpahan atau yang penghasilannya pas-pasan selalu rawan terhadap perselisihan gara-gara uang. Sebaliknya, konflik keluarga akan menurun apabila memiliki uang yang cukup. Dengan memiliki uang yang cukup, keluarga akan memperoleh kesejahteraan.

Tempat tinggal di Kabupaten Bogor (p<0,01) dengan odd ratio 0,257, artinya keluarga yang tinggal di Kabupaten Bogor mempunyai peluang sejahtera 0,257 kali lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tinggal di Kota Bogor. Perbedaan kesejahteran antara keluarga yang tinggal di kota dan desa dapat dipandang sebagai pembanding tingkat kesejahteraan keluarga antara Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Tingkat kesejahteran yang dialami kedua komunitas ini adalah sebagai dampak krisis ekonomi yang sampai saat ini masih dirasakan. Studi yang dilakukan oleh Maryono (1999) tentang Peta Dampak Krisis dan Kapasitas Masyarakat, mengungkapkan beberapa problem mendasar, antara lain: (a) dampak krisis pada kualitas kehidupan rumah tangga; (b) penghasilan rumah tangga desa dan kota; dan (c) kenaikan penghasilan masyarakat kota dan desa. Maryono menemukan bahwa masyarakat di perkotaan dan pedesaan sama-sama merasakan memburuknya kualitas kehidupan secara umum, tetapi masyarakat pedesaan lebih banyak yang merasakan adanya perbaikan nasib daripada masyarakat perkotaan. Masyarakat di perkotaan lebih merasakan kesulitan dalam mempertahankan penghasilan bersih rumah tangga. Penurunan penghasilan bersih lebih banyak terjadi di perkotaan daripada di pedesaan, sedangkan kenaikan penghasilan kebanyakan terjadi di pedesaan. Proporsi masyarakat pedesaan yang mengalami kenaikan penghasilan lebih besar daripada di masyarakat perkotaan. Mereka juga mengalami peningkatan pengeluaran, sehingga penghasilan bersihnya tidak bertambah.

Studi ini dilakukan di wilayah kota dan sebuah kabupaten setiap propinsi, sehingga dipandang representatif untuk menjelaskan perbedaan tingkat kesejahteraan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Hasil studi tersebut dapat mengeneralisir kehidupan masyarakat kota dan desa akibat krisis ekonomi. Memiliki perencanaan (p<0,01) dengan *odd ratio* 0,343, artinya keluarga yang memiliki perencanaan berpeluang sejahtera 0,343 kali lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki perencanaan. Salah satu fungsi manajemen keluarga adalah perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah keputusan keluarga untuk melakukan hal-hal yang akan dilakukan. Oleh karena itu, manfaatnya baru terlihat ketika perencanaan itu sudah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan di tingkat keluarga merupakan sebuah keputusan yang realistis, bisa dicapai dengan

sumber daya yang tersedia. Walaupun perencanaan di tingkat keluarga adalah sederhana, tetapi membutuhkan keterampilan dalam membuat rencana. Dalam hal inilah diperlukan keterlibatan anggota lain untuk memberikan kontribusi pemikiran. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28 Faktor yang bepengaruh terhadap kesejahteraan menurut BKKBN

Variabel Bebas	Indikator (0=	Tidak Sejahtera;	1= Sejahtera)			
Variabel Bebas	β	Sig	OR			
Jumlah anggota	-0,382	0,001*	0,683			
Usia KK	-0,074	0,018**	0,928			
Usia Istri	0,074	0,035**	1,077			
Pendidikan KK	0,305	0,025**	1,357			
Pendidikan istri	0,023	0,872	0,977			
Pendapatan per kapita	2,4x10 ⁻⁶	0,018**	1,000			
Pekerjaan KK (0= bukan dagang; 1= dagang)	-0,263	0,628	0,769			
Pekerjaan KK (0= bukan buruh; 1= buruh)	-0,381	0,412	0,683			
Pekerjaan Ibu (0= tidak bekerja; 1= bekerja)	0,855	0,048**	2,351			
Kepemilikan aset	0,082	0,087***	1,086			
Kepemilikan tabungan (0= tidak; 1= ya)	1,072	0,069***	2,922			
Perencanaan (0= tidak; 1= ya)	-1,070	0,010*	0,343			
Pembagian tugas (0= tidak; 1= ya)	0,259	0,533	1,296			
Pengontrolan (0= tidak; 1= ya)	0,882	0,104	2,416			
Pinjaman pada lembaga finansial	-0,051	0,927	0,951			
Bantuan BLT	-0,583	0,329	0,558			
Kepemilikan kredit	-0,347	0,382	0,707			
Lokasi (0= kota; 1= kabupaten)	-1,359	0,009*	0,257			
\mathbb{R}^2		0,457				
P	0,000					

Keterangan: *(p<0,01), **(p<0,05), ***(p<0,1)

Perencanaan yang baik menurut Guhardja *et al.* (1993) adalah dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan, sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana dapat mencegah pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan merupakan

inti dari proses manajemen. Rencana yang baik dapat menjelaskan mengapa suatu tujuan tercapai dan mengapa tidak tercapai. Misalnya, jika suatu keluarga berkeinginan untuk menyediakan makanan bergizi dalam jumlah kalori dan zat gizi disesuaikan dengan kebutuhan, dalam rencana perlu dinilai kemampuan pengetahuan gizi dan keterampilan memasak dari ibu.

C.2. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Menurut BPS

Hasil analisis faktor yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan menurut kriteria BPS adalah pendidikan istri (p<0,01) dengan odd ratio 0,370, pekerjaan suami bukan buruh (p<005) dengan odd ratio 0,039, pendapatan (p<0,05) dengan *odd ratio* 1000, kepemilikan aset (p<0,01) dengan odd ratio 0,034, dan memiliki perencanaan (p<0,01) dengan odd ratio 0,053. Nilai odd ratio dalam kriteria BPS menunjukkan bahwa, pendidikan istri yang tinggi mempunyai peluang sejahtera 0,370 kali lebih tinggi dibanding pendidikan istri yang rendah. Keluarga dengan pendapatan tinggi memiliki peluang sejahtera 1,000 kali lebih tinggi dibanding keluarga berpendapatan rendah. Keempat faktor menurut kriteria BPS (pendidikan istri, pendapatan, kepemilikan aset, dan perencanaan), deskripsinya sama dengan kriteria BKKBN, kecuali unsur pekerjaan suami bukan buruh. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Guhardja (1986) yang memperlihatkan upah buruh pada usahatani di Desa Cikarawang, sekitar Rp700 per jam berupa uang atau Rp350 per hari ditambah makan dan makanan kecil satu kali. Sementara itu, menuai yang biasanya dikerjakan oleh wanita, demikian pula menyiang dan tandun biasanya tidak diperhitungkan untuk masing-masing pekerjaan tersebut. Namun, disatukan seluruhnya dan upahnya tergantung pada hasil yang diperoleh pada waktu panen, sehingga tinggi rendahnya upah sangat tergantung pada tinggi rendahnya hasil yang diperoleh pada waktu panen. Upah seperti ini bisa dihitung sejauh mana tingkat kesejahteraan buruh yang bersangkutan. Berbeda dengan pedagang yang memiliki aset produksi, sehingga amatlah lumrah jika terjadi perbedaan tingkat kesejahteraan. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29 Faktor yang bepengaruh terhadap kesejahteraan menurut BPS

Variabel Bebas	Indikator (0= Tidak Sejahtera; 1= Sejahtera)		
	β	Sig	OR
Jumlah anggota	-0,253	0,277	0,777
Usia KK	0,061	0,538	1,063
Usia Istri	-0,104	0,341	0,901
Pendidikan KK	0,526	0,206	1,692
Pendidikan istri	0,995	0,043**	0,370
Pendapatan per kapita	2,2x10 ⁻⁵	0,006*	1,000
Pekerjaan KK (0= bukan dagang; 1= dagang)	-2,229	0,190	0,100
Pekerjaan KK (0= bukan buruh; 1= buruh)	-3,239	0,045**	0,039
Pekerjaan Ibu (0= tidak bekerja; 1= bekerja)	1,318	0,243	3,738
Kepemilikan aset	0,440	0,034**	1,552
Kepemilikan tabungan (0 = tidak; 1= ya)	0,054	0,973	1,056
Perencanaan (0= tidak; 1= ya)	-2,942	0,008*	0,053
Pembagian tugas (0= tidak; 1= ya)	1,796	0,109	6,026
Pengontrolan (0= tidak; 1= ya)	-0,851	0,575	0,427
Pinjaman pada lembaga finansial	1,714	0,324	5,550
Bantuan BLT	-0,553	0,691	0,575
Kepemilikan kredit	-0,357	0,678	0,700
Lokasi (0= kota; 1= kabupaten)	-1,580	0,112	0,206
\mathbb{R}^2	0,624		
P	0,000		

Keterangan: *(p<0,01), **(p<0,05), ***(p<0,1)

C.3. Faktor yang Memengaruhi Kesejahteraan Menurut Pengeluaran Pangan

Berdasarkan hasil analisis, faktor yang paling berpengaruh nyata terhadap determinan kesejahteraan menurut kriteria Pengeluaran Pangan adalah usia suami (p<0,05) dengan *odd ratio* 0,936, pendidikan KK (p>0,01) dengan *odd ratio* 1,543, kepemilikan aset (p<0,01) dengan *odd ratio* 1,169, dan pengontrolan atas kegiatan keluarga (p<0,1) dengan *odd ratio* 0,342. Nilai *odd ratio* dalam kriteria Pengeluaran Pangan menunjukkan bahwa keluarga dengan usia suami yang lebih muda mempunyai peluang sejahtera 0,936 kali lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga dengan usia suami yang tua. Pendidikan KK yang tinggi mempunyai peluang sejahtera 1,543 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan KK yang rendah.

Keluarga yang memiliki aset lebih banyak berpeluang sejahtera 1,169 kali dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki aset. Keluarga yang selalu mengontrol kegiatan keluarga berpeluang sejahtera 0,342 kali lebih baik dibandingkan dengan keluarga yang tidak melakukan pengontrolan atas kegiatan keluarga. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30 Faktor yang bepengaruh terhadap kesejahteraan menurut Pengeluaran Pangan

Variabel Bebas	Indikator (0= Tdk Sejahtera; 1= Sejahtera)		
	β	Sig	OR
Jumlah anggota	-0,065	0,533	0,937
Usia KK	-0,066	0,053**	0,936
Usia Istri	0,060	0,114	1,061
Pendidikan KK	0,434	0,004*	1,543
Pendidikan istri	-0,206	0,190	0,814
Pendapatan per kapita	1,3x10 ⁻⁶	0,177	1,000
Pekerjaan KK (0= bukan dagang; 1= dagang)	0,016	0978	1,016
Pekerjaan KK (0= bukan buruh; 1= buruh)	-0,247	0,611	0,781
Pekerjaan Ibu (0= tidak bekerja; 1= bekerja)	0,579	0,199	1,784
Kepemilikan aset	0,156	0,005*	1,169
Kepemilikan tabungan (0= tidak; 1= ya)	0,111	0,864	1,117
Perencanaan (0= tidak; 1= ya)	-0,523	0,219	0,593
Pembagian tugas (0= tidak; 1= ya)	0,073	0,864	1,076
Pengontrolan (0= tidak; 1= ya)	-1,072	0,077***	0,342
Pinjaman pada lembaga finansial	1,012	0,133	2,751
Bantuan BLT	-0,482	0,407	0,617
Kepemilikan kredit	0,570	0,162	1,768
Lokasi (0=kota; 1= kabupaten)	-0,187	0,701	0,830
\mathbb{R}^2	0,343		
P	0,000		

Keterangan: *(p<0,01), **(p<0,05), ***(p<0,1)

Ketiga faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan menurut kriteria Pengeluaran Pangan (usia suami, pendidikan suami, dan kepemilikan aset). Deskripsinya sama dengan apa yang dijelaskan pada kriteria BKKBN, kecuali unsur pengawasan. Pengawasan merupakan tindakan ke arah perbaikan, sekaligus evaluasi terhadap keberhasilan suatu kegiatan, baik secara individu maupun bersama-sama.

C.4. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Menurut Persepsi Keluarga

Berdasarkan hasil analisis faktor, yang paling berpengaruh nyata terhadap determinan kesejahteraan menurut kriteria Persepsi Keluarga adalah pendidikan KK (p<0,1) dengan *odd ratio* 0,810, pendapatan (p<0,05) dengan *odd ratio* 1,000, dan pembagian tugas dalam keluarga (p<0,05) dengan *odd ratio* 2,335. Nilai *odd ratio* dalam kriteria Persepsi Keluarga menunjukkan bahwa keluarga yang pendidikan KK-nya tinggi, berpeluang sejahtera 0,810 kali lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang pendidikan KK-nya rendah, seperti dalam Tabel 31.

Tabel 31 Faktor yang bepengaruh terhadap kesejahteraan menurut Persepsi Keluarga

Variabel Bebas	Indikator (0= Tidak Sejahtera; 1= Sejahtera)		
	β	Sig	OR
Jumlah anggota	-0,079	0,386	0,924
Usia KK	-0,012	0,661	0,988
Usia Istri	-0,010	0,738	0,990
Pendidikan KK	-0,210	0,079***	0,810
Pendidikan istri	-0,019	0,874	0,981
Pendapatan per kapita	-1,1x10 ⁻⁶	0,056**	1,000
Pekerjaan KK (0= bukan dagang; 1= dagang)	0,102	0,822	1,108
Pekerjaan KK (0= bukan buruh; 1= buruh)	-0,033	0,932	0,967
Pekerjaan Ibu (0= tidak bekerja; 1= bekerja)	0,522	0,143	1,685
Kepemilikan aset	0,036	0,358	1,037
Kepemilikan tabungan (0= tidak; 1= ya)	0,629	0,175	1,876
Perencanaan (0= tidak; 1= ya)	-0,379	0,283	0,685
Pembagian tugas (0= tidak; 1= ya)	0,484	0,015**	2,335
Pengontrolan (0= tidak; 1= ya)	-0,453	0,300	0,636
Pinjaman pada lembaga finansial	0,055	0,907	1,057
Bantuan BLT	0,146	0,776	1,158
Kepemilikan kredit	-0,324	0,330	0,724
Lokasi (0= kota; 1= kabupaten)	0,339	0,408	1,403
\mathbb{R}^2	0,146		
P	0,010		

Keterangan: *(p<0,01), **(p<0,05), ***(p<0,1)

Keluarga yang memiliki pendapatan tinggi mempunyai peluang lebih sejahtera 1,000 kali lebih tinggi daripada keluarga dengan pendapatan yang rendah. Keluarga yang melakukan pembagian tugas dalam keluarga mempunyai peluang sejahtera 2,335 kali lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tidak melakukan pembagian tugas dalam keluarga. Kedua faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan menurut kriteria Persepsi Keluarga (pendidikan suami dan pendapatan), deskripsinya juga sama dengan apa yang telah dijelaskan pada kriteria BKKBN, kecuali unsur pembagian tugas dalam kegiatan. Pembagian tugas merupakan pendelegasian wewenang kepada anggota untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab.

Selain itu, pembagian tugas juga merupakan langkah nyata ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya. Dengan demikian, pembagian tugas dalam keluarga merupakan proses memobilisasi sumber daya, sehingga dengan sumber daya tersebut tujuan dapat tercapai. Pembagian tugas dalam keluarga merupakan proses yang jauh lebih dinamis karena membagi-bagi tugas anggota dan alat-alat yang digunakan bersama tanggung jawabnya, sehingga masing-masing dapat melaksanakan dengan baik. Misalnya, suami bertugas mencari nafkah, istri bertugas memasak, dan anak-anak bertugas mencuci piring. Pembagian tugas seperti ini merupakan proses yang terjadi dalam manajemen keluarga, sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen keluarga dilaksanakan guna membantu keluarga tersebut mencapai tingkat kehidupan yang diinginkan. Dengan demikian, manajemen keluarga menjadi sangat penting untuk dipelajari (Guhardja et al. 1993). Jika dilihat dari hasil analisis secara keseluruhan, pendapatan merupakan major variable yang dipandang sebagai faktor paling berpengaruh terhadap kesejahteraan, baik pada kriteria BPS, kriteria BKKBN, kriteria Pengeluaran Pangan, maupun kriteria Persepsi Keluarga. Variabel berikut merupakan kepemilikan aset yang berada pada kriteria BPS, Pengeluaran Pangan, dan Persepsi Keluarga.

Hal yang menarik pada penelitian ini adalah akses pinjaman pada lembaga finansial, kredit barang, dan BLT tidak berpengaruh terhadap kesejahteran keluarga. Hasil analisis ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Zain (1996) di Kabupaten Blitar tentang "Kaji Tindak Kredit Kepada Keluarga Miskin" menunjukkan bahwa dari empat desa. Sampel dengan jumlah binaan sebanyak 897 rumah tangga miskin dengan tingkat angsurannya adalah 98%. Rumah tangga yang mampu meningkatkan pendapatannya sebesar 80%, sisanya tidak meningkat 17%, dan 3% mengalami penurunan. Pinjaman yang diberikan 86% digunakan sesuai tujuan, sisanya ada penyimpangan, misalnya untuk membebaskan hutang, memperbaiki rumah, pengobatan sakit, serta membayar sekolah.

Dengan hasil temuan ini, kita bisa mengatakan pemberian kredit kepada rumah tangga kurang efektif karena masih ada kendala-kendala di sebagian kecil keluarga. Oleh karena itu, ketika memberi kredit perlu mengidentifikasi status sosial masing-masing rumah tangga. Dengan maksud pihak fungsionaris dapat memberikan kredit sesuai dengan pendapatan rumah tangga yang bersangkutan. Artinya, jika sebuah rumah tangga dengan pekerjaan buruh tani dengan upah yang rendah, pemberian kredit jangan terlalu melampaui batas kemampuan, sehingga ketidakmampuan mengembalikan kredit dapat dihindari. Keluarga yang kredit barang atau peralatan juga tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Temuan ini diperkuat dengan hasil penelitian Peterson dan Peterson (1981) tentang kegagalan peminjam dalam melunasi mobil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian dan pekerjaan yang tinggi akan meminjam dengan jumlah pinjaman yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang keahlian dan pekerjaannya rendah akan meminjam dengan jumlah yang rendah.

Studi Peterson dan Peterson menguji rata-rata kegagalan peminjam dari kelompok profesional dan pekerja yang tinggi adalah rendah dibandingkan dengan kelompok pekerja dan profesional yang rendah. Dengan kata lain, kelompok kedua ini gagal melunasi mobil yang mereka kredit. Studi Sullivan dan Fisher (1988) melihat peminjam dari segi pendapatan dan usia. Studi ini dianalisis melalui analisis multivariat dan bivariat menunjukkan bahwa keterlambatan dalam melunasi hutang diakibatkan oleh faktor pendapatan dan usia. Kesulitan melunasi hutang bagi mereka yang berpendapatan rendah di

bawah \$10.000 sangat tinggi (37%), sedangkan kesulitan membayar hutang bagi mereka yang berpendapatan tinggi yaitu \$50.000 adalah (7%). Sementara itu, kepala rumah tangga di bawah usia 35 tahun sanggup melunasi hutang, sedangkan kepala rumah tangga yang berusia 55 tahun mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan hutang. Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Canner dan Luckett (1990) yang menunjukkan bahwa rumah tangga besar mempunyai masalah (55%) dalam melunasi pinjaman. Rumah tangga yang tidak bekerja (24%) juga mempunyai masalah dalam melunasi hutang.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa BLT tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Penelitian Reziki (2006) menunjukkan bahwa dana BLT dipakai untuk kebutuhan pangan sehari-hari, bahkan pada ibu bekerja (33,3%) maupun ibu tidak bekerja (27%) menghabiskan uang BLT dalam sehari. Ibu bekerja 40,4% dan 35,1% ibu tidak bekerja membelanjakan uangnya dalam jangka waktu 2–7 hari. Ibu yang menghabiskan uang dalam kurun waktu 8–14 hari cukup banyak, hal ini dapat dilihat pada ibu bekerja (18,2%) yang menghabiskan uangnya lebih dari sebulan.

Dengan demikian, BLT tidak mendidik keluarga untuk berusaha, tetapi membuat ketergantungan yang besar. Sebaiknya, BLT tersebut diberikan bukan dalam modus bantuan mengatasi kemiskinan agar tidak lebih parah. Namun, sebaiknya BLT diberikan dalam mendorong kegiatan produktif dan komersial dengan modus simpan pinjam sebagai entry-point-nya dalam mengatasi kemiskinan.

D. Tujuan Hidup Keluarga

Uji reliabilitas tujuan hidup yang berskala ordinal (pendidikan anak, status sosial, sosialisasi anak, keluarga sakinah, ikatan emosional, kehadiran anak, dan keuangan) menggunakan metode internal konsistensi *Alpha Cronbach*. Metode ini menunjukkan uji realibilitas adalah 0,712, sedangkan *Alpha Cronbach standardizes items* adalah 0,737. Tujuan hidup keluarga diformulasi ke dalam sembilan macam, yaitu: pendidikan anak, memperoleh status sosial di masyarakat, mempunyai keluarga sakinah,

mempunyai tabungan, mempunyai rumah sendiri, memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, ingin selamat dunia dan akhirat, ingin naik haji, dan sebagian kecil tersebar pada tujuan hidup yang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 26,7% responden yang tinggal di kota mengatakan diusahakan pendidikan anak yang lebih baik adalah tergolong miskin. Responden yang tinggal di pedesaan 42,2% mempunyai pernyataan yang sama, tetapi tergolong tidak miskin. Dengan demikian, pendidikan anak menjadi prioritas baik keluarga di kota maupun di desa. Prioritas berikut untuk responden yang tinggal di daerah perkotaan adalah mempunyai rumah sendiri, sedangkan responden yang tinggal di daerah pedesaan ingin memiliki keluarga yang sakinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 23,3% responden di kota yang memiliki rumah sendiri adalah miskin, sedangkan 28,9% responden di desa yang ingin memiliki keluarga sakinah adalah tidak miskin.

Tujuan hidup lain yang ingin dicapai keluarga adalah ingin memiliki status sosial yang baik di masyarakat, mempunyai tabungan di bank, ingin memiliki rumah sendiri, kesejahteraan keluarga yang baik, selamat di dunia dan akhirat, dan naik haji bagi yang mampu. Secara umum, (72%) responden di wilayah ini ingin memiliki pendidikan anak yang baik dan keluarga ini termasuk keluarga yang tidak miskin. Sebanyak 57,4% tergolong miskin, tetapi mereka lebih mengutamakan juga pendidikan anak yang baik. Prioritas berikut adalah mempunyai keluarga sakinah dan mempunyai rumah sendiri.

Tujuan hidup yang diinginkan keluarga contoh di wilayah ini memang agak berbeda kontur dan konfigurasi teori Maslow tentang kebutuhan manusia, yaitu secara hirarki mulai dari kebutuhan yang paling esensial sampai kepada kebutuhan paling puncak. Berbeda dengan apa yang ditemukan peneliti. Kebutuhan keluarga di daerah penelitian menunjukkan sebagian besar ingin mencapai satu tujuan hidup. Sebagian yang lain mencapai kebutuhan hidup secara sekaligus karena itu secara kuantitatif atau persentase dari total tujuan yang ingin dicapai memang tidak sama. Inilah yang dilihat sebagai bantahan yang jelas antara hierarki kebutuhan Maslow dengan peneliti. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32 Sebaran tujuan hidup keluarga contoh yang ingin dicapai dan tingkat kesejahteraan

Kota Desa To		Kota	ta			Desa	sa			Total (Kota+Desa)	Cota+D	esa)
Tujuan Hidup	Σ	Miskin (36)	T Misl	Tidak Miskin (24)	Mi	Miskin (79)	ΗΣU	Tidak Miskin (101)	Mis	Miskin (115)	Tida	Tidak Miskin (125)
	п	%	n	%	n	%	u	%	п	%	п	%
Pendidikan anak yang baik	16	26,7	14	23,3	50	27,8	9/	27,8 76 42,2	99	57,4	90	72,0
Mempunyai status sosial	-	1,7	3	5,0	11	6,1	16	6,8	12	10,4	19	15,2
Mempunyai keluarga sakinah	10	16,7	10	16,7	35	19,4	52	28,9	45	39,1	62	49,6
Mempunyai tabungan	3	5,0	7	11,7	23	12,8	18	10,0	26	22,6	25	20,0
Mempunyai rumah sendiri	14	23,3	6	15,0	19	10,5	33	18,3	33	28,7	42	33,6
Kesejahteraan yang baik	2	3,3	4	6,7	9	3,3	13	7,2	8	6,9	17	13,6
Selamat dunia dan akhirat	П	1,7	5	8,3	2	1,1	6	5,0	8	2,6	14	11,2
Naik haji bila mampu	1	1,7	0	0,0	5	2,8	5	2,8	9	5,2	>	4,0
Dan lain-lain jika diperlukan	0	0,0	3	5,0		0,5	2	1,1	П	6,0	\sim	4,0

Bagi peneliti, menghadirkan sanggahan seperti ini memang benarbenar ideomatisasi yang paling esensial. Bukan mengamini apa yang dikatakan Maslow, sehingga wajar jika terjadi konfrontasi realitas mengenai sejarah pengagungan teori Maslow yang harus dirobek oleh kebenaran. Penelitian seperti inilah yang kemudian peneliti tidak begitu saja mengekor tesis Maslow mengenai jenjang kebutuhan hierarki.

D.1. Pendidikan Anak

Pendidikan anak yaitu keinginan seseorang untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan pendidikan anak setinggi-tingginya. Setiap manusia ingin mengembangkan kapasitas mental dan kapasitas kerjanya melalui berbagai cara. Salah satu cara untuk mengembangkan kapasitas personal adalah pendidikan anak. Pendidikan anak tersebut diharapkan pada masa yang akan datang si anak dapat berfungsi dan difungsikan oleh orang lain jika diperlukan.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan sebagian besar responden di perkotaan maupun di pedesaan yang menganggap bahwa pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 91,6% responden di kota yang mengganggap pendidikan anak penting adalah tidak miskin, sedangkan 72,3% responden di desa juga mempunyai pernyataan yang sama. Sebagian responden di daerah perkotaan menyatakan pendidikan anak yang diperoleh sesuai dengan keinginan. Hal ini disebabkan sampai saat ini anak masih bisa melanjutkan sekolahnya, sedangkan sebagian besar responden di daerah pedesaan mengatakan tidak sesuai dengan keinginan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 54,2% responden di kota yang mengatakan sesuai keinginan adalah tidak miskin, sedangkan 24,6% responden di desa juga mempunyai pernyataan yang sama. Keadaan yang sama ini dapat terjadi karena sebesar 55,6% keluarga di perkotaan maupun di pedesaan (33,3%) mempunyai alasan karena masalah keuangan, yaitu tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah dan mereka ini tergolong miskin. Seperti terlihat pada Tabel 33.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai tingkat pendidikan yang ada, sebagian besar (91,6%) responden di daerah perkotaan dan

88,1% responden di daerah pedesaan mempunyai pendidikan anak lakilaki sampai tingkat S1 dan mereka ini tergolong tidak miskin.

Tabel 33 Sebaran jawaban responden tentang pendidikan anak dan tingkat kesejahteraan

		Ke	ota			Do	esa		,	Total (I	Kota+l	Desa)
Pernyataan		iskin 36)	M	idak liskin (24)		iskin 79)	Т	idak iskin (101)	N	fiskin (115)	Ti Mi	dak skin (125)
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1.Pendidikan anak?												
a. Sangat penting	26	72,2	22	91,6	49	62,0	73	72,3	75	65,2	95	76,0
b. Penting	9	25,0	1	4,2	29	36,7	25	24,8	38	33,0	26	20,8
c. Cukup penting	1	2,8	1	4,2	1	1,3	2	2,0	2	1,7	3	2,4
d. Kurang penting	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
e. Tidak penting	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	1	0,8
2. Sesuai keinginan?												
a. Ya	18	50,0	13	54,2	14	19,9	25	24,8	32	29,1	38	30,4
b. Tidak	18	50,0	11	45,8	60	81,1	76	75,2	78	70,9	87	69,6
3. Alasan ya												
a. Bisa sekolah	8	44,4	2	15,4	6	42,8	9	36,0	14	43,7	11	28,9
b. Pendidikan yang baik	3	16,7	2	15,3	3	21,4	11	44,0	6	18,8	13	34,2
c. Lebih baik ortu	0	0,0	0	0,0	2	14,2	1	4,0	2	6,2	1	2,6
d. Bisa bekerja	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	2,6
e. Sesuai kemampuan	1	5,6	9	69,2	0	0,0	0	0,0	1	3,1	9	23,7
f. Bisa sampai SMU	2	11,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,2	0	0,0
g. Sesuai keinginan	4	22,2	0	0,0	3	21,4	3	12,0	7	21,9	3	7,9
4. Alasan tidak												
a. Anak belum sekolah	4	22,2	3	27,2	4	6,7	16	21,0	16	20,5	11	12,6
b. Anak masih di TK	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,6	0	0,0	2	2,3
c. Tidak mau sekolah	0	0,0	1	9,0	9	15,0	5	6,7	9	11,5	6	6,9
d. Tidak ada biaya	10	55,6	3	27,2	20	33,3	11	14,4	30	38,5	14	16,1
e. Anak masih SD	0	0,0	0	0,0	8	13,3	12	15,8	8	10,2	12	13,8
f. Anak masih SMA	0	0,0	0	0,0	3	5,0	2	2,6	3	3,8	2	2,3
g. Tidak sesuai kemauan	0	0,0	1	9,0	0	0,0	2	2,6	0	0,0	3	3,4
h. Tidak bisa ke PT	2	11,1	1	9,0	1	1,7	15	19,7	3	3,8	16	18,4
i. Belum punya anak	0	0,0	1	9,0	1	1,7	3	3,9	1	1,3	4	4,6
j. Bisa SD	0	0,0	0	0,0	6	10,0	2	2,6	6	7,7	2	2,3
k. Bisa SMP	1	5,6	0	0,0	3	5,0	1	1,3	4	5,1	1	1,1
1. Bisa SMA	1	5,6	1	9,0	5	8,3	5	6,7	6	7,7	6	6,9

Tabel 33 Sebaran jawaban responden tentang pendidikan anak dan tingkat kesejahteraan (lanjutan)

		K	ota			Do	esa		,	Total (I	Kota+I	Desa)
Pernyataan		iskin 36)	M	idak liskin (24)		iskin 79)		idak iskin (101)		fiskin (115)	Mi	dak skin (125)
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
5.Yang diinginkan												
a. Anak laki-laki												
1. SMP	0	0,0	0	0,0	4	5,1	3	3,0	4	3,5	3	2,4
2. SMA	4	26,7	1	4,2	19	24,1	8	7,8	23	20,0	9	7,2
3. S1	11	73,3	22	91,6	56	70,8	89	88,1	67	58,2	111	8,8
4. S2	0	0,0	1	4,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8
5. S3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,8
b. Anak perempuan												
1. SMP	0	0,0	0	0,0	4	5,1	6	5,9	4	3,5	6	4,8
2. SMA	2	66,7	5	14,3	16	20,2	4	4,0	18	15,6	9	7,2
3. S1	1	33,3	30	85,7	59	74,7	91	90,1	60	52,2	121	96,8

Keinginan yang hampir sama yaitu sebesar 85,7% keluarga di kota dan 90,1% keluarga di desa menginginkan pendidikan anak perempuan sampai S1, mereka juga tergolong tidak miskin. Keinginan yang lebih tinggi terjadi pada keluarga di kota maupun di desa jika anak laki-laki atau anak perempuan memperoleh pendidikan sampai S3. Secara umum, (76%) responden menginginkan pendidikan anak yang baik dan mereka ini termasuk keluarga yang tidak miskin. Pernyataan yang sama juga terjadi pada keluarga miskin (65,2%) yang berkeinginan agar pendidikan anak lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa telah adanya kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan, baik keluarga miskin maupun keluarga tidak miskin.

D.2. Memperoleh Status Sosial

Penghargaan merupakan tujuan hidup tingkat keempat yang menggambarkan keinginan seseorang untuk mencapai prestis, reputasi, dan status yang lebih baik. Status sosial dalam kajian ini menggambarkan posisi seseorang di dalam masyarakat. Posisi yang dimaksud adalah figur-figur yang menempati posisi tertentu di dalam masyarakat yang

menjalankan peran tertentu pula. Menurut Soekanto (1993), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku aktual dari pemegang kedudukan, serta bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.

Berdasarkan pengertian tersebut, memungkinkan setiap pemegang posisi untuk membangun pola perilaku dan bagaimana bersikap, sehingga masyarakat bertingkah laku sebagaimana yang dipikirkan. Peran merupakan sesuatu yang dimainkan seseorang, sehingga orang tersebut secara polaristik berbeda dengan orang lain. Peran yang melekat pada diri seseorang memungkinkan seseorang dapat mengkespresikan emosinya dan memperlihatkan kehadirannya. Pandangan yang sama terjadi pada responden di perkotaan maupun di pedesaan yang menganggap status sosial sebagai hal yang penting dalam kehidupan sosialnya.

Sebagian besar (72,2%) responden di daerah perkotaan dan 87,3% responden di daerah pedesaan tidak mempunyai kedudukan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden di daerah perkotaan maupun di pedesaan yang tidak mempunyai kedudukan di masyarakat adalah miskin. Sebesar 20,8% responden di desa dan 29,7% responden di desa yang memiliki kedudukan, termasuk tidak miskin. Terdapat beberapa kedudukan yang berlaku di masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebanyak 40% keluarga di perkotaan dan 50% keluarga di pedesaan berperan sebagai seorang guru dan guru mengaji, mereka ini tergolong miskin.

Keinginan untuk memiliki status sosial yang baik tidak senantiasa diidentikkan dengan kedudukan yang dimiliki seseorang dalam sebuah masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 26 responden di perkotaan yang tidak memiliki keinginan untuk memperoleh kedudukan dan mereka termasuk miskin. Sebanyak 74 responden di perdesaan yang tidak memiliki keinginan untuk memperoleh kedudukan berstatus tidak miskin. Secara umum, 54,4% mengatakan memiliki kedudukan di masyarakat adalah penting dan mereka termasuk keluarga tidak miskin. Sebanyak 59,3% mempunyai pernyataan yang sama, tetapi mereka tergolong keluarga miskin. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34 Sebaran responden berdasarkan status sosial dan tingkat kesejahteraan

		Ko	ota			D	esa		7	Total (K	ota+	Desa)
Pernyataan		iskin 36)	M	idak iskin 24)		iskin 79)	M	idak iskin 101)		liskin (115)	M	idak iskin .25)
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Pentingkah status?												
a. Sangat penting	7	19,4	10	41,7	12	15,1	13	12,9	19	16,5	23	18,4
b. Penting	15	41,7	9	37,5	47	59,4	59	58,4	62	53,9	68	54,4
c. Cukup penting	11	30,6	5	20,8	17	21,5	23	22,8	28	24,3	28	22,4
d. Kurang penting	2	5,6	0	0,0	0	0,0	5	4,9	2	1,7	5	4,0
e. Tidak penting	1	2,8	0	0,0	3	3,8	1	0,9	4	3,5	1	0,8
Punya pekerjaan?												
a. Ya	10	27,8	5	20,8	10	12,7	30	29,7	20	17,4	35	28,0
b. Tidak	26	72,2	19	79,1	69	87,3	71	70,2	95	82,6	90	72,0
Jenis Kedudukan												
a. Anggota DPD	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	10,0	0	0,0	3	8,6
b. Anggota TNI	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,7	0	0,0	2	5,7
c. Seorang haji	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3	0	0,0	1	2,8
d. Pengurus DKM	2	20,0	0	0,0	0	0,0	8	26,7	2	10,0	8	22,8
e. Guru ngaji	4	40,0	0	0,0	5	50,0	5	16,7	9	45,0	5	14,3
f. Kader Posyandu	2	20,0	0	0,0	2	20,0	0	0,0	4	20,0	0	0,0
g. Ketua RT	1	10,0	1	20,0	1	10,0	6	20,0	2	10,0	7	20,0
h. Ketua RW	0	0,0	1	20,0	1	10,0	0	0,0	1	5,0	1	2,8
i. Aparat desa	1	10,0	3	60,0	1	10,0	5	16,7	2	10,0	8	22,8
Yang diinginkan												
1. Tidak ada	26	100	19	100	61	88,4	74	73,2	87	75,6	93	74,4
2. Pengusaha	1	2,7	0	0,0	11	13,9	14	13,9	12	10,4	14	11,2
3. Guru	0	0,0	0	0,0	1	1,2	0	0,0	1	0,9	0	0,0
4. Jadi RW	0	0,0	1	4,1	1	1,2	1	0,9	1	0,9	2	1,6
5. Kepala sekolah	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,9	0	0,0	2	1,6
6. Kepala desa	3	8,3	1	4,1	0	0,0	2	1,9	3	2,6	3	2,4
7. Ustad	2	5,6	1	4,1	1	1,2	1	0,9	3	2,6	2	1,6
8. Tokoh masyarakat	0	0,0	1	4,1	4	5,0	1	0,9	4	3,5	2	1,6
9. Ketua DPD	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	1	0,8
10. Ketua RT	1	2,7	1	4,1	0	0,0	1	0,9	1	0,9	2	1,6
11. PNS	2	5,6	0	0,0	0	0,0	2	1,9	2	1,7	2	1,6
12. Punya pekerjaan	1	2,7	0	0,0	0	0,0	1	0,9	1	0,9	1	0,8
13. Camat	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	1	0,8

Jenis kedudukan yang paling banyak (22,8%) dimiliki keluarga adalah menjadi pengurus DKM mereka tergolong tidak miskin, sedangkan sebanyak 10% termasuk keluarga miskin. Kedudukan yang paling banyak diinginkan keluarga contoh adalah menjadi pengusaha (11,2%) termasuk keluarga tidak miskin, sedangkan sebanyak 10,4% tergolong keluarga miskin.

D.3. Mempunyai Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah dalam Al-Quran surah Ar-Rum Ayat 21, diterjemahkan sebagai keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu memenuhi tiga faktor, yaitu:

- 1. Sakinah, keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak;
- 2. Mawadah, kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta kasih dan saling membutuhkan, serta saling menghormati; dan
- 3. Warrahmah, pergaulan antaranggota keluarga yang saling menyayangi, sehingga kehidupannya diliputi rasa kasih sayang.

Dogmatisasi seperti ini menggambarkan bahwa keluarga sakinah terbangun melalui unsur spiritual dan material. Unsur spiritual mencakup pendidikan anak, sosialisasi anak, pengamalan, penghayatan nilai-nilai agama seperti salat dan puasa, akses terhadap pengetahuan agama melalui buku, ustad, serta ikatan emosional (cinta kasih, saling membantu, saling menghormati, dan saling menyayangi). Unsur material dibatasi pada pendapatan dan kepemilikan anak.

Sebesar 70,8% responden di daerah perkotaan dan 75,2% responden di daerah pedesaan merasa bahwa bapak atau ibu memiliki peran yang sangat penting dalam sosialisasi anak, mereka tergolong tidak miskin. Sebanyak 80,5% responden di daerah perkotaan dan 93,7% responden di daerah pedesaan tidak melakukan pembagian peran antara bapak dan ibu dalam kegiatan mendidik, mengasuh, dan merawat (sosialisasi) anak, mereka tergolong miskin.

Dari 7 responden di daerah perkotaan dan 22 responden di daerah pedesaan yang membagi peran, sebagian besar responden di daerah

perkotaan dan daerah perdesaan menyerahkan tanggung jawab mengasuh dan merawat pada ibu, sedangkan ayah bertanggung jawab mendidik. Tidak adanya pembagian peran bapak atau ibu pada 53 responden di daerah perkotaan dan 158 responden di daerah pedesaan disebabkan sebagian besar responden di perkotaan maupun responden di pedesaan mengasuh, merawat, dan mendidik dilakukan secara bersama-sama.

Keluarga merupakan cermin kebutuhan sosial yang dipraktikkan oleh manusia karena keluarga adalah lembaga sosial yang mengikat anggotaanggotanya secara fisik dan emosional. Lebih dari setengah (79,2%) responden di perkotaan dan sebagian besar (79,2%) responden di pedesaan menyatakan bahwa dalam kehidupan, keluarga yang penuh cinta kasih, saling membutuhkan, dan saling menghormati sangatlah penting, mereka tergolong tidak miskin. Lebih dari separuh (55,5%) responden di perkotaan dan 49,5% responden di pedesaan melakukan praktik keagamaan melalui salat dan pengajian, mereka tergolong keluarga miskin dan tidak miskin. Sebanyak 30,1% responden di perkotaan dan 30,3% responden di pedesaan memperoleh pengetahuan melalui acara pengajian, tetapi keluarga ini tergolong miskin. Partisipasi responden dalam kegiatan pengajian memperlihatkan adanya kebutuhan sosial untuk dapat diterima dan berkomunikasi dengan individu lainnya di luar anggota keluarga.

Sebagian besar, 83,3% responden di perkotaan dan 91% responden di pedesaan menyatakan keberadaan anak dalam sebuah keluarga sangatlah penting. Sebesar 70,8% responden di perkotaan dan 79,2% responden di pedesaan menganggap jumlah anak yang dimiliki telah sesuai dengan yang diinginkan dan memang mereka termasuk keluarga tidak miskin. Kesesuaian jumlah anak yang diinginkan pada 24 responden di kota mengatakan anak yang dimiliki sudah cukup, sedangkan 87 responden di pedesaan mengatakan anak yang dimiliki sesuai dengan yang direncanakan. Sebaliknya, alasan ketidaksesuaian jumlah anak pada 10 responden di kota dan 21 responden di desa diakibatkan adanya keinginan untuk menambah jumlah anak. Anak dalam suatu keluarga merupakan tempat bagi kedua orang tua untuk menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang yang ada. Sebanyak 80,6% responden di kota menyatakan pendapatan yang diterima belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sebanyak 65,9% responden di desa juga mengatakan pendapatan yang

diterima belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka tergolong keluarga miskin.

Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 74,4% keluarga contoh mengatakan bahwa sosialisasi anak adalah sangat penting (74,4%) bagi keluarga yang tidak miskin, sedangkan bagi keluarga yang miskin sebesar 68,7%. Dalam sosialisasi anak, sebanyak 86,4% responden mengatakan ada pembagian peran dan mereka ini tergolong tidak miskin. Walaupun keluarga yang miskin mengatakan ada pembagian peran (89,6%), tetapi mereka termasuk keluarga miskin. Pembagian peran tersebut terlihat dari 100% responden mengatakan mendidik anak adalah mereka yang tergolong keluarga tidak miskin, sedangkan 75% responden yang mengatakan ada pembagian peran, mereka termasuk keluarga miskin. Selain ada keluarga yang melakukan pembagian peran, tetapi ada keluarga yang tidak melakukan pembagian peran. Sebanyak 52,8% tidak melakukan pembagian peran dan sosialisasi anak dilakukan bersama-sama, tergolong tidak miskin, sedangkan 55,3% keluarga yang tidak melakukan pembagian peran tergolong miskin.

Dalam memantapkan keterlibatan ritual dan intelektual keagamaan keluarga, sebesar 49,6% melakukan praktik keagamaan melalui salat dan pengajian tergolong tidak miskin, sedangkan 48,7% tergolong miskin. Sebesar 36,8% keluarga memperoleh pengetahuan agama melalui pengajian termasuk tidak miskin, sedangkan 32,2% tergolong miskin. Sebesar 89,6% keluarga mengatakan keberadaan anak adalah sangat penting dan mereka ini termasuk keluarga tidak miskin, sedangkan 73,9% tergolong keluarga miskin. Dalam menopang kehidupan keluarga sehari-hari, sebesar 68% responden mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh saat ini sudah mencukupi dan keluarga ini termasuk tidak miskin, sedangkan 11,3% tergolong miskin. Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.

D.4. Mempunyai Tabungan

Manusia tidak hanya memerlukan perlindungan dari gangguan kriminalitas, tetapi juga membutuhkan kenyamanan agar tidak khawatir akan nasib hidupnya di masa mendatang. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memiliki

tabungan. Tabungan merupakan tindakan yang mengarah kepada keamanan harta melalui simpanan di bank, sehingga terhindar dari kejahatan (pencurian dan perampokan). Hasil penelitian menunjukkan 86,1% responden di perkotaan dan 83,6% responden di pedesaan tidak memiliki tabungan, mereka tergolong miskin. Responden yang memiliki tabungan (33,3%) di daerah perkotaan dan (38,7%) di daerah pedesaan, di antaranya dimanfaatkan sebagai investasi guna biaya pendidikan anak dan persiapan dihari tua.

Secara umum, sebanyak 62,4% keluarga tidak memiliki tabungan, termasuk keluarga tidak miskin, sedangkan 84,3% yang tidak memiliki tabungan tergolong miskin. Alasan tidak memiliki tabungan karena belum ada dana (87,1%) termasuk keluarga tidak miskin, sedangkan sebesar 95,9% yang juga mengatakan belum ada dana tergolong miskin. Dalam kaitan dengan kredit uang untuk mengatasi kesulitan, sebagian besar tidak mau kredit uang atau barang dengan alasan takut tidak bisa bayar, sebagian yang lain mengatakan biasa membeli barang dengan tunai, dan yang lainnya mengatakan belum perlu. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 35 Sebaran responden terhadap kebutuhan keamanan dan tingkat kesejahteraan

		Ko	ota			Do	esa			Total (K	ota+	Desa)
Pernyataan		iskin 36)	Mi	dak iskin 24)		iskin 79)	M	idak iskin 101)		liskin (115)	M	idak iskin 125)
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Ada tabungan?												
a. ya	5	13,9	8	33,3	13	16,4	39	38,7	18	15,7	47	37,6
b. Tidak	31	86,1	16	66,7	66	83,6	62	61,3	97	84,3	78	62,4
Alasan ya												
a. Pendidikan anak	1	20,0	6	75,0	3	23,0	8	20,6	4	22,2	14	29,8
b. Masa depan anak	1	20,0	1	4,1	0	0,0	2	5,1	1	5,6	3	6,3
c. Urusan mendidik	1	20,0	1	4,1	0	0,0	15	38,4	1	5,6	16	34,0
d. Untuk hari tua	1	20,0	0	0,0	8	61,4	6	15,3	9	50,0	6	12,8
e. Beli rumah	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,7	1	5,6	0	0,0
f. Keperluan	1	20,0	0	0,0	2	15,3	5	12,8	3	16,7	5	10,7
sekolah	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,1	0	0,0	2	4,2
g. Modal usaha												

6.4

Resejai	Itti	iaii (ic	uiju	taii								
		Ko	ota			D	esa		,	Total (K	ota+	Desa)
Pernyataan		iskin 36)	M	idak iskin 24)		iskin 79)	M	idak iskin 101)		fiskin (115)	M	idak iskin 125)
	n %		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alasan tidak												
a. Belum ada dana	29	93,5	15	93,8	64	97,0	53	85,4	93	95,9	68	87,1
b. Bangun rumah	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,2	0	0,0	2	2,6
c. Modal usaha	2	6,4	0	0,0	1	1,5	3	4,8	3	3,0	3	3,9

6,2

Tabel 35 Sebaran responden terhadap kebutuhan keamanan dan tingkat kesejahteraan (lanjutan)

D.5. Mempunyai Rumah Sendiri

d. Keperluan lain

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan tersebut dapat meliputi pakaian, makanan, dan rumah. Kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan primer. Sebesar 50% responden di daerah perkotaan menempati rumah orang tua, mereka tergolong miskin. Lebih dari separuh (81,1%) responden di pedesaan memiliki rumah sendiri dan berstatus tidak miskin. Sebagian besar, 80% responden di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan memiliki keinginan untuk memperluas rumah dan memiliki rumah sendiri daripada tinggal dengan orang tua atau rumah kontrakan. Secara umum, 72,8% keluarga memiliki rumah sendiri, berstatus tidak miskin, sedangkan 49,6% yang memiliki rumah sendiri berstatus miskin. Sebanyak 89,6% responden ingin memiliki dan memperluas rumah tergolong tidak miskin, sedangkan 90,4% yang ingin memiliki rumah tergolong miskin. Untuk lebih lengkap, dapat dilihat pada Tabel 36.

Tabel 36 Sebaran responden tentang kebutuhan fisik dan tingkat kesejahteraan

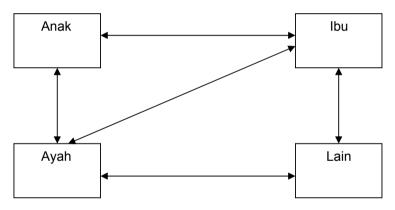
		Ko	ota			De	esa		门	Total (K	Cota+l	Desa)
Kepemilikan		iskin 36)	M	idak iskin 24)		iskin 79)	Mi	idak iskin 01)		iskin 15)	M	idak iskin 25)
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Status rumah												
a. Milik sendirib. Milik orang tuac. Kontrakd. Lainnya	16 18 1 1	44,4 50,0 2,8 2,8	9 12 3 0	37,5 50,0 12,5 0,0	41 23 15 0	51,9 29,1 19,0 0,0	82 13 4 2	81,1 12,9 4,0 2,0	57 41 16 1	49,6 35,7 13,9 0,9	91 25 7 2	72,8 20,0 5,6 1,6
Ingin memiliki/ perluas rumah a. Ya b. Tidak	33	91,7 8,3	19 5	79,1 20,9	71 8	89,9 10,1	93 8	92,0 7,9	104 11	90,4 9,6	112 13	89,6 10,4

E. Komunikasi, Pengemabilan Keputusan, dan Pengelolaan Sumber Daya Keluarga

E.1. Komunikasi Dalam Keluarga

Komunikasi dalam keluarga berupaya membangun secara lebih jelas keterlibatan subsistem dalam mengungkap berbagai persoalan. Komunikasi yang dibangun adalah komunikasi interpersonal dalam lingkungan keluarga. Struktur komunikasi seperti ini akan menyebabkan daya antisipasi yang kuat terhadap kebutuhan ke depan. Struktur komunikasi yang dimaksud adalah jaringan komunikasi antaranggota keluarga dalam menjaga kedekatan dan keterhubungan antarsubsistem. Hal ini dilakukan agar proses mencapai kesepakatan terhadap kebutuhan yang direncanakan menjadi nyata dan bukan utopia.

Tipe analisis hubungan komunikasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan komunikasi di dalam keluarga adalah komunikasi beberapa individu yang menyatu menjadi satu kesatuan sistem. Hubungan komunikasi pada tingkat sistem menggunakan dua indeks sebagai variabel struktural, yaitu keterhubungan sistem (system connectedness) dan keterbukaan sistem (system openness). Keterhubungan sistem adalah degree of members (derajat para anggota) suatu sistem berhubungan satu sama lain yang dapat dihitung dari jumlah arus informasi interpersonal yang ada. Keterbukaan sistem adalah derajat pada saat anggota suatu sistem saling bertukar informasi dengan sistem di luarnya. Indeks keterhubungan komunikasi dapat dihitung pada kedua sistem tersebut. Oleh karena itu, anggota dalam sistem menjadi unit analisis (Setiawan dan Muntaha 2000). Gambar 4 menunjukkan komunikasi internal dan eksternal, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, seperti dalam gambar berikut.



Gambar 4 Hubungan interpersonal internal dan eksternal sistem

Gambar di atas memperlihatkan sistem interaksi yang terjadi dalam berbagai pernyataan yang terdiri dari lima macam interaksi, baik ayah dan ibu, anak dan ibu, anak dan ayah, ayah dengan pihak lain, serta ibu dengan pihak lain. Renggangnya interaksi antaranggota dapat menyebabkan misunderstanding, sehingga pengambilan keputusan di tingkat keluarga menjadi kurang tepat. Analisa struktur interakasi antaranggota berupaya mengungkap intensitas interaksi (degree of interaction) antarindividu dalam keluarga maupun antaranggota dengan pihak luar. Pemahaman yang mendalam terhadap struktur interaksi yang dianalisis akan bermanfaat ketika merespons tujuan yang ingin dicapai maupun pengambilan keputusan yang akan dilakukan.

Gambar 4 tersebut menunjukkan bahwa di satu sisi ada keterhubungan antaranggota. Sementara itu, di lain pihak terdapat keterbukaan anggota, yaitu antara ibu dengan saudara dan pihak lain maupun antara ayah dengan saudara dan pihak lain. Untuk mengetahui derajat keterhubungan komunikasi antaranggota, dimasukkan delapan pernyataan ke dalam pasangan yang terlibat dalam komunikasi (suami dan istri, suami, istri, dan anak, istri dan saudara, suami dan saudara, istri dan pihak lain, serta suami dan pihak lain) untuk mengetahui pernyataan mana yang paling intens di antara pasangan-pasangan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lebih dari separuh (57,6%) suami dan istri di daerah perkotaan mendiskusikan masalah pendidikan anak, sedangkan di daerah pedesaan juga lebih dari separuh (60,4%). Untuk jumlah anak, sebagian besar (95%) keluarga di daerah perkotaan melibatkan pasangan untuk mendiskusikannya, sedangkan di daerah pedesaan juga sebagaian besar (93,3%) mendiskusikan jumlah anak. Masalah keikutsertaan KB, sebagian besar (83,3%) keluarga contoh di daerah perkotaan melibatkan pasangannya untuk mendiskusikan hal tersebut, sedangkan di daerah pedesaan juga sama (95,5%) suami dan istri mendiskusikan masalah tersebut. Ibu bekerja di luar atau di dalam rumah, sebagian besar (86,7%) suami dan istri di daerah perkotaan mendiskusikan masalah tersebut. Sementara itu, di daerah pedesaan juga sama (91,1%) suami dan istri mendiskusikan hal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (83,3%) suami dan istri di daerah perkotaan mendiskusikan masalah kepemilikan rumah, baik rumah sendiri, rumah kontrakan, atau tingal dengan orang tua/mertua. Untuk di daerah pedesaan juga memperlihatkan kecenderungan yang sama, yaitu 92,8% suami dan istri mendiskusikan masalah tersebut. Kepemilikan kendaran lebih dari separuh (59%) suami dan istri di daerah perkotan mendiskusikan kepemilikan kendaran tersebut, sedangkan di daerah pedesaan sebagian kecil (45,5%) suami dan istri mendiskusikan masalah tersebut. Untuk kredit, sebagian besar (82,5%) suami dan istri di daerah perkotaan mendiskusikan masalah hutang atau kredit, sedangkan di daerah pedesaan sebagian kecil (48,8%) suami dan istri mendiskusikan masalah hutang atau kredit. Artinya, bahwa masalah kendaraan dan utang/

kredit bagi masyarakat pedesaan masih rendah. Sebagian besar (65%) suami dan istri di daerah perkotaan mendiskusikan masalah pangan, sedangkan di daerah pedesaan lebih dari separuh (51,7%) suami dan istri mendiskusikan hal tersebut. Dari ke delapan pernyataan tersebut, sebagian kecil saja yang didiskusikan oleh anggota lain, baik keluarga di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Analisis sosiometri perbandingan pasangan yang berjumlah enam pasangan dan delapan pernyataan, baik keluarga di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan mencerminkan degree of interaction yang lebih intensif antara suami dan istri jika dibandingkan dengan pasangan yang lain. Derajat interaksi suami dan istri dalam berbagai persoalan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam berbagai persoalan, suami dan istri lebih dominan dalam membicarakan masalah-masalah yang dihadapi, baik keluarga di perkotaan maupun di pedesaan. Secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4.

E.2. Pengambilan Keputusan dalam Keluarga

Mengacu pada struktur keluarga yang digunakan dalam merancang pengambilan keputusan, penulis membagi analisis bagian ini ke dalam dua subbagian analisis, yaitu analisis perilaku pengambilan keputusan di tingkat individu dan analisis pengambilan keputusan di tingkat keluarga. Analisa pengambilan keputusan yang berkekuatan individualistik pusat perhatian ditujukan pada kedudukan, karakter, dan resource yang dimiliki. Sementara itu, analisa pengambilan keputusan yang berkekuatan keluarga pusat perhatian ditujukan pada dinamika humanistik (keputusan bersama). Pengambilan keputusan yang berkekuatan individualistik dalam penelitian ini mengungkap berbagai peran dan karakter individu, serta sumber daya yang dikuasai oleh salah satu anggota. Seorang istri atau suami yang mempunyai kedudukan tentu lebih berperan, sehingga anggapan yang dibangun adalah tingkah laku anggota lain selalu lentur, berusaha menerima, dan menyepakati apa yang dilakukannya. Peran seperti ini bisa terungkap pada berbagai wilayah kehidupan, seperti domestik, publik, dan yang lazim dimainkan oleh seorang ibu rumah tangga maupun suami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengambilan keputusan yang digunakan oleh sebagian besar keluarga contoh baik di kota maupun di desa adalah model kekuatan dinamalika humanistik (keputusan bersama). Hal ini dapat ditunjukkan pada kedua konsentrasi pemukiman, yaitu untuk keluarga contoh yang tinggal di kota, seperti dalam hal memilih jenis sekolah (57,1%), menentukan tingkat pendidikan anak (60,7%), menentukan jumlah anak (98,3%), keikutsertaan dalam KB (78,3%), menentukan ibu bekerja di luar atau di dalam rumah (51,7%), kepemilikan rumah (80%), kepemilikan kendaraan (52,8%), dan memiliki kredit (70,4%). Keluarga contoh yang tinggal di desa, yaitu dalam hal memilih jenis sekolah (73,5%), menentukan tingkat pendidikan anak (76,5%), keikutsertaan dalam KB (72,2%), menentukan ibu bekerja diluar atau di dalam rumah (56,7%), kepemilikan rumah (79,7%), kepemilikan kendaraan (66,3%), dan memiliki kredit (72,4%). Berarti dalam memutuskan segala sesuatu harus dilakukan dengan melibatkan pasangan hidupnya (istri dan suami). Walaupun sebagian kecil anggota keluarga menggunakan model keputusan yang berkekuatan individualistik (tidak melibatkan anggota lain) dalam pengambilan keputusan, tetapi dalam hal kebutuhan pangan, baik mengatur menu makan dan menentukan pengeluaran pangan diputuskan oleh istri untuk responden di perkotaan. Dalam hal menentukan makan di luar rumah untuk daerah pedesaan ditentukan oleh suami (36,8%).

Hal ini bisa dinilai seberapa besar peran anggota keluarga dalam memutuskan berbagai persoalan. Seorang istri lebih menentukan persoalan mengatur menu makan dan pengeluaran untuk pangan karena ia berperan sebagai ibu rumah tangga yang lebih tahu persoalan dapur dengan segala aktivitasnya, atau karena kebetulan ia sebagai seorang janda. Penguasaan infrastruktur atau sumber daya oleh seorang istri atau suami akan lebih memungkinkan memutuskan berbagai persoalan. Oleh karena itu, istri atau suami menginginkan dapat memaksakan anggota lain yang tidak memiliki kekuatan produksi mengikuti apa yang dikehendaki istri atau suami. Kondisi seperti ini, sadar atau tidak, keluarga telah berada pada relasi superordinasi dan subordinasi. Dalam relasi ini, istri atau suami dapat memaksa tingkahlaku anggota lain untuk mengikuti apa yang diinginkan.

Pengambilan keputusan yang berkekuatan bersama (dinamika humanistik) menghendaki keterlibatan anggota dalam berbagai keputusan. Dengan demikian, dinamika humanistik harus dirancang melalui diskusi anggota keluarga karena di dalam diri setiap anggota keluarga mempunyai "kepribadian rangkap" atau dalam terminologi sosiologi disebut *role set*. Kedua terminologi ini sesungguhnya mengedepankan sejumlah peran yang dimiliki seorang anggota yang berkedudukan sebagai seorang istri atau suami di satu pihak, sedangkan di lain pihak berkedudukan sebagai seorang manajer dan eksekutif. Dinamika humanistik mendorong ke arah penyatuan kepribadian rangkap atau *role set* seseorang, sehingga keputusan yang akan diambil lebih tepat berdasarkan referensi yang dimiliki anggota. Secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.

Pengambilan keputusan yang merupakan perhatian utama pada dinamika humanistik juga ditujukan pada keputusan yang dominan dibuat suami atau istri. Dengan demikian, keputusan yang didominasi oleh seorang istri maupun suami atau keputusan bersama suami dan istri pada prinsipnya berada pada wilayah kehidupan yang humanistik. Akan tetapi, keputusan itu didominasi oleh salah satu yang disebabkan oleh peran dan kontribusi nyata yang lebih besar dari salah satu aktor. Keputusan bersama ini lebih demokratis di tingkat keluarga karena berorientasi humanistik yang lebih besar. Kekuatan bersama untuk menentukan keputusan dalam berbagai hal terletak pada partisipasi aktif suami dan istri. Keputusan bersama menghargai potensi masing-masing, mau mendengarkan saran dan pendapat, dan menghormati sesama atas kapasitas masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang berkekuatan humanistik memiliki nilai yang lebih tinggi di kota (59%), mereka tergolong tidak miskin. Keputusan yang berkekuatan dinamika humanistik sebesar 57,7% terjadi di daerah pedesaan mereka tergolong miskin. Urutan nilai yang kedua untuk di kota adalah keputusan yang berkekuatan individualistik (istri saja) dengan nilai 38,6% dan berstatus miskin, sedangkan untuk di desa adalah keputusan yang berkekuatan humanistik (istri dominan) dengan nilai 20,4% dan tergolong keluarga tidak miskin. Sementara itu, secara keseluruhan, keputusan yang diambil keluarga adalah keputusan bersama (suami dan istri) dengan nilai 53,2%.

Uraian tersebut menggambarkan seberapa besar peranan keputusan individualistik dan humanistik terhadap sebuah pernyataan. Pemahaman terhadap identifikasi jumlah keputusan dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya model keputusan yang diambil pada keluarga contoh adalah model keputusan yang berkekuatan dinamika humanistik (keputusan bersama suami dan istri). Secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.

Lampiran 6 tersebut secara substansial menggambarkan bahwa secara kuantitatif pengambilan keputusan dilakukan individu atau pasangan hidup. Dengan menghitung masing-masing keputusan terhadap setiap pernyataan yang menyangkut pendidikan anak, jumlah anak, ikut KB atau tidak, ibu bekerja atau tidak, memiliki rumah sendiri, dan kontrak atau tinggal dengan orang tua. Jumlahnya berbeda-beda karena individu atau pasangan hidup bisa saja memilih lebih dari satu pernyataan. Pernyataan yang paling banyak mendapat keputusan adalah yang mempunyai derajat tanggapan besar dan terdistribusi pada semua aktor. Pernyataan yang paling tinggi mendapat keputusan dari individu atau pasangan hidup adalah keputusan yang paling banyak dilakukan oleh pasangan hidup daripada yang lainnya.

Walaupun suami istri lebih banyak mengambil keputusan dalam berbagai hal, tetapi kenyataannya keputusan tersebut tidak diberikan kepada salah satu anggota keluarga. Pembagiannya didasarkan pada beberapa pertimbangan yang menurut Deacon dan Firebaugh (1981) adalah power and resources hypotesis, gender, time availability, dan preferences.

Pandangan yang mengatakan suami dan istri yang memiliki kekuasaan dan uang, diasumsikan akan mengambil keputusan secara bersama-sama. Seperti keluarga yang tinggal di desa dalam hal menetapkan tingkat pendidikan anak (60,7%), jumlah anak (98,3%), memiliki rumah sendiri (80%), dan memiliki kendaraan (52,8%). Keluarga yang tinggal di desa dalam hal yang sama, yaitu menetapkan tingkat pendidikan anak (76,5%), memiliki rumah sendiri (79,7%), dan memiliki kendaraan (66,3%). Ini menunjukkan bahwa suami istri memiliki kekuasaan dan finansial untuk menentukan apa yang mereka inginkan, tanpa dukungan salah satu pihak yang sulit untuk merealisir keinginan mereka.

Perspektif yang mengungkapkan bahwa gender turut berpengaruh dalam menentukan keputusan. Hal ini dibuktikan dengan keinginan istri untuk bekerja di luar atau di dalam rumah. Untuk menentukan pekerjaan yang pantas dilakukan oleh seorang istri di kota sebanyak 38,3% ditentukan oleh istri saja. Sesuai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang wanita, sekalipun ada diskusi di tingkat keluarga, tetapi keputusan tetap didominasi isteri (5%). Sementara itu, sebanyak 13,9% keluarga di desa ditentukan oleh istri saja sesuai pekerjaan yang diinginkan isteri, sekalipun terjadi diskusi di tingkat keluarga, tetapi keputusan tetap didominasi istri (26,1%) dalam memutuskan hal tersebut.

Pengambilan keputusan juga sangat ditentukan oleh *time availability* atau ketersediaan waktu yang dimiliki oleh anggota dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 65% menu makan diatur oleh istri, sedangkan menentukan pengeluaran untuk pangan sebanyak 65% bagi keluarga di kota. Sebanyak 51,1% menu makan diatur oleh istri, sedangkan menentukan pengeluaran untuk pangan sebanyak 39,4% bagi keluarga di desa. Hal ini membuktikan bahwa istri mempunyai waktu yang banyak untuk mengatur kedua hal tersebut.

Berbeda dengan menentukan makan di luar rumah bagi suami atau istri dan anggota lain. Keluarga di kota maupun di desa, ketika makan di luar ditentukan oleh masing-masing anggota sesuai kesukaan makanan yang dikonsumsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menentukan jenis makanan yang dikonsumsi di luar rumah, persentase terbesar ditentukan oleh masing-masing anggota jika dibandingkan dengan keputusan bersama untuk memilih jenis makanan di luar rumah.

E.3 Pengelolaan Sumber Daya Keluarga

E.3.1. Komunikasi dalam Pembuatan Rencana

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah keluarga menyebabkan perlunya suatu pengelolaan yang baik agar tujuan hidup yang diinginkan dapat tercapai. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat suatu perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh (6,25%) responden di kota dan 7,33% responden di desa

memiliki perencanaan dalam mencapai tujuan hidup, mereka tergolong tidak miskin. Sebanyak 80,8% responden di kota dan 82,4% responden di desa mengatakan rencana perlu dibuat agar tujuan hidup dapat tercapai, ternyata mereka tergolong tidak miskin.

Sebaliknya, sebagian besar responden di kota maupun responden di desa membiarkan tujuan hidup mengalir seperti apa adanya, tetapi sebanyak 100% di kota dan 85,3% responden di desa yang mengatakan membiarkan tujuan hidup mengalir seperti apa adanya adalah tergolong miskin. Pembuatan perencanaan dapat dilakukan dengan cara tertulis, tetapi hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar (97,2%) responden di kota dan 100% responden di desa membuat perencanaan yang tidak tertulis. Alasan cukup diingat saja, mereka termasuk keluarga miskin.

Dari empat orang responden di desa yang melakukan perencanaan tertulis, di antaranya beralasan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target dan lebih jelas. Dalam pembuatan perencanaan, lebih dari separuh (75%) ibu di daerah perkotaan dan 94% ibu di daerah pedesaan mengomunikasikan dengan pasangan hidupnya (bapak) dengan alasan agar keduanya sama-sama berusaha mewujudkan rencana yang telah dibuat. Sebanyak 15 responden di kota dan 38 responden di desa yang tidak berkomunikasi dengan bapak, disebabkan oleh tidak adanya sesuatu yang perlu direncanakan, sehingga komunikasi juga tidak harus dilakukan.

Selain pasangan hidupnya (bapak), pembuatan suatu rencana yang dilakukan oleh ibu terkadang juga melibatkan anggota keluarga lainnya, seperti anak dan saudara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh (65%) responden di kota berkomunikasi dengan anak, sedangkan 76,2% responden di desa juga melakukan hal yang sama. Sebanyak 34 responden di kota dan 51 responden di desa yang melakukan komunikasi dengan anak beralasan bahwa anak dapat dijadikan sebagai tempat bertukar pikiran. Sebaliknya, anak tidak diikutsertakan untuk berkomunikasi dalam pembuatan perencanaan oleh 92,8% responden di kota dan 76,8% responden di desa. Hal tersebut disebabkan karena anak yang dimiliki oleh responden masih kecil dan masing-masing keluarga tersebut tergolong miskin dan tidak miskin.

Hasil penelitian memperlihatkan juga bahwa sebagian besar responden di kota maupun di desa tidak melakukan komunikasi dengan saudara dalam pembuatan rencana. Sebanyak 18 responden di kota dan 12 responden di desa yang mengomunikasikan rencana dengan saudara beralasan bahwa saudara merupakan anggota keluarga yang dapat dijadikan tempat bertukar pikiran. Sebaliknya, dari 34 responden di kota dan 166 responden di desa yang tidak berkomunikasi dengan saudara, sebagian besar (63,9%) responden di kota dan 92,4% responden di desa beranggapan bahwa pembuatan perencanaan tidak perlu merepotkan orang lain, mereka ini termasuk keluarga miskin.

Keterlibatan pihak lain di luar keluarga dalam pembuatan rencana juga terjadi pada beberapa keluarga. Akan tetapi, sebagian besar (95,8%) responden di kota dan 97,8% responden di desa tidak melakukan komunikasi dengan pihak lain dalam pembuatan rencana. Sebanyak 4 responden di kota dan 5 responden di desa yang melibatkan pihak lain beralasan bahwa pihak lain dapat digunakan sebagai tempat bertukar pikiran. Sebaliknya, responden di kota maupun responden di desa yang tidak berkomunikasi dengan pihak lain memiliki anggapan bahwa komunikasi dengan pihak lain tidaklah diperlukan karena komunikasi dapat dilakukan dalam keluarga saja.

Sebagian besar (97,7%) responden di kota dan 84,8% responden di desa tidak membuat perencanaan secara terperinci, mereka tergolong miskin. Pembuatan perencanaan yang tidak terperinci oleh 53 responden di kota dan 151 responden di desa beralasan hanya garis besar saja. Sebaliknya, responden di kota dan responden di desa yang membuat rencana terperinci beranggapan bahwa hal tersebut diperlukan agar rencana menjadi lebih terarah. Secara umum, sebesar 71,2% memiliki rencana dan keluarga tersebut termasuk tidak miskin, sedangkan 53,9% yang memiliki rencana, tergolong miskin. Sebanyak 92% responden membuat rencana tidak tertulis dan mereka termasuk tidak miskin, sedangkan 99,1% yang membuat rencana tidak tertulis, tergolong miskin.

Dalam pembuatan rencana sebanyak 90,4% dikomunikasikan dengan bapak dan mereka tergolong tidak miskin, sedangkan 62,6% yang mengomunikasikan dengan bapak termasuk miskin. Sebanyak 62,4% mengomunikasikan dengan anak ketika membuat rencana, keluarga ini

termasuk tidak miskin, sedangkan 62,6% mengomunikasikan dengan anak ketika membuat rencana tergolong miskin. Sebesar 83,2% tidak mengomunikasikan dengan saudara ketika membuat rencana, mereka tergolong tidak miskin, sedangkan 83,5% yang tidak mengomunikasikan dengan saudara ketika membuat rencana, tergolong miskin. Sebesar 96,8% tidak mengomunikasikan dengan pihak lain ketika membuat rencana, mereka tergolong tidak miskin, sedangkan 94,8% yang tidak mengomunikasikan dengan pihak lain ketika membuat rencana, tergolong miskin. Sebesar 83,2% responden membuat rencana tidak terperinci, mereka tergolong tidak miskin, sedangkan 86,9% responden membuat rencana tidak terperinci, tergolong miskin. Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 7.

E.3.2 Pembagian Tugas dalam Keluarga

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa lebih dari separuh (50%) responden di kota dan 40,5% responden di desa melakukan pembagian tugas, mereka tergolong miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 31,6% ibu di kota dan 92% ibu di desa berperan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tugas mengurus anak dan rumah tangga,ibu rumah tangga ini tergolong miskin. Sementara itu, sebesar (90%) suami di kota dan sebagian besar (84,6%) suami di kota bertugas untuk mencari nafkah, mereka tergolong tidak miskin. Anak sebagai anggota keluarga lainnya, sebagian besar (93,3%) anak di kota dan 81,8% anak di desa hanya memiliki kewajiban untuk belajar. Adanya pembagian tugas yang jelas antara tiap anggota sangatlah diperlukan agar rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai tujuan yang diinginkan.

Secara umum, responden menetapkan pembagian tugas pada masing-masing anggota. Sebagian besar, (67,3%) ibu bertugas mengurus anak dan rumah tangga, keluarga ini tergolong tidak miskin, sedangkan sebesar 65,9% termasuk miskin. Sebesar 88,6% bapak bertugas lebih banyak mencari nafkah dan keluarga ini termasuk tidak miskin, sedangkan 100% termasuk keluarga miskin. Sebagian besar, (85,9%) anak bertugas untuk belajar dan keluarga ini termasuk tidak miskin, sedangkan 63,6% anak yang bertugas untuk belajar termasuk keluarga yang miskin, seperti dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37 Sebaran pembagian tugas keluarga contoh dan tingkat kesejahteraan

		,))	`						
		¥	Kota				Desa		To	Total (Kota+Desa)	+Desa)	
e.	2	Miskin	Tdial	Tdiak Miskin	M	Miskin	Tidak	Tidak Miskin	Miskin	kin	Tidak	Tidak Miskin
Гегпуатаап		(36)		(24)	<u> </u>	(62)	(101)	11)	(115)	5)	(125)	:5)
	п	%	n	%	n	%	n	%	n	%	% u	%
1.Ada pembagian tugas?												
a. Ya	18	50,0	13	54,1	32	40,5	33	32,8	50	43,5	46	36,8
b. Tidak	16	44,4	6	37,5	47	59,4	89	67,3	63	54,8	77	61,6
c. Kadang	7	5,6	2	8,3	0	0,0	0	0,0	2	1,7	2	1,6
2. Ibu bertugas												
a. Urus RT/anak	9	31,6	11	8,89	23	92,0	24	2,99	29	6,59	35	67,3
b. Eko RT/anak	11	6,75	>	31,2	2	8,0	111	30,5	13	29,5	16	30,8
c. Lainnya	7	10,5	0	0,0	0	0,0	П	2,8	2	4,5	П	1,9
3. Tugas bapak												
a. Cari nafkah	11	100	20	0,06	50	100	11	84,6	61	100	31	9,88
b. Hubungan sosial	0	0,0	1	4,5	0	0,0	1	2,6	0	0,0	2	5,7
c. Lainnya	0	0,0	1	4,5	0	0,0	1	2,6	0	0,0	2	5,7
4. Tugas anak												
a. Bantu Ibu	0	0,0	2	6,7	2	25,0	_	12,7	2	18,1	6	10,6
b. Belajar	7	2,99	28	93,3	2	62,5	45	81,8	_	9,69	73	6,58
c. Lainnya	1	33,3	0	0,0	П	12,5	3	5,5	2	18,1	3	3,5

E.3.3 Pelaksanaan

Pelaksanan adalah upaya mendistribusikan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dengan cukup baik, sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun pendistribusian sumber daya adalah sejauhmana keluarga dapat mengalokasikan sumber daya uang dan sumber daya waktu untuk memenuhi kebutuhan.

a. Alokasi Pengeluaran Keluarga

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan melalui besarnya pendapatan yang diterimanya setiap bulan atau setiap tahun. Dengan demikian, pendapatan keluarga adalah besarnya rata-rata penghasilan yang diperoleh dari seluruh anggota keluarga (Susanti 1999). Namun, idiomidiom tentang tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pendapatan sangat sulit dilakukan karena masyarakat pada umumnya sukar untuk mencatat dan mengingat arus pendapatan, serta jenisnya atau juga oleh sebab-sebab lain. Oleh karena itu, pendapatan keluarga dibedakan menurut pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Kedua jenis pengeluaran ini dapat menjelaskan dengan cukup baik bagaimana pola konsumsi masyarakat secara umum (Rambe 2004).

Pengeluaran pangan rata-rata per kapita per bulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota keluarga. Suhardjo (1989) menyatakan bahwa, pendapatan sangat berpengaruh terhadap alokasi pengeluaran keluarga. Keluarga yang memiliki pendapatan yang rendah akan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk pangan sebagai kebutuhan pokok. Sementara itu, tingkat pendapatan yang baik akan memberi peluang lebih besar untuk pangan yang baik berdasarkan kuantitas dan kualitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk pangan di daerah perkotaan yang berstatus miskin sebesar Rp197.920,7, sedangkan untuk daerah pedesaan yang tergolong miskin adalah sebesar Rp195.486,7. Untuk pangan di daerah perkotaan yang tergolong miskin adalah sebesar Rp169.770,4, sedangkan di daerah

per-desaan yang tergolong miskin adalah sebesar Rp155.708,2. Jika dilihat berdasarkan jenis pangannya, komponen pengeluaran terbesar adalah untuk pangan hewani, baik di daerah perkotan maupun di daerah pedesaan. Jenis pangan hewani yang sering dikonsumsi oleh sebagian besar keluarga adalah telur, daging ayam, ikan asin, dan sebagian kecil adalah daging sapi.

Sementara itu, proporsi terbesar kedua adalah konsumsi makanan dan minuman jadi, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Pengeluaran untuk konsumsi padi-padian menempati urutan ketiga. Hal yang cukup menarik dalam pola pengeluaran ini adalah besarnya pengeluaran untuk tembakau dan sirih, baik di daerah perkotaan yang berstatus miskin (Rp14.967,3), sedangkan di daerah pedesaan adalah Rp25.083,1. Tingginya pengeluaran tersebut disebabkan adanya kebiasaan merokok, terutama pada kepala keluarga dalam sehari dapat menghabiskan minimal satu bungkus rokok. Untuk jenis pangan lainnya, besarnya pengeluaran pada umumnya masih di bawah Rp10.000 per kapita per bulan. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa komponen pengeluaran nonpangan per kapita per bulan terbesar untuk bahan bakar di daerah perkotaan yang berstatus miskin adalah sebesar Rp71.902,5, sedangkan di daerah pedesaan adalah sebesar Rp40.057,4.

Tingginya pengeluaran tersebut disebabkan naiknya harga bahan bakar pada saat ini, termasuk minyak tanah yang banyak digunakan oleh sebagian besar keluarga. Selain minyak tanah, bahan bakar yang banyak digunakan oleh keluarga adalah bensin untuk kendaraan bermotor dan sebagian kecil mobil yang dimiliki keluarga. Komponen pengeluaran terbesar kedua per kapita per bulan di daerah perkotaan yang berstatus miskin adalah pendidikan (Rp34.616,6), sedangkan di daerah pedesaan adalah Rp26.887,5. Tingginya biaya pendidikan tersebut disebabkan oleh tingginya biaya transportasi dan uang saku yang diberikan kepada anak.

Hasil uji *t* menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05). Ratarata pengeluaran pangan di daerah perkotaan adalah Rp205.563,7 per kapita per bulan, sedangkan di daerah pedesaan adalah Rp246.923,2 per kapita per bulan. Sebaliknya, hasil uji *t* menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05). Rata-rata pengeluaran nonpangan di daerah perkotaan

adalah Rp190.132,2 per kapita per bulan, sedangkan di daerah pedesaan adalah Rp209.772,7 per kapita per bulan.

Komponen pengeluaran terbesar kedua per kapita per bulan di daerah perkotaan untuk bahan bakar bensin setelah melalui hasil uji t adalah pendidikan (Rp44.975,2), sedangkan di daerah pedesaan adalah Rp38.177,40.

Hasil uji *t* menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05). Ratarata pengeluaran pangan di daerah perkotaan yang tergolong miskin adalah Rp197.920,7 per kapita per ubaln, sedangkan di daerah pedesaan adalah Rp195.486,7 per kapita per bulan. Sebaliknya, hasil uji *t* menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05). Rata-rata pengeluaran nonpangan di daerah perkotaan yang beerstatus miskin adalah Rp169.770,4 per kapita per bulan, sedangkan di daerah pedesaan adalah Rp155.708,2 per kapita per bulan. Secara umum, rata-rata pengeluaran untuk pangan per kapita per bulan adalah Rp236.583,3, sedangkan pengeluaran untuk nonpangan adalah sebesar Rp204.862,6. Secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 8.

Apabila dilihat dari tingkat kesejahteran berdasarkan pengeluaran pangan, pada penelitian ini ditemukan bahwa persentase pengeluaran pangan baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk nonpangan. Rata-rata persentase pengeluaran pangan di daerah perkotaan yang berstatus miskin adalah sebesar 58,9%, sedangkan rata-rata persentase pengeluaran pangan di desa adalah 52,9%. Sementara itu, rata-rata persentase pengeluaran nonpangan di kota yang berstatus miskin adalah 41,1%, sedangkan rata-rata persentase pengeluaran nonpangan di desa adalah 39,7%. Secara umum, persentase pengeluaran untuk pangan sebesar 57,4%, sedangkan untuk nonpangan sebesar 42,5%.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soekirman (1991) bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk pangan masih merupakan bagian terbesar (>50%). Pola pengeluaran rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kehidupan suatu masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah

komposisi pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan. Kesejahteraan dikatakan baik jika persentase pengeluaran untuk makanan semakin kecil dibandingkan dengan total pengeluaran. Hasil penelitian Saleh (1980) menunjukkan bahwa pengeluaran keluarga miskin menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti beras dan lauk pauk. Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 9.

b. Alokasi Waktu Kegiatan Suami dan Istri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dialokasikan oleh suami untuk kegiatan produktif (8,4 jam), tergolong tidak miskin, sedangkan rata-rata kegiatan produktif suami di daerah pedesaan sebesar 7,9 jam, tergolong tidak miskin. Alokasi rata-rata kegiatan pribadi suami di daerah perkotaan (10,5 jam), sedangkan alokasi rata-rata kegiatan pribadi di daerah pedesaan (11,3 jam) adalah berstatus tidak miskin. Dengan demikian, alokasi rata-rata waktu kegiatan pribadi adalah yang terbanyak jika dibandingkan kegiatan lainnya.

Keadaan yang hampir sama yaitu alokasi rata-rata kegiatan pribadi istri di daerah perkotaan sebesar 11,1 jam, sedangkan alokasi rata-rata kegiatan pribadi istri di daerah pedesaan sebesar 11,3 jam, mereka tergolong tidak miskin. Hasil penelitian di lain pihak menunjukkan bahwa istri responden yang sebagian besar hanya menjadi ibu rumah tangga. Terlihat pula dari besarnya waktu istri untuk kegiatan domestik di daerah perkotaan (5,6 jam) per hari, sedangkan di daerah pedesaan (5,3 jam) per hari yang mencakup kegiatan memasak, mengasuh anak, mencuci, menyetrika, dan membereskan rumah, mereka tergolong tidak miskin juga. Secara umum, rata-rata kegiatan produktif suami contoh di wilayah ini adalah 8 jam per hari, keluarga termasuk tidak miskin, sedangkan rata-rata kegiatan produktif suami contoh sebesar 7,8 jam per hari adalah miskin. Menurut Guhardja et al. (1992), pada umumnya pekerjaan rumah tangga sampai saat ini masih dianggap sebagai pekerjaan sektor domestik yang tidak produktif dan tanggung jawab, serta beban pekerjaan terletak pada istri. Curahan waktu istri terhadap pekerjaan rumah tangga lebih tinggi jika dibandingkan dengan suami. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38 Jumlah alokasi waktu kegiatan suami contoh dan tingkat kesejahteraan

	I	Kota (n= 51)		D	esa (r	n= 173)		Total	(Kota 22	+Desa)	(n=
Jenis Kegiatan	Misk	cin	Tida Misk		Misk	in	Tida Misk		Misk	in	Tida Misk	
	Rata- rata	Std	Rata- rata	Std	Rata- rata	Std	Rata- rata	Std	Rata- rata	Std	Rata- rata	Std
Produktif	7.7	4.7	8.4	4.6	7.8	4.3	7.9	3.0	7.8	4.4	8.0	3.4
Luang	3.9	3.1	3.8	2.9	4.3	3.4	4.1	2.6	4.1	3.2	4.1	2.7
Pribadi	10.2	2.0	10.5	2.1	11.1	1.8	11.3	1.9	10.8	1.9	11.2	1.9
Sosial	1.1	2.0	0.7	1.8	0.5	1.3	0.3	0.8	0.6	1.6	0.4	1.0
Domestik	1.1	1.8	0.6	2.2	2.6	0.9	0.3	1.0	0.5	1.3	0.4	1.3

Keterangan: 16 suami telah meninggal

Waktu kegiatan istri yang sangat menonjol adalah kegiatan pribadi. Waktu kegiatan pribadi untuk istri di daerah perkotaan adalah 10,8 jam per hari, sedangkan di daerah pedesaan adalah 11,5 jam per hari. Meskipun demikian, suami juga berperan dalam kegiatan domestik walaupun dengan rata-rata alokasi waktu yang jauh lebih sedikit. Umumnya peran suami dalam pekerjaan domestik adalah membantu pengasuhan anak, sedangkan kegiatan produktif, kegiatan waktu luang, dan kegiatan pribadi maupun kegiatan sosial, waktu yang dialokasikan suami dan istri cenderung hampir sama.

Aktivitas luang yang umumnya dilakukan oleh suami maupun istri adalah menonton TV dan santai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran suami adalah sebagai pencari nafkah keluarga dan peran domestik istri sebagai ibu rumah tangga masih dominan. Secara umum, rata-rata kegiatan produktif istri contoh di wilayah ini adalah 2,7 jam per hari, keluarga ini termasuk tidak miskin, sedangkan rata-rata kegiatan produktif 2,8 jam per hari adalah miskin. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 39.

	Keseja	inter	aan									
	I	Kota (n= 51)		Γ	Desa (1	n= 173)		Tota	`	ta+Desa 34)) (n=
Jenis Kegiatan	Misl	cin	Tid: Misl		Misl	cin	Tid Misl		Misk	cin	Tid Misl	
	Rata- rata	Std	Rata- rata	Std	Rata- rata	Std	Rata- rata	Std	Rata- rata	Std	Rata- rata	Std
Produktif	3.9	4.9	2.2	3.9	2.4	3.9	2.9	3.9	2.8	4.3	2.7	3.9
Luang	3.9	2.3	4.0	1.9	4.6	3.0	3.7	2.6	4.4	2.8	3.8	2.5
Pribadi	10.6	2.1	11.1	2.1	11.3	2.3	11.7	2.1	11.1	2.3	11.5	2.1

0.9 0.4

3.1 5.3

1.9

3.1

0.5

5.2

1.3

3.1

0.5 1.3

5.4 3.3

1.9 0.4

4.2 5.3

Tabel 39 Jumlah alokasi waktu kegiatan istri contoh dan tingkat kesejahteraan

Keterangan: Enam istri telah meninggal

1.9 1.1

3.3 5.6

0.8

4.8

Sosial

Domestik

Jika kita perhatikan alokasi waktu kegiatan produktif suami, menggambarkan bahwa suami menghabiskan waktu produktif tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan istri. Mengindikasikan bahwa sebagian besar istri tidak bekerja untuk menopang pendapatan keluarga. Terlepas dari alokasi waktu kegiatan yang berbeda secara kuantitatif di atas, tetapi dalam perspektif gender terkesan istri bekerja di luar rumah tidak dipermasalahkan sepanjang bekerjanya tidak akan melupakan tugas utama. Tugas istri adalah untuk kesejahteran keluarga. Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat pola hubungan sosial yang menurut Tomagola dalam Sugiarti 1995 sangat ditentukan oleh budaya yang menjadi rujukan normatif. Pola hubungan yang berkembang pada keluarga sampel adalah pola hubungan equal partner, yaitu suatu pola di mana suami maupun istri bisa berperan ganda bila keadaan menuntut. Siapa saja dapat melakukan sesuatu hal secara fungsional, saling melengkapi, saling terbuka, dan saling membantu, sehingga perlu ditopang oleh sikap kedewasaan dan toleransi yang tinggi dari kedua belah pihak.

E.3.4 Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan sekaligus dilakukan evaluasi dan perbaikan jika terjadi kesalahan atau penyimpangan di dalam kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, sebesar 55% responden di kota tidak melakukan pengontrolan atas tugas yang dilaksanakan. Sebanyak 24,4% responden di desa saling mengingatkan jika ada kesalahan yang dilakukan. Sebagian besar, (72,2%) istri di kota melakukan kegiatan kontrol pada kegiatan yang dilakukan oleh anak dan segala macam urusan rumah tangga, sedangkan di desa 85,4%, masingmasing dengan status miskin dan tidak miskin. Sebanyak 75% suami di kota mencari nafkah, sedangkan di desa 32,3%, mereka tergolong tidak miskin. Kontrol atas kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengevaluasi sejauhmana pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan.

Secara umum, cara pengontrol yang dilakukan adalah memperbaiki (26,9%), keluarga ini termasuk tidak miskin, sedangkan sebesar 20% adalah miskin. Sebesar 83,3% pekerjaan yang dikontrol ibu adalah anak dan segala urusan keluarga, keluarga ini termasuk tidak miskin, sedangkan 75% adalah miskin. Sementara itu, sebesar 45,2% pekerjaan yang dikontrol ayah adalah mencari nafkah, keluarga ini tergolong tidak miskin, sedangkan 43,5% adalah miskin. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 40.

Tabel 40 Sebaran responden dalam melakukan pengawasan dan tingkat kesejahteraan

		Ko	ota			D	esa		T	otal (K	ota+[Desa)
Pernyataan		iskin 36)	M	idak iskin 24)		iskin 79)	M	dak iskin 01)		iskin 15)	M	idak iskin 125)
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Cara mengontrol												
a. Mengingatkan	5	13,8	2	8,3	5	11,3	5	9,6	10	12,5	7	8,9
b. Tidak dikontrol	20	55,5	7	29,1	12	27,2	12	23,0	32	40,0	19	24,3
c. Menegur	8	22,2	8	33,3	7	15,9	10	19,2	15	18,7	18	23,0
d. Buat catatan	0	0,0	4	16,7	1	2,2	1	1,9	1	1,2	7	8,9
e. Memperbaiki	0	0,0	2	8,3	16	36,3	19	36,5	16	20,0	21	26,9
f. Diperhatikan	3	8,3	1	4,1	3	6,8	5	9,6	6	7,5	6	7,6
Dikontrol ibu												
a. Urusan RT	26	72,2	16	66,7	31	77,5	59	89,4	57	75,0	75	83,3
b. Ekonomi RT	10	27,7	8	33,3	9	22,5	7	10,6	19	25,0	15	16,7

11000)41110		(200)								
		Ko	ota			D	esa		T	otal (K	ota+[Desa)
Pernyataan		iskin 36)	M	idak iskin 24)		iskin 79)	M	dak iskin 01)		iskin 15)	M	idak iskin 125)
	n %		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Dikontrol ayah	n %											
a. Pendidikan anak	5	13,9	1	4,1	8	16,4	13	19,1	13	15,3	15	16,1
b. Cari nafkah	22	61,1	18	75,0	15	30,6	24	32,3	37	43,5	42	45,2
c. Aktivitas keluarga	2	5,5	4	16,7	15	30,6	9	13,2	17	20,0	13	14,0
d. Keuangan	7	19,4	1	4,1	11	22,4	22	32,4	18	21,2	23	24,7

Tabel 40 Sebaran responden dalam melakukan pengawasan dan tingkat kesejahteraan (lanjutan)

Pembuatan rencana yang terperinci, pengorganisasian, sampai pada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Kontrol yang baik terhadap kegiatan yang dilakukan akan sangat menunjang tercapainya tujuan hidup yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 55,5% keluarga di kota tidak melakukan kontrol, sedangkan di desa 27,2%, termasuk keluarga miskin.

E.3.5 Faktor yang Berpengaruh Terhadap Manajemen Sumber Daya Keluarga

Analisis dilakukan melalui beberapa faktor internal atau eksternal yang memengaruhi proses manajemen adalah jumlah anggota, umur KK/istri, pendidikan KK/istri, pendapatan, dan kepemilikan aset. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses manajemen adalah tempat tinggal. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41 Faktor yang memengaruhi perencanaan dalam keluarga

Variabel Bebas	Perencanaan (0= tidak, 1= ya)		
	β	Sig	OR
Jumlah Anggota	0,050	0,552	1,051
Umur KK	0,022	0,403	1,022
Umur Istri	-0,045	0,124	0,956
Pendidikan KK	0,134	0,232	1,143

Tabel 41 Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan dalam Keluarga (lanjutan)

Variabel Bebas	Perencanaan (0= tidak, 1= ya)		
	β	Sig	OR
Pendidikan Istri	-0,204	0,076	0,818
Pendapatan	3,5x10 ⁻⁷	0,373	1,000
Aset	0,009	0,806	1,009
Lokasi (1= kota, 0= kabupaten)	0,995	0,009**	2,705
\mathbb{R}^2	0,173		
P	0,008		

Keterangan: *(p<0,01), **(p<0,05), ***(p<0,1)

Pada Tabel 41, terlihat bahwa responden yang tinggal di kota memiliki peluang lebih tinggi 2,705 kali untuk melakukan perencanaan dibanding keluarga yang tinggal di desa. Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa pendidikan KK yang tinggi berpeluang lebih tinggi 1,373 kali untuk melakukan pembagian tugas dibanding KK yang tingkat pendidikannya rendah.

Contoh yang tinggal di kota berpeluang lebih tinggi 3,477 kali untuk melakukan pembagian tugas dibanding contoh yang tingal di desa. Pembagian tugas adalah distribusi kewenangan atau tanggung jawab kepada anggota, sehingga tidak menjadi beban salah satu anggota. Dengan begitu, semua pekerjaan berjalan secara teratur. Tanpa pembagian tugas yang jelas, dapat menyebabkan saling menunggu dan mengharapkan siapa yang sesungguhnya akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Rezeki (2006) bahwa dalam hal keuangan diatur oleh istri, baik ibu bekerja (65,1%) maupun ibu tidak bekerja (56,7%). Penyediaan menu sehari-hari pada ibu bekerja (90,9%) maupun ibu tidak bekerja (86,5%). Secara rinci dapat dilihat Tabel 42.

Tabel 42 Faktor yang memengaruhi pembagian tugas dalam keluarga

Variabel Bebas	Pembagian Tugas (0= tidak, 1= ya)		
	β	Sig	OR
Jumlah Anggota	0,037	0,675	1,038
Umur KK	-0,023	0,627	0,967
Umur Istri	0,022	0,498	1,022
Pendidikan KK	0,317	0,012*	1,373
Pendidikan Istri	0,212	0,081	0,809
Pendapatan	-6,7x10 ⁻⁷	0,207	1,000
Aset	-0,029	0,456	0,972
Lokasi (1=kab, 0=kota)	1,246	0,001**	3,477
\mathbb{R}^2	0,172		
P	0,007		

Keterangan: *(p<0,01), **(p<0,05), ***(p<0,1)

Persentase tertinggi pekerjaan domestik dilakukan oleh istri, baik yang bekerja (63,6%) dan tidak bekerja (65,5%), partisipasi suami cukup tinggi yaitu lebih dari separuhnya. Untuk pelaksanaan yang dimaksud adalah alokasi pendapatan dan alokasi waktu kegiatan. Keluarga contoh yang pendapatannya tinggi berpeluang 1,000 kali untuk tidak melakukan pengawasan atau kontrol dibandingkan dengan keluarga contoh yang memiliki pendapatan rendah Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 43 Faktor yang memengaruhi pengawasan kegiatan keluarga

Variabel Bebas	Pengawasan (0=tidak, 1= ya)		
	β	Sig	OR
Jumlah Anggota	0,160	0,212	1,173
Umur KK	-0,023	0,478	0,977
Umur Istri	0,018	0,630	1,0108
Pendidikan KK	0,292	0,050	1,339
Pendidikan Istri	-0,078	0,615	0,925
Pendapatan	$-1,3x10^{-6}$	0,007**	1,000
Aset	-0,006	0,897	0,994
Lokasi (1=kab, 0=kota)	-0,349	0,504	0,705
\mathbb{R}^2	0,141		
P	0,000		

Keterangan: *(p<0,01), **(p<0,05), ***(p<0,1)

BAGIAN KETIGA MODEL PEMBERDAYAAN

Berbagai model telah dikembangkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Tujuan utama dari model-model tersebut adalah untuk memperbaiki kesejahteraan. Model pemberdayan ini kemudian dioperasionalkan melalui berbagai macam program. Berbagai program yang diturunkan oleh pemerintah sebelum krisis sangat berhasil menekan prevalensi kemiskinan dari tahun 1970 sebanyak 70 juta berhasil dikurangi menjadi 22,5 juta pada tahun 1996. Selain berbagai program yang dikemukakan tersebut, terdapat juga beberapa program yang diluncurkan dari berbagai departemen atau instansi, seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dari Depsos, Program Peningkataan Pendapatan Petani Kecil dan Nelayan (P4K) dari Deptan, Beras Miskin (Raskin), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tujuan inti dari program-program ini adalah meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakatr miskin, sehingga tidak menambah parah bagi keluarga miskin. Namun, terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, kemiskinan pun kembali meningkat secara tajam menjadi 49,5 juta Kemudian, angka ini menurun pada tahun 2005 menjadi 35,10 juta, tetapi meningkat lagi menjadi 39,05 juta pada tahun 2006. Kelompok masyarakat yang dianggap terpuruk dari dampak krisis ekonomi adalah kaum buruh, keluarga dengan banyak tanggungan, petani dan nelayan kecil, pekerja sektor informal, pegawai negeri golongan rendah, serta mereka yang terkena bencana alam (Maryono 1999). Dengan demikian, model pemberdayaan yang dirancang pemerintah boleh dinilai gagal dalam menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, penulis mencoba merancang sebuah model sesuai riset.

Model Bab **8**Model dan Strategi Pemberdayaan

Model adalah deskripsi tentang keterkaitan antara kebutuhan, potensi, dan masalah yang disederhanakan dalam suatu pemikiran logis berdasarkan kenyataan. Berlo (1960) mengembangkan model berdasarkan teori dan hasil penelitian dalam bidang ilmu perilaku. Dalam menyusun model, Berlo melakukan beberapa kali perubahan sebagai hasil diskusi, kursus, penelitian, dan seminar. Model bisa berbeda-beda tentang suatu fenomena. Model tertentu tidak bisa dikatakan paling benar, tetapi beberapa di antaranya lebih berguna daripada yang lain atau lebih cocok dalam mencapai suatu tujuan (Berlo 1960 dan Collett 1991).

Sehubungan dengan naik turunnya angka kemiskinan tersebut, muncullah berbagai kritik terhadap model pemberdayaan yang telah dilakukan. Misalnya, upaya penanggulangan keluarga miskin yang diterapkan di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia dengan menggunakan dalil trickle down effect, dinilai telah gagal. Menurut pendekatan ini, yang amat penting adalah pertumbuhan ekonomi karena adanya investasi (golongan mampu). Konsekuensinya adalah golongan miskin akan mendapat pengaruh atau tetesan dari pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh produktivitas ekonomi pada golongan kaya. Namun dalam kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, pendekatan ini memiliki mode of production yang berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan menempatkan buruh sebagai alat produksi semata yang harus mengikuti kemauan pemilik perusahaan (Sarwoprasodjo 1993). Kritik lain terhadap sejumlah pendekatan pemberdayaan, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Depsos misalnya, masih terbukti

tingginya jumlah kelompok yang mati (Anonim 1989). Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah, seperti: (a) pengalaman usaha; (b) jenis usaha; (c) jumlah anggota dan pengelola usaha; (d) tempat usaha; (e) perkembangan modal; dan (f) perkembagan keuntungan (Sarwoprasodjo 1993).

Penelitian Sarwoprasodjo (1993) menunjukkan bahwa pengalaman usaha menjadi hal penting dalam menunjang kesinambungan usaha, terutama dalam hal teknis pengelolaan usaha. Latihan keterampilan yang diberikan kepada anggota kurang memadai, terlalu singkat, dan lebih bersifat teoritis. Latihan lebih banyak hal-hal yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan kelompok. Jenis usaha yang dikembangkan tidak sesuai dengan keinginan anggota, sehingga usahanya tidak bertahan lama karena tidak memiliki pengalaman usaha di bidang tersebut. Lahan usaha yang bukan milik anggota kelompok cenderung akan mati karena akan ada biaya tambahan untuk sewa. Modal usaha semakin berkurang, pada akhirnya usaha semakin tidak menguntungkan dan anggota enggan melanjutkan kegiatan kelompok. Perkembangan permodalan kelompok menunjukkan prospek usaha KUBE yang kurang baik. Perkembangan permodalan sangat berhubungan dengan kesinambungan kelompok. Kelompok yang tidak aktif mempunyai perkembangan modal yang semakin menurun, sehingga keuntungannya juga semakin menurun. Jika tidak ada tambahan modal, akan semakin banyak kelompok yang mati atau tidak aktif. Kritik lain, misalnya proyek P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil) dari Deptan. Menurut Suhanda (2007), proyek ini masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengelolaannya, antara lain: (a) kemampuan PPL dalam membina variasi usaha kelompok; (b) penyimpangan dana oleh PPL dan ketua; dan (c) terjadinya ikatan kolusi di tingkat pengurus. Program pengentasan kemiskinan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 44.

Tabel 44 Program-program pengentasan kemiskinan periode 1990-an

Program Pengentasan Kemiskinan	Tujuan Program	Target Sasaran Program
Sebelum Krisis Ekonomi		
IDT (Inpres Desa Tertinggal)	-Melepaskan diri dari kemiskinan -Memunculkan pengusaha kecil yang dapat memperkuat daya tahan ekonomi rakyat	-Wilayah desa/kecamatan miskin -Penduduk/keluarga miskin
Pemb. Keluarga Sejahtera (PKS)	Meningkatkan peran dan fungsi keluarga, terutama PS dan KS-1 di bidang ekonomi	Ibu dari KK yang termasuk dalam kelompok sasaran PS dan KS-1, dengan alasan ekonomi di desa IDT dan bukan IDT
Pemberian Makanan Tambahan Anak-anak Sekolah (PMTAS)	Mengembangkan ekonomi desa dan meningkatkan derajat kesehatan, serta gizi anak sekolah	Anak SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri maupun swasta di daerah miskin
Program Pengentasan Kemiskinan Sektoral	Membantu dan memberdayakan penduduk miskin	Sesuai dengan sektor
Masa Krisis		
Ketahanan Pangan	Membantu penduduk miskin akibat krisis dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan	Keluarga PS dan KS-1
Pengamanan Sosial: -Bidang Pendidikan	Agar anak-anak usia sekolah terhindar dari putus sekolah	Keluarga Miskin
-Bidang Kesehatan	Memberikan pelayanan (<i>service</i>) kesehatan dasar terhadap keluarga yang miskin	
Penciptaan Lapangan Kerja Padat Karya	Mengatasi dampak krisis ekonomi	Penganggur karena pemutusan hubungan kerja dan penganggur lain akibat krisis

Sumber: Irawan & Romdiati (2000) dan Remi S & S. Tjiptoherijanto P (2002)

PPL yang ditugaskan pada kelompok usaha tidak memiliki pengetahuan kewiraswastaan sulit untuk melakukan pembinaan terhadap petani yang berusaha di sektor lain bersifat produktif dan komersial, kecuali memiliki pengetahuan teknis di bidang pertanian. Pada tingkat struktur, terjadinya penyimpangan dana oleh ketua dan PPL. Kadang-kadang, uang pinjaman dipakai oleh ketua dan PPL, sehingga menimbulkan kemacetan dalam usaha kelompok. Selain itu, terjadinya ikatan kolusi di tingkat struktur yang cenderung mendistribusikan uang pinjaman kepada keluarga yang bukan individu sasaran. Kasus lain, misalnya JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang juga masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (a) mekanisme koordinasi antarinstansi vertikal maupun horizontal belum kukuh, terutama dalam menetapkan kelompok sasaran, jumlah, dan lokasinya; (b) mekanisme penyaluran dana belum menjangkau langsung masyarakat lapisan paling bawah; (c) kelompok sasaran yang memanfaatkan program belum jelas, baik tentang siapa, di mana, dan apa kegiatannya; dan (d) penetapan upah tenaga kerja yang bervariasi, sehingga pembakuan pedoman untuk menilai keberhasilan program sulit dilakukan (Sumodiningrat 1999). Masih banyak institusi pemberdayaan keluarga miskin yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

Kritik terhadap pendekatan penanggulangan keluarga miskin yang ada saat ini adalah terlalu berorientasi pada pendekatan pemenuhan minimum. Program-program yang berorientasi kebutuhan pemenuhan kebutuhan minimum seperti Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian santunan kepada golongan miskin, pemberian subsidi kepada golongan miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi tanpa diikuti oleh pembentukan perekayasaan sosial untuk memperbaiki struktur sosial yang ada. Pendekatan ini dinilai tidak melihat masalah produktivitas dan partisipasi sosial keluarga miskin dan kurang mendidik masyarakat untuk melakukan usaha-usaha ke arah produktivitas. Kritik terakhir terhadap program pemerintah adalah pemerintah menempatkan diri sebagai aktor utama penanggulangan kemiskinan. Pemerintah yang didukung oleh kekuatan dan kekuasaan, memiliki akses dan aset yang dipandang sebagai pelaku mampu melakukan intervensi terhadap kemiskinan. Oleh

karena itu, penanggulangan kemiskinan hanya bisa di atasi kalau dijamin oleh pemerintah yang kuat. Pendekatan ini kadang-kadang memaksakan masyarakat untuk mengikuti apa yang pemerintah kehendaki.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan, berbagai upaya pemberdayaan tersebut, alternatif pemecahan dilakukan melalui pendekatan "proses belajar" atau secara sederhana pendekatan proses (Korten 1981). Pendekatan ini meliputi beberapa dimensi antara lain dimensi struktural dan fungsional, dimensi kognitif, dimensi moral, asas demokrasi, dan strategi pemberdayaan.

Dimensi struktural dan fungsional mengacu pada pembentukan kelompok-kelompok kecil sebagai wadah pelaksanaan program. Dengan memberikan kedudukan dan fungsi kepada masing-masing kelompok, baik terhadap pengelola maupun individu sasaran. Ada dua pertimbangan yang menjadi dasar pendekatan struktural dan fungsional. Pertama, dilihat dari aspek pembinaan memungkinkan pembina untuk membina kelompok, baik secara struktural maupun fungsional. Pembinaan struktural dan fungsional adalah siapa harus bertanggung jawab kepada siapa dan siapa melaksanakan apa. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah sistem dan mekanisme kerja kelompok. Kedua, dari sudut kepentingan, pendekatan ini memungkinkan anggota untuk mengembangkan kemampuan bekerja sama. Dimensi kognitif berorientasi pada beberapa aspek, antara lain: (1) pendidikan serta pelatihan dan (2) sosialisasi berbagai regulasi yang lebih mengarah pada sanksi hukum dan sanksi sosial. Agar kelompok usaha tetap eksis dalam usahanya perlu dilakukan pengembangan kegiatan ekonomi produktif melalui berbagai kegiatan, antara lain: (a) diadakannya pendidikan dan latihan keterampilan, baik terhadap kelompok sasaran maupun terhadap fungsionaris kelompok atau pendamping; (b) dilakukannya bimbingan kewirausahaan; (c) dilakukannya bimbingan pemasaran; dan (d) diadakannya apresiasi wirausaha (Tjiptoherijanto 2002). Program pendidikan dan pelatihan dapat menerapkan konsep Community College (Rahardjo 2000). Inti konsep ini adalah peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, pendidikan, latihan, dan penyuluhan yang merespon kebutuhan ekonomi dan bisnis. Seandainya keluarga miskin ingin mengembangkan agribisnis, stakeholders harus meramu kurikulum dan silabus agribisnis, bahkan lebih khusus lagi, misalnya holtikultura. Upaya pemahaman kondisi objektif dan interpretasi subjektif juga perlu dilakukan melalui penelitian. Misalnya, perekonomian masyarakat Bogor saat ini sedang mencari bentuknya ketika memasuki perekonomian global yang makin berorientasi pasar. *Stakeholders* perlu melakukan penelitian agar lebih meningkatkan efisiensi dan daya saingnya melalui analisis SWOT, sehingga dapat menemukan strategi baru yang bisa berkompromi dengan realitas.

Supaya tidak terjadi penyimpangan di dalam mengelola kelompok maupun mendapatkan perlakuan yang adil, sehingga keluarga dapat mengakses berbagai aset yang disiapkan *stakeholders*. Penerapan sistem birokrasi legal rasional menjadi sangat penting. Muhaimin (2000) mengatakan birokrasi legal rasional terdapat pemisahan yang jelas antara hubungan kerabat, teman, dan kenalan dengan kepentingan kelompok. Hubungan antara anggota dengan pengurus bersifat impersonal yaitu ditentukan oleh peraturan. Penerapan konsep birokrasi seperti ini bertujuan untuk membuka sistem-sistem yang tidak menghambat dalam usaha (pengembangannya), mencegah terjadinya sistem kolusi dan nepotisme di struktur. Siapa yang melakukan penyelewengan harus diberikan sanksi sosial, berupa dikucilkan dari masyarakat atau sanksi yuridis, berupa hukuman atau denda.

Dimensi moral berorientasi pada pendekatan sikap dan kultur masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk merespons opini, keyakinan, perasaan, preferensi, dan pernyataannya tentang perilaku. Pendekatan seperti inilah yang kemudian sikap itu diartikan sebagai suatu bangunan psikologis. Membangun adalah caracara mengonseptualisasikan unsur-unsur yang tak mudah dipahami daerah yang diselidiki oleh suatu ilmu tertentu. Para ilmuan sosial menyelidiki keyakinan dan perilaku orang dalam usahanya untuk menarik kesimpulan-kesimpulan mengenai keadaan mental dan proses mental. Sikap tidak dapat diobservasi atau diukur secara langsung. Keberadaannya harus ditarik kesimpulan dari hasil-hasilnya. Dengan demikian, sikap tersebut dapat didefinisikan sebagai kesetujuan mandiri yang mempengaruhi atau menolak sebagai suatu komponen yang kritis pada konsep sikap itu (Mueller 1992).

Kesetujuan untuk menerima atau menolak suatu perubahan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan serta adat yang berlaku di masyarakat bersangkutan. Mereka yang bertahan pada kebiasaan dipandang sebagai "tradisional" disebut sebagai "reaksioner" atau "kolot atau konservatif". Arti tradisi yang paling mendasar adalah traditum, yaitu sesuatu yang diteruskan (*tranmitted*) dari masa lalu ke masa sekarang, berupa benda atau tindakan (Pudjiwati Sajogyo 1985).

Berbicara mengenai tradisi adalah berbicara mengenai sesuatu yang mempunyai fungsi untuk menjaga atau memelihara yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat yang hidup sesuai dengan tradisi yang tidak terputus-putus, kemudian datangnya masyarakat modern dipandang sebagai malapetaka bagi kehidupan masyarakat tradisional. Perubahan yang mempertemukan berbagai insan dari berbagai latar akan melahirkan kesepakatan-kesepakatan kultural baru yang sudah tentu diharapkan memperkaya kehidupan manusia sebagai satu kesatuan sistem (umat). Kesepakatan-kesepakatan baru inilah yang akan memungkinkan interaksi dan transaksi antarmanusia dalam kehidupan baru. Kehidupan baru yang tertengarai sebagai one world, tetapi not devided akan mendorong terjadinya kerja sama yang dilandasi solidaritas atas landasan humanisme, bukan konfrontasi yang sering melahirkan konflik laten maupun potensial. Hal yang akan menjadi sorotan utama adalah unsur-unsur manakah yang harus dilihat sebagai esensi yang khas dan hakiki. Mana pulakah yang boleh diinterpretasi sebagai sesuatu yang imanen dan tidak transenden. Oleh karena itu, boleh saja ditawar untuk diadaptasikan secara kontekstual ke tuntutan-tuntutan perubahan (Wignjosoebroto 1995). Dalam hubungannya dengan dimensi moral, ada dua elemen utama yang dipandang, yaitu pendidikan dan ekonomi.

Pendidikan. Transformasi pendidikan dengan ajaran-ajaran baru yang text book oriented, dan journal oriented atau bercorak urban industrial akan memaksakan perubahan-perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan. Tak ayal kecakapan dan kearifan yang bertradisi lokal berciri rural agrarian yang mungkin tak akan menahan lajunya perubahan karena perubahan itu sendiri lebih berfungsi dan relevan dengan tuntutan kehidupan baru. Dalam proses transformasi seperti itu, terlahirnya generasi baru yang bisa berfungsi dan difungsikan yang kadang ditebus dengan konflik-konflik

kultur yang bersegmen konflik kaidah dan konflik nilai. Fungsi generasi baru sebagai akibat dari program-program yang di *link and match* yang bermisi pada kebutuhan dan tuntutan dunia produksi maupun yang berskala proyek-proyek *crash programs*. Berorientasi pelatihan-pelatihan yang bertujuan menerampilkan kaki tangan anak-anak manusia, sehingga akan siap pakai dan siap dipakai, daripada manusia yang syarat deterministik oleh warisan lama akan digilas oleh perubahan dan kemudian mereka ini tetap menyelinap di zona degradasi.

Ekonomi. Perbincangan tentang kehidupan ekonomi keluarga pada akhirnya selalu saja terkesan pembicaraan yang mengarah pada tema tentang kehidupan ekonomi golongan yang powerless. Golongan lemah adalah golongan yang selalu saja terpuruk di papan bawah. Semua ini pasti karena adanya lingkungan budaya yang mengepungnya. Budaya ini memiliki kemungkinan untuk menghabiskan hasil-hasil kerja untuk kepentingan yang overconsumtive yang diharamkan sebagai pemborosan dan sekali-kali diwarnai oleh motif kelaliman. Pada akhirnya menyebabkan kehidupan ekonomi keluarga menjadi stagnan pada taraf disitu-situ saja, investasi yang ekonomis pun tak akan kunjung tergalakkan. Di sisi lain, keluarga juga kurang mengenal imperatif tentang mulianya kerja keras, pemintaminta yang merusak wajah jalanan umum, atau pun atas nama kegiatan sosial (pembangunan gereja dan masjid). Menunjukkan pola perilaku yang dicerca jika kelak sumbangan ini mengalami pembelotan dari yang semula untuk kepentingan umum, tetapi dijarah menjadi kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Stakeholders yang memiliki infrastruktur dan suprastruktur maupun keluarga yang bekerja keras, kemudian menjadi kapitalis yang sudah amat cenderung kapitalistik. Harus membelanjakan hasil kerja keras untuk maksud yang paling dihalalkan, ialah yang memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan untuk kepentingan umum harus tetap didasarkan pada asas keadilan, kebaikan, dan serba moderat. Dengan konsep-konsep seperti ini, pada akhirnya menyebabkan kehidupan ekonomi keluarga yang mapan. Setiap kali sejumlah kekayaan negeri atau pribadi diperoleh, setiap kali itu pula diberi haknya kepada masyarakat untuk memungut dan

menyebarkan kembali kepada masyarakat itu melalui institusi maupun individu. Ibadah ekonomi yang humanistik seperti dipaparkan di muka apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam ranah keadilan, kesamaan, pemerataan, dan kerja sama memungkinkan terjadinya proses-proses the accumulation of wealth untuk keperluan investasi dan pengembangan ekonomi keluarga.

Asas demokrasi berorientasi pada pendekatan yang lebih bersifat participatory. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melibatkan anggota, baik dalam merencanakan usaha, jenis usaha apa yang layak menurut anggota, berapa modal usaha yang diperlukan, dan tempat mana yang layak untuk mengembangkan usaha. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan anggota untuk melakukan evaluasi, bahkan menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan ikut mengambil keputusan dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijaksanaan. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi dan menjadi basis untuk menyalurkan aspirasi.

Strategi pemberdayaan adalah mengembangkan ekonomi keluarga dengan mendorong simpan-pinjam sebagai titik masuk (entry point) yang mengarah kepada bentuk koperasi di tingkat desa atau kelurahan. Hal yang perlu diperhatikan adalah merintis lebih maksimal lembaga keuangan bank dan nonbank di setiap kecamatan. Dengan begitu, pemberdayaan keluarga yang powerless menjadi powerfull memerlukan payung politis, sehingga pemberdayaan keluarga diselenggarakan dalam jangka panjang dan sustainable. Tidak boleh dilupakan bahwa masyarakat Bogor adalah multietnis, sehingga strategi pemberdayaan dilakukan melalui dua cara, yaitu (a) tabungan melalui kotak amal dan (b) tabungan melalui bank.

Tabungan melalui kotak amal merupakan embrio dari menabung di bank. Sebenarnya merupakan penjelmaan dari kebiasaan keluarga untuk menabung melalui celengan di setiap keluarga yang di institusionalkan dalam rangka mendidik keluarga agar selalu hidup hemat. Membiasakan diri atau berdisiplin untuk menabung dari keuntungan, rezeki, atau berkat yang diperoleh dari usaha produktif minimal Rp100 per hari. Kotak amal tabungan rutin setiap hari minimal Rp100 bisa diberi nama "gerakan sumbangan 100".

Yang dimaksud dengan gerakan sumbangan 100 adalah suatu gerakan menyadarkan masyarakat untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki atau berkat yang diperolehnya. Misalnya, sebuah keluarga memperoleh keuntungan Rp1.000 diambil Rp100, kemudian dimasukkan ke dalam kotak amal di rumah masing-masing, demikian seterusnya. Kotak ini terdapat dua lubang, yaitu (1) kotak sumbangan dan (2) kotak angsuran. Kotak sumbangan adalah kotak khusus untuk menabung sumbangan 100, sedangkan kotak angsuran adalah kotak untuk mengembalikan modal pinjaman. Uang pinjaman dipergunakan untuk modal usaha yang bersifat produktif. Akan tetapi, setiap peminjam diwajibkan menabung untuk angsuran sebesar 10% dan sumbangan 5%. Misalnya, sebuah keluarga meminjam Rp 50.000,- dan diprediksi laba minimal sebesar Rp2.000 per hari, akan didapati hasil sebagai berikut:

- tabungan angsuran sebesar : Rp200 - tabungan sumbangan sebesar : Rp100 - pendapatan keluarga sebesar : Rp1.700

Jika jumlah peminjam sebanyak 100 orang, maka setiap hari diperoleh:

- tabungan angsuran 100 x 200,.... = Rp20.000

- tabungan sumbangan $100 \times 100 = Rp10.000$

- pendapatan anggota 1700 x 100 = Rp170.000

Dalam jangka waktu sebulan atau 30 hari akan diperoleh:

- tabungan angsuran 20.000 x 30 = Rp600.000

- tabungan sumbangan $10.000 \times 30 = Rp300.000$

- pendapatan keluarga 170.000 x 30 = Rp5.100.000

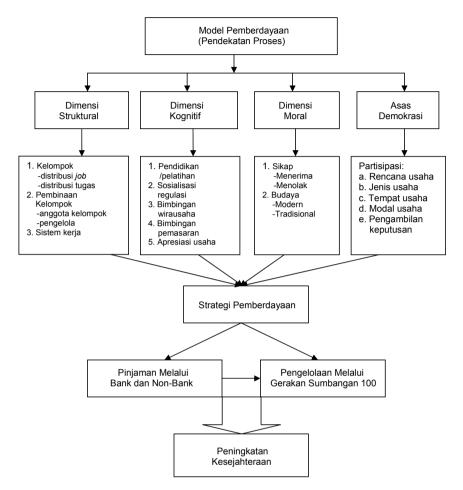
Dengan jumlah modal pinjaman Rp5.100.000 untuk 100 peminjam, pengurus amal bisa menolong sebanyak 100 pengusaha kecil. Bahkan dapat menambah 12 anggota baru yang diambil dari tabungan angsuran, di samping memperoleh pemasukan dari tabungan sumbangan. Dengan demikian, dapat diestimasi jika jumlah dana pinjaman lebih besar,

begitu pula jumlah anggota dan pendapatan (laba) anggota lebih banyak, kesejahteraan keluarga semakin meningkat, dan InsyaAllah kemiskinan dapat diatasi.

Untuk kelancaran gerakan sumbangan 100 ini, kepengurusan pemberdayaan perlu dibentuk di setiap kelurahan atau desa. Kepengurusan lembaga ini seyogianya dari pemerintah dan ulama, serta tokoh masyarakat. Pemerintah adalah kepala desa atau kelurahan sebagai pembina umum, sedangkan ulama sebagai pembina teknis dan remaja gereja atau masjid pun harus diorganisir untuk membantu gerakan sumbangan Rp100.

Mekanisme pengambilan tabungan sumbangan maupun tabungan angsuran adalah untuk tabungan sumbangan sebulan sekali dicatat dan diambil oleh petugas. Kemudian di setor ke bendahara amal, sedangkan tabungan angsuran dicatat oleh petugas dan disetor sendiri oleh peminjam kepada bendahara amal. Dana yang terkumpul dari tabungan sumbangan, para anggota peminjam, atau dari dana sumbangan yang lain digunakan untuk kepentingan umum, antara lain: (a) untuk admininistrasi sekretariat pengurus sebesar 5% dari total pemasukan setiap bulan; (b) untuk operasional petugas di lapangan sebesar 10% dari total pemasukan setiap bulan; dan (c) untuk dana sosial sebesar 85% dari total pemasukan setiap bulan. Dana sosial 85% ini digunakan untuk membantu keluarga miskin, yatim piatu, dan SPP bagi anak-anak yang tidak mampu.

Gerakan sumbangan 100 ini akan berhasil jika dilakukan atas dasar keikhlasan, kejujuran, dan kedisiplinan. Tanpa semua tuntutan moral, tidak mungkin akan berhasil. Pendapatan bersih keluarga dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif, kebutuhan produktif, dan sebagiannya ditabung di bank. Gerakan seperti ini diasumsikan bahwa keluarga menggunakan pinjaman tersebut untuk lebih dari satu maksud atau mempunyai beberapa usaha. Pemberian kredit tanpa jaminan dan keluarga yang tepat mengembalikan pinjaman dapat diberikan pinjaman kedua yang lebih besar dari pinjaman pertama.



Gambar 5 Model pemberdayaan yang berorientasi proses belajar

Bab**9** Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.

- Analisis Tingkat Kesejahteraan. Menurut kriteria BKKBN dan Persepsi Keluarga, responden di kota lebih banyak yang miskin daripada yang tidak miskin. Sebaliknya, responden di desa menurut kriteria Persepsi Keluarga adalah lebih banyak yang miskin daripada yang tidak miskin. Sementara itu, kriteria lain menggambarkan responden di kota maupun di desa tidak miskin lebih besar dibandingkan dengan yang miskin.
- 2. Analisis Karakteristik Demografi dan Karakteristik Sosial Ekonomi. Menurut kriteria BKKBN, faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan adalah jumlah anggota yang kecil, usia suami yang muda, umur istri yang tua, pendidikan suami yang tinggi, pendapatan, ibu yang bekerja, kepemilikan aset, kepemilikan tabungan, dan perencanaan. Menurut kriteria BPS, faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteran adalah pendidikan istri yang tinggi, pendapatan, pekerjaan suami bukan buruh, kepemilikan aset, dan perencanaan. Menurut kriteria Pengeluaran Pangan, faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan adalah usia suami yang lebih muda, pendidikan KK yang tinggi, dan kepemilikan aset. Menurut kriteria Persepsi Keluarga, faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan adalah pendidikan KK, pendapatan, dan pembagian tugas.
- 3. Analisis Faktor Eksternal yang memengaruhi kesejahteraan. Menurut kriteria BKKBN, keluarga yang tinggal di desa mempunyai peluang sejahtera dibanding dengan keluarga yang tinggal di kota.

- 4. Analisis Proses Manajemen Sumber Daya Keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Komunikasi yang dibangun oleh keluarga adalah system connectedness dan system openness dalam mendiskusikan berbagai masalah, seperti pendidikan anak dan KB. Model pengambilan keputusan adalah model keputusan yang berkekuatan dinamika humanistik. Sebagian besar, responden memiliki perencanan keluarga, sedangkan lebih dari separuh responden di kota melakukan pembagian tugas dan sebagian besar responden di desa tidak melakukan pembagian tugas. Sementara itu, lebih dari separuh responden di kota tidak melakukan pengontrolan, sedangkan sebagian kecil responden di desa saling mengingatkan.
- 5. Analisis Faktor yang memengaruhi praktik manajemen sumber daya keluarga. Pendidikan KK yang tinggi dapat melakukan pembagian tugas, sedangkan keluarga dengan pendapatan tinggi melakukan pengontrolan atas kegiatan. Sementara itu, responden di kota dapat melakukan perencanaan dan pembagian tugas.
- 6. Analisis Model Pemberdayaan Keluarga. Pemberdayaan keluarga miskin melalui model pendekatan "proses", yang memiliki empat dimensi, yaitu dimensi struktural dan fungsional, dimensi kognitif, dimensi moral, serta asas demokrasi. Strategi pemberdayaan adalah mendorong simpan-pinjam sebagai entry point yang mengarah kepada bentuk koperasi di tingkat desa atau kelurahan, sehingga perlu dirintis lembaga keuangan bank dan nonbank di setiap kecamatan. Pemberdayaan mereka yang tergolong powerless menjadi powerfull memerlukan payung politis dalam jangka panjang dan sustainable. Taktik pemberdayaan dilakukan melalui dua cara, yaitu tabungan melalui kotak amal dan tabungan melalui bank. Setiap keuntungan atau rezeki yang diperoleh diwajibkan menabung Rp100 per hari. Tidak boleh dilupakan bahwa masyarakat Bogor adalah multi etnis, sehingga institusi lokal seperti ini dapat diberi nama "Gerakan Sumbangan 100".

Daftar Pustaka

- Achir Y dan Agus C. 1994. Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Bangsa. Bulletin Prisma No. 6.
- Abbas R. 2000. Keganasan Keluarga dari Perspektif Psikologi. http/www. Kempedu. gov.my.
- Akatiga. 1999. Krisis Perempuan Miskin Perkotaan. http/akatiga.or.id.
- Amiyatsih SS. 1986. Hubungan Antara Input Pembangunan dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa. Karya Ilmiah S2 IPB, Bogor.
- Aryani F. 1994. Analisa Curahan Kerja dan Kontribusi Penerimaan Keluarga Nelayan dalam Kegiatan Ekonomi di Desa Pantai. Tesis Magister Sains Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Ang TH. 2003. Saat-Saat Krisis Perkawinan. http/www.pikiran-rakyat.com.
- Anonymous. 2003. Kisah Hamba Lelaki. http/www/one 4 all.easyjournal. com.

 _______. 2003. Bahagia dan Duka. http/www/online.jurnal.

 _______. 2002. Meniti Kehidupan. http/www.geocities.com.

 _______. 2003. Kempen Promosi Keluarga Sehat. http/www.moh.gov. my.

 ______. 1989. Penelitian Evaluasi Proyek Penyantunan dan Pengentasan Fakir Miskin. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial.
- Aspatria U. 1996. Studi Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dengan Pendekatan Perbedaan Karakteristik Agroekologi di Kabupaten. Tesis S2 GMK, IPB, Bogor.

- Berita Resmi Statistik. 2006. Tingkat Kemiskinan di Indonesia. http/ www.bps.go.id.
- Bank Dunia. 1989. Informasi dan Latihan penyediaan Air Bersih dan Sanitasi. Deskripsi Penyakit diterjemahkan oleh ITN-ITB-Centre, Bandung, modul: 31a.
- _____. 2006. Kemiskinan, Bank Dunia, dan Revitalisasi Pertanian. http://www.kompas.com.
- Benenson AS. 1970. Control of Communicable Desearses in Man. New York; APHA.
- Banks et al. 1994. Life-cycle, Expenditure Alocations and the Consumption of children. European Economic, review: 38, 1391–1410.
- Bates FL. 1956. Position Role and Status: A Reformulation of Concepts, Social Forces, 34 pp: 313–12. Disitir oleh Robert F Winch In The Modern Family, (New York Holt, Rinahart and Winston, Inc, 1963), pp: 8–9.

Best. 1998. Kesehatan Reproduksi Pria. http/www.rho.org.

BPS. 1984. <i>Indikator Kesejahteraan Rakyat</i> . Jakarta.
1997. <i>Statistik Kesejahteran Rumah Tangga</i> . Jakarta.
1997. <i>Statistik Kesejahteran Rakyat</i> . Jakarta.
2001. <i>Statistik Indonesia 2001</i> . Jakarta: BPS.
2002. Indikator Kesejahteran Rakyat 2002. Jakarta: BPS.
2003. Kecamatan Dramaga dalam Angka 2003. Bogor: BPS.
2005. Data dan Informasi Kemiskinan Kota Bogor. Bogor: BPS.
BKKBN. 1996. Panduan Pembagian Keluarga Sejahtera dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kantor Menteri Negara Kependudukan.

_. 1998. Opini Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta.

Jakarta: BKKBN.

- Buletin An-Nur. 1999. Menuju Rumah Tangga Islami. http/www.alsofwah.or.id.
- Budiman A. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungaran Saragih *et al.* 1993. Pola Pengeluaran dan Karakteristik Rumah Tangga sebagai Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Kerja Sama Antar-Bagian Proyek Peningkatan Sarana dan Pengembangan Satatistik Proyek Sensus Pertanian 1993 Biro Pusat Statistik dengan Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor.
- Burgess EW, Harvey JL. 1960. *The Family from Institution to Companionship*. New York: American Book Company.
- Berlo DK. 1960. The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice, Holt Rinehart and Winston, Inc. New York.
- Bryant KW. 1990. *The Economic Organization of the Household*. Cambridge University Press.
- Collett D. 1991. Modelling Binary Data. London: Chapman and Hall.
- Chruder dan Sherman. 1972. <u>Dalam</u> Johan R 2002. Kepuasan Kerja Karyawan dalam Lingkungan Institusi Pendidikan. http/www.bpk. penabur.or.id.
- Canner GB, Luckett CA. 1990. Consumer debt repayment woes: Insights from a household survey. Journal of Retail Bunking. http/www.sciencedirect.com.
- Campbell, B.J. 1979. Understanding Information Systems, Fondations for Control. New Delhi: Prentice-Hall of India.
- Anonymous. 2006. Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan. http://www.duniaesai.com/ekonomi/Eko41.htm.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2005. *Analisa Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2005*. Bogor.
- Daulay AS. 2003. Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu. http/www.depdiknas.go.id.

- Duvall EM, Muller BC. 1985. *Marriage and Family Development*. New York: Harper and Row Publiser, Inc.
- Deacon RE, Firebaugh FM. 1981. Family Resource Management Principles and Aplications, 470. Boston: Atlantic Avenue.
- DeVaney SA, Lytton RH. 1995. Household Insolvency: A Review of Household Debt Repayment, Delinquency, and Bankruptcy. http/www.sciencedirect.com.
- Devency SA, Hanna S. 1994. The effect of marital status, income, age, and other variables on insolvency in the U.S.A. Journal of Consumer Studies and Home Economics. http/www.sciencedirect.com.
- Diener E, R Biswas. 2000. New Direction Well-Being Research: The Cutting Edge. University of Illionis Pasific. USA: Illionis.
- Firdausy CM. 1999. *Urban proverty in Indonesia: Trends, Issues and Policies Asian Development*. Review: 12 (1) 68-69.
- Ferree. 1976. Wanita Bekerja. http/www.e-psikologi.com.
- Freudiger P. 1983. Wanita Bekerja. http/www.e-psikologi.com.
- Fisek *et al.* 1978 <u>dalam</u> Terefe *et al.* 1993. Laki-laki dan Kesehatan Reproduksi, 1998. http/www.rho.org/htm/menrh.keyissues.htm.
- Gundik G. 1993. Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Petani, serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada Daerah Opsus Simpei Karuhei Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Tesis S2 IPB, Bogor.
- Guzman et al. 1981. Development of a Short Method of Dietary Analaysis for Food Quality. Nutr. Rev: 31 (1).
- Gross et al. 1973. Management for Modrn Families. Prentice Hall Inc. Englewood Clifes.
- Guhardja *et al.* 1992. Petunjuk Laboratorium Manajemen Sumberdaya Keluarga. Pusat Antar-Universitas Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor.

- _____.1986. Alokasi Waktu Keluarga di Pedesaan dan Desa/Kota Kasus di Dua Desa Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Bogor.
- Herms WB, James TM. 1961. *Medical Entomology*. New York: The Macmillan Co.
- Hill R, Donald AH. 1960. The identification of conceptual frameworks utilized is family study. In *Marriage and Family Living*, 22: 299-311.
- Hira TK. 1992. The rehabilitattive aspects of consumer bankruptcy procedures. Proceedings of The Association for FinancialCounseling and Planning Education. http/www.sciencedirect.com.
- Hutabarat I. 2002. Saya Melihat Cara Saya Melihat Dunia. http/www.cybertokoh.com.
- Hye KL, Hanna S. 1990. Pattern of Wealth Accross Household Type and Over An Artificial Life Cycle. Family Resource Management Departement The Ohio State University.
- Herbert P. 2001. The DAC Guidelines Poverty Reduction.
- Hackel LS, Ruble DN. 1992. Changes in the marital relationship ather the firs baby is born: Predicting the impact of expectancy disconfirmation. Journal of personality and social psychology, 62: 944-957.
- Hennekens CH, Buring JE. 1987. *Epidemiology in Medicine. Little, Beown, and Company.* Boston/Toronto.
- Hatmadji S, Anwar EN. 1993. Transisi Keluarga di Indonesia: Perspektif Global. Makalah Seminar Mengisi Keluarga Nasional 1993. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga bekerjasama dengan Kantor Menteri Negara Kependudukan dan BKKBN.
- Haryono S. 1997. *Program Penghapusan Kemiskinan*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Hasibuan Malayu SP. 1990. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah.* Jakarta: C.V. Haji Masagung.

- Ibrahim H. 2007. Analisis Faktor yang Berhubungan Dengan Kesejahteran Keluarga di Kabupaten Lembata. Tesis Magister (S2) Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, IPB.
- Ibrahim I. 2003. Kisah Wanita Belum Kawin. http/www.jaring.my.
- Irawan PB. 2000. Analisis Sensitivitas pada Pengukuran Kemiskinan. <u>Dalam</u> Widyakarya Pangan dan Gizi VII LIPI *Fenomena Kemiskinan Sementara Selama Krisis Ekonomi di Indonesia*.
- Irawan PB, A Sutanto. 1999. Impact of the Economic Crisis on the Number of Poor People. Makalah dipresentasikan International Seminar on Agricultural Sectors During the Turbelence of Economic Crisis: Lessons and Future Direction. The Centre for the Agro-Socioeconomic Research (CASER), Agency for Agricultural. Research and Development, Ministry of Agricultural, Bogor, 17–18 Februari 1999.
- Johan R. 2002. Kepuasan Kerja Karyawan dalam Lingkungan Institusi Pendidikan. http/ www.bpk.penabur.or.id.
- Joseph RP, Fred RG. 1986. The American Family and The State. California: Pacific Research Institute for Public Policy San Fransisco.
- Kuncoro DJ. 1994. Problematika Prospek Pembangunan Masyarakat Desa Ditinjau dari Segi Pendidikan Nonformal. http/www.depdiknas. go.id.
- Kuncoro M. 1997. *Ekonomi Pembangunan. Teori, Masalah, dan Kebijakan.* Yogyakarta: Penerbit UPP APP YKPN.
- Karsin ES. 1989. Keragaan Status Gizi dan Prestasi Belajar Anak Sekolah dari Keluarga Guru Wanita SD (Studi Kasus pada Keluarga Wanita di di Kotamadya Bogor). Thesis yang tidak dipublikasikan, Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Khomsan A. 1993. Keragaan Kebiasaan Makan pada Peserta dan Bukan Peserta Proyek Diversifikasi Pangan dan Gizi. Media Gizi Keluarga, XVII (2) 1-10.
- Korten CD, Felipe B. 1981. *Bureaucracy and The Por: Closing The Gap.* Singapore: Mc Graw Hill International Book Company.

- Lamb JC. 1985. Water Quality and its Control. New York: John Wiley and Sons.
- Lie D. 2003. Xiaoyao. http/www.Siu.Tao.jurnal.
- Lubis Z. 2006. Penanggulangan Kemiskinan. http://www.waspada.co.id.
- Mangkuprawira S. 1985. Alokasi Waktu dan Kontribusi Kerja Anggota Keluarga dalam Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga. Disertasi IPB, Bogor.
- Madjid N. 2002. Pendidikan Untuk Demokrasi. http/www.paramadina.ac.id.
- Markman H. 1997. Kiat Pasutri Mengelola Uang. http/www.indomedia.com.
- McIntyre J. 1966. The Structure Fungsional Approach to Family Study. *In* I. Nye and F.M, Berardo (eds). *Emerging Conceptual Frameworks in Family Analysis*. New York: The Macmillan Co.
- Muhaimin Y. 2000. *Birokrasi dan Muhammadiyah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Megawangi R. 1994. Gender Perspectives in Early Chilhood care and Development in Indonesia. The Consultative group on early childhood care and Development, Indonesia.
- ______. 1999. *Membiarkan Berbeda. Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Maryono E. 1999. *Peta Dampak Krisis dan Kapasitas Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Jari Indonesia Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan.
- Maulana H. 2006. Kompensasi Dana Subsidi BBM. http://herdiyanmaulana.blogspot.com (9 Agustus 2006).
- Muller. 1992. Mengukur Sikap Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nik A. 1991. Keluarga Sejahtera Sebagai Landasan Bagi Realisasi Wawasan 2020. Pa Universiti Malaya. http/www. Jkm.gov.my.

- Olson DH. 2002. Tujuh Tipe Perkawinan. http://library.USU.ac.id/downlood/fk/psiko-sri.pdf.
- Parsons T, Bales RF. 1956. Family Socialization and Interaction Prosess. London: Routledge, Kegan dan Paul.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Peterson CM, Peterson RI. 1981. Downpayments, borrower characteristic, and defaults. Journal of Retail Banking. http/www.sciencedirect.com.
- Priyono S, Soerata M. 2005. *Kiat Sukses Wurausaha*. Yogyakarta: Palem Pustaka.
- Philips BS. 1971. *Social Research Strategy and Tactics*. (second edition). New York: The Macmillan Company.
- Raharto A, H Romdiati. 2000. Identifikasi Rumah Tangga Miskin. Dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VII. Jakarta: Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bappenas, Unicef, Deptan, Depkes, dan BPS.
- Rice AS, Tucker SM. 1986. *Family Life Management*. New York: Macmillan Publishing Co.
- Richard S. 1997. Kiat Pasutri Mengelola Uang. http/www.indomedia.com.
- Ritzer G. 1980. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. (revised edition). Boston: Aliyn and Bacon, Inc.
- _____. 1983. Sosiological Theory. New York: Alfred A. Knopf.
- Rini JF. 2002. Wanita Bekerja. http/www.e-psikologi.com.
- Rahardjo D. 2000. Pengembangan Perekonomian Masyarakat: Sebuah Alternatif Model Bagi Muhammadiyah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ratus SA, Nevid JS. 1983. *Adjusment and Growth: The Chalengers of Life.* New York: Holt Rinchart and Wiston.

- Rambe A. 2005. Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota Sumatra Utara). Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Rusli S et al. 1995. Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin Suatu Tinjauan dan Alternatif. Jakarta: PT Grasindo.
- Rasahan *et al.* 1999. *Refleksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusantara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rezeki AS. 2006. Peran Gender Dalam Kehidupan Keluarga Miskin Penerima Subsidi Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak. Skripsi Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga Fakultas Pertanian, IPB. Bogor.
- Slamet SJ. 1996. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sarwoprasodjo S. 1993. Dinamika dan Perkembangan Kelompok Usaha Bersama Golongan Miskin Dalam Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial. Program Pascasarjana, IPB. Bogor.
- Sajogyo. 1984. Pendekatan Pemerataan di dalam Bias Urban Pembangunan Sementara dan Pala Penguasaan Tunggal Atas Urusan Desa. Makalah <u>dalam</u> Seminar *Nasional Kualitas Manusia dalam Pembangunan di Palembang, 19-22 Maret 1984*.
- _____. 1996. *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soedjatmoko. 2003. Pembangunan Ekonomi Sebagai Masalah Kebudayaan. http/www.ekonomirakyat.
- Sumodiningrat G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto S. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali.
- _____. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada.
- Sanjaya D. 2002. Menemukan Kebahagiaan dalam Diri. http/www.sinarharapan.co.id.

- Samhadi. 2005. BLT. Lahir dan Kecemasan Pemerintah. http://kompas.com/lompas. Cetak/0510/22/Fokus/2145441.htm (9 Agustus 2006).
- Steward JH. 1979. Theory of Culture Change The Methodology of Multilinier Evolution. USA: Univ. Illinois Press.
- Susanti. 1999. Kebiasaan Makan dan Aktivitas Fisik dalam Hubunganya dengan Gizi Lebih Pada Murid Taman Kanak-kanak di Kodya Bengkulu. Tesis Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Scott GR. 1998. Menyingkirkan Rintangan Menuju Kebahagiaan Keluarga. http/www.ids.org/conference/talk/display.
- Scanzoni. 1980. Wanita Bekerja. http/www.e-psikologi.com.
- Sismayanti T. 1995. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebahagiaan Perkawinan Pada Ibu Bekerja dan Ibu Tidak Bekerja. Tesis S2 Jurusan GMSK, IPB. Bogor.
- Sumarti T. 1999. Persepsi Kesejahteraan dan Tindakan Kolektif Orang Jawa dalam Kaitannya dengan Gerakan Masyarakat dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera Di Pedesaan. Disertasi Sosiologi Pedesaan, IPB. Bogor.
- Smolak I. 1993. Adult Development. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Siagian SP. 1980. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI). 2000. http/www.ekonomirakyat.org.
- Sutrisno. 1997. Kiat Pasutri Mengelola Uang. http/www.indomedia.
- Stoner AF, Edward FE. 1994. Manajemen Penerjemah Wilhelmus W. Bakowatun dan Benyamin Molan. Jakarta: Intermedia.
- Shepard L. 1984. Accounting for the in consumer bankruptcy rates in the United States: A preliminary analysis of aggregate data. The Journal of Consumer Affairs. http/www.sciencedirect.com.
- Sullivant C, Fisher RM. 1988. Consumer credit delinquency risk: Characteristics of consumers who fall behind. Journal of Retail Banking. http/www.sciencedirect.com.

- Sullivant *et al.* 1989. As we forgive our debtors: Bankruptcy and consumer credit in America. New York: Ocford University Pess. http/www.sciencedirect.com.
- Sunarti E. 2001. Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan. Program Pascasarjana IPB.
- Soekirman. 1991. Dampak Pembangunan Terhadap Keadaan Gizi. Orasi Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa Ilmu Gizi Fakultas Pertanian, IPB. Bogor.
- Susenas. 2003. Pedoman Pencacah Kor. Jakarta: BPS.
- Soetandyo W. 1994. Misi dan Fungsi Pendidikan. Sebuah Makalah Pengantar untuk Rujukan Ceramah Berikut Diskusinya. *Pendidikan Sains, Tehnologi, dan Humaniora di Indonesapada Era Industrialisasi dan Globalisasi.* Diselenggarakan dalam acara Seminar Nasional dalam Rangka Lustrum VIII IKIP Malang, 19 Nopember 1994.
- Syarif H. 1997. Membangun SDM Berkualitas. Suatu Telaah Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, IPB.
- Syarif H, Hartoyo. 1993. Beberapa Aspek dalam Ketahanan Keluarga. Seminar Keluarga Menyongsong Abad 21 dan Peranannya dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia. Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga IPB dan BKKBN.
- Suryawati. 2002. Alokasi Pengeluaran untuk Pendidikan Anak pada Keluarga Ibu Bekerja dan Ibu Tidak Bekerja. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, Fakultas Pertanian, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Suhardjo. 1989. Sosio Budaya Gizi Pusat Antar-Universitas Pangan dan Gizi. IPB.
- Tim Peneliti IPB. 1993. Studi Peningkatan Sistem dan Mekanisme Pendataan Depsos RI.
- Tjahjadi A. 1989. <u>Dalam</u> Tifli *et al.* 1999. Majalah Buddha Cakkhu Asadha. http/www.alsofwah.or.id.

- Tolstoy LN. 1859. Family Happiness. http/www.ccel.org/t/tolstoy/home. html.
- Tutang. 2003. Belajar Cepat Microsof Excel 2000. Jakarta: Penerbit Datakom Lintas Buana.
- Tomagola <u>dalam</u> Sugiarti. 1995. Perubahan dan Pergeseran Peran Keluarga dalam Era Globalisasi. Makalah Kapita Selekta Sosiologi, UMM, Malang.
- Tjiptoherijanto P. 2002. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tenge E.1989. Analisis Pendapatan dan Curahan Tenaga Kerja Petani Transmigran di Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah (Kasus UPT Sausa, Kecamatan Parigi). Tesis Magister Sains, Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Usman S. 1995. Penelitian dengan Kerangka Teori Sosiologi. Diktat Untuk Mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP, UGM. Yogyakarta.
- White MJ, Klein MD. 1976. Family Theories An Introduction. New Delhi.
- Walters, McKenry. 1985. Wanita Bekerja. http/www.e-psikologi.com.
- Watkins GP. 1915. Welfare as an Economic Quantity. Boston and New York: Publisher P.97 (His context indicates that the he had no merely the standard but the plan or content of living as I view them).
- Williams R. 1983. Concepts of Health an analysis of lay logic. Sociology.
- WHO. 1984. Health Promotion: A WHO Discussion Document on the concepts and Principles. Reprinted in: Journal of the Insitute of Health Education.
- Zain D. 1996. Kaji Tindak Bantuan Kredit Kepada Keluarga Miskin. htttp//digilib.Brawijaya.ac.id.

Tentang Penulis



Lahir pada tanggal 10 Agustus 1958. A Iskandar menyelesaikan Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Negeri Nusa Cendana, Kupang pada tahun 1985. Ia meraih gelar *Master of Sosiology* tahun 1996 di Unmuh Malang dan meraih gelar Doktor Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) di Institut Pertanian Bogor tahun 2007.

Sebagai pendidik ditekuninya sejak tahun 1987 di Unmuh Kupang. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Antropologi selama dua periode, yaitu tahun 1987-1990 dan tahun 1990-1993, serta menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial selama dua periode pula, yaitu tahun 1997-2000 dan tahun 2000-2004. Pada tahun 2011, penulis pindah sebagai dosen tetap di FakuItas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komunikasi di Universitas Djuanda, Bogor sampai sekarang. Ia juga seorang aktivis di berbagai kegiatan, seperti gemar berolahraga keras di dunia persilatan "Perisai Diri, sebagai salah satu pelatih senior di perguruan silat tersebut. Ia juga berkutat di politik praktis, yaitu sebagai Ketua Umum PNI Front Marhaenisme, NTT tahun 1998. Dalam beberapa event nasional atau lokal, banyak pertemuan ilmiah dan karya ilmiah yang diikutinya, bahkan menjadi nara sumber sebagai berikut: (a) sebagai nara sumber seminar nasional "peningkatan kapasitas bidang politik dan pemerintahan" di Jakarta tahun 2007; (b) sebagai pembicara diskusi ilmiah nasional "Metodologi Penelitian" untuk para dosen Kopertis Wilayah VIII tahun 2008 di Kupang; (c) orasi ilmiah wisuda sarjana UMK tahun 2002 dan 2003 di Kupang; (d) sebagai pembicara tentang kesehatan lingkungan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2011; dan (e) sebagai

pembicara Darul Arqam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tahun 1998 di Kupang. Selain itu, penulis pernah menjadi pembicara pada Seminar Nasional ke-20 Kimia dalam Industri dan Lingkungan tanggal 6 September 2012 lalu; sebagai tim ahli reformasi birokrasi di BPN RI tahun 2012; sebagai tim ahli Program Layanan Internet Kecamatan Kementrian Informasi dan Komunikasi RI; sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Darma Manunggal (UNIDARMA) Kupang, NTT; dan sebagai pendiri Universitas Karyadarma (UNDARMA) Kupang, NTT.

Ia juga menulis banyak karya ilmiah hasil penelitian di berbagai perguruan tinggi negeri yang memiliki jurnal nasional terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi (ISSN), seperti: (a) di Institut Pertanian Bogor (IPB); (b) di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan; (c) di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Bandung; (d) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan (e) di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI. Saat ini, ia sedang menulis empat buku yang siap untuk diterbitkan.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Jenis data, peubah, dan cut off yang digunakan

No.	Jenis Data	Peubah	Cut Off
1	Karakteristik Demografi	Jumlah Anggota Keluarga (orang) (BPS 2001)	 Kecil <4 orang Sedang 5–7 orang Besar >7 orang
		Usia Suami dan Istri (tahun)	<20 tahun 20–25 tahun 26–30 tahun 31–35 tahun 36–40 tahun 41–45 tahun 46–50 tahun >50 tahun
2	Karakteristik Sosial Ekonomi	Lama Pendidikan Formal Suami dan Istri (tahun)	0 tahun 1–6 tahun 7–12 tahun 13–16 tahun >16 tahun
		Pendapatan (Rp/kapita/ bulan) (BPS 2003)	Rp60.000-Rp79.999 Rp80.000-Rp99.999 Rp100.000-Rp149.999 Rp150.000-Rp199.999 Rp200.000-Rp499.999 >Rp500.000
3	Karakteristik Lingkungan	Akses Pinjaman pada Lembaga Finansial (Rupiah)	Rp200.000-Rp1000.000 Rp1000.000-Rp5.000.000 Rp5000.000-Rp10.000.000 Rp10.000.000-Rp20.000.000 Rp20.000.000-Rp50.000.000 Rp50.000.000-Rp100.000.000 >Rp100.000.000
		Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Rp/keluarga/bulan)	Rp100.000.000
		Kredit Barang/Peralatan (Jenis)	Mobil Sepeda Motor TV Peralatan Rumah Tangga Pakaian

Lampiran 1 Jenis data, peubah, dan cut off yang digunakan (lanjutan)

No.	Jenis Data	Peubah	Cut Off
4	Tingkat Kesejahteraan	BPS (2005)	Miskin <rp175.000 bulan<br="" kapita="">untuk Kota Bogor Miskin <rp150.000 bulan<br="" kapita="">untuk Kabupaten Bogor</rp150.000></rp175.000>
		BKKBN	Kategori Keluarga Miskin Pra-Sejahtera Sejahtera I Kategori Keluarga Tidak Miskin Keluarga Sejahtera II Keluarga Sejahtera III Keluarga Sejahtera III Plus
		Pengeluaran Pangan	Miskin: Pengeluaran Pangan >70%
		Persepsi Keluarga	Miskin <75%

Lampiran 2 Sebaran jawaban responden tentang persepsi keluarga

			Kota	ĘĘ			Ď	Desa			Total	al	
No.	Pernyataan		Ya	Ë	Tidak		Ya	T	Tidak		Ya	Ţ	Tidak
		n	%	n	%	n	%	п	%	п	%	п	%
П	Pendapatan yang diperoleh saat ini sudah mencukupi 12 kebutuhan keluarga	12	20,0 48 80,0	48	80,0	53	29,4 127	127	70,6	65	27,1 175	175	72,9
2	Konsumsi makanan yang diperoleh selama ini sudah mencukupi	38	63,3	22	36,7	111	61,7	69		38,3 149	62,1	91	37,9
3	Rumah yang dimiliki sekarang sudah layak dihuni	35		25	41,7	135	58,3 25 41,7 135 75,0 45	45		25,0 170	70,8	70	29,2
4	Kondisi rumah dengan fasilitasnya sudah membuat nyaman keluarga	39	65,0	21	35,0	132	65,0 21 35,0 132 73,3 48	48	26,7	26,7 171	71,3	69	28,8
~	Pakaian yang diperoleh keluarga sudah dianggap layak dan mencukupi	50	83,3	10	16,7	150	10 16,7 150 83,3	30	30 16,7 200	200	83,3	40	16,7
9	Sarana kesehatan dapat membantu mengatasi masalah kesehatan keluarga	49	49 81,7	11	18,3	157	11 18,3 157 87,2	23	12,8	206	23 12,8 206 85,8	34	14,2
_	Keluarga mempunyai keinginan untuk meningkatkan 51 85,0 pendidikan anggota	51		6	15,0	173	9 15,0 173 96,1	7		224	3,9 224 93,3	16	6,7
∞	Keluarga mendapat kemudahan memperoleh obat- obatan farmasi	41	41 68,3 19 31,7 129 71,7	19	31,7	129	71,7	51	28,3	170	51 28,3 170 70,8	70	29,2
6	Kebebasan keluarga menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing	09	60 100,0	0	0,0	180	0 0,0 180 100,0	0	0,0	240	0,0 240 100,0	0	0,0
10	Keluarga menikmati kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Nyepi, dan Waisak	09	60 100,0	0	0,0	180	0 0,0 180 100,0	0	0,0	240	0,0 240 100,0	0	0,0
11	Keluarga aman dari gangguan kejahatan seperti penodongan dan perampokan	51	51 85,0	6	15,0	153	9 15,0 153 85,0	27	15,0	204	27 15,0 204 85,0	36	15,0

Lampiran 2 Sebaran jawaban responden tentang persepsi keluarga (lanjutan)

	Pernyataan	٤	Ko Ya	Kota	Tidak		Desa Ya	2	Tidak		Total Ya	2	Tidak
Kemudahan	Kemudahan keluarga dalam memperoleh pekerjaan formal	13	21,7	47		43	23,9	137	76,1	56	23,3	184	76,7
Keluarga me Al-Quran, I	Keluarga memiliki kitab suci sesuai agamanya, seperti Al-Quran, Injil, Tripitaka, dan dari agama lain	59	6,86	1	1,7	176	8,76	4	2,2	235	6,76	5	2,1
Keluarga m nengatasi k	Keluarga meminjam uang atau barang untuk mengatasi kebutuhan makan	19	31,7	41	31,7 41 68,3	68	49,4	91	50,6 108	108	45,0	132	55,0
Keluarga memperoleh l membiayai anak ke SD	Keluarga memperoleh bantuan orang tua asuh untuk membiayai anak ke SD	5	8,3	55	91,7	7	3,9	173	96,1	12	5,0	228	95,0
Keluarga m erlantar, da	Keluarga memberikan bantuan fakir miskin, anak terlantar, dan orang jompo	15	25,0	45	25,0 45 75,0 151	151	83.9	29	16,1 166	166	69,2	74	30,8
Partisipasi k lingkungan	Partisipasi keluarga dalam kegiatan kebersihan lingkungan	57	95,0	8	5,0	167	92,8	13	7,2	224	93,3	16	6,7
Partisipasi k ingkungan	Partisipasi keluarga dalam kegiatan gotong-royong di lingkungan tempat tinggal	57	57 95,0	ϵ	5,0	167	167 92,8	13	7,2	224	93,3	16	6,7
Hubungan	Hubungan anggota keluarga terjalin dengan baik	59	6,86	П	1,7	176	8,76	4	2,2	235	6,76	5	2,1
Harga BBN Anda	Harga BBM saat ini dapat meresahkan keluarga Anda	55	91,7	\sim	8,3	161	89,4	19	10,6	216	0,06	24	10,0

Lampiran 2 Sebaran jawaban responden tentang persepsi keluarga (lanjutan)

			Kota	ota			De	Desa			Total	Te.	
Pernyataan			Ya	T	Tidak		Ya	Ë	Tidak		Ya	Ţij	Tidak
		n	%	n	%	u	%	n	%	u	%	n	%
Harga barang-barang sekarang menyulitkan keluarga	vulitkan keluarga	57	95,0	3	2,0	161	89,4	19	9,01	218	8,06	22	9,2
Bahagia dengan jumlah anak yang dimiliki sekarang	imiliki sekarang	58	2,96	2	3,3	174	2,96	9	3,3	232	2,96	8	3,3
Keluarga merasa tidak sulit kebutuhan makan setiap hari dengan adanya Raskin	ın makan setiap	21	35,0	39	65,0	09	33,3	120	2,99	81	33,8	159	66,3
Keluarga membuat alokasi waktu untuk bekerja, mengurus rumah, dan rekreasi	tuk bekerja,	28	46,7	32	53,3	81	45,0	66	55,0	109	55,0 109 45,4	131	54,6
Keluarga selalu bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu	n memutuskan	58	2,96	2	3,3	160	6,88	20	11,1	218	8,06	22	9,2
Partisipasi keluarga dalam arisan, pengajian, dan pertemuan di lingkungannya	gajian, dan	50	83,3	10	16,7 149	149	82,8	31	17,2	199	82,9	41	17,1
Jumlah anggota keluarga menyulitkan keluarga dalam mengatasi kebutuhan	ı keluarga	24	40,0	36	0,09	09	33,3	120	2,99	84	35,0	156	65,0
Keluarga mendapat kemudahan dalam pelayanan KB	n pelayanan KB	39	65,0	21	35,0 152	152	84,4	28	15,6 191	191	9,62	49	20,4
Keluarga menjadi orang tua asuh anak-anak yang tidak mampu sekolah atau putus sekolah	k-anak yang olah	П	1,7	59	6,86	5	2,8	175	97,2	9	2,5	234	97,5
Partisipasi dalam pembinaan keterampilan mental spiritual pada anak putus sekolah	npilan mental	17	28,3	43	28,3 43 71,7 12	12	6,7	168	168 93,3	29	12,1	211	87,9
31 Pekerjaan dapat membuat keluarga sejahtera	sejahtera	32	53,3	28	46,7	133	53,3 28 46,7 133 73,9 47 26,1 165 68,8	47	26,1	165	8,89	75 31,3	31,3

Lampiran 3 Sebaran responden berdasarkan kebutuhan sosial di kota dan desa

		K	Kota			De	Desa			Total	Total (Kota+Desa)	Desa)
Pernyataan	Mis (3	Miskin (36)	T M	Tidak Miskin (24)	M C	Miskin (79)	I M I	Tidak Miskin (101)		Miskin (115)	ΗΨ	Tidak Miskin (125)
	n	%	n	%	u	%	u	%	u	%	n	%
Dalam kehidupan keluarga, seberapa pentingkah peran bapak-ibu dalam sosialisasi anak?												
1. Sangat penting	21	58,3	17	70,8	58	73,4	9/	75,2	79	68,7	93	74,4
2. Penting	13	36,1	_	29,2	21	26,6	20	19,8	34	29,6	27	21,6
3. Cukup penting	_	2,7	0	0,0	0	0,0	5	6,5		6,0	\sim	4,0
4. Kurang penting	_	2,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	_	6,0	0	0,0
5. Tidak penting	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Apakah ada pembagian peran bapak-ibu dalam mendidik, merawat, dan mendidik anak?												
1. Ya	_	19,4	0	0,0	5	6,3	17	16,8	12	10,4	17	13,6
2. Tidak	29	80,5	24	100	74	93,7	84	83,2	103	9,68	108	86,4
Jika ya, jelaskan												
1. Ibu mengasuh dan merawat, bapak mendidik	4	57,1	0	0,0	2	100	17	100	6	75,0	17	100
2. Ibu mengawasi belajar, bapak mengawasi mengaji		14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	_	8,3	0	0,0
3. Ibu mengurus, bapak mengantarkan ke sekolah	_	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	П	6,5
4. Anak perempuan oleh ibu, anak laki-laki oleh bapak	_	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	0	0,0

Lampiran 3 Sebaran responden berdasarkan kebutuhan sosial di kota dan desa (lanjutan)

		Kota	Ę			De	Desa			Total (Kota+Desa)	Kota+	Desa)
Pernyataan	Miskin (36)	kin 5)	Ti	Tidak Miskin (24)	Mi.	Miskin (79)	T Mii	Tidak Miskin (101)	2	Miskin (115)	T. Wis	Tidak Miskin (125)
	n	%	п	%	n	%	п	%	u	%	u	%
Jika tidak, jelaskan												
1. Dilakukan bersama-sama	22 7	75,8 18		75,0	35	47,3	39	46,4	57	55,3	57	52,8
2. Ibu lebih dominan karena bapak cari uang	9	20,7	2	20,8	30	40,5	45	53,6	36	34,9	50	46,3
3. Belum punya anak	0	0,0	0	0,0	6	12,2	0	0,0	6	8,7	0	0,0
4. Dititipkan di orang tua atau saudara	1	3,4	_	4,2	0	0,0	0	0,0	1	6,0	1	6,0
Dalam kehidupan bermasyarakat, seberapa pentingkah keluarga penuh kasih sayang, saling membutuhkan, dan saling menghormati?												
1. Sangat penting	22 (61,1	19	79,2	99	6,07	80	79,2	78	8,79	66	79,2
2. Penting	14	38,9	5	20,8	23	29,1	20	19,8	37	32,2	25	20,0
3. Cukup penting	0	0,0	0	0,0	0	0,0		6,0	0	0,0	П	8,0
4. Kurang penting	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5. Tidak penting	0	0,0	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Lampiran 3 Sebaran responden berdasarkan kebutuhan sosial di kota dan desa (lanjutan)

		Kc	Kota			De	Desa			Total (Kota+Desa)	Total +Desa)	
Pernyataan	Mis (3	Miskin (36)	I M	Tidak Miskin (24)	Mi	Miskin (79)	H W	Tidak Miskin (101)	Z C	Miskin (115)	Tic Mis (12	Tidak Miskin (125)
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	u	%
Praktik keagamaan yang dilakukan												
1. Salat, pengajian, dan puasa	7	5,5	7	8,3	15	18,9	25	24,7	17	14,8	27	21,6
2. Salat dan pengajian	20	5,55	12	50,0	36	45,5	90	49,5	99	48,7	62	49,6
3. Salat dan puasa	П	2,8	_	4,2	П	1,3	4	3,9	7	1,7	~	4,0
4. Keluarga taat beribadah	∞	22,2	0	0,0	8	10,1	3	2,9	16	13,9	3	2,4
5. Salat, zakat, dan pengajian	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,9	0	0,0	7	1,6
6. Pengajian	0	0,0	П	4,2	П	1,3	2	1,9	П	6,0	3	2,4
7. Salat	7	5,5	2	8,3	6	11,4	9	6,5	11	9,6	∞	6,4
8. Salat, puasa, dan zakat	П	2,8	П	4,2	2	2,5	2	4,9	3	2,6	9	4,8
9. Kadang-kadang	0	0,0	1	4,2	_	8,8	3	2,9	_	6,1	4	3,2
10. Ke gereja	7	5,5	4	16,6	0	0,0	П	6,0	7	1,7	\sim	4,0

Lampiran 3 Sebaran responden berdasarkan kebutuhan sosial di kota dan desa (lanjutan)

		K	Kota			Ď	Desa			(Kota	Total (Kota+Desa)	
Pernyataan	Mi:	Miskin (36)	L Z	Tidak Miskin (24)	Ä S	Miskin (79)	ΗÑC	Tidak Miskin (101)	¥ C	Miskin (115)	Tio Mis	Tidak Miskin (125)
	n	%	n	%	п	%	n	%	n	%	n	%
Sumber memperoleh pengetahuan atau ilmu agama												
1. Pengajian	13	36,1	4	16,7	24	30,3	42	11,9	37	32,2	46	36,8
2. Ustad	_	19,4	3	12,5	21	26,6	18	17,8	28	24,3	21	16,8
3. Guru	3	8,3	5	20,8	15	19,0	22	21,8	18	15,6	27	21,6
4. Orang tua	2	5,5	2	8,3	8	10,1	4	4,0	10	8,7	9	4,8
5. Pesantren	0	0,0	0	0,0	~	6,3	4	4,0	2	4,3	4	3,2
6. Gereja	1	2,8	_	4,1	0	0,0	П	6,0		6,0	2	1,6
7. Sekolah dan pengajian	9	16,7	5	20,8	2	6,3	0	0,0	Π	9,6	5	4,0
8. Sekolah dan orang tua	0	0,0	7	8,3	0	0,0	П	6,0	0	0,0	3	2,4
9. Pengajian dan TV	0	0,0	2	8,3	0	0,0	7	2,0	0	0,0	4	3,2
10. Ustad dan buku	2	55	0	0,0	_	1,2	5	5,0	3	2,6	5	4,0
11. Lain-lain	2	5,5	0	0,0	0	0,0	2	2,0	2	1,7	2	1,6
Dalam kehidupan keluarga, seberapa penting keluarga yang penuh kasih sayang, dan saling menghormati												
1. Sangat penting	25	69,4	20	83,3	59	74,7	80	79,2	84	73,0	100	80,0
	11	30,6	4	16,7	19	24,0	20	19,8	30	26,1	24	19,2
	0	0,0	0	0,0	П	1,3	П	6,0	П	6,0	П	8,0
4. Kurang penting	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5. Tidak penting	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Lampiran 3 Sebaran responden berdasarkan kebutuhan sosial di kota dan desa (lanjutan)

		Kota	ta			Ď	Desa			Total (Kota+Desa)	Котан	.Desa)
Pernyataan	Miski (36)	Miskin (36)	E Mis	Tidak MiskiN (24)	Mi C	Miskin (79)	H M C	Tidak Miskin (101)	M	MiskiN (115)	H Will	Tidak MiskiN (125)
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Bagaimana dengan suasana kehidupan keluarga?												
1. Baik-baik saja	3	8,3	3	12,5	6	11,3	0	0,0	12	10,4	3	2,4
2. Harmonis	_	19,4	~	33,3	13	16,4	27	26,7	20	17,4	35	28,0
3. Saling menyayangi	10	27,8	_	29,1	31	39,2	41	40,6	41	35,6	48	38,4
4. Rukun dan damai	0	0,0	0	0,0	4	5,0	11	10,9	4	3,5	11	8,8
5. Masih suka bertengkar	0	0,0	0	0,0	3	3,8	9	6,5	3	2,6	9	4,8
6. Saling kerja sama	4	11,1	0	0,0	0	0,0	8	6,7	4	3,5	∞	6,4
7. Belum sesuai yang diinginkan	0	0,0	0	0,0	∞	10,1	_	6,9	8	6,9	_	9,9
8. Masih dalam tahap belajar	0	0,0	_	4,1	9	2,6	_	6,0	9	5,2	2	1,6
9. Saling menghormati	9	16,7	~	20,8	~	6,3	0	0,0	11	9,5	2	4,0
10. Selalu mendidik anak dengan baik	9	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	5,2	0	0,0
Dalam kehidupan keluarga, seberapa penting keberadaan anak?												
1. Sangat penting	26	72,2	20	83,3	59	74,7	92	91,0	85	73,9	112	9,68
2. Penting	10	27,8	4	16,7	19	24,0	6	11,3	29	25,2	13	10,4
3. Cukup penting	0	0,0	0	0,0	-	1,2	0	0,0	_	6,0	0	0,0
4. Kurang penting	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5. Tidak penting	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Lampiran 3 Sebaran responden berdasarkan kebutuhan sosial di kota dan desa (lanjutan)

		Kota	ta			Ď	Desa			Total	(Kota	Total (Kota+Desa)
Pernyataan	Mis ©	Miskin (36)	T III	Tidak MiskiN (24)	Ž S	Miskin (79)	LAC	Tidak Miskin (101)	Σ	MiskiN (115)	F Ä C	Tidak MiskiN (125)
	п	%	n	%	n	%	u	%	n	%	u	%
Jumlah anak sesuai yang diinginkan												
1. Ya	31	13,9	17	8,02	53	53 67,0	80	79,2	84	73,0	26	77,6
2. Tidak	5	13,9	_	29,1	26	32,9	21	20,8	31	26,9	28	22,4
Alasan ya, sesuai yang diinginkan												
1. Karena sesuai yang direncanakan	17	54,8	7	14,3	37	46,8	90	49,5 54	54	64,3	52	53,6
2. Cukup dua saja	0	0,0	0	21,4	4	5,0	15	14,8	4	4,7	15	15,5
3. Takut tidak bisa membiayai	4	11,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	4,7	0	0,0
4. Sudah cukup	6	25,0	15	64,3	8	10,1	15	14,8	17	20,7	30	30,9
5. Sudah terlalu banyak	П	2,8	0	0,0	4	5,0	0	0,0	5	6,5	0	0,0
Alasan tidak sesuai yang diinginkan												
1. Ingin tambah lagi	4	11,1	9	25,0	20	25,3	_	6,0	24	77,4	_	25,0
2. Belum punya anak	_	2,8	_	4,1	0	0,0	_	6,9	П	3,2	∞	28,6
3. Belum punyak anak laki-laki	0	0,0	0	0,0	3	3,8	8	6,7	3	2,6	∞	28,6
4. Melebihi yang direncanakan	0	0,0	0	0,0	3	3,8	5	5,0	3	2,6	5	17,8
Apakah pendapatan keluarga yang diterima sudah mencukupi?												
1. Ya	\sim	13,9	3	12,5	8	10,1	82	81,1	13	11,3	85	0,89
2. Tidak	29	9,08	20	83,3	52	6,59	4	4,0	81	70,4	24	19,2
3. Kadang-kadang	7	9,6	1	4,1 19	19		15	24,0 15 14,8 21	21	18,3 16	16	12,8

Lampiran 4 Sebaran struktur komunikasi keluarga contoh

	Bp+ lain	%	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	6,0	0,0	1,2
	B	n	0	0	0	0	—		0	2
	Ibu+ lain	%	2,2	1,7 0 0,0	1,9	2,8 0 0,0	1,1	0,9 1 0,9	0,5 0 0,0	13,3
	= -	n	4	\mathcal{C}	3	\sim	2		-	24
	Bp+ Sdr	% u	1,1	0,0	90	0,0	0,0	1,8	2,2	1,1
			7	0	_	0	0	2	4	2
Desa	Ibu+ Sdr	%	2,2	2,2	1,9	1,1	9,0	1,8	9,9	267
	S S	n	4	4	33	2	-	2	12	48
	Bp+Ibu +Anak	%	33,9	5 2,8 4 2,2 0 0,0 3	0,0	9 5,0 2 1,1 0 0,0 5	5,0	20,7	3,8	6,1
	Bp.	n	09	5	0	6	6	23	_	11
	Bp+ Ibu	%	1,7 107 60,4 60 33,9 4 2,2 2 1,1 4 2,2 0 0,0	0,0 168 93,3	95,	91,1	1,7 167 92,8 9 5,0 1 0,6 0 0,0 2 1,1 1 0,6	45,5 23 20,7 2 1,8 2 1,8 1	88 48,8 7 3,8 12 6,6 4 2,2 1	51,7 11 6,1 48 267 2 1,1 24 13,3 2 1,2
	B H	n	107	168	148	164	167	82	88	93
	Bp+ lain	%	1,7		83,3 1 2,8 3 8,3 0 0,0 2 5,5 0 0,0 148 95, 0 0,0 3 1,9 1 06 3 1,9 0 0,0	0,0 164	1,7	0,0	0,0	1,7 93
		n	-	0	0	0	-	0	0	-
	Ibu+ lain	% u	1,7	1,7	5,5	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
		n	-	П	7	_	_	0	0	0
	p+	% u	0,0	1,7 1 1,7 0 0,0 1 1,7 0	0,0	3,3	1,7	26	0,0	3,3
ta	<u>м</u> У	n	0	0	0	7			0	2
Kota	ou+	% u	8,5	1,7	8,3	5,0	5,0	5,1	5,0	8,3
	T. S	n	5		3	3	3	2	2	5
	Bp+Ibu Ibu+ Bp+ +Anak Sdr Sdr	%	30,5	1,7	2,8	2 3,3 3 5,0 2 3,3 1 1,7 0	6,7	33,3	5 12,5 2 5,0 0 0,0 0 0,0 0	21,7
	Bp +A	n	18	П	-	7	4	13	\sim	13
	Bp+ Ibu	%	57,6 18 30,5 5 8,5 0 0,0 1 1,7 1	95,0	83,3	86,7	50 83,3 4 6,7 3 5,0 1 1,7 1 1,7 1	59,0 13 33,3 2 5,1 1 26 0 0,0 0	82,5	65,0 13 21,7 5 8,3 2 3,3 0 0,0 1
	П	n	34	57	30	53	50	23	33	39
	Pernyataan		1. Pendidikan anak (n= 236)	2. Jumlah anak $(n=240)$	3. Ikut KB (n= 191)	4. Ibu bekerja (n=240)	5. Kepemilikan rumah (n=240)	6. Kepemilikan kendaraan (n= 150)	7. Hutang/kredit (n= 153)	8. Pengeluaran Pangan (n= 240)

Lampiran 5 Sebaran pengambilan keputusan keluarga contoh

					K	Kota									D	Desa				
Pernyataan	Ibu	Ibu saja	I	Ibu dominan	J. A.	Ibu + Ayah	A	Ayah dominan	A	Ayah saja	Ibu	Ibu saja	I	Ibu dominan	J. A.	Ibu + Ayah	A	Ayah dominan	Aya	Ayah saja
	п	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	u	%	n	%	n	%
1. Pendidikan anak																				
a. Memilih jenis sekolah (n= 226)	6	16,1	3	5,4	32	57,1	11	19,6	_	1,8	8	4,7	13	7,6	125	73,5	16	9,4	8	4,7
b. Menetapkan pendidikan anak (n= 226)	6	16,1	1	1,8	34	60,7	10	17,9	2	3,6	∞	4,7	12	71	130	765	14	82	9	3,5
2. Jumlah anak (n= 240)	_	1,7	0	0,0	59	98,3	0	0,0	0	0,0	5	2,8	19	10,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3. Ikut/tidak ikut KB (n= 240)	12	200		1,7	47	78,3	0	0,0	0	0,0	17	9,4	32	17,8	130	72,2	_	9,0	0	0,0
4. Pekerjaan ibu																				
a. Bekerja di rumah/di luar rumah (n= 240)	23	38,3	3	5,0	31	51,7	2	3,3 1	-	1,7	25	13,9	47	26,1 102	102	56,7	~	2,8	1	9,0
5. Rumah																				
a. Memiliki rumah sendiri (n= 188)	9	12,0	Т	2,0	40	80,0	2	40 1		2,0	5	3,6	5	36	110	79,7	18	13,0	0	0,0
b. Lainnya (n= 52)	7	40,0	0	0,0	7	40,0	0	0,0	_	200	П	2,1	0	0,0	38	80,9	8	17,0	0	0,0
6. Kenderaan																				
a. Memiliki kendaraan (n= 122)	5	13,9	П	2,8	19	52,8	_	19,4 4		11,1	0	0,0	П	12	57	6,99	24	27,9	4	4,7
b. Jenis kendaraan (n= 122)	5	13,9	_	2,8	12	33,3	14	389	4	11,1	0	0,0	П	1,1	31	35,6	51	58,6	4	4,6
7. Kredit																				
a. Kredit uang di bank (n= 56)	5	18,5	П	3,7	19	70,	2	7,4	0	0,0	2	6,9	7	6,9	21	72,4	4	13,8	0	0,0
b. Lainnya (n= 98)	∞	44,4	1	5,6	6	50,0	0	0,0	0	0,0	17	21,3	22	27,5	32	40,0	∞	10,0	1	1,3

Lampiran 5 Sebaran pengambilan keputusan keluarga contoh (lanjutan)

					K	Kota									D	Desa				
Pernyataan	Ibu	Ibu saja		Ibu dominan		Ibu + Ayah	A	Ayah dominan	A	Ayah saja	Ibu	Ibu saja	I	Ibu dominan	J. A.	Ibu + Ayah	A	Ayah dominan	Aya	Ayah saja
	п	%	n	%	n	%	п	%	п	%	n	%	п	% u % u % u % u % u % u % u		%	n	% u % u % u	n	%
8. Kebutuhan Pangan																				
a. Mengatur menu makan (n= 240) 39 65,0 15 25.0 2 3,3 0 0,0 4 6,7 93 51,7 74 41,1 10 5,6 3 1,7 0 0,0	39	65,0	15	25.0	2	3,3	0	0,0	4	2,9	93	51,7	74	41,1	10	5,6	3	1,7	0	0,0
b. Menentukan pengeluaran untuk pangan (n= 240)	39	65,0	16	26,7	2	3,3	0	0,0	3	5,0	71	39,4	71	39 65,0 16 26,7 2 3,3 0 0,0 3 5,0 71 39,4 71 39,4 31	31	17,2	9	17,2 6 3,3 1 0,6		9,0
c. Menentukan makan di luar (n= 155)	19	38,8	10	20,4	10	20,4	3	6,1	_	14,3	22	20,8	19	19 38,8 10 20,4 10 20,4 3 6,1 7 14,3 22 20,8 19 17,9 10 9,4 39 36,8 16 15,1	10	9,4	39	36,8	16	15,1

Lampiran 6 Sebaran analisis pengambilan keputusan keluarga contoh

			\times	ota						esa					To	tal		
Keputusan	Mi (n=	Miskin (n=36)	H M T	Tidak Miksin (n=24)	Tc (n=	Total (n=60)	Mis (n=	Miskin (n=79)	Tic Mil	Tidak Miksin (n=101)	To (n=1	Total (n=180)	Miskin (n=115)	kin 15)	Tidak Miksin (n=125)	lak sin 25)	Total (n=240)	tal (40)
	n	%	u	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Istri + Suami	112	43,2	203	59,0	315	52,2	520	57,7	466	49,5	986	53,5	632	54,1	699	51,6	1301	53,2
Istri Saja	100	38,6	82	23,8	182	30,2	114		160	16,9	274	14,9	214	18,6	242	18,7	456	18,6
Istri Dominan	6	3,5	18	5,2	27	4,5	153	16,9	192	20,4	345	18,7	162	14,1	210	16,2	372	15,3
Suami Dominan	20	7,7	31	0,6	51	8,5	101	11,2	105	11,1	206	11,2	121	10,5	136	10,5	257	10,5
Suami Saja	6	3,5	19	5,5	28	4,6	13	1,4	19	2,0	32	1,7	22	1,9	38	2,9	09	2,4
Total	259	42,9	344	57,1	603	100	901	48,9	942	51,1	1843	100	1151	47,1 1	1295	52,9	2446	100

Lampiran 7 Sebaran responden berdasarkan perencanaan untuk mencapai tujuan

		K	Kota			D	Desa			Total	(Кота+	Total (Kota+Desa)
Pernyataan	Misk	Miskin (36)	Mis	Tidak Miskin (24)	Σ .	Miskin (79)	Mis	Tidak Miskin (101)	40	Miskin (115)	Tida)	Tidak Miskin (125)
	n	%	n	%	n	%	n	%	u	%	u	%
Apakah mencapai tujun hidup, biasanya bapak-ibu memiliki rencana												
a. Ya	22	61,1	15	62,5	40	50,6	74	73,3	62	53,9	68	71,2
b. Tidak	11	30,5	9	25,0	34	43,0	27	26,7	45	39,1	33	26,4
c. Kadang-kadang	3	8,3	3	12,5	5	72,1	0	0,0	8	6,9	8	2,4
Alasan selalu direncanakan												
a. Agar tujuan hidup tercapai	16	72,7	12	80,0	25	62,5	61	82,4	41	66,1	73	82,0
b. Agar dapat dilaksanakan secara teratur dan terarah	3	13,6	3	20,0	9	15,0	13	17,6	6	14,5	16	17,9
c. Agar kehidupan lebih baik	3	13,6	0	0,0	6	22,5	0	0,0	12	19,3	0	0,0
Alasan tidak direncanakan												
a. Apa adanya saja	11	100,0	7	33,3	29	85,3	26	6,96	40	88,9	28	84,8
b. Repot	0	0,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	2	4,4	0	0,0
c. Takut tidak tercapai	0	0,0	0	0,0	3	8,8	0	0,0	3	6,7	0	0,0
d. Langsung dikerjakan saja	0	0,0	4	9,99	0	0,0	_	3,7	0	0.0	5	15,1
Perencanaan selalu tertulis												
a. Ya	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	3,4	0	0,0	4	3,2
b. Tidak	35	97,2	20	83,3	79	100,0	95	94,0	114	99,1	115	92,0
c. Kadang-kadang	1	2,8	4	16,7	0	0,0	2	2,0	1	6,0	9	4,8

Lampiran 7 Sebaran responden berdasarkan perencanaan untuk mencapai tujuan (lanjutan)

4	4											
		Kota	ota			D	Desa			Total	Total (Kota+Desa)	Desa)
Pernyataan	Misk	Miskin (36)	T Misl	Tidak Miskin (24)	M	Miskin (79)	Misl	Tidak Miskin (101)	7	Miskin (115)	Tida)	Tidak Miskin (125)
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	п	%
Alasan perencanaan tertulis												
a. Supaya terlaksana sesuai target	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	50,0	0	0,0	2	50,0
b. Supaya lebih jelas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	50,0	0	0,0	2	50,0
Alasan perencanaan tidak tertulis												
a. Takut ada beban	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	10,5	0	0,0	10	8,7
b. Repot	_	20,0	3	15,0	13	16,4	16	16,8	20	17,5	19	16,5
c. Hanya dibicarakan saja	3	9,8	3	15,0	∞	10,1	10	10,5	11	9,6	13	11,3
d. Apa adanya	8	22,8	4	20,0	38	48,1	11	11,6	46	40,3	15	13,0
e. Hanya diingat-ingat saja	13	37,1	∞	40,0	16	20,1	48	50,5	29	25,4	99	48,6
f. Lain-lain (malas, tidak perlu, dan kurang mengerti)	4	11,4	2	10,0	4	5,1	0	0,0	8	7,0	2	1,7
Apakah pembuatan rencana, ibu mengomunikasikan dengan bapak?												
a. Ya	26	72,2	18	75,0	46	58,2	95	94,0	72	62,6	113	90,4
b. Tidak	10	27,8	5	20,8	32	40,5	9	59	42	36,5	11	8,8
c. Kadang-kadang	0	0,0	П	4,2	-	1,3	0	0,0	1	6,0	П	8,0

Lampiran 7 Sebaran responden berdasarkan perencanaan untuk mencapai tujuan (lanjutan)

		Kc	Kota			Ď	Desa			Total (Kota+Desa)	Kota+	Desa)
Pernyataan	Wi:	Miskin (36)	H M 3	Tidak Miskin (24)	Ä.S	Miskin (79)		Tidak Miskin (101)	20	Miskin (115)	H M C	Tidak Miskin (125)
	n	%	п	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alasan mengomunikasikan dengan bapak												
a. Agar ada tanggung jawab bersama	\mathcal{C}	11,5	_	38,9	_	15,2	28	29,5	10	13,9	35	22,1
b. Agar bapak tahu dan dapat mempertimbangkan	4	15,3	2	1,1	11	23,9	8	8,4	15	20,8	10	8,8
c. Bapak yang menentukan karena bapak kepala keluarga	3	11,5	4	22,2	9	13,0	38	40,0	6	12,5	42	37,2
d. Agar sama-sama berusaha mewujudkan rencana	16	61,5	5	27,8	18	39,1	14	14,7	34	47,2	19	16,8
e. Agar tidak terjadi kesalahpahaman	0	0,0	0	0,0	3	73,9	3	3,1	3	4,2	3	2,6
f. Solusinya dari bapak	0	0,0	0	0,0	_	2,2	4	4,2	1	1,4	4	3,5
Alasan tidak mengomunikasikan dengan bapak												
a. Tidak ada yang direncanakan	4	11,1	0	0,0	27	34,2	3	50,0	31	73,8	3	27,3
b. Bapak sakit	0	0,0	П	4,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1
c. Bapak sudah meninggal	~	13,9	2	8,3	3	3,8	П	16,7	∞	19,0	3	27,3
d. Malas membicarakannya	_	2,8	П	4,1	7	2,5	П	16,7	3	7,1	2	18,2
e. Lain-lain	0	0,0	1	4,1	0	0,0	1	16,7	0	0,0	2	18,2
Apakah pembuatan rencana, ibu mengomunikasikan dengan												
anakè	20	55,5	14	58,3	21	26,6	30	29,7	41	35,6	44	35,2
a. Ya	14	38,9	6	37,5	58	73,4	69	68,3	72	62,6	78	62,4
b. Tidak	7	5,5	П	4,1	0	0,0	2	2,0	2	1,7	3	2,4
c. Kadang-kadang												

Lampiran 7 Sebaran responden berdasarkan perencanaan untuk mencapai tujuan (lanjutan)

		Kota	ta			Ď	Desa			Total (Kota+Desa)	Kota+	Desa)
Pernyataan	Mi (5)	Miskin (36)	H A	Tidak Miskin (24)	Mi	Miskin (79)	ii M ii	Tidak Miskin (101)	Σ \circ	Miskin (115)	H Z C	Tidak Miskin (125)
	п	%	n	%	n	%	n	%	u	%	u	%
Alasan mengomunikasikan dengan anak												
a. karena anak sudah dewasa	1	5,0	0	0,0	2	9,5	12	40,0	3	7,3	12	27,3
b. Anak lebih sering di rumah	0	0,0	0	0,0	7	9,5	0	0,0	2	4,9	0	0,0
c. Anak yang menafkahi keluarga	9	30,0	4	28,6	_	4,8	0	0,0	_	17,1	4	9,1
d. Untuk membangun komunikasi yang baik	0	0,0	_	7,1	0	0,0	10	33,3	0	0,0	11	25,0
e. Untuk bertukar pikiran	13	0,59	6	64,3	16	76,2	∞	26,7	29	70,7	17	38,6
Alasan tidak mengomunikasikan dengan anak												
a. Anak masih kecil	13	92,8	∞	6,88	32	55,2	53	8,9/	45	63,9	61	78,2
b. Tidak ada rencana yang perlu dibahas dengan anak	0	0,0	_	11,1	17	29,3	12	17,4	17	23,6	13	16,7
c. Anak tidak serumah lagi	0	0,0	0	0,0	3	5,2	7	2,9	3	4,2	2	2,6
d. Belum punya anak	_	7,1	0	0,0	9	10,1	2	2,9	7	2,6	2	2,6

Lampiran 7 Sebaran responden berdasarkan perencanaan untuk mencapai tujuan (lanjutan)

		Kc	Kota			Ď	Desa			Total (Kota+Desa)	Kota+	Desa)
Pernyataan	Mi (3	Miskin (36)	E Z	Tidak Miskin (24)	M	Miskin (79)	HΣ	Tidak Miskin (101)	ΜO	Miskin (115)	Mi Ti	Tidak Miskin (125)
	n	%	п	%	п	%	п	%	n	%	n	%
Apakah pembuatan rencana, ibu mengomunikasikan dengan saudara?												
a. Ya	10	27,8	∞	33,3	9	2,6	9	6,5	16	13,9	14	11,2
b. Tidak	23	63,9	11	45,8	73	92,4	93	92,0	96	83,5	104	83,2
c. Kadang-kadang	3	8,3	5	20,8	0	0,0	2	2,0	3	2,6	_	5,6
Alasan mengomunikasikan dengan saudara												
a. Untuk bertukar pikiran	6	0,06	_	29,5	4	9,99	0	0,0	13	81,2	_	50,0
b. Dekat dengan saudara	_	10,0	1	4,2	_	16,7	0	0,0	2	12,5	П	7,1
c. Supaya tidak ada kesalahpahaman	0	0,0	0	0,0	_	16,7	9	100,0	1	6,5	9	42,8
Alasan tidak mengomunikasikan dengan saudara												
a. Tidak mau merepotkan	22	9,56	10	0,06	65	89,0	90	8,96	87	9,06	100	96,1
b. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan saudara	П	4,3	П	0,6	5	8,9	3	3,2	9	6,5	4	3,8
c. Malu	0	0,0	0	0,0	3	4,1	0	0,0	3	3,1	0	0,0
Apakah pembuatan rencana, ibu mengomunikasikan dengan pihak lain?												
a. Ya	4	11,1	0	0,0	2	2,5	3	3,0	9	5,2	3	2,4
b. Tidak	32	88,9	23	8,56	77	5,76	86	97,0	109	94,8	121	8,96
c. Kadang-kadang	0	0,0	_	4,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,0

Lampiran 7 Sebaran responden berdasarkan perencanaan untuk mencapai tujuan (lanjutan)

		Ko	Kota			Ď	Desa			Total (Kota+Desa)	Kota+]	Desa)
Pernyataan	Mi 💭	Miskin (36)	ΗŽ	Tidak Miskin (24)	Z C	Miskin (79)	F M C	Tidak Miskin (101)	Σ	Miskin (115)	II WIE	Tidak Miskin (125)
	n	%	n	%	n	%	n	%	u	%	n	%
Alasan mengomunikasikan dengan pihak lain												
a. Untuk bertukar pikiran	2	50,0	0	0,0	_	50,0	7	9,99	3	50,0	2	2,99
b.Untuk meminta bantuan	2	50,0	0	0,0	_	50,0	_	33,3	3	50,0	П	33,3
Alasan tidak mengomunikasikan dengan pihak lain												
a. Tidak perlu, keluarga saja yang diajak diskusi	19	59,4	17	73,9	77	77 100,0	95	6,96	96	88,1	112	92,6
b. Tidak mau merepotkan	13	40,6	9	26,1	0	0,0	3	3,1	13	11,9	6	7,4
Apakah rencana tersebut dibuat terperinci												
a. Ya	3	8,3	0	0,0	11	13,9	13	12,9	14	12,2	13	10,4
b. Tidak	33	7,16	20	1,1	29	84,8	84	83,2	100	6,98	104	83,2
c. Kadang-kadang	0	0,0	4	16,7	П	1,3	4	40	1	6,0	∞	6,4
Alasan rencana tersebut dibuat terperinci												
a. Untuk lebih memotivasi mencapai tujuan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	23,1	0	0,0	3	23,1
b. Untuk menyesuaikan dengan dana	_	33,3	0	0,0	П	10,0	~	38,5	2	14,3	5	38,5
c. Agar lebih jelas dan terarah	7	6,1	0	0,0	10	6,06	5	38,5	12	85,7	5	38,5

Lampiran 7 Sebaran responden berdasarkan perencanaan untuk mencapai tujuan (lanjutan)

			ı									
		K	Kota			Д	Desa			Total	Kota	Total (Kota+Desa)
Pernyataan	Mi (3	Miskin (36)	ΙŽS	Tidak Miskin (24)	Σ	Miskin (79)	, , ,	Tidak Miskin (101)		Miskin (115)	LZ	Tidak Miskin (125)
	п	%	n	%	п	%	п	%	n	%	п	%
Alasan rencana tersebut tidak dibuat terperinci												
a. Hanya garis besarnya saja	6	27,3	_	35,0 8	8	11,9	6	10,7	17	17,0	16	15,4
b. Repot	6	27,3	7	10,0	_	10,4	17	20,2	16	16,0	19	18,3
c. Repot dan malas	7	6,1	0	0,0	10	14,9	25	29,8	12	12,0	25	24,0
d. Tidak ada rencana yang dibuat terperinci	0	0,0	0	0,0	25	37,3	11	13,1	25	25,0	11	10,6
e. Belum dibuat dan masih dipikirkan	7	6,1	4	20,0	5	7,5	_	8,3	_	7,0	11	10,6
f. Apa adanya	9	18,2	2	10,0	3	4,5	6	10,7	6	0,6	11	10,6
g. Kesulitan merincinya	0	0,0	_	5,0	9	8,9	0	0,0	9	0,9	П	6,0
h.Tidak perlu	7	6,1	3	15,0	3	4,5	4	4,8	5	2,0	_	6,7
ii.Lainnya	3	9,1	1	5,0	0	0,0	2	2,4	3	3,0	3	2,9

Lampiran 8 Sebaran responden berdasarkan pengeluaran/kapita/bulan dan tingkat kesejahteraan

	Tidak Miskin (n=125)	Std	22.173.7	15.766.8	42.162.8	15.242.9	14.292.1	3.100.4	18.572.3	12.82634	20.216.6	13.381.5	49.251.8	9.150.5	31.686.3	148.812.8	32.517.2	51.823.8	8.403.6	9.221.9	67.217.7
Total (Kota+Desa)	Tidak Mis	Rata-rata	41.869.30	4.873.9	45.070.3	16.423.9	6.963.7	1.959.2	9.325.9	9.586.6	21.075.3	7.368.6	45.756.2	7.525.1	28.082.6	246.923.2	11.012.2	38.177.40	10.067.9	12.112.3	57.613.9
Total (Ko	(n=115)	Std	21.134.3	9.256.4	51.375.2	19.437.4	30.370.6	4.140.3	13.786.9	9.427.7	24.792.8	16.167.7	41.002.1	6.235.6	20.955.6	106.261.2	9.203.5	60.450.3	12.593.1	11.902.5	193.134.9
	Miskin (n=115)	Rata-rata	32.981.1	5.954.8	50.001.8	13.150.00	12.730.9	2.160.8	7.455.0	6.654.5	16.604.4	7.794.9	35.450.5	4.250.2	13.741.2	205.563.7	8.157.1	44.975.2	10.327.5	9.955.8	58.093.9
	in (n=101)	Std	17,624.0	20,789.8	41,309.5	17,902.3	17,925.8	3,632.9	20,967.9	15,305.4	24,834.2	17,312.4	66,038.5	11,256.4	35,955.0	166,991.2	34,567.6	56,816.3	8,599.1	9,719.5	80.593.7
Sa	Tidak Miksin (n=101)	Rata-rata	41.683.7	6.566.9	51.604.8	20.216.2	10.420.7	2.078.3	12.018.8	10.234.8	25.428.5	8.820.2	67.621.2	9.105.4	30.428.7	287.155.7	13.875.6	47.008.1	10.611.4	13.611.5	71.346.4
Desa	(n=79)	Std	27.018.8	2.752.3	42.021.7	8.937.9	4.640.4	2.257.5	14.370.7	8.716.3	9.557.2	4.522.9	32.207.3	6.125.4	25.109.2	10.157.2	10.255.6	42.363.8	8.148.2	8.210.8	38.535.7
	Miskin (n=79)	Rata-rata	42.106.6	2.667.3	36.715.9	11.575.4	2.543.9	1.807.0	5.883.2	8.757.9	15.509.8	5.512.8	37.323.6	5.456.8	25.083.1	195.486.7	9.255.4	26.887.5	9.373.1	10.195.6	40.057.4
	in (n=24)	Std	20.509.6	2.890.2	65.469.1	14.033.7	18.735.9	1.868.0	17.144.1	12.053.8	8.240.3	5.428.9	39.009.2	7.525.6	19.217.9	91.923.5	8.345.5	68.942.4	11.889.2	12.416.5	18.832.2
ta	Tidak Miksin (n=24)	Rata-rata	35.862.1	2.359.5	72.292.2	9.230.6	6.286.7	1.988.8	10.302.9	7.759.5	11.838.1	5.830.9	41.374.8	6.321.8	11.902.1	217.028.3	10.218.5	60.512.9	11.046.2	13.894.8	37.380.8
Kota	(n=36)	Std	21.610.8	11.143.2	32.631.3	22.133.8	35.300.8	5.154.5	10.862.8	7.277.0	31.074.0	20.417.2	28.682.3	1.236.7	22.219.1	115.460.4	4.283.7	52.541.9	13.185.3	10.943.9	249.310.3
	Miskin	Rata-rata	31.060.4	8.351.7	35.141.5	15.762.9	17.027.2	2.275.5	5.556.4	5.917.9	9.781.9	9.104.2	32.973.6	2.150.5	14.967.3	197.920.7	5.124.5	34.616.6	9.848.4	7.329.9	71.902.5
	Jenis	Lugendan	1. Padi-padian	2. Umbi-umbian	3. Pangan hewani	4. Sayur-sayuran	5. Buah-buahan	6. Kacang- kacangan	7. Susu	8. Minyak	9. Bumbu- bumbuan	10. Gula	11. Makanan/ minuman jadi	12. Konsumsi Lainnya	13. Tembakau/ sirih	Pangan	1. Perumahan	2. Pendidikan	3. Kesehatan	4. Pakaian/alas kaki	5. Bahan bakar

Lampiran 8 Sebaran responden berdasarkan pengeluaran/kapita/bulan dan tingkat kesejahteraan (lanjutan)

		Ko	Kota			Desa	ssa			Total (Ko	Total (Kota+Desa)	
Jenis Pengeluaran	Miskin	(n=36)	Tidak Mik	Tidak Miksin (n=24)	Miskin (n=79)	(n=79)	Tidak Miksin (n=101)	in (n=101)	Miskin (n=115)	(n=115)	Tidak Mis	Tidak Miskin (n=125)
Lugeman	Rata-rata	Std	Rata-rata	Std	Rata-rata	Std	Rata-rata	Std	Rata-rata	Std	Rata-rata	Std
6. Transport	12.091.3	27.309.8	21.406.3	30.347.5	18.929.8	33.858.2	17.935.5	28.545.5	15.817.3	28.681.7	18.371.9	90.903.1
7. Rekreasi	6.115.5	6.277.7	10.189.5	10.415.9	2.357.9	6.624.4	6.619.1	15.095.2	7.745.1	8.349.9	4748.9	12.284.8
8. Sosial	3.960.0	11.535.5	8.889.8	22.279.5	7.228.4	22.489.8	12.250.1	32.066.5	6.331.9	16.763.7	10.046.2	28.303.6
9. Bayar kredit	3.820.8	9.774.3	13.285.4	41.501.9	14.777.2	29.995.3	24.617.2	57.999.3	9.909.2	27.385.9	20.298.5	78.909.4
10.Pajak	10.607.2	26.924.1	8.339.1	26.126.7	9.049.4	39.745.5	4.280.9	21.468.2	6.669.6	26.408.1	6.373.7	30.845.9
11.Koran	238.1	1.428.6	2.173.6	4.870.7	1.432.5	12.656.5	682.0	2.558.1	1.012.3	3.372.4	1.011.4	8.578.9
12.Telepon	4.051.6	8.265.3	11.631.9	22.335.6	1.707	8.090.8	12,005.6	25.552.7	7.083.7	15.780.7	7.485.8	20.483.2
13.Pembantu	0	0.0	0	0	1592.8	9.046.6	5,140.3	17.347.4	0	0.0	3.583.3	14.383.9
14.Tabungan	1.416.7	4.747.2	15.668.6	53.207.9	2.511.4	8.704.3	18,201.9	39.302.4	7.117.5	34.155.3	11.315.5	30.934.3
Nonpangan	169.770.4	272.876.2	220.674.8	220.674.8 157.214.2	155.708.2	140.596.2	252,060.8	539.216.5	539.216.5 190.132.2	233.323.0	209.772.7	186.717.8

Lampiran 9 Persentase pengeluaran pangan/nonpangan terhadap pengeluaran total dan tingkat kesejahteraan

7		Jenis Pengeluaran	٥	Persentase pengeluaran pangan	Persentase pengeluaran nonpangan	Total Pengeluaran
			Rata-rata	.n 58.9	.n 41.1	n 367.691,2
7	K	Miskin (n=36)	Std	18.3	18.8	317.760,2
2	Kota	Tidak Mik	Rata-rata	52.9	47.1	437.703,1
C		Tidak Miksin (n=24)	Std	13.3	13.3	227.191,6
2		Miskin	Rata-rata	60.3	39.7	351.194,8
-	Desa	Miskin (n=79)	Std	15.3	15.3	207.446,2
1 1 0	sa	Tidak Miks	Rata-rata	55.8	44.2	317.760,2 437.703,1 227.191,6 351.194,8 207.446,2 539.216,5 333.913,1 356.358,9 242.038,9 519.725,9 317.967,3
		Tidak Miksin (n=101)	Std	13.9	13.9	333.913,1
C			Rata-rata	59.9	40.1	356.358,9
· ·	Total (Kota+Desa)	(n=115)	Std	16.4	16.4	242.038,9
	ta+Desa)	Miskin (n=115) Tidak Miskin (n=125)	Rata-rata	55.2	44.8	519.725,9
		in (n=125)	Std	13.8	13.8	317.967,3